



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

T.A. 2023

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN



Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu



www.waykanankab.go.id



(0723) – 461001



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Tabik Pun

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun secara formal untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditahun 2023 yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Disamping itu, dengan adanya laporan ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak mengenai capaian kinerja yang telah diraih, permasalahan dan kendala yang dihadapi, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023.

Akhir kata, Semoga apa yang tercantum dalam dokumen laporan ini mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan informasi bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di masa datang.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Blambangan Umpu, Maret 2024

**BUPATI WAY KANAN,**

ADIPATI SURYA



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	19
C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	312
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	324
A. Capaian Kinerja Makro	324
B. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	326
C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	462
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	606
A. Dasar Hukum	607
B. Gambaran Umum Tugas Pembantuan Yang Diterima	607
C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	607
D. Permasalahan dan Kendala	619
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	620
A. Urusan Pendidikan	623
B. Urusan Kesehatan	634
C. Urusan Pekerjaan Umum	663
D. Urusan Perumahan Rakyat	669
E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	674
F. Urusan Sosial	710
BAB IX PENUTUP	724



DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel I.1	Jumlah Kampung dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	4
Tabel I.2	Letak Geografis Daerah Kabupaten Way Kanan	4
Tabel I.3	Nama Gunung dan Tinggi dari Permukaan Laut di Kabupaten Way Kanan	6
Tabel I.4	Nama Sungai dan Panjang Sungai serta Luas Aliran Sungai di Kabupaten Way Kanan	8
Tabel I.5	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Way Kanan	9
Tabel I.6	Luas Area Hutan di Kabupaten Way Kanan	10
Tabel I.7	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022	11
Tabel I.8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022	10
Tabel I.9	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022	13
Tabel I.10	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022	13
Tabel I.11	Jumlah ASN Menurut Instansi, Unit Kerja dan Golongan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	14
Tabel I.12	Jumlah ASN Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	16
Tabel I.13	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	17
Tabel I.14	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 – 2023	18
Tabel I.15	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 – 2023	19
Tabel I.16	Program Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan 2016 – 2021	95
Tabel I.17	Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	204





Tabel I.18	Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dalam RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	205
Tabel I.19	Perangkat Daerah Pengampu SPM di Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	322
Tabel II.1	Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 – 2023	324
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	464
Tabel II.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	467
Tabel II.4	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dalam Rangka Pencapaian Misi	469
Tabel II.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	471
Tabel II.6	Capaian Reformasi General Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	479
Tabel II.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	483
Tabel II.8	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	491
Tabel II.9	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	494
Tabel II.10	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Inovasi Daerah	501
Tabel II.11	Susunan Organisasi PPID Kabupaten Way Kanan	505
Tabel II.12	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	510
Tabel II.13	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	522
Tabel II.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	527
Tabel II.15	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	529
Tabel II.16	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	533
Tabel II.17	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan	538
Tabel II.18	Kategori Penghargaan Kota Layak Anak berdasarkan Skor	543



Tabel II.19	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	543
Tabel II.20	Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM	549
Tabel II.21	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	550
Tabel II.22	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pembangunan Gender	553
Tabel II.23	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Mengurangi Dampak Bencana	556
Tabel II.24	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Konflik Sosial	557
Tabel II.25	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	562
Tabel II.26	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Usaha Konstruksi	576
Tabel II.27	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Usaha Perdagangan	578
Tabel III.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang dilaksanakan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	610
Tabel III.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Way Kanan Tahun 2023	615
Tabel IV.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Perangkat Daerah Pelaksana SPM Tahun 2023	621
Tabel IV.2	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	624
Tabel IV.3	Pagu Anggaran Terkait SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023	630
Tabel IV.4	Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023	631
Tabel IV.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	631
Tabel IV.6	Banyaknya Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan	632
Tabel IV.7	Banyaknya Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	632



Tabel IV.8	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	637
Tabel IV.9	Sub Kegiatan dan Realisasi Anggaran Terkait Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	653
Tabel IV.10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	654
Tabel IV.11	Jumlah Pegawai pada UPT Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	654
Tabel IV.12	Banyaknya Pegawai Puskesmas Berdasarkan Jenis SDM Kesehatan Kab. Way Kanan Thn 2023	655
Tabel IV.13	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan Tahun 2023	664
Tabel IV.14	Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023	667
Tabel IV.15	Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan ...	668
Tabel IV.16	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	668
Tabel IV.17	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kab. Way Kanan Tahun 2023	670
Tabel IV.18	Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023	671
Tabel IV.19	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat, Golongan dan Pendidikan	671
Tabel IV.20	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	672
Tabel IV.21	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	679
Tabel IV.22	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Kampung Berdasarkan Peta Rawan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan	687
Tabel IV.23	Jumlah Satgas Penanggulangan Bencana, Aparatur dan Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana Dalam Pelatihan Mitigasi Bencana Tahun 2023	690
Tabel IV.24	Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	691
Tabel IV.25	Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	702





Tabel IV.26	Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2023	703
Tabel IV.27	Data Penugasan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Tahun 2023	705
Tabel IV.28	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2023	712
Tabel IV.29	Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM Bidang Sosial Kab. Way Kanan Tahun 2023	720
Tabel IV.30	Jumlah Personil Sumber Daya Manusia Terkait Penerapan SPM Bidang Sosial	722





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pembentukan Daerah

Diawali pada tahun 1957, dengan dipimpin oleh Wedana Way Kanan, Ratu Pengadilan, diadakanlah pertemuan yang pertama kali guna membahas rencana Pemerintah Pusat yang memerlukan 100.000 hektar tanah untuk keperluan transmigrasi. Pada saat itu tiga kewedanaan yang ada, yaitu Kewedanaan Kotabumi, Kewedanaan Krui dan Kewedanaan Menggala menolak rencana Pemerintah Pusat. Namun Kewedanaan Way Kanan menerima tawaran itu dengan pertimbangan agar kelak Way Kanan dapat cepat ramai penduduknya. Pada saat itulah muncul gagasan awal yang dikemukakan oleh Hi. Ridwan Basyah selaku notulis dalam pertemuan tersebut, untuk menjadikan Way Kanan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri terpisah dari Kabupaten Lampung Utara.

Pada tahun 1971, keinginan untuk menjadikan Way Kanan menjadi kabupaten yang berdiri sendiri muncul kembali. Pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan para ilmuwan diselenggarakan di kediaman Hi. Ridwan Basyah di Tanjung Agung - Bandar Lampung. Selanjutnya pada tahun 1975, Bapak Nasrunsyah Gelar Sutan Mangkubumi, di Bumi Agung - Kecamatan Bahuga melaksanakan acara adat Bugawi dengan mengundang tokoh-tokoh adat (penyimbang) sewilayah Way Kanan. Pada kesempatan itu diadakan musyawarah khusus yang dipimpin oleh Hi. Ridwan Basyah membahas kembali gagasan untuk menjadikan Way Kanan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri, sekaligus mengajukan



usul kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung. Kemudian pada tahun 1986, Pemerintah Pusat membentuk Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Blambangan Umpu dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 821.26-502 Tanggal 8 Juni 1985, dengan Wilayah Pembantu Bupati Blambangan Umpu terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Blambangan Umpu dengan ibukota Blambangan Umpu;
2. Kecamatan Bahuga dengan ibukota Mesir Ilir;
3. Kecamatan Pakuon Ratu ibukota Pakuon Ratu;
4. Kecamatan Baradatu dengan ibukota Tiuh Balak;
5. Kecamatan Banjit dengan ibukota Banjit;
6. Kecamatan Kasui dengan ibukota Kasui.

Berdasarkan Surat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat I Lampung, Nomor : 660/1990/II/1991 Tanggal 18 Februari 1991 yang ditujukan kepada Pembantu Bupati Wilayah Blambangan Umpu, maka Hi. Ridwan Basyah yang pada waktu itu menjabat Pembantu Bupati menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) dengan mengambil tempat di SESAT PURANTI GAWI Blambangan Umpu, pada tanggal 4 Mei 1991 dengan maksud untuk mempersiapkan lahan perkantoran, nama kabupaten dan letak ibukota kabupaten sebagai persiapan Way Kanan menjadi Kabupaten. Adapun Way Kanan baru resmi menjadi kabupaten tersendiri 8 tahun kemudian.

Kabupaten Way Kanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan



Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Kabupaten Way Kanan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan ibukota Blambangan Umpu, terletak di sebelah selatan Provinsi Sumatera Selatan pada $104,17^{\circ}$ - $105,04^{\circ}$ bujur timur dan $4,12^{\circ}$ - $4,58^{\circ}$ lintang selatan. Kabupaten Way Kanan memiliki luas 392.163 hektare dan menjadi kabupaten terluas keempat dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Luas dari kabupaten yang nama lainnya Bumi Ramik Ragom ini melebihi luas kabupaten induknya yang mana memiliki luas 272.587 hektare. Kabupaten Way Kanan pada awal berdiri baru 6 wilayah kecamatan definitif, dengan jumlah 192 kampung. Pada tahun 2003 wilayah kecamatan menjadi 12 kecamatan dengan jumlah kampung 198. Kemudian hingga tahun 2005 terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 2 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005, sehingga jumlah kecamatan menjadi 14 kecamatan dengan jumlah kampung menjadi 210. Seiring perkembangan waktu hingga tahun 2020 terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk, sehingga kini Kabupaten Way Kanan memiliki 15 Kecamatan dengan jumlah kampung 222 dengan 1 Kampung Persiapan serta 6 kelurahan. Adapun rincian jumlah kampung dan kelurahan per kecamatan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana table dibawah.



Tabel I.1
Jumlah Kampung dan Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Kecamatan	Kampung		Kelurahan	
		2022	2023	2022	2023
1	Banjit	19	19	1	1
2	Baradatu	19	19	3	3
3	Gunung Labuhan	21	21	-	-
4	Kasui	18	18	1	1
5	Rebang Tangkas	10	10	-	-
6	Blambangan Umpu	12	12	1	1
7	Way Tuba	13	13	-	-
8	Negeri Agung	20*	20*	-	-
9	Bahuga	11	11	-	-
10	Buay Bahuga	9	9	-	-
11	Bumi Agung	10	10	-	-
12	Pakuan Ratu	19	19	-	-
13	Negara Batin	15	15	-	-
14	Negeri Besar	13	13	-	-
15	Umpu Semenguk	13	13		
Way Kanan		222	222	6	6

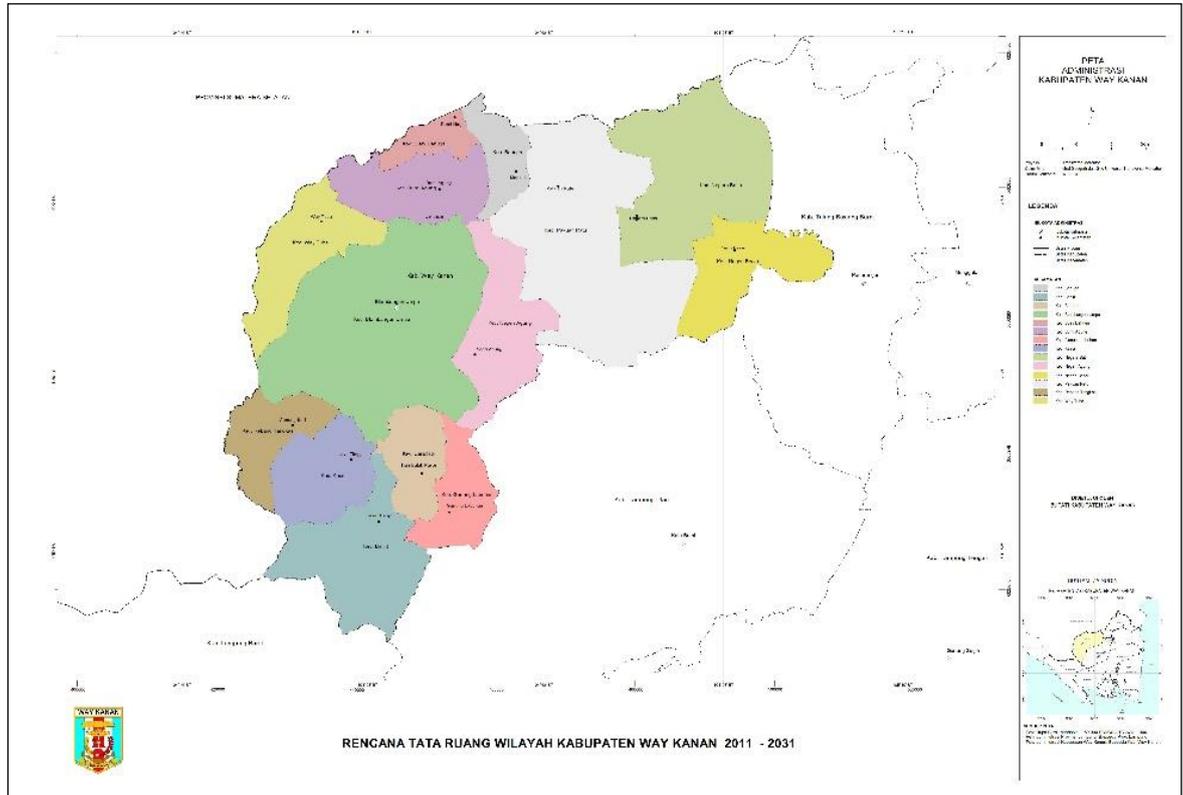
*) 1 Kampung Persiapan

Tabel I.2
Letak Geografis Daerah Kabupaten Way Kanan

Dari Sudut Geografis	
ARAH	TERLETAK ANTARA
Utara – Selatan	4,12 ⁰ – 4,58 ⁰ LS
Timur – Barat	104,17 ⁰ – 105,4 ⁰ BT
Dari Sudut Administrasi	
SEBELAH	BERBATASAN DENGAN
Utara	Provinsi Sumatera Selatan
Selatan	Kabupaten Lampung Utara
Timur	Kabupaten Tulang Bawang Barat
Barat	Kabupaten Lampung Barat

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2023

Gambar I.1
Peta Administratif



2. Geografis Daerah

Bentang alam Kabupaten Way Kanan dapat dikelompokkan dalam bentuk wilayah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0 – 15% mencakup luasan kurang lebih 73,9%, bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan lereng 15 – 25% memiliki sebaran kurang lebih 20,2% dan berbukit sampai bergunung dengan kemiringan lereng 25- >40% memiliki sebaran kurang lebih 5,9%. Lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi 450 – 1700 dpl, meliputi Kasui dengan puncaknya di Gunung Pungur (1700M), daerah Banjit dengan puncaknya di Gunung Remas (1600M) dan Gunung Bukit Duduk (1500M).

Tabel I.3
Nama Gunung dan Tinggi dari Permukaan Laut
Di Kabupaten Way Kanan

No.	Nama Gunung	Tinggi (m)	Kecamatan
1.	Gunung Punggur	1.700	Kasui
2.	Gunung Remas	1.600	Banjit
3.	Gunung Bukit Duduk	1.500	Banjit

Secara topografi Kabupaten Way Kanan terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu :

- Sebelah Barat lebih kurang 7% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan merupakan rangkaian Pegunungan Bukit Barisan, yang terdiri dari lereng-lereng curam dan terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450 – 1500 M dari permukaan laut dan pada umumnya ditutupi oleh Vegetasi primer dan sekunder.
- Sebelah Timur lebih kurang 93% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan terbentang dataran yang sebagian besar tertutupi vulkanis awan gelap dan terbentang sawah serta perkebunan dataran rendah.

Bentang alam Kabupaten Way Kanan didominasi oleh grup dataran tufa masam. Grup ini adalah grup dataran, alluvial dan volkan. Kelompok alluvial dijumpai pada lembah-lembah sungai utama yang mengalir di wilayah ini. Grup volkan kebanyakan masih tergolong cukup muda yang berselang – seling dengan bahan proklastik terdapat pada bagian Barat Daya.

Secara umum wilayah Kabupaten Way kanan terbagi menjadi dua tipe iklim, yaitu bagian barat memiliki curah

hujan cukup tinggi, berkisar antara 3000 – 3500 mm per tahun dan bagian Timur memiliki curah hujan yang cukup rendah, berkisar antara 2000 – 3000 mm/tahun. Rata-rata suhu udara berselang dengan temperature antara 26,5 – 30°C. Sedangkan rata-rata kelembaban relatifnya adalah antara 58,3 – 94,2% untuk tekanan udara minimal dan maksimal adalah 1007,8 Nbs dan 1016,5 Nbs.

Musim hujan berlangsung dari Bulan November sampai Bulan Februari, sedangkan musim kemarau berlangsung dari Bulan Mei sampai Agustus. Bulan agak kering adalah Bulan September sampai Bulan Oktober. Jumlah hari hujan di musim penghujan rata 4 – 8 hari. Sementara itu jika diklasifikasikan ke dalam iklim menurut R. Oldeman, maka wilayah Kabupaten Way Kanan kondisi iklimnya terbagi menjadi 3 iklim, yaitu :

- Iklim B, yaitu bulan basah 7-9 bulan, bulan kering < 2 bulan. Wilayah yang memiliki iklim B ini terdapat di sebagian Kecamatan Banjit, Kasui, Blambangan Umpu dan Bahuga.
- Iklim C 1, yaitu bulan basah 5-6 bulan, bulan kering < 2 bulan. Wilayah yang memiliki iklim C1 ini terdapat di Kecamatan Bahuga, Blambangan Umpu, Pakuon Ratu, Banjit dan Baradatu.
- Iklim C2, yaitu bulan basah 5-6 bulan, bulan kering 2-3 bulan. Wilayah yang memiliki iklim C2 ini terdapat di Kecamatan Pakuon Ratu dan sekitarnya.

Pada umumnya kedalaman efektif tanah bervariasi dari dangkal sampai dalam dan biasanya dipengaruhi oleh jenis dan sifat tanah yang bersangkutan. Kedalaman

efektif tanah di Kabupaten Way Kanan antara lain :

- Kedalaman efektif tanah > 90 cm, yang umumnya terdapat di Kabupaten Way Kanan.
- Kedalaman efektif 90-60 cm, yang tersebar disebagian besar Kecamatan Blambangan Umpu, Negeri Agung dan Way Tuba.

Sementara itu ditinjau dari tekstur tanahnya, maka tekstur tanah di Kabupaten Way Kanan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu tekstur halus, sedang (lempung) dan kasar. Tekstur tanah di Kabupaten Way Kanan sebagian besar berupa tekstur sedang sampai halus, merupakan tanah yang dapat dikembangkan untuk jenis budidaya apapun. Tekstur tanah sedang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, kecuali Kecamatan Kasui, sedangkan tekstur halus tersebar di beberapa kecamatan yaitu Blambangan Umpu, Kasui, Banjit dan Baradatu. Lahan yang mempunyai tekstur tanah kasar hanya sedikit yaitu tersebar di Kecamatan Bahuga, Blambangan Umpu dan Pakuan Ratu. Di Kabupaten Way Kanan terdapat river basin sungai-sungai besar dan kecil. Sebagian besar sungai mengalir dari arah Barat yang berbukit-bukit menuju kearah Timur yang landai. Hal ini sangat potensial untuk pengembangan irigasi.

Tabel I.4
Nama Sungai dan Panjang Sungai serta Luas Aliran Sungai di Kabupaten Way Kanan

No.	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Aliran Sungai (KM ²)
1.	Way Kanan	51	1.198
2.	Way Pisang	50	386
3.	Way Umpu	100	1.179

4.	Way Besay	113	870
5.	Way Giham	80	506
6.	Way Tahmi	60	550

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2023

Dengan luas wilayah 3.921,63 Km², Kabupaten Way Kanan menurut pola tata guna lahannya dibagi menjadi berbagai kegiatan antara lain : Sawah, Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Tegal, Sungai, Ladang / Huma, Hutan Rakyat, Kolam / Tambak, Rawa, Hutan Negara, Padang Rumput, Perkebunan dan Tanah tidak diusahakan. Adapun luas penggunaan lahan di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel I.5
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Way Kanan

No	Luas Penggunaan Lahan	TAHUN			
		2014		2015	
		Luas (Ha)	Persentase	Luas (Ha)	Persentase
1	Sawah	19.384	4,94	19.974	5,09
2	Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai	72.470	18,48	64.056	16,33
3	Tegal/Kebun	46.658	11,90	52.509	13,39
4	Ladang/Huma	46.574	11,88	49.388	12,59
5	Hutan Rakyat	7.318	1,87	7.080	1,81
6	Kolam, Tambak, Rawa, Hutan Negara	66.198	16,88	63.512	16,20
7	Tanah tidak diusahakan	27.424	6,99	23.476	5,99
8	Padang Rumput	30	0,01	30	0,01
9	Perkebunan	106.108	27,06	112.139	28,59
TOTAL		392.164	100	392.164	100

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka, 2020

Berdasarkan pola penggunaan lahan, perkebunan merupakan jenis penggunaan lahan paling luas pemanfaatannya yaitu seluas 112.139 Ha, kemudian luas pemanfaatan Jalan, Pemukiman, Perkantoran dan Sungai seluas 64.056 Ha. sedangkan Padang rumput merupakan penggunaan lahan paling sedikit yaitu seluas 30 Ha. Luas kawasan hutan di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.6
Luas Areal Hutan Menurut Jenis Hutan di Kabupaten Way Kanan

No	KECAMATAN	Jenis Hutan	
		Hutan Lindung (Hektar)	Hutan Produksi (Hektar)
1	Register 24 Bukit Punggur Berbatasan dengan : Kec. Banjit, Kec. Kasui, Kec. Rebang Tangkas, Lampung Barat dan Oku Selatan	21.020,00	-
2	Register 41 Bukit Saka Berbatasan dengan : Kec. Way Tuba, Rebang Tangkas, Blambangan Umpu dan Oku Timur	1.218,70	-
3	Register 42 Rebang Berbatasan dengan : Kec. Blambangan Umpu, Negeri Agung dan Bumi Agung	-	14.050,00
4	Register 44 Sungai Muara Dua Berbatasan dengan : Kec. Negara Batin, Pakuan Ratu dan Tulang Bawang Barat	-	33.730,00
5	Register 46 Way Hanakau Berbatasan dengan : Kec. Pakuan Ratu, Negara Batin, Negeri Besar dan Lampung Utara	-	22.100,00
6	Non Register Giham Tahmi Berbatasan dengan : Kec. Blambangan Umpu dan Rebang Tangkas	-	13.200,10

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2023

3. Demografis Daerah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan tahun 2022 tercatat bahwa penduduk Kabupaten Way Kanan berjumlah 483.884 jiwa, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 yang berjumlah 480.042 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021-2022 sebanyak 0,08 persen dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Way Kanan 123 KM².

Tabel I.7
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2021-2022	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	Banjit	47 433	0,24	143
2	Baradatu	44 872	0,33	295
3	Gunung Labuhan	31 332	-0,02	272
4	Kasui	33 338	0,68	222
5	Rebang Tangkas	23 892	-0,92	115
6	Blambangan Umpu	37 347	0,90	105
7	Way Tuba	26 482	2,03	128
8	Negeri Agung	38 070	-0,61	68
9	Umpu Semenguk	33 440	0,77	100
10	Bahuga	12 169	2,41	88
11	Buay Bahuga	21 857	0,92	214
12	Bumi Agung	29 152	1,35	221
13	Pakuan Ratu	45 437	1,84	78
14	Negara Batin	37 820	2,62	109
15	Negeri Besar	21 243	0,20	59
Way Kanan		483 884	0,80	123

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2023

Tabel I.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	23 462	22 161	45 623
5-9	22 419	21 398	43 817
10-14	20 931	20 175	41 106
15-19	19 641	18 739	38 380
20-24	19 154	18 596	37 750
25-29	20 188	18 991	39 179
30-34	20 830	19 634	40 464
35-39	19 228	17 825	37 053
40-44	17 237	16 500	33 737
45-49	15 132	14 468	29 600
50-54	12 796	12 646	25 442
55-59	11 216	11 044	22 260
60-64	8 989	8 596	17 585
65-69	6 761	5 997	12 758
70-74	4 221	3 946	8 167
75 +	4 183	3 932	8 115
Way Kanan	246 388	234 648	481 036

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2023

Komposisi penduduk sebagaimana tabel I.8 di atas, pada kelompok umur 0-14 tahun berjumlah 130.546 orang, jumlah kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 321.450 orang dan penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 29.040 orang, dari komposisi tersebut rasio ketergantungan (*dependency ratio*) berkisar 49,65%, Artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 49 Penduduk non produktif, dengan dominasi tanggungan adalah usia muda.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, angkatan kerja dan jenis kelamin serta lapangan pekerjaan utama pada tahun 2022 di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada pada tabel 1.9 dan I.10 berikut ini :

Tabel I.9
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	
≤ Sekolah Dasar (SD)	112 584	4 083	116 667	96,50
SLTP/Sederajat	54 394	888	55 282	98,39
SLTA/Sederajat	62 500	3 045	65 545	95,35
Perguruan Tinggi	11 063	151	11 214	98,65
Way Kanan	240 541	8 167	248 708	96,72

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2023

Tabel I.10
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
- Pertanian	104 415	39 685	144 100
- Manufaktur	17 044	3 673	20 717
- Jasa	36 904	38 820	75 724
Way Kanan	158 363	82 178	240 541

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2023

4. Administrasi Pemerintahan

a. Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way mengenai Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 berjumlah 46 OPD yang terdiri dari OPD berbentuk Badan sebanyak 6 OPD, OPD berbentuk Dinas sebanyak 20 OPD, 1 Sekretariat Daerah yang terdiri dari 12 Bagian, 1 Sekretariat DPRD, 1 Rumah Sakit Umum Daerah dan 15 Kecamatan. Adapun secara rinci jumlah OPD di Pemerintah Kabupaten Way Kanan berikut jumlah ASN nya dapat dilihat ditabel dibawah :

Tabel I.11
Jumlah ASN Menurut Instansi, Unit Kerja dan Golongan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No.	Instansi / Unit Kerja	Golongan PNS				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten	-	6	44	31	81
2.	Sekretariat DPRD	-	1	12	3	16
3.	Inspektorat	-	1	43	15	59
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3	18	6	27
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	2	32	8	42
6.	Badan Pendapatan Daerah	-	9	43	5	57
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	1	15	7	23
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1	8	4	13
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1	13	4	18
10.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	1	46	89	15	151
11.	Dinas Perkebunan	-	1	13	6	20
12.	Dinas Perikanan	-	1	13	3	17

13.	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	6	4	10
14.	Perindustrian dan Perdagangan	1	3	28	7	39
15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	2	31	20	54
	- Guru SLTP dan DPK	-	33	513	241	787
	- Guru SD	3	128	1475	614	2210
	- Guru TK	-	2	39	4	45
	- Pengawasa Sekolah	-	-	4	25	29
16.	Dinas Kesehatan	-	3	23	9	35
	- UPT Puskesmas	1	115	574	36	726
	- UPT Gudang Farmasi	-	-	0	1	1
17.	RSUD Z.A. Pagar Alam	-	25	80	21	126
18.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-	-	12	5	17
19.	Dinas Sosial	-	-	15	6	21
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1	13	5	19
21.	Dinas Perhubungan	-	3	15	2	20
22.	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	1	10	3	14
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	2	11	5	19
24.	Dinas Pekerjaan Umum	1	20	55	8	84
25.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	2	3	5	10
26.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	21	5	26
27.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	1	36	8	45
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-	1	11	5	17
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1	20	4	25
30.	Dinas Lingkungan Hidup	-	2	16	2	20
31.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	2	11	3	16
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	4	24	4	32
33.	Kecamatan Blambangan Umpu	-	2	12	1	15
	- Kelurahan Blambangan Umpu	1	-	5	0	6
34.	Kecamatan Pakuan Ratu	1	13	6	1	21

35.	Kecamatan Banjit	-	2	9	2	13
	- Kelurahan Pasar Banjit	-	-	6	-	6
36.	Kecamatan Negeri Agung	-	1	8	1	10
37.	Kecamatan Bahuga	-	5	15	4	24
38.	Kecamatan Kasui	-	3	13	2	18
	- Kelurahan Kasui Pasar	-	2	6	-	8
39.	Kecamatan Baradatu	-	-	24	2	26
	- Kelurahan Tiuh Balak Pasar	-	2	5	1	8
	- Kelurahan Taman Asri	-	2	7	-	9
	- Kelurahan Campur Asri	-	1	6	1	8
40.	Kecamatan Negara Batin	-	2	11	1	14
41.	Kecamatan Negeri Besar	1	2	7	3	13
42.	Kecamatan Way Tuba	-	5	12	1	18
43.	Kecamatan Rebang Tangkas	1	2	10	-	13
44.	Kecamatan Gunung Labuhan	-	4	9	2	15
45.	Kecamatan Buay Bahuga	-	4	9	-	13
46.	Kecamatan Bumi Agung	-	-	7	1	8
47.	Kecamatan Umpu Semenguk	-	1	10	1	12
48.	CPNS Baru	-	-	-	-	-
Way Kanan		13	477	3.586	1.183	5.259

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Tabel I.12
Jumlah ASN Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	S D	4	-	4
2.	S L T P	11	2	13
3.	S L T A	279	130	409
4.	Diploma I, II dan III	171	513	684
5.	Diploma IV	19	69	88
6.	Sarjana	1.398	2.126	3.524
7.	Pasca Sarjana	330	205	535
8.	Doktor	1	1	2
Way Kanan		2.213	3.046	5.259

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui pada akhir tahun 2023 jumlah Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Way Kanan berjumlah 5.259 orang yang terdiri dari ASN Perempuan sebanyak 3.046 orang dan laki-laki berjumlah 2.213 orang. Adapun kalau dilihat dari jabatan struktural eselon sebanyak 538 orang, yang terdiri dari jabatan eselon IV.b sampai dengan jabatan eselon II.a, dimana jabatan eselon yang dijabat laki-laki sebanyak 395 orang dan jabatan eselon yang dijabat perempuan sebanyak 143 orang. Adapun pejabat fungsional berjumlah 1.013 orang, yang terdiri dari fungsional laki-laki sebanyak 315 orang dan fungsional umum perempuan sebanyak 698 orang.

Tabel I.13
Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Eselon II	29	3	32
2.	Eselon III	132	34	166
3.	Eselon IV	234	106	340
4.	Fungsional	315	698	1.013
5.	Pelaksana	678	807	1.485
6.	Guru	801	1393	2194
7.	Pengawas	24	5	29
Way Kanan		2.213	3.046	5.259

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2024

b. Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Adapun realisasi APBD tahun anggaran 2023 dan 2022 dikabupaten Way Kanan menurut jenisnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel I.14
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 – 2023

No.	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2022	2023*
1.	Pendapatan Asli Daerah	77.242.579.541,44	79.438.525.085,75
	- Pajak Daerah	19.723.432.197,04	22.873.383.491,14
	- Retribusi Daerah	2.308.149.197,43	2.409.262.670
	- Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	5.013.842.240,52	5.379.146.380,59
	- Lain-lain PAD yang Sah	50.197.155.906,45	48.776.732.544,02
2.	Pendapatan Transfer Pusat dan Dana Perimbangan	1.152.330.128.917	1.181.226.101.961
	- Dana Bagi Hasil	44.446.903.677	35.166.171.271
	- Dana Alokasi Umum	615.022.986.000	645.990.677.310
	- Dana Alokasi Khusus	309.590.341.240	283.458.460.380
	- Dana Insentif Daerah		17.959.153.000
	- Dana Desa	183.269.898.000	198.651.640.000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	86.376.019.160	74.362.920.919
	- Pendapatan Hibah	10.180.448	46.696.671
	- Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil)	86.003.786.950	74.316.224.248
	- Lain-Lain	362.051.762	-
Jumlah Pendapatan (1+2+3)		1.315.948.727.618,44	1.335.027.547.965,75

*) Data UnAudite per tanggal 17 Januari 2023

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan, 2023

Dari data diatas dapat dilihat realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp. 1.315.948.727.618,44 dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp. 1.335.027.727.618,44. Dari sisi belanja daerah,

pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.1.298.465.949.488,06 dan pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.347.022.390.439,66.

Tabel I.15
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 – 2023

No.	Jenis Belanja	Tahun	
		2022	2023*
1.	Belanja Operasi	916.159.561.718,09	948.988.781.184,86
	- Belanja Pegawai	534.333.209.655,00	538.314.118.862,00
	- Belanja Barang dan Jasa	356.598.836.918,54	365.467.734.865,86
	- Belanja Bunga	-	-
	- Belanja Hibah	24.162.015.144,55	45.101.927.457,00
	- Belanja Bantuan Sosial	1.065.500.000,00	105.000.000,00
2.	Belanja Modal	109.116.148.013,92	107.713.480.015,54
3.	Belanja Tidak Terduga	1.518.368.696,00	257.796.125,00
4.	Belanja Transfer	271.671.871.060,05	290.062.333.114,26
	- Belanja Bagi Hasil	2.442.623.850,00	1.319.999.850,00
	- Belanja Bantuan Keuangan	269.229.247.210,05	288.742.333.264,26
	Jumlah Belanja (1+2+3+4)	1.298.465.949.488,06	1.347.022.390.439,66

*) Data Unaudited per tanggal 26 Januari 2024

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan, 2024

B. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu 2016 – 2021 telah membuahkan hasil yang diharapkan, namun demikian pembangunan ke depan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi dan diatasi yang kemudian dirumuskan sebagai permasalahan pembangunan. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mengakibatkan kesenjangan pencapaian kinerja yang telah dicapai saat ini dan yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan demi pencapaian yang lebih baik. Masalah pokok tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :

a. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pertumbuhan Ekonomi Mengalami Perlambatan

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan secara umum mengalami Perlambatan terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,12%, kemudian menjadi 5,11% pada tahun 2017, pada tahun 2018 berada pada 5,18%, pada tahun 2019 menjadi 5,17% dan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,16 %. Perekonomian Kabupaten Way Kanan untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,16% setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan positif diatas 5 persen, ini sebagai dampak dari adanya pandemik corona virus-19 selama satu tahun terakhir ini.

PDRB Per Kapita yang belum Optimal

Di tahun 2020 Pendapatan per Kapita Kabupaten Way Kanan hanya sebesar 30.925 Juta, masih jauh di bawah capaian Provinsi Lampung yaitu sebesar 42,69 Juta dan capaian Nasional sebesar 59,065 Juta pada kurun waktu yang sama, dan baru mencapai 77,79 % dari target masa akhir RPJMD yaitu sebesar 40.269 Juta.

Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2020 sebesar 12,90 persen, menurun 0,17 poin dibanding 2019 sebesar 13,07 persen tetapi masih berada di bawah target akhir RPJMD sebesar 12,03 persen. Capaian Penurunan Kemiskinan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2020 berada pada peringkat ke 6 (enam) dengan penurunan kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 0,17 point dan masih di bawah Provinsi Lampung sebesar 0,28 point.

Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

IPM Kabupaten Way Kanan sejak tahun 2016-2020 secara signifikan mengalami peningkatan yaitu dari **65,74 (2016)** menjadi **67,44 (2020)**, namun angka IPM Way Kanan masih berada dibawah rata-rata Provinsi sebesar **69,69** dan Nasional sebesar **71,94**, dan masih berada di bawah target akhir RPJMD sebesar 70,90 poin. Indeks Pembangunan Manusia Way Kanan pada tahun 2020 berada di bawah 70, atau berstatus **SEDANG**. Hanya empat Kabupaten/ Kota dengan IPM diatas 70,00 yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan

Kabupaten Lampung Tengah. Sementara Kabupaten Way Kanan berada di peringkat ke-9 dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Angka Melek Huruf yang belum Optimal

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 angka melek huruf di Kabupaten Way Kanan mencapai 96,73 persen turun menjadi 95,50 persen pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 95,78 pada tahun 2018, dan 96,14 pada tahun 2019, ini artinya masih ada lebih kurang 4 persen yang belum dapat membaca dan menulis.

Rata-Rata Lama Sekolah Belum Optimal

Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 baru mencapai 7,32 tahun terus meningkat menjadi 7,39 tahun pada tahun 2019, yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Way Kanan ditahun 2019 baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 7 atau putus sekolah di kelas 8. Posisi ini masih dibawah target akhir RPJMD sebesar 7,73 tahun.

Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

Kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Way Kanan selama beberapa tahun terakhir masih belum optimal. Berbagai masalah kesehatan ditemui diberbagai daerah. Adapun

masalah kesehatan yang membutuhkan penanganan, antara lain :

- 1) Masih terdapat kasus balita gizi buruk. Berdasarkan data Pada tahun 2019 jumlah balita gizi buruk ada 6 kasus.
- 2) Masih adanya Angka kesakitan penduduk pada suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya pola penyakit dan penyakit potensial yang berkembang, baik penyakit menular maupun tidak menular, seperti TBC, Infeksi akut lain pada saluran nafas bagian atas, Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Radang selaput otak, radang paru-paru, pertusis dan polio.

Menurunnya Pertumbuhan Beberapa Sektor Terhadap PDRB

Selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2020, kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan. Menurunnya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB ditunjukkan dari data Tahun 2019, dimana kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan sebesar 0,95 persen dan terus menurun hingga mencapai 0,91 persen pada Tahun 2020. Kondisi 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kurun waktu 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai 23,24 persen pada Tahun 2019. Namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 21,43 persen.

b. ASPEK PELAYANAN UMUM

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Secara lebih rinci berikut ini kami sajikan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Way Kanan :

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

Permasalahan bidang pendidikan antara lain:

- Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun;
- Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;
- Masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan;
- Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi masih rendah.

2) Bidang Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan antara lain :

- Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar;
- Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang masih rendah;
- Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (Kusta, HIV dan AIDS, TBC) dan tidak menular (hipertensi, jantung dan diabetes);
- Masalah gizi masyarakat;
- Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumberdaya manusia dibidang kesehatan;
- Kurangnya ketersediaan dan mutu farmasi dan peralatan
- Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;
- Masih adanya angka *stunting*; dan
- Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat.

3) Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

- Masih rendahnya Panjang jalan dalam kondisi mantab;
- Masih ada wilayah yang belum terkoneksi dengan sistem jaringan jalan dan transportasi;
- Kondisi baik jaringan irigasi baru mencapai 66,67 persen pada tahun 2019;
- Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi;

- Belum optimalnya akses berkelanjutan penduduk terhadap air minum berkualitas dan sanitasi baik di kawasan perkotaan maupun dikawasan pedesaan;
- Semua kawasan strategis belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), masih berupa hasil kajian dan belum ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Perlunya penguatan penataan ruang eksisting guna kepentingan investasi dan bangunan serta ketersediaan lahan untuk kepentingan publik;
- Kurangnya kualitas infrastruktur pedesaan.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Kesadaran masyarakat melaksanakan pembangunan ber IMB masih rendah;
- Belum optimalnya Penyediaan pasokan air bersih baik;
- Belum optimalnya Sistem penyediaan air minum dan sanitasi;
- Penurunan kualitas sumber air baku;
- Kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan masih kurang;
- Peningkatan laju pertumbuhan penduduk belum diikuti dgn peningkatan penyediaan sarpras pembuangan air limbah;
- Masih adanya kawasan pemukiman kumuh (seluas 34,362 Ha) dan rumah tidak layak huni.

5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Masih kurangnya kesiagaan bahaya kebakaran;
- Masih Kurangnya Sarana Prasarana Pemadam kebakaran;
- Masih kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam;
- Masih kurangnya jumlah dan profesionalisme aparat penegak Peraturan Daerah (Polisi Pamong Praja);
- Belum optimalnya pemanfaatan tenaga perlindungan masyarakat;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum.

6) Bidang Sosial

Permasalahan bidang sosial yaitu kecenderungan meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini disebabkan oleh :

- Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
- Belum optimalnya penanganan bencana sosial;
- Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *human trafficking*;
- Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial;

- Masih rentan terhadap konflik sosial; dan
- Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan terkait tenaga kerja adalah : (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah sebesar 75,22 persen ditahun 2020; (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi yaitu 3,56 persen di tahun 2020. Akar permasalahan dari permasalahan tenaga kerja, antara lain :

- Lapangan kerja terbatas;
- Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;
- Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal;
- Masih Kurangnya pendidikan/latihan keterampilan kerja;
- Belum optimalnya sistem informasi dan pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- Pencari kerja lebih memilih bekerja di perkotaan dibanding pedesaan;
- Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan perlindungan anak, yaitu :

- Masih Rendahnya sosialisasi dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- Kurangnya jumlah tenaga penyuluh KB, saat ini hanya 8 orang penyuluh KB untuk 15 (lima belas) Kecamatan;
- Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah;
- Masih rendah keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam organisasi dan pembangunan;
- Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3) Bidang Pangan

Permasalahan dibidang pangan yang dihadapi Kabupaten Way Kanan adalah :

- Skor Indeks Ketahanan Pangan pada Tahun 2019 sebesar 72,37 poin. Angka ini sudah cukup baik, namun masih dibawah rata-rata Provinsi Lampung sebesar 77,33 poin;
- Masih rendahnya indeks pemanfaatan sebesar 51,42 poin pada tahun 2019;
- Ketidakstabilan harga pangan;
- Keragaman konsumsi pangan masih rendah, hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok yaitu beras;

- Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman berdasarkan Pola Pangan Harapan (Skor PPH);
- Distribusi dan logistik pangan yang belum optimal.

4) Bidang Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Way Kanan selalu berusaha untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

5) Bidang Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup ditemui masalah terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini disebabkan antara lain :

- Masih rendahnya Skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 sebesar 63,93 poin
- Kurangnya penegakan hukum lingkungan
- Belum optimalnya penanganan persampahan dengan cara 3R (Reduce, Reuse and Recycle);
- Masih rendahnya jangkauan pelayanan persampahan;

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan;
- Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan ilegal;
- Meningkatnya risiko bencana akibat kerusakan lingkungan.

6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Way Kanan, yaitu :

- Keterbatasan SDM ASN yang berkompeten menjadi administrator database;
- Aksesibilitas jaringan komunikasi data dari kabupaten/kota yang akan melakukan perekaman kurang merata;
- Sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di kabupaten/kota banyak yang rusak dan tidak layak operasi;
- Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan (blanko KTP-EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi kedaerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah.

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Permasalahan yang dihadapi meliputi :

- Belum adanya roadmap pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

- Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan Kampung;
- Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Kampung;
- Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat Kampung dalam upaya keberdayaan ekonomi Kampung;
- Masih Tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan angka kemiskinan perkotaan;
- Belum optimalnya penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam upaya penanggulangan kemiskinan
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Kampung;
- Lemahnya akses terhadap sentra-sentra produksi dan pelayanan publik.

8) Bidang Perhubungan

- Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi massal perkotaan serta integrasi antar moda angkutan;
- Masih rendah ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
- Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah;
- Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;
- Masih tingginya *overloading* angkutan barang;
- Belum tersedianya terminal tipe c;

- Belum optimalnya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang.

9) Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama bidang komunikasi dan informatika untuk aplikasi dan informatika, meliputi :

- Belum adanya standar pembangunan/ pengembangan aplikasi/system Informasi/ website, data, serta infrastruktur TI;
- Belum adanya standar keamanan informasi;
- Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan TI;
- Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI.

10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), yaitu :

- Jumlah Koperasi aktif yang masih terbilang kecil, di tahun 2020 sebanyak 94 Koperasi;
- Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM;
- Minimnya Modal dan masih rendahnya informasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil terutama di perdesaan;
- Masih rendahnya SDM pengelola UMKM;
- Kurangnya Inovasi dan Penerapan Teknologi oleh pelaku UMKM;

- Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal;
- Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

11) Bidang Penanaman Modal

Beberapa permasalahan pada bidang penanaman modal, yaitu :

- Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata;
- Kurangnya Optimalnya Promosi dan Kerjasama Penanaman modal;
- Menurunnya realisasi Penanaman Dalam Negeri (PMDN) tahun 2020 sebesar 22.916 Milyar Rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 29.114 milyar Rupiah.

12) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
- Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga;
- Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Kabupaten Way Kanan yang memenuhi standar nasional dan internasional.

13) Bidang Statistik

- Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum adanya aturan daerah tentang wali data.

14) Bidang Persandian

- Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi relatif terbatas;
- Sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan masih sedikit.

15) Bidang Kebudayaan

- Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan Masyarakat;
- Lemahnya pemahaman sejarah lokal;
- Lemahnya data dan informasi kebudayaan;
- Kurang optimalnya promosi budaya lokal.

16) Bidang Perpustakaan

- Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan;
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan;
- Terbatasnya sarpras perpustakaan;
- Kurangnya promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.

17) Bidang Kearsipan

- Belum optimalnya penataan tertib arsip;
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan.

Urusan Pilihan

1) Bidang Perikanan

- Rendahnya nilai tambah produksi hasil perikanan;
- Pemasaran hasil Perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir;
- Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh Petani.

2) Bidang Pariwisata

- Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan terhadap pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman dll);
- Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan; dan
- Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata.

3) Bidang Pertanian

Permasalahan pokok terkait pertanian di Kabupaten Way Kanan, yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Selama

periode 2016-2020 pertumbuhan yang dicapai kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami trend yang berfluktuatif namun cenderung turun. Secara umum, akar permasalahan di bidang pertanian, yaitu :

- Rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian, peternakan dan perkebunan;
- Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura);
- Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
- Masih rendahnya kapasitas produksi pertanian dan tingginya alih fungsi lahan pertanian;
- Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
- Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
- Kurang efektif dan efisien penanganan paska panen;
- Masalah anomaly cuaca;
- Rendahnya akses permodalan.

4) Bidang Perdagangan

- Promosi produk industri lokal (asal way kanan) masih dirasa kurang;
- Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan;
- Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai; dan

- Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

5) Bidang Perindustrian

- Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;
- Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM;
- Belum optimalnya antisipasi terhadap berkembangnya revousi industri 4.0;
- Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

Urusan Penunjang

1) Perencanaan Pembangunan

- Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
- Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi pembangunan daerah; serta
- Belum optimal pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.

2) Keuangan

- Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada kurun tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami pluktuatif, terendah pada tahun 2016 sebesar 0,250 dan tertinggi pada tahun

2019 sebesar 0,703, dengan katagori KPD rendah.

3) Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

- Belum meratanya distribusi ASN sesuai dengan formasi dan kebutuhan;
- Kekurangan pegawai terutama berkaitan hal yang sifatnya teknis;
- Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme ASN.

4) Bidang Penelitian dan Pengembangan

- Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal.

c. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pada Aspek Daya Saing Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1) Masih Tingginya Jumlah Kriminalitas dan Resiko terkena tindak kejahatan

Dalam rentang tahun 2016-2020, angka kriminalitas sebanyak 558 kasus pada tahun 2016 hingga 425 kasus pada tahun 2020, artinya angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan.

Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar resiko yang dimiliki

penduduk menggambarkan bahwa semakin tidak aman suatu wilayah. Pada tahun 2019 terlihat bahwa Way Kanan memiliki crime rate sebesar 95,31 yang berarti bahwa setiap 100.000 orang penduduk di Kabupaten Way Kana nada sebanyak 95 orang memiliki resiko terkena tindak kriminalitas.

2) Masih tingginya pengeluaran konsumsi pangan perkapita

Semakin tinggi tingkat pendapatan atau kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan cenderung menurun, namun sebaliknya proporsi untuk non makanan akan meningkat. Pada tahun 2020 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita sebesar 45,50 persen, Kondisi ini tercermin dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

3) Masih rendahnya PDRB dan PDRB perkapita

Perekonomian Kabupaten Way Kanan secara umum terus bergerak ke arah peningkatan. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Way Kanan yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 14.037,77 triliun, namun masih dibawah target Akhir RPJMD sebesar 18.434.157 trilyun, baru sebesar 76,62

persen. Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Way Kanan ini diikuti pula dengan peningkatan PDRB perkapita. pada tahun 2019 mencapai Rp.31.378.767,- namun masih dibawah target Akhir RPJMD sebesar 40.268.653, baru sebesar 77,92 persen.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TERKAIT STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1) SPM Bidang Pendidikan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan, sebagai berikut :

- a) Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam memahami aturan dan mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan;
- b) Masih terbatasnya alokasi atau anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan;
- c) Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan;
- d) Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM (Anak Tidak Sekolah – ATS dan Peserta Didik Miskin – PDM).

2) SPM Bidang Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Way Kanan yang belum dapat mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

- a) Regulasi Peraturan Pemerintah yang cukup jauh waktu terbitnya dengan regulasi pelaksanaan dan regulasi teknis;
- b) Regulasi pelaksanaan yaitu Permendagri nomor 100 tahun 2018 baru diundangkan pada tanggal 19 November 2018;
- c) Regulasi teknis yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 baru keluar pada tanggal 31 Januari 2019;
- d) Setelah keluar Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri nomor 100 tahun 2018 tersebut SPM Bidang Kesehatan belum dapat segera di implementasikan karena jajaran kesehatan menunggu keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang baru terbit/diundangkan pada tanggal 31 Januari 2019. Sehingga mulai bulan Januari barulah dapat memulai mempersiapkan pelaksanaan SPM bidang kesehatan baik SPM Bidang Kesehatan tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

- e) Tim Penerapan SPM Kabupaten Way Kanan baru terbentuk dengan SK Kepala Daerah pada akhir 2019.
- f) Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan, khususnya untuk melakukan pendataan sasaran SPM Bidang Kesehatan (turun lapangan untuk sensus mencari sasaran SPM BK). Selain itu juga belum ada dana khusus SPM Bidang Kesehatan di Dokumen Perencanaan Jangka menengah (RPJMD/Renstra) dan Dokumen Rencana Tahunan (Renja). Hal ini akan sedikit menyulitkan ketika akan melakukan evaluasi anggaran SPM BK tahun 2019 sesuai Permendagri 100 tahun 2018 karena belum ada dana khusus untuk SPM BK berdasarkan jenis layanan.
- g) Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD/Renstra) sampai tahun 2019 dan dokumen perencanaan tahunan (Renja) 2019 belum mengakomodir kegiatan SPM Bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota sehingga kegiatan di DPA SKPD 2019 belum ada kegiatan dan anggaran berdasarkan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan sesuai Permendagri 100 tahun 2018.
- h) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang akan melaksanakan SPM bidang kesehatan. SDM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan terbatas khususnya

yang ada di pelayanan kesehatan dasar (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP : Puskesmas) belum cukup secara jenisnya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 (belum semua puskesmas memiliki 9 jenis tenaga kesehatan) dan secara jumlah. Jumlah yang kurang akan menyulitkan untuk melakukan pendataan sasaran SPM BK yang sifatnya sensus (100%) dan secara jenis tenaga yang tidak standar akan menyebabkan pemberian pelayanan kesehatan belum sesuai dengan standar tenaga termasuk terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih untuk masalah kesehatan jiwa secara standar.

- i) Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menegakkan diagnosis penyakit secara standar membutuhkan sarana (alat kesehatan) prasarana (reagent, stik pemeriksaan dll) khususnya untuk Penyakit tidak Menular/PTM (Hipertensi, Diabetes Militus) di Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama/puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan SPM BK Kabupaten Kota.
- j) Keterbatasan obat dan BMHP untuk melakukan layanan standar masih belum tersedia cukup di puskesmas terutama obat untuk penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Militus/DM, Orang dengan gangguan jiwa) karena selama ini

Kabupaten/Kota mengadakan obat pelayanan kesehatan dasar sedangkan pusat mengadakan obat program (bagaimana dengan obat utk program PTM).

- k) Pemahaman SPM BK yang belum optimal ditingkat Kabupaten dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (perhitungan estimasi sasaran, Definisi Operasional, indikator untuk mengukur capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten hingga ke Puskesmas).
- l) Pencatatan SPM BK yang belum maksimal untuk SPM BK khususnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/ FKTP (Puskesmas dan Klinik swasta). Pelaporan SPM BK yang belum optimal mulai dari klinik swasta ke puskesmas, puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi.

3) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Kabupaten Way Kanan masih belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan berbagai persoalan, sebagai berikut:

- a) Masih kurangnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam pelayanan SPM;
- b) Masih kurangnya SDM secara teknis dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum

mengingat banyaknya jumlah kegiatan yang spesifik membutuhkan keahlian pada bidang tertentu.

4) SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan & pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Kebakaran diantaranya adalah :

- a) Masih kurang/minimnya personil yang memiliki sertifikasi PPNS;
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana kebakaran;
- c) Masih kurangnya data tentang pelanggaran Perda oleh dinas yang terkait;
- d) Kurangnya kerjasama antara Dinas yang mempunyai Perda dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Penanganan Bencana Daerah di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

- a) Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam memahami aturan dan mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub- Urusan Bencana;
- b) Masih terbatasnya alokasi atau anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian

- SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sesuai dengan amanah peraturan;
- c) Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana;
 - d) Pandemi Covid-19 telah menjadi pukulan telak bagi perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia khususnya Kab. Way Kanan, sehingga mengurangi akses jalannya kegiatan karena alokasi atau anggaran selain terbatas juga di alihkan untuk penanganan Wabah Virus Corona yang memerlukan penanganan cepat;
 - e) Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM.

5) SPM Bidang Sosial

Permasalahan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Way Kanan adalah :

- a) Keterbatasan Anggaran Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Sosial, khususnya untuk melakukan pendataan sasaran SPM. Selain itu juga belum ada dana khusus SPM Bidang Sosial di Dokumen Perencanaan Jangka menengah (RPJMD/Renstra). Namun sudah terdapat dana khusus SPM dalam Dokumen Rencana Tahunan (Renja) meski belum sesuai anggaran yang dibutuhkan karena keterbatasan Anggaran di kabupaten. Hal ini akan menyulitkan

ketika akan melakukan evaluasi anggaran SPM tahun 2020 sesuai Permendagri 100 tahun 2018 karena belum ada dana khusus untuk SPM berdasarkan jenis layanan;

- b) Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD/Renstra) sampai tahun 2020 dan dokumen perencanaan tahunan (Renja) 2020 belum mengakomodir kegiatan SPM Bidang Sosial di Kabupaten sehingga kegiatan di DPA SKPD 2020 belum ada kegiatan dan anggaran berdasarkan jenis layanan SPM sesuai Permendagri 100 tahun 2018, namun terdapat kegiatan-kegiatan dengan sasaran dan output yang sama dengan SPM sehingga kegiatan-kegiatan tersebut diasumsikan peruntukannya sebagai kegiatan pencapaian SPM;
- c) Sumber Daya Manusia Sumber Sosial yang akan melaksanakan SPM bidang Sosial. SDM pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan terbatas khususnya yang ada di pelayanan Sosial. Jumlah yang kurang akan menyulitkan untuk melakukan pendataan sasaran SPM yang sifatnya Capaian (100%) dan secara jenis tenaga yang tidak standar akan menyebabkan pemberian pelayanan sosial belum sesuai dengan standar tenaga sosial yang terlatih;

- d) Sarana Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencapaian target SPM Kabupaten/Kota;
- e) Pemahaman SPM yang belum optimal ditingkat Kabupaten dan Fasilitas pelayanan Sosial tingkat pertama (perhitungan estimasi sasaran, Definisi Operasional, indikator untuk mengukur capaian SPM Bidang Sosial);
- f) Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan SPM yang belum maksimal untuk SPM khususnya di Fasilitas Pelayanan PMKS Belum Optimalnya Peras PSKS dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan social;
- g) Kurang kerja sama antara dinas sosial kabupaten Way Kanan dengan pihak luar seperti dinas terkait dan dunia usaha csr dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
- h) Adanya Pandemi Covid-19 mengurangi frekuensi kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencapaian SPM;
- i) Kabupaten Way Kanan terdapat beberapa kecamatan dan daerah yang rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistic dalam penanganan bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Way Kanan.

2. Isu Strategis

Berdasarkan kajian terhadap dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Lampung dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2025, serta juga memperhatikan berbagai isu-isu internasional (*global*), nasional maupun regional yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Way Kanan, maka ada beberapa isu utama yang diperkirakan akan menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan Kabupaten Way Kanan pada periode 2021-2026, yaitu :

- a. Pandemi Covid-19 telah menjadi pukulan telak bagi perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai pihak mengakui, dampak ekonomi yang dirasakan akibat Covid-19 jauh lebih hebat dari periode-periode sebelumnya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap sisi perekonomian saja, tapi juga kesehatan hingga sosial suatu Negara;
- b. Sejumlah indikator yang menunjukkan Indonesia sedang mengarah ke jurang resesi. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi yang negatif pada kuartal II dan tren ekonomi kuartal III dan IV yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian global. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, pentingnya usaha pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional bagi masyarakat. Indonesia harus memperkuat sektor-sektor primer terutama sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan kekuatan ekonomi lokal maka

masyarakat tidak terlalu bergantung pada ekonomi global;

- c. Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), memberikan peluang dan ancaman bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN namun harus didukung dengan pembangunan disektor pendukung investasi dan pembangunan sumber daya manusia;
- d. Impor produk pertanian yang selama ini belum bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri pun mengalami kendala, karena perubahan kebijakan dari negara-negara eksportir yang berusaha untuk menyimpan hasil produksi untuk kebutuhan dalam negeri. Situasi ini, bisa semakin buruk jika pandemi Covid-19 terjadi berkepanjangan. Semakin lama pandemi ini berangsur, semakin kompleks masalah pangan yang dihadapi;
- e. Pertumbuhan bahan makanan organik di dunia terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di Indonesia. Pertumbuhannya mencapai 15-20 persen, didorong peningkatan daya beli masyarakat. Alasan konsumen memilih produk organik menurut riset adalah ingin hidup lebih sehat. Karena ada kelebihan produk organik dibandingkan produk non-organik, yaitu bebas pestisida dan bebas GMO (genetically modified food);

- f. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cukup tinggi sehingga mengancam Kabupaten Way Kanan dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah dan mendukung lumbung pangan nasional;
- g. Masih banyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten Way Kanan yang belum termanfaatkan secara optimal;
- h. Perusahaan perjalanan digital Booking.com menemukan kecenderungan wisata mengarah kepada pariwisata berkelanjutan pasca pandemi virus corona (Covid-19);
- i. Ada kecenderungan masyarakat lebih ingin merencanakan liburan ke destinasi wisata domestik, ketimbang vakansi keluar negeri ketika pandemi mereda. Artinya, ada kecenderungan masyarakat untuk mengobati bosan dengan melakukan perjalanan ke tujuan yang lebih dekat dengan rumah atau hanya sekadar staycation di sebuah hotel;
- j. Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25-27 September 2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni Sustainable Development Goal (SDGs) yang disepakati oleh 192 negara termasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai platform pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan dimana pada tahun pada tahun 2030 cita-cita dari SDGs yang tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Upaya percepatan pencapaian Target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kabupaten Way Kanan telah menindaklanjutinya melalui SK Tim Penyusunan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Way Kanan Tahun 2017-2021;

- k. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, terdapat beberapa isu sebagai berikut :

1) Pilar Sosial

- a) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B;
- b) Persentase Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Way Kanan;
- c) Iklim yang kondusif, aman dan nyaman bagi pelaku ekonomi dalam rangka menarik investor masuk;
- d) Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SSJN Bidang Kesehatan;
- e) Rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prog. Keluarga Harapan;
- f) Jumlah BLK, BKK;
- g) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;
- h) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN;
- i) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah;
- j) Jumlah Cakupan pelayanan bencana alam;

- k) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social;
- l) Persentase Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan;
- m) Kondisi sarana prasarana pertanian dalam keadaan baik;
- n) Laju pertumbuhan sektor pertanian;
- o) Prevalensi Malnutrisi pada anak balita;
- p) Prevalensi anemia pada Ibu Hamil, Remaja Putri dan Lansia;
- q) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH);
- r) Jumlah Angka kesakitan akibat penyakit tidak menular (Hypertensi, Diabetes Mellitus dan Kesehatan jiwa) masih tinggi;
- s) Persentase Angka Harapan Hidup;
- t) Penyalahgunaan napza di wilayah perkotaan dan kampung masih tinggi;
- u) Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan;
- v) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil;
- w) Persentase Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian balita (AKAba);
- x) Kegiatan pengendalian penyakit menular (TB, HIV, Covid-19) belum optimal;
- y) Masalah terkait dengan perlindungan anak masih sering ditemui;

- z) Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi semua cara;
- aa) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern;
- bb) Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR);
- cc) Meningkatkan unmeet need pelayanan kesehatan;
- dd) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- ee) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat;
- ff) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat;
- gg) Angka rata-rata lama sekolah;
- hh) APK anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD);
- ii) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B;
- jj) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B;
- kk) Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- ll) Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan;
- mm) Persentase Keterwakilan perempuan di DPR;
- nn) Persentase Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II);
- oo) Meningkatkan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi.

2) Pilar Ekonomi

- a) Peningkatan produktifitas, kemampuan kewirausahaan dan daya saing produktif pemuda dalam aktivitas ekonomi;
- b) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/
Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun;
- c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita per tahun;
- d) Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e) Persentase Lapangan Pekerjaan di kabupaten Way Kanan;
- f) Jumlah pasar tradisional untuk membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan digunakan sebagai tempat promosi;
- g) Jumlah Penduduk yang mendapat Akses Internet;
- h) Pembangunan Terminal Tipe C;
- i) Penyediaan dan revitalisasi Prasarana (Jalan dan Jembatan) sebagai akses utama;
- j) Pemanfaatan Limbah / sampah melalui penumbuhan inovasi Tepat Guna (TTG);
- k) Persentase penduduk miskin di Kabupaten Way Kanan;
- l) Jumlah Desa Tertinggal di kab. Way Kanan;
- m) Kapasitas dan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kalangan dunia usaha/investor dengan potensi di Way Kanan;

- n) Proporsi individu yang menggunakan internet;
- o) Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB.

3) Pilar Lingkungan

- a) Tersedianya air baku yang cukup bagi masyarakat Way Kanan;
- b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;
- c) Kondisi prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. (proporsi embung dalam kondisi baik);
- d) Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
- e) Jumlah penduduk yang menerima fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni akibat program relokasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Persentase Ruang Terbuka Hijau terutama di Kawasan perkotaan untuk memenuhi 30% sesuai amanah Undang-undang nomor 26 tahun 2007;
- g) Tersedianya MCK yang layak di permukiman;
- h) Tingkat Ketahanan pangan di Kabupaten Way Kanan;
- i) Koordinasi dan pengawasan pengelolaan limbah terutama limbah hasil budidaya peternakan dan limbah industri;

- j) Kawasan perkebunan harus disesuaikan dengan kesesuaian fisik (Agroekosistem) dan status Kawasan untuk menciptakan nilai tambah perkebunan yang memberikan nilai manfaat yang inklusif dan memberikan manfaat bagi sekitar kawasan.

4) Pilar Hukum & Tata Kelola Kelembagaan

- a) Produk hukum dan penegakan hukum dalam tata ruang;
 - b) Keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislative;
 - c) Kompetensi sumber daya manusia melalui pembinaan, Pendidikan dan pelatihan.
1. Semakin maraknya penggunaan teknologi digital, meningkatkan e-commerce pada dunia perdagangan dapat berdampak meningkatnya daya kreatifitas masyarakat dalam membentuk sutau produk baru dengan cara pemasaran yang lebih baik sehingga menumbuhkan industri usaha kecil menengah. Namun maraknya e-commerce berdampak juga pada penurunan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor keuangan;
- m. Revolusi Industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia. Sampai saat ini, mereka yang telah memperoleh hasil maksimal darinya adalah konsumen yang mampu membeli dan mengakses dunia dan layanan digital. Di masa depan, inovasi

teknologi juga akan mengarah pada keajaiban sisi penawaran, dengan keuntungan efisiensi dan produktivitas jangka panjang. Biaya transportasi dan komunikasi akan turun, logistik dan rantai pasokan global akan menjadi lebih efektif dan biaya perdagangan akan berkurang, yang semuanya akan membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh ekonom Erik Brynjolfsson dan Andrew McAfee, revolusi dapat menghasilkan ketimpangan yang lebih besar, khususnya dalam potensinya untuk mengganggu pasar tenaga kerja;

- n. Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan bahwa dunia dalam bahaya krisis air global. Laporan bersama Bank Dunia dan PBB menyatakan saat ini 40% populasi dunia mengalami kelangkaan air. Laporan yang disusun berdasarkan penelitian selama dua tahun tersebut mengatakan 700 juta orang akan menderita akibat kelangkaan air parah pada 2030;
- o. (UNESCO) tahun 2018 menyatakan bahwa sebanyak 1,9 juta orang di Lampung tinggal di kawasan langka air. Beberapa daerah di Lampung, seperti Metro, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran dan Pesisir Barat, kondisi ketersediaan air bersihnya cukup memprihatinkan;
- p. Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut, gangguan di sektor pertanian dan ketahanan pangan jadi ancaman di depan mata. Kebakaran lahan menjadi tentangan terberat;

- q. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau;
- r. Kerusakan, pendangkalan dan pencemaran sungai akibat penambangan ilegal, menjadi kontra produktif terhadap upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan;
- s. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala antara lain Ketidaksiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan keterlibatan dalam pembangunan desa;
- t. Penduduk Kabupaten Way Kanan tahun 2019 berjumlah 450.109 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,95%. Jumlah Penduduk Usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 merupakan kelompok umur yang paling besar yaitu berjumlah 300.100 jiwa atau 66,67% dari penduduk Way Kanan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan sudah memasuki era 'Bonus Demografi'. Keuntungan bonus demografi tersebut adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan, agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana berupa ledakan pengangguran pada usia produktif;

- u. Upaya Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menurunkan angka kemiskinan bukan hanya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga akar penyebab kemiskinan seperti permasalahan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang setiap tahun mengalami peningkatan disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak, perempuan dan human human trafficking, belum optimalnya penanganan bencana sosial dan penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta asih sering terjadinya konflik sosial dan belum memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara maksimal;

3. Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD Provinsi dan RPJMN. Visi dan misi kepala daerah yang dimaksud adalah visi dan misi kepala daerah yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi dan misi kepala daerah tersebut merupakan cerminan dari kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan, saat ini telah sampai pada periode pembangunan jangka menengah tahap ke-4 (empat) dari RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2025, yaitu periode 2021-2026. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap 4 dari RPJP Kabupaten Way Kanan 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2019-2024 menjadi pedoman utama dalam pembangunan lima tahun Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026 yang dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stakeholders* dan terkristalisasi sebagai jati diri. Visi umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stake holders* untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh

kemampuan *stake holders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dengan mendasarkan kepada modal dasar Kabupaten Way Kanan, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 2005-2025, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005-2025, maka Visi Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 adalah **“Way Kanan Mandiri, Maju dan Berdaya Saing”**

Way Kanan yang Mandiri adalah keinginan menjadikan Way Kanan sebagai Kabupaten yang mandiri pada periode 20 tahun kedepan. Kata-kata mandiri ini menunjuk pada kemandirian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Way Kanan yang Maju adalah Way Kanan sebagai Kabupaten yang maju. Kata maju menunjukkan kemajuan dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan pendapatan perkapita yang meningkat, pemerataan tingkat distribusi pendapatan, pengurangan tingkat kemiskinan, serta pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan.

Way Kanan yang Berdayasaing adalah Menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan potensi daerah.

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi direction untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Way Kanan 2005-2025, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut :

- 1) Memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Way Kanan;
- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan dukungan potensi daerah yang handal;
- 3) Mewujudkan manajemen publik yang semakin handal dengan peningkatan profesionalitas aparat pemerintah daerah;
- 4) Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah yang semakin maju dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah;
- 5) Mewujudkan pembangunan sosial kemasyarakatan yang berbudaya untuk mempercepat proses pembangunan daerah.

Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan seperti yang diinginkan, maka arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 20 tahun mendatang melalui tahapan Perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan RPJPD Kabupaten Way Kanan 2005-2025 berikut :

- 1) RPJM Kesatu (2006 – 2011)
- 2) RPJM Kedua (2011 – 2016)
- 3) RPJM Ketiga (2016 – 2021)
- 4) RPJM Keempat (2021 – 2026)

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Kabupaten Way Kanan

periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Filosofi :

Bahwa pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil- hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Makna Unggul :

adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain.

Makna Sejahtera :

adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Dalam rangka mencapai visi "**Way Kanan Unggul dan Sejahtera**" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 ditetapkan sebagai berikut :

- Misi-1** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
- Misi-2** : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
- Misi-3** : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.
- Misi-4** : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur.

Misi-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik.

Misi-2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

Misi-3 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan

perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif. Disamping itu, perlu upaya seluruh pemangku kepentingan menghadapi pandemi covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru.

Misi-4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur

Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Diwilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan. Keberadaan Bandara Gatot Subroto, sarana transportasi kereta api dan jalur Lintas Tengah Sumatera serta Tol Sumatera perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan mengembangkan kawasan-kawasan sentra produksi dan destinasi wisata. Seiring dengan itu perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja

yang ada terutama dalam menyambut “Bonus Demografi”.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi petani, pengusaha kecil, pengrajin, dan koperasi perlu didukung dengan keberadaan tenaga penyuluh pertanian, penyuluh industri, tenaga pendamping UMKM, penyuluh koperasi dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Selain itu, perlu dikembangkan tatanan baru aktivitas ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid 19.

Pencapaian Misi dengan dibarengi komitmen dilakukan melalui Agenda Kerja Utama yang akan dituangkan dalam Program dan kegiatan prioritas. Agenda Kerja Utama tersebut antara lain :

Misi-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Agenda Kerja :

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dilakukan dengan langkah-langkah :
 - a) Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil (outcome) berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
 - b) Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih handal.

- c) Memperbaiki penjabaran perencanaan kinerja (cascade down) dari level pemerintah daerah kepada perangkat daerah hingga level individu.
 - d) Menyusun rencana aksi setiap setiap perangkat daerah sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja PD dengan target kinerja secara periodok/triwulan yang kemudian dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi agar lebih optimal.
 - e) Menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang.
 - f) Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja PD serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan SAKIP yang berkelanjutan terhadap masing-masing PD.
- 2) Opini dari BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), dengan cara peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan penataan aset daerah.

- 3) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dilakukan dengan langkah :
 - a) Meningkatkan pendapatan asli daerah.
 - b) Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan dana perimbangan.
 - c) Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan lain-lain pendapatan yang sah.
- 4) Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan kajian atas peraturan perundangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan pemetaan, identifikasi dan pengendalian penyusunan produk hukum daerah secara berkala untuk mewujudkan harmonisasi produk hukum yang efektif, sehingga mengurangi produk hukum daerah yang tidak harmonis.
- 5) Meningkatkan penguatan organisasi perangkat daerah, yang dilakukan dengan penyusunan struktur organisasi didasarkan pada kinerja yang akan dicapai, agar struktur organisasi tersebut dapat efektif mencapai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan struktur organisasi selain mengacu pada arahan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi, tetapi juga memperhatikan proses bisnis yang lebih fleksibel dan adaptif.
- 6) Meningkatkan kualitas ketatalaksanaan, yang dilakukan dengan penyusunan kebijakan tentang proses bisnis internal yang menggambarkan

hubungan tata kerja antar Perangkat Daerah didasarkan pada kinerja yang akan dicapai.

- 7) Meningkatkan kualitas pengawasan, dilakukan dengan langkah :
 - a) Membangun unit kerja Zona Integritas serta memaksimalkan peran Inspektorat dalam mengawal pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
 - b) Memperkuat penerapan sistem integritas dengan membuat kebijakan terkait penangan gratifikasi, benturan kepentingan, dan mengimplementasikan SPIP kedalam SOP, penempatan SDM, manajemen resiko, dan lain-lain.
- 8) Meningkatkan pelayanan publik, dimana setiap unit yang memberikan pelayanan publik agar melakukan reviu atas pelaksanaan standar pelayanan maupun SOP pelayanan, dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Bagian Organisasi.
- 9) Meningkatnya inovasi daerah.
- 10) Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang dilakukan dengan mendorong penerapan e-government secara merata dalam manajemen pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang bersifat transaksional.

- 11) Meningkatkan sistem manajemen SDM, yang dilakukan dengan menerapkan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi serta melakukan pengukuran kinerja secara periodik, sehingga capaian kinerja individu dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan pegawai berkelanjutan serta sebagai dasar pemberian *reward dan punishment*.
- 12) Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil Negara.
- 13) Meningkatkan kualitas arsip daerah.
- 14) Meningkatkan kualitas layanan sekretariat daerah.
- 15) Meningkatkan kualitas layanan sekretaria DPRD.

Misi-2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Agenda Kerja :

Meningkatkan kualitas tutupan hutan, kualitas udara, kualitas air dan menjaga sumber mata air, dilakukan dengan beberapa langkah :

- 1) Gerakan tanam pohon sumber air disepanjang sempadan sungai dan ruang terbuka hijau.
- 2) Pengelolaan persampahan (Bank Sampah, TPA) dan mendorong gerakan kebersihan lingkungan.
- 3) Pencegahan pencemaran air sungai.
- 4) Pencegahan pencemaran udara.
- 5) Penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Misi-3 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah

Agenda Kerja :

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup, dilakukan dengan langkah-langkah :
 - a) Mengurangi angka kematian ibu, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.
 - b) Mengurangi angka kematian bayi, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin.
 - c) Mengurangi angka kematian balita, dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir dan balita.
 - d) Mengurangi angka stunting.
 - e) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia pendidikan dasar.
 - f) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia produktif.
 - g) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut.
 - h) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk penderita hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, tuberculosi;
 - i) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.

- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan yang diukur dengan indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan langkah-langkah :

- a) Meningkatkan angka partipasi sekolah.
 - b) Mendorong dan memfasilitasi partisipasi penduduk putus sekolah untuk mengikuti Pendidikan luar sekolah.
 - c) Mendorong dan memfasilitasi sekolah untuk diakreditasi sehingga kualitas pelayanan sekolah semakin baik.
 - d) Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas guru.
 - e) Mendorong dan memfasilitasi pemenuhan sarana prasarana sekolah.
- 3) Menurunkan angka kemiskinan, dengan beberapa langkah sebagai berikut :
- a) Pengelolaan data terpadu kemiskinan yang semakin baik dan akurat, dilakukan dengan melakukan update data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara rutin dan dikelola dengan sistem SIKNG dan SIDATUK (Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan);
 - b) Penanganan kemiskinan, dimana berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 terdapat 12,90% atau 58.410 jiwa.
 - c) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin terutama pada persentil 1-13.
- 4) Pengendalian pertumbuhan penduduk yang diukur dengan laju pertumbuhan penduduk.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup anak, dilakukan dengan melakukan pemenuhan hak-hak dasar anak, perlindungan khusus anak dan peningkatan kualitas keluarga.

- 6) Meningkatkan keberdayaan perempuan, yang dilakukan dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan.
- 7) Meningkatkan keberdayaan masyarakat kampung yang diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun.
- 8) Melestarikan & mengembangkan budaya daerah.
- 9) Meningkatkan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat.

Misi-4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur

Agenda Kerja :

- 1) Mengembangkan Kawasan Pangan (food estate) di Kecamatan Bahuga, Buay Bahuga, Bumi Agung dan Way Tuba, Blambangan Umpu.
- 2) Meningkatkan produksi, mutu dan usaha komoditas tanaman pangan (terutama padi, jagung, ubi kayu) dengan beberapa langkah yaitu :
 - a) Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b) Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dgn tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman pangan yang ada.

- c) Pengembangan Kawasan Tanaman Padi
 - Pengembangan Kawasan pertanian padi organik dan padi unggul varietas lokal.
 - Mendorong perluasan areal layanan Daerah Irigasi Way Umpu, Suplesi Way Besai dan Daerah Irigasi Komerling, serta meningkatkan indeks pertanaman padi dengan cara merehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, cetak sawah baru, serta pemberdayaan P3A.
 - Pengembangan tanaman refugia sebagai upaya pengendalian hama tanaman padi.
 - Memfasilitasi ketersediaan sarana produksi pertanian tanaman padi.
 - d) Pengembangan kawasan tanaman pangan lainnya terutama singkong, jagung, kedelai.
 - e) Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan & jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman pangan.
 - f) Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman pangan.
- 3) Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman hortikultura semusim (sayur-sayuran, dan tanaman biofarmaka serta tanaman hias semusim), dengan beberapa langkah yaitu :
- a) Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b) Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas

- memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman hortikultura yang ada.
- c) Pengembangan Kawasan tanaman sayur-sayuran.
 - d) Pengembangan Kawasan tanaman biofarmaka dan tanaman hias semusim.
 - e) Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan & jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman hortikultura.
 - f) Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman hortikultura.
- 4) Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman hortikultura tahunan (buah-buahan dan tanaman hias tahunan) dengan beberapa langkah yaitu :
- a) Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b) Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dgn tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman hortikultura yang ada.
 - c) Pengembangan kawasan tanaman buah-buahan.
 - d) Pengembangan Kawasan tanaman tanaman hias.

- e) Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan & jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman hortikultura.
 - f) Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman hortikultura.
- 5) Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman perkebunan semusim, dengan beberapa langkah yaitu :
- a) Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b) Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dgn tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman perkebunan semusim yang ada.
 - c) Pengembangan kawasan tanaman perkebunan semusim (tebu, tembakau dan lain-lain).
 - d) Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman perkebunan semusim.
 - e) Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman perkebunan semusim.
- 6) Meningkatkan produksi dan mutu komoditas tanaman perkebunan tahunan, dengan beberapa langkah yaitu :

- a) Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b) Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dgn tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi pertanian tanaman perkebunan tahunan yang ada.
 - c) Pengembangan kawasan tanaman perkebunan tahunan (karet, kopi, lada, kakao, sawit, kelapa, dll).
 - d) Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan & jembatan menuju kawasan pengembangan tanaman perkebunan tahunan.
 - e) Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan tanaman perkebunan tahunan.
- 7) Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging serta telur, dengan beberapa langkah :
- a) Menata organisasi perangkat daerah di lingkup pertanian terutama agar fokus dan memudahkan pencapaian dan pengukuran target kinerja.
 - b) Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dengan tugas memfasilitasi kelompok tani yang ada dan mampu memaksimalkan potensi peternakan yang ada.
 - c) Pengembangan ternak sapi, kerbau, kambing, domba, ternak unggas dan ternak lainnya berbasis kawasan.

- d) Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan & jembatan menuju kawasan pengembangan peternakan.
 - e) Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan peternakan.
- 8) Meningkatkan produksi ikan dan olahan ikan, dengan beberapa langkah, yaitu :
- a) Menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh perikanan dengan tugas memfasilitasi kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang ada dan mampu memaksimalkan potensi perikanan yang ada.
 - b) Pengembangan kawasan sentra perikanan.
 - c) Pengembangan pembenihan dan bina usaha perikanan.
 - d) Pengembangan budidaya dan bina usaha perikanan.
 - e) Pengembangan perikanan tangkap.
 - f) Pengembangan produk olahan ikan.
 - g) Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan & jembatan menuju kawasan pengembangan perikanan.
 - h) Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan perikanan.
- 9) Meningkatkan industri olahan terutama meningkatkan nilai tambah produk pertanian di Kabupaten Way Kanan terutama diprioritaskan pada komoditas unggulan, dengan beberapa langkah, yaitu :

- a) Mendorong dan menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh industri dengan tugas memfasilitasi kelompok industri mikro dan kecil yang ada dan mampu memaksimalkan potensi yang ada.
 - b) Pengembangan kawasan industri mikro dan kecil terutama yang berbasis pertanian dengan tetap memfasilitasi industri mikro kecil yang berbasis non pertanian.
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan & jembatan menuju kawasan pengembangan industri mikro dan kecil.
 - d) Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan industri mikro dan kecil.
- 10) Memperluas pasar produk di pasar dalam negeri, dilakukan dengan beberapa langkah :
- a) Fasilitasi dan pembinaan penjualan produk (termasuk secara online) untuk pelaku UMKM, petani, koperasi, industri kecil dengan dukungan tenaga pendamping.
 - b) Fasilitasi dan Promosi produk unggulan daerah.
 - c) Fasilitasi dan pembinaan pedagang di pasar pemda, pasar kampung, pertokoan dan warung.
 - d) Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan perdagangan.
- 11) Meningkatkan usaha pariwisata, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :

- a) Mendorong adanya tenaga pendamping pariwisata dengan tugas memfasilitasi kelompok sadar wisata yang ada dan mampu memaksimalkan potensi yang ada.
 - b) Mendorong pengembangan destinasi wisata dengan fokus pada destinasi wisata unggulan.
 - c) Pengembangan promosi wisata dan pengembangan sumberdaya pariwisata.
 - d) Pembangunan dan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan destinasi wisata unggulan.
 - e) Fasilitasi kerjasama antar kampung maupun pihak ketiga untuk mengembangkan kampung wisata.
- 12) Meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi.
 - 13) Meningkatkan usaha transportasi & pergudangan.
 - 14) Meningkatkan kualitas dan efisiensi penanaman modal.
 - 15) Meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :
 - a) Mengembangkan wirausaha mandiri dengan memfasilitasi pelatihan bagi penduduk usia kerja yang menganggur.
 - b) Mendorong penduduk usia kerja yang saat ini hanya mengurus rumah tangga agar dapat berpartisipasi sebagai tenaga kerja produktif dengan diberikan pelatihan.
 - c) Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja melalui Kerjasama dengan Balai

Latihan Kerja (BLK) untuk melatih penduduk usia kerja.

- 16) Meningkatkan kualitas koperasi dan usaha mikro kecil, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :
 - a) Mendorong dan menata kembali peran dan fungsi tenaga penyuluh koperasi dengan tugas memfasilitasi koperasi yang ada dan mampu memaksimalkan potensi yang ada.
 - b) Mendorong pengembangan koperasi menjadi koperasi sehat.
 - c) Mendorong dan menata kembali peran dan fungsi tenaga pendamping usaha mikro dan kecil dengan tugas memfasilitasi usaha mikro dan kecil yang ada & mampu memaksimalkan potensi yang ada.
 - d) Mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil.

Upaya mewujudkan Visi “Way Kanan Unggul Dan Sejahtera” menghadapi berbagai keterbatasan yaitu (1) keterbatasan waktu, (2) keterbatasan sumberdaya manusia, (3) keterbatasan anggaran dan (4) keterbatasan kewenangan, untuk itu perlu skala prioritas dalam pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan menjadi 3 Prioritas Wajib, 3 Prioritas Unggulan dan 3 Prioritas Penunjang. Prioritas Wajib terdiri dari (1) Pendidikan, (2) Kesehatan dan (3) Perlindungan Sosial. Prioritas Unggulan terdiri dari (1) Pertanian, (2) Usaha Mikro Kecil, (3) Pariwisata. Prioritas Penunjang terdiri dari (1) Infrastruktur, (2) Lingkungan Hidup dan (3) Biorokrasi.



Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Way Kanan dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik. Yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis sebelumnya.

Tujuan dari 4 Misi dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 terdapat 4 tujuan, yaitu :

1) Meningkatkan Kualitas Birokrasi

Tujuan Misi-1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah Meningkatkan Kualitas Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada tahun 2026 sebesar 53,93 poin.

2) **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Tujuan Misi-2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup, dengan target pada tahun 2026 sebesar 69,49 poin.

3) **Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia**

Tujuan Misi 3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah, adalah Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, dengan target pada tahun 2026 sebesar 69,55 poin

4) **Meningkatkan Perekonomian Daerah**

Tujuan Misi-4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur, adalah Meningkatkan Perekonomian Daerah yang indikatornya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target selama periode 2021-2026 rata-rata tumbuh sebesar 4,03%.

Sasaran dari 4 Misi dan 4 Tujuan RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 terdapat 49 sasaran. Yang terdiri dari 11 sasaran pada misi-1, 7 sasaran pada misi-2, 17 sasaran pada misi-3 dan 14 sasaran pada misi-4, yaitu :

1) Meningkatkan Kualitas Birokrasi

Upaya meningkatkan kualitas birokrasi dengan target indeks reformasi birokrasi pada tahun 2026 sebesar 53,93 poin, dicapai dgn 11 sasaran, yaitu :

- a) Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai

- Evaluasi SAKIP Kabupaten, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 63,64 poin.
- b) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 91,96 poin.
 - c) Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah, dengan indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 0,750 poin.
 - d) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 9,30 poin.
 - e) Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dengan indikator Nilai Komponen Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 9,50 poin.
 - f) Meningkatnya Kinerja Organisasi, dengan indikator Nilai Komponen Kinerja Organisasi, pd tahun 2026 ditargetkan mencapai 6,45 poin.
 - g) Meningkatnya Inovasi Daerah dengan indikator Indeks Inovasi Daerah, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 45 poin.
 - h) Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Keterbukaan Informasi Publik, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 86 poin.
 - i) Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Nilai

Indeks Pelaksanaan SPBE, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 3,25 poin.

- j) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dengan indikator Persentase Peningkatan Data Satu Data Way Kanan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 20%.
- k) Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah dengan indikator Kualitas Pengelolaan Arsip, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 43,40 poin.

2) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan target indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 69,49 poin, dicapai dengan 7 sasaran, yaitu :

- a) Meningkatnya Kualitas Lahan dengan indikator Indeks Kualitas Lahan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 66,41 poin.
- b) Meningkatnya Kualitas Air dengan indikator Indeks Kualitas Air, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 58,84 poin.
- c) Meningkatnya Kualitas Udara dengan indikator Indeks Kualitas Udara, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 80,55 poin.
- d) Meningkatnya Pengelolaan Sampah dengan indikator Persentase Sampah yang di Kelola, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 100%.
- e) Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 100 poin.

- f) Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3) dengan indikator Persentase Penanganan B3 dan Limbah B3, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 100%.
 - g) Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup dengan indikator Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 39,52%.
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
- Upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan target indeks pembangunan manusia pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 69,55 poin, dicapai dengan 17 sasaran, yaitu :
- a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 70,7 tahun.
 - b) Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 12,48 tahun.
 - c) Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah dengan indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 7,88 tahun.
 - d) Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator Cakupan PMKS yang tertangani, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 11,72%.
 - e) Meningkatnya Budaya Baca dengan indikator Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 70,7%.

- f) Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan indikator Angka Kemiskinan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 9,99%.
- g) Meningkatnya Kualitas Hidup Anak dengan indikator Indeks Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Kategori Madya.
- h) Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk yang rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai dibawah 0,9 %.
- i) Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung dengan indikator Indeks Desa Membangun, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 0,6683 poin.
- j) Meningkatnya Pembangunan Gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 88,54 poin.
- k) Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda dengan indikator Cakupan Pembinaan Pemuda, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 0,09%.
- l) Meningkatnya Kualitas Olahraga dengan indikator Cakupan Pembinaan Olahraga, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 56,67%.
- m) Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah dengan indikator Cakupan Pembinaan Kebudayaan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 79%.
- n) Mengurangi Dampak Bencana dengan indikator Indeks Resiko Bencana, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 131.19 poin.

- o) Meningkatnya Ketertiban Daerah dengan indikator Cakupan Ketertiban, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 65%.
- p) Menurunnya Konflik Sosial dengan indikator Angka Konflik Sosial, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 0 kasus.
- q) Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 74,15 poin.

4) Meningkatkan Perekonomian Daerah

Upaya meningkatkan perekonomian daerah dengan target laju pertumbuhan ekonomi yang targetnya selama periode 2021-2026 rata-rata tumbuh 4,03%, dicapai dengan 14 sasaran, yaitu :

- a) Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 3,92%.
- b) Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 3,83%.
- c) Meningkatnya Usaha Konstruksi dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 4,67%.
- d) Meningkatnya Usaha Perdagangan dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil

- dan Sepeda Motor, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 4,67%.
- e) Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan dgn indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi & Pergudangan, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 4,67%.
 - f) Meningkatnya Usaha Pariwisata dengan indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan mencapai 4,67%.
 - g) Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian dengan indikator Persentase Koperasi Sehat, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 78,43%.
 - h) Meningkatnya Usaha Mikro dengan indikator Persentase usaha mikro per jumlah penduduk, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 7,50%.
 - i) Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal dengan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 6,71 poin.
 - j) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dengan indicator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 75%.
 - k) Berkembangnya Ekonomi Kreatif dengan indicator Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 4,41%.

- l) Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan dengan indicator Persentase Jalan Mantap, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 63,4%.
- m) Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang dengan indicator Ketaatan Terhadap RTRW, pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 100%.
- n) Terkendalinya Inflasi dengan indicator Laju Inflasi, dengan rata-rata dari tahun 2021-2026 ditargetkan berkisar 3-5%.

4. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik.

Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat.

Kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkup luas tidak hanya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Proses optimalisasi atas potensi SDA dan SDM diharapkan agar mampu

membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan. Kedua prasyarat tersebut merupakan inti dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Way Kanan, setelah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, maka selanjutnya diuraikan strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan umum dan program prioritas sebagai program pembangunan daerah. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan resume dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program prioritas merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang



terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD. Selain program prioritas, program yang disajikan ini juga menuangkan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD agar terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMD dengan Renstra SKPD yang dituangkan dalam Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 yang terbagi dalam bidang-bidang urusan, dituangkan dalam tabel sebagai berikut :





Tabel I.16
Program Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021 – 2026

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
Misi-1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik					
1	Meningkatkan Kualitas Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	51,13	53,93
	1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	57,64	63,64
	1.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	20,09	22,5
	1.1.1.1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kabupaten	%	100	100
	1.1.1.2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100





			1.1.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	%	100	100
			1.1.1.4	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu	%	N/A	100
		1.1.2	Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	14,22	15,8
			1.1.2.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Rencana Aksi SKPD Tepat Waktu	%	N/A	100
					Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Kinerja Tepat Waktu	%	N/A	100
					Persentase Pemenuhan Dokumen Pertanggung jawaban Kepala Daerah	%	N/A	100
			1.1.2.2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Pelaporan Berkala Pengukuran Evaluasi Program Pembangunan	%	N/A	100





	1.1.3	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Poin	8,86	10,55	
		1.1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Dokumen Laporan LKIJP Sesuai Standar	%	30	80
	1.1.4	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Internal Pemerintahan Daerah		Nilai Komponen Evaluasi Kinerja Internal	Poin	4,84	6,5	
		1.1.4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Indeks Nilai SAKIP OPD	Poin	47,92	60
	1.1.5	Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja		Nilai Komponen Capaian Kinerja	Poin	9,63	11,05	
		1.1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase IKU Bupati Yang Tercapai	Poin	N/A	65
	1.1.6	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD		Nilai Sakip Opd	Poin	47,92	62,5	
		1.1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP DIKBUD	Poin	60,03	68,03
					Nilai SAKIP DINKES	Poin	61,72	69,72
					Nilai SAKIP PU	Poin	50,07	61,07
					Nilai SAKIP SATPOL PP	Poin	49,16	60,16
					Nilai SAKIP BPBD	Poin	45,78	60,78
	Nilai SAKIP DINSOS				Poin	32,09	60,09	





					Nilai SAKIP DISNAKERTRANS	Poin	57,43	63,93
					Nilai SAKIP PPPA DALDUK KB	Poin	31,89	60,89
					Nilai SAKIP KETAHANAN PANGAN	Poin	52,94	61,94
					Nilai SAKIP LH	Poin	50,26	61,26
					Nilai SAKIP DUKCAPIL	Poin	17,13	60,13
					Nilai SAKIP PMPK	Poin	63,16	69,16
					Nilai SAKIP PERHUBUNGAN	Poin	54,34	62,34
					Nilai SAKIP KOMINFO	Poin	8,78	60,78
					Nilai SAKIP KOPERASI DAN UKM	Poin	31,51	60,51
					Nilai SAKIP PM PTSP	Poin	48,22	62,22
					Nilai SAKIP PORAPAR	Poin	31,33	60,78
					Nilai SAKIP PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Poin	41,73	62,64





					Nilai SAKIP PERIKANAN	Poin	39,59	60,09
					Nilai SAKIP PERKEBUNAN	Poin	34,37	60,37
					Nilai SAKIP TPHP	Poin	60,22	68,22
					Nilai SAKIP INDAG	Poin	41,27	65,5
					Nilai SAKIP SEKRETARIAT DAERAH	Poin	60,5	68,50
					Nilai SAKIP SEKRETARIAT DPRD	Poin	62,17	70,17
					Nilai SAKIP BAPPEDA	Poin	64,24	72,25
					Nilai SAKIP BPKAD	Poin	60,63	68,63
					Nilai SAKIP BAPENDA	Poin	52,71	63,71
					Nilai SAKIP BKPSDM	Poin	46,1	63,1
					Nilai SAKIP INSPEKTORAT	Poin	70,72	72,30
					Nilai SAKIP KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN KASUI	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN BANJIT	Poin	N/A	35





					Nilai SAKIP KECAMATAN BARADATU	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN BAHUGA	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN PAKUAN RATU	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI AGUNG	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN WAY TUBA	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN REBANG TANGKAS	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN GUNUNG LABUHAN	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN NEGARA BATIN	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN NEGERI BESAR	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN BUAY BAHUGA	Poin	N/A	35
					Nilai SAKIP KECAMATAN BUMI AGUNG	Poin	N/A	35





				Nilai SAKIP KECAMATAN UMPU SEMENGGUK	Poin	N/A	35
				Nilai SAKIP BADAN KESBANGPOL	Poin	46,96	54,96
	1.1.7	Meningkatkan Pendampingan & Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Cakupan Pendampingan dan Asistensi SAKIP SKPD	%	N/A	100
	1.1.7.1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Cakupan Pendampingan dan Asistensi SAKIP SKPD	%	N/A	100
1.2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	91,96
	1.2.1	Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran		Skor Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Poin	N/A	19.33
	1.2.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran	%	N/A	100
	1.2.2	Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	Poin	N/A	20
	1.2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Cakupan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD	%	N/A	100





	1.2.3	Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		Skor Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	14.28
		1.2.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Ketepatan waktu & Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah	%	N/A	65
	1.2.4	Menciptakan Kondisi Keuangan Daerah Yang Baik		Skor Kondisi Keuangan Daerah	Poin	N/A	1.28
		1.2.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Kondisi Keuangan Daerah	Poin	N/A	1.28
	1.2.5	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Poin	15	15
		1.2.5.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Keuangan	Opini	WTP	WTP
		1.2.5.1	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	60	85,00
	1.3	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,563	0,750





		1.3.1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	%	11	9
				1.3.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%
				Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	N/A	6,6
		1.3.1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp.	27.650.000	35,945,000
				Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp.	186.135.000	241.975.500
				Retribusi Pelayanan Pasar/Sewa Peralatan	Rp.	166.141.000	205.111.166
				Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar	Rp.	95.528.000	124,186,400
				Retribusi Tera Ulang Timbangan	Rp.	0	12.600.000
				Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp.	0	126,000,000





					Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alsintan)	Rp.	134.400.000	169.344.000
					Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	Rp.	160.101.000	201.992.424
					Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa)	Rp.	6.467.750	8.408.076
					Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih)	Rp.	25.472.250	30.764.753
					Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat)	Rp.	20.000.000	26.000.000
					Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp.	541.571.549	583.675.359
					Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah/ Penjualan Bibit/Benih Ikan	Rp.	12.000.000	15.600.000





				Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp.	1.000.000	6.000.000
				Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp.	38.800.000	50.440.000
				Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Lahan)	Rp.	19.000.000	27.412.532
		1.3.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	%	100	100
1.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik	Poin	9,18	9,30
	1.4.1	Terhadap Standar Pelayanan Publik		Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Dari Ombudsman	Poin	97,12	
		1.4.1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas PM PTSP	Poin		90
		1.4.1.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KES. MASYARAKAT	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Din Kes	Poin	97	100



		1.4.1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Perhubungan	Poin	73	80
		1.4.1.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Sosial	Poin	92	100
		1.4.1.5	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Dilingkup DisNakerTrans	Poin	100	100
		1.4.1.6	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap pembuatan KK, KTP dan KIA	Poin	100	100
		1.4.1.7	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan	Poin	100	100
		1.4.1.8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas TPHP	Poin	33,5	40
		1.4.1.9	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai Kepatuhan Terhadap Standa Pelayanan Publik Dilingkup Kesbangpol	Poin	100	100





		1.4.2	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Survei Eksternal Pelayanan Publik	%	3,67	5,39
		1.4.2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM Pelayanan Publik Yang telah mengikuti diklat terkait pelayanan	%	60	64
		1.4.2.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan SOP Pelayanan Publik Yang Di Evaluasi	%	60	85
				Cakupan Pelayanan Publik yang di Survei	%	100	100
		1.4.2.3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Anggota DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Poin		74.50
		1.4.3	Pemetaan, Identifikasi dan Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Berkala	Persentase Produk Hukum yang harmonis	%	100	100
		1.4.3.1	PROGRAM PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan evaluasi produk hukum	%	0	100
				Persentase peningkatan produk hukum daerah	%	1.286	5
				Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	100





	1.4.4	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pelayanan Publik	Cakupan Pendampingan dan Asistens Kualitas Pelayanan Publik	%	43,38	64,51
	1.4.4.1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pendampingan dan Asistens Kualitas Pelayanan Publik	%	43,38	64,51
1.5	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN		Nilai Komponen Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Poin	9,38	9,50
	1.5.1	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP	Poin	3	
	1.5.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan OPD dengan SPIP Terdefinisi	%	48,38	67,73
	1.5.2	Meningkatkan Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Integritas SPI	Poin	0	70
	1.5.2.1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengawasan Dlm Rangka Pencegahan Praktek Korupsi	%	48,38	67,73
	1.5.3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Jasa	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang & Jasa	Poin	0	40
	1.5.3.1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Pengelolaan Kualitas Pengadaan Barang & Jasa	Poin	0	40
1.6	Meningkatnya Kinerja Organisasi		Nilai Komponen Kinerja Organisasi	Poin	4,64	6,45





	1.6.1	Penataan Organisasi Perangkat Daerah		Persentase Indikator Kinerja Utama SKPD Yang Tercapai	%	75	80	
		1.6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Peta Bisnis Pencapaian Visi Misi	%	70	100
	1.6.2	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	58	65	
		1.6.2.1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Cakupan Tertib Administrasi Kepegawaian	%		90
		1.6.2.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%		88
		1.6.2.3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan	Poin	81,56	87,56
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Poin	75,71	81,71
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pekerjaan Umum	Poin	75,47	81,47
	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Satpol PP				Poin	35,42	41,42	
				Indeks Profesionalitas ASN BPBD	Poin	51,66	57,66	
				Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial	Poin	55,17	61,17	





					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Nakertrans	Poin	37,5	43,5
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas PPPADALDUK KB	Poin	50,34	56,34
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Ketahanan Pangan	Poin	52,91	58,91
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup	Poin	53,09	59,09
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Dukcapil	Poin	49,3	55,3
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK	Poin	51,77	57,77
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Poin	48,5	54,5
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo	Poin	48,15	54,15
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi UKM	Poin	45,69	51,69
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMPTSP	Poin	55	61
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Porapar	Poin	50,8	56,8





					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip	Poin	66,11	72,11
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perikanan	Poin	46,31	52,31
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perkebunan	Poin	40,5	46,5
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas TPHP	Poin	71,66	77,66
					Indeks Profesionalitas ASN Dinas Indag	Poin	49,53	55,53
					Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Daerah	Poin	62,05	68,05
					Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD	Poin	61,09	67,09
					Indeks Profesionalitas ASN BAPPEDA	Poin	55,91	61,91
					Indeks Profesionalitas ASN BPKAD	Poin	83,09	89,09
					Indeks Profesionalitas ASN BAPENDA	Poin	58,14	64,14
					Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM	Poin	54,03	60,03





					Indeks Profesionalitas ASN INSPEKTORAT	Poin	78	84
					Indeks Profesionalitas ASN Kec. Blambangan Umpu	Poin	59,11	65,11
					Indeks Profesionalitas ASN Kec. Kasui	Poin	45,5	51,5
					Indeks Profesionalitas ASN Kec. Banjit	Poin	48,33	54,33
					Indeks Profesionalitas ASN Kec. Baradatu	Poin	45,42	51,42
					Indeks Profesionalitas ASN Kec. Bahuga	Poin	47,33	53,33
					Indeks Profesionalitas ASN Kec. Pakuan Ratu	Poin	43,1	49,1
					Indeks Profesionalitas ASN Kec. Negeri Agung	Poin	45	51
					Indeks Profesionalitas ASN Kec. Way Tuba	Poin	43,88	49,88
					Indeks Profesionalitas ASN Kec. Rebang Tangkas	Poin	33,41	39,41
					Indeks Profesionalitas ASN Kec. Gunung Labuhan	Poin	45,55	51,55





				Indeks Profesionalitas ASN Kec. Negara Batin	Poin	58,8	64,8
				Indeks Profesionalitas ASN Kec. Negeri Besar	Poin	49,33	55,33
				Indeks Profesionalitas ASN Kec. Buay Bahuga	Poin	42,33	48,33
				Indeks Profesionalitas ASN Kec. Bumi Agung	Poin	38,88	44,88
				Indeks Profesionalitas ASN Kec. Umpu Semenguk	Poin	55	61
				Indeks Profesionalitas ASN KESBANGPOL	Poin	48,82	54,82
	1.6.3	Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi Kinerja Organisasi		Cakupan Pendampingan dan Asistens Kualitas Kinerja Organisasi	%	56,25	87,5
	1.6.3.1	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Cakupan Pendampingan dan Asistens Kualitas Kinerja Organisasi	%	56,25	87,5
	1.6.4	Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
	1.6.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan	%	100	100





					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran Dinas PU	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sat Pol PP	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran Dinas BPBD	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Nakertrans	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PPPA DALDUK KB	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan	%	100	100





					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Dukcapil	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Koperasi dan UKM	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PM PTSP	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Porapar	%	100	100





					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perikanan	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perkebunan	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas TPHP	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Indag	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100	100





					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BAPPEDA	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BPKAD	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BAPENDA	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran BKPSDM	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Blambangan Umpu	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Kasui	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Banjit	%	100	100





					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Baradatu	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Bahuga	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Pakuan Ratu	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Negeri Agung	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Way Tuba	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Rebang Tangkas	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Gunung Labuhan	%	100	100
					Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Negara Batin	%	100	100





				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Negeri Besar	%	100	100
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Buay Bahuga	%	100	100
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Bumi Agung	%	100	100
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Umpu Semenguk	%	100	100
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kesbangpol	%	100	100
	1.6.5	Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Pemerintahan		Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Poin	2,98	3,7
	1.6.5.1	PROGRAM PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Penataan Adm. Pemerintahan	%		100
				Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	%		100





				Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Poin	2,98	3,7
	1.6.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan		Cakupan Pelayanan Menunjang Kinerja Pimpinan	%	100	
	1.6.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Adm. Keuangan dan Operasional KDh dan WKDh	%	100	100
				Cakupan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	100
				Cakupan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100
				Cakupan Pelayanan Administrasi Umum dan Perlengkapan	%	100	100
	1.7	Meningkatnya Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	Poin	419	45
	1.7.1	Meningkatkan Inovasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	%	5	10
	1.7.1.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	%	5	10





	1.7.2	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan		Persentase Peningkatan Penelitian dan Pengembangan	%	1	1
	1.7.2.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Peningkatan Penelitian dan Pengembangan	%	1	1
1.8	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	80	86
	1.8.1	Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik		Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	%	80	86
	1.8.1.1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	%	80	86
	1.8.2	Meningkatkan Keamanan Informasi		Indeks Keamanan Informasi	Poin	n/a	350
	1.8.2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Indeks Keamanan Informasi	Poin	n/a	350
1.9	Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE	Poin	2,05	3,25
	1.9.1	Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal		Indeks Domain Kebijakan Internal	Poin	2	3,25
	1.9.1.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Indeks Domain Kebijakan Internal	Poin	2	3,25





	1.9.2	Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	2,18	3,25		
		1.9.2.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	2,18	3,25	
	1.9.3	Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE		Indeks Domain Manajemen SPBE	Poin	2	3,25		
		1.9.3.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Indeks Domain Manajemen SPBE	Poin	2	3,25	
	1.9.4	Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE		Indeks Domain Layanan SPBE	Poin	2	3,25		
		1.9.4.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Indeks Domain Layanan SPBE	Poin	2	3,25	
	1.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data			Cakupan Satu Data Way Kanan	%	0	20	
		1.10.1	Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan		Persentase Peningkatan Data Pada Satu Data Way Kanan	%	0	15	
			1.10.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	0	15
			1.10.1.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	0	15





		1.10.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	0	15
		1.10.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	0	100
		1.10.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	0	100
1.11	Meningkatnya Kualitas Arsip Daerah			Kualitas Pengelolaan Arsip	Poin	32,39	43,40
	1.11.1	Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis Secara Baku Bagi Pencipta Arsip		Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Scr Baku	%	n/a	67,39
		1.11.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yang Mengelola Arsip Dinamis Scr Baku	%	n/a	67,39
	1.11.2	Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Yang Dilestarikan		Persentase Arsip Statis Daerah Yang Di Lestarikan	%	n/a	30
		1.11.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip statis yang telah dikelola	%	n/a	30
		1.11.2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	%	n/a	30





Misi-2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	63,93	66,49
2.1	Meningkatnya Kualitas Lahan		Indeks Kualitas Lahan	Poin	56,37	66,41
2.1.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan		Persentase Luas Penanaman Pohon di Lahan Kritis	%	N/A	20
2.1.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Peningkatan Jumlah Pohon Yang Ditaman Di Wilayah Di Luar Kawasan Hutan	%	N/A	20
2.1.2	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	%	N/A	30
2.1.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	%	N/A	30
2.1.3	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pelestarian Lahan untuk Masyarakat		Cakupan Masyarakat Yang Di Diklat dan Disuluh Pelestarian lahan	%	N/A	100
2.1.3.1	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Kerusakan Lahan	%		10
2.2	Meningkatnya Kualitas Air		Indeks Kualitas Air	Poin	58,89	58,84





	2.2.1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan		Persentase Penanaman Pohon Di Sempadan Sungai	%	N/A	20	
		2.2.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Sungai Yang Ditangani	%	N/A	90
		2.2.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air	%	0	5
		2.2.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	0	5
	2.2.2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Perairan untuk Masyarakat			Cakupan Masyarakat Yang Didiklat dan Disuluh Dalam Pengendalian Pencemaran Air	%		100
		2.2.2.1	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Air	%		10
	2.3	Meningkatnya Kualitas Udara			Indeks Kualitas Udara	Poin	79,05	80,55
2.3.1		Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Udara		Persentase Penanaman Pohon Di Titik Pencemar Udara	%		20	





		2.3.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Meningkatnya Jumlah Usaha dan Atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencemaran Udara	%		80
	2.3.2	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Hidup Udara untuk Masyarakat		Cakupan Masyarakat Yang Didiklat dan Disuluh Dalam Pengendalian Pencemaran Udara	%		100
		2.3.2.1	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Diklat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara	%		10
2.4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah			Timbunan Sampah Yang Dikelola	Ton	14,643	20,987
	2.4.1	Meningkatnya cakupan Pengurangan Sampah		Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	%	22,03	30,02
		2.4.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penurunan Volume Sampah	%	2,01	2,02
		2.4.1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terangkut	%	n/a	100





2.5	Terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup		Indeks Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan	Poin	25	100	
	2.5.1	Pemenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		Persentase Penanganan Volume Sampah	Poin	25	
		2.5.1.1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	%	100
	2.5.2	Pemenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten		Persentase Pemenuhan Dokumen KLHS	%	0	100
		2.5.2.1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Pemenuhan Dokumen KLHS	%	0
	2.6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)		Persentase Penanganan Limbah B3	Poin	21,43	100
2.6.1		Mengendalikan Penyimpanan Sementara Limbah B3		Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	21,43	
		2.6.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	21,43
2.7	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup		Cakupan Pengawasan Lingkungan Hidup	Poin	39,52	39,52	
	2.7.1	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	%	39,52	





		2.7.1.1	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	%	0	100
		2.7.1.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	%	18,87	100
Misi-3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah							
3	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,44	69,55
	3.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	69,40	70,7
		3.1.1	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	101	183
		3.1.1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	93	100
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	91,7	100
		3.1.2	Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	1.14	16





		3.1.2.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	95	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	91,2	100
		3.1.3	Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting	%	5,95	14
				3.1.3.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK)	%
		Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	1,9		2	
		Persentasi Balita Yang ditimbang naik berat badannya (N/D)	%	88,8		90	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	89		100	





		3.1.3.2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	72,6	90
	3.1.4	Menurunkan Angka Kesakitan		Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru (Success Rate)	%	90	90
		3.1.4.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	38	100
				Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	85	100
				Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	79	100
				Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	%	68	100





				Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	53	100
				Persentase Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	29	100
				Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	49	100
		3.1.4.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten	%	100	100
				Persentase Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	%	100	100
	3.1.5	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan		Indeks Akreditasi Puskesmas	Poin	2.1	2.75
		3.1.5.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas Tercukupi Sarana Puskesmas (85%)	%	80	90





				Persentase Puskesmas Tercukupi Prasarana Puskesmas (85%)	%	5	30
				Persentase Puskesmas Tercukupi Alat Kesehatan (85%)	%	0	25
				Persentase Puskesmas Tersedia Obat dan Vaksin	%	100	100
		3.1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	%	20	70
		3.1.5.3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	%	50	75
				Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	%	42	267





		3.1.5.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	%		65
		3.1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas dengan Pengeolaan Keuangan BLUD	%	95	100
	3.1.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSUD ZAPA		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	73,85	80
		3.1.6.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Status Akreditasi Rumah Sakit	Katagori	Perdana	Paripurna
		3.1.6.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pegawai Rumah Sakit yang telah mengikuti Diklat BHD	%	81	100
		3.1.6.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase bagian Rumah Sakit yang telah tercakup PKRS	%	50	100
	3.1.7	Meningkatkan Kualitas Air Minum		Persentase Peningkatan Layanan SPAM	%	n/a	6
		3.1.7.1	PROGRAM PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	%	n/a	6
	3.1.8	Meningkatkan Kualitas Perumahan		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	n/a	6





		3.1.8.1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	n/a	6
		3.1.8.2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani	%	n/a	6
3.2	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,36	12,48
	3.2.1	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini		APK PAUD	Poin	39,35	42,5
		3.2.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	%	n/a	100
				Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	%	n/a	100
				Cakupan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Dalam Kondisi Baik	%	51,62	66,37
				Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dalam Kondisi Baik	%	0	64,90





				Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD	%	n/a	91,63
				Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD	%	n/a	44,25
				Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD	%	n/a	100
				Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD	%	n/a	73,75
				Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD	%	n/a	100
				Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	%	n/a	54,57
				Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	%	n/a	73,75
		3.2.1.2	PROGRAM PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	n/a	66,37
		3.2.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Akreditasi PAUD	Poin	25,96	50,15



3.2.2		Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar	APK SD	Poin	107,05	108,5
3.2.2.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD	%	n/a	62,5	
		Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	%	100	100	
		Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	65,76	74,53	
		Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	n/a	52,55	
		Cakupan Perpustakaan Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	55,73	73,25	
		Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik	%	n/a	38,22	





					Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	n/a	63,69
					Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD	%	n/a	81,63
					Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD	%	n/a	79,62
					Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD	%	n/a	62,5
					Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD	%	100	100
					Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	%	100	100
					Cakupan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD	%	n/a	77,71





				Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	%		79,62
				Angka Akreditasi Sekolah Dasar	Poin	99,36	100
				Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	%	n/a	87,58
		3.2.2.2	PROGRAM PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	99,36	100
	3.2.3	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Menengah Pertama		APK SMP	Poin	90,18	92,5
		3.2.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP	%	n/a	60,71
				Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP	%	100	100
				Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	62,40	79,89





					Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	n/a	82,42
					Cakupan Perpustakaan Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	65,9	90,11
					Cakupan Laboratorium Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	68,1	86,81
					Cakupan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik	%	63,7	80,2
					Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	n/a	51,6
					Cakupan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik	%	n/a	56,0
					Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Kategori Kantin Sehat	%	n/a	54,9





					Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	n/a	60,4
					Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP	%	n/a	74,40
					Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP	%	n/a	60,71
					Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	%	n/a	83,52
					Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	%	100	100
					Cakupan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	%	100	100
					Cakupan Muatan Lokal Pendidikan SMP	%	n/a	80,66
					Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	%	n/a	93,41
					Angka Akreditasi SMP	Poin	96,59	100





		3.2.3.2	PROGRAM PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	n/a	84,62
	3.2.4	Meningkatkan Fasilitas Kerjasama Pendidikan Tinggi		Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	%	10	100
		3.2.4.1	PROGRAM PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi / Vokasi	%	10	100
		3.2.4.2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rehabilitasi Bangunan	%	0	50
3.3	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,70	7,88
	3.3.1	Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan		Indeks Pendidikan Kesetaraan	%	n/a	3,19
		3.3.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	%	n/a	24,71
3.4	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Cakupan PMKS yang tertangani	%	5,72	11,72
	3.4.1	Melakukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	18.18	24.18





			3.4.1.1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	17.41	23.41	
			3.4.1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	6.7	11.7	
			3.4.1.3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	4.8	10.8	
						Cakupan Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial	%	1,54	7,54
						Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial	%	1.21	7.21
						Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial	%	1,52	7,52





				Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Sosial	%	0	6
				Cakupan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial	%	1,75	7,75
				Cakupan Rehabilitasi Sosial Pemulung Di Luar Panti Sosial	%	12,54	18,54
		3.4.1.4	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	%	0,04	6,04
		3.4.1.5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial	%	0,02	6,02
	3.4.2	Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100
		3.4.2.1	PROGRAM PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Fasilitasi Bina Mental Spiritual	%	100	100





				Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	
3.5	Meningkatnya Budaya Baca			Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan	%	n/a	70,9	
3.5.1	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Daerah			Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten Untuk Perpustakaan Daerah	%		90	
3.5.1.1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	%		100	
					Cakupan Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	%		98
					Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	%		100
					Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	%		90
					Tingkat Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Per Hari	%		96





				Perentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Komunikasi Informasi dan Edukasi Perpustakaan	%		20
				Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	%		66
	3.5.2	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar		Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten Untuk Perpustakaan Pendidikan Dasar	%		69
		3.5.2.1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan	%		72
				Cakupan Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	%		72
				Tingkat Kunjungan Siswa Ke Perpustakaan Per Hari	%		52
				Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	%		90
				Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan	%		10





3.6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Angka Kemiskinan	%	12,90	9,99		
	3.6.1	Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan		Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kemiskinan	%	100	100	
		3.6.1.1	PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL		Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi	%	12,7	9,7
		3.6.1.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Cakupan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	%	100	100
	3.6.2	Optimalisasi Program Perlindungan Sosial		Cakupan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Miskin	%	2,45	8,45	
		3.6.2.1	PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL		Cakupan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	%	1,02	7,02
					Cakupan Bantuan Sosial Tunai (BST)	%	1,39	7,39
					Cakupan Bantuan Sosial Bedah Rumah	%	0,04	6,04
	Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional				%	47,3	47,28	





			3.6.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Daerah	%	6,9	7,7	
			3.6.2.3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Bantuan Sosial Penanganan kawasan permukiman kumuh	%	24,5	60	
			3.6.2.4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Bantuan Sosial Berkurangnya prosentase backlog rumah	%	n/a	10,08	
			3.6.2.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	%	n/a	80	
			3.6.3	Pemberdayaan Masyarakat Miskin		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	%	n/a	2,08
			3.6.3.1	PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL		Cakupan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	%	n/a	0.15
			3.6.3.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Pangan	%	n/a	0.15
						Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Tanaman Hortikultura	%	n/a	0.15





				Cakupan Peternak Miskin Yang Dibina Budidaya Peternakan	%	n/a	0.15
				Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Perkebunan	%	n/a	0.15
		3.6.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petani Miskin Yang Diberdayakan Dalam Budidaya Ikan	%	n/a	0.15
		3.6.3.4	PROGRAM PENGOLAHAN & PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pengolahan Ikan	%	n/a	0.15
				Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Pemasaran Ikan	%	n/a	0.15
		3.6.3.5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Industri Pengolahan	%	n/a	0.15
		3.6.3.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro	%	n/a	0.15



		3.6.3.7	PROGRAM PELATIHAN KERJA & PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja	%	0.15	0.15	
		3.6.3.8	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	%	0.15	0.15	
		3.6.3.9	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Keluarga Miskin Yang Diberdayakan	%	0.15	0.15	
		3.6.3.10	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Masyarakat Miskin Di Kampung Yang Diberdayakan	%	0.15	0.15	
	3.6.4	Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan dengan Berbagai Pihak			Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Sinergi Dengan Berbagai Pihak	%		0.30
		3.6.4.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana Desa	%		0.15
		3.6.4.1	PROGRAM PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT		Cakupan Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Melalui Dana CSR Pihak Swasta	%		0.15
	3.7	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak			Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Madya





		3.7.1	Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	40	90
		3.7.1.1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	%	40	90
				Persentase Peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	40	90
		3.7.2	Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak	Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100
		3.7.2.1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	%	100	100
		3.7.3	Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%	n/a	25
		3.7.3.1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%	n/a	25





3.8	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.51	0.9		
	3.8.1	Meningkatkan Pengendalian Penduduk		Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%	1.51	0.9	
		3.8.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%	0.9	
	3.8.2	Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana		Cakupan Peserta KB Aktif	%	81,4	83,9	
		3.8.2.1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)	%	11	8
	3.8.3	Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera		Cakupan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	10	50	
		3.8.3.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	%	10	50
					Persentase Pembinaan Bina Kluarga Lansia (BKL)	%	10	50
					Persentase Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	%	10	50





				Persentase Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga	%	10	50
3.9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung			Indeks Desa Membangun	Poin	0,6541	0,6683
	3.9.1	Meningkatkan Kualitas Kampung		Indeks Kategori Kampung	Poin	3,00	3,29
		3.9.1.1	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Penataan Kampung	%		23
		3.9.1.2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Kerjasama Kampung	%		25
		3.9.1.3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Tertib Administrasi Kampung	%		100
				Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	%		100
		3.9.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kampung	%		66
	3.9.2	Meningkatkan Kualitas Kampung Eks Transmigrasi		Indeks Desa Membangun Kampung Transmigrasi	Poin	0,6699	0,7111





	3.9.2.1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Masyarakat Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi	Kelompok	55	11
	3.9.3	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Blambangan Umpu	Indeks Desa Membangun Kecamatan Bl. Umpu	Poin	0,6228	0,6611
	3.9.3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
	3.9.3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65
	3.9.3.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
	3.9.3.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
	3.9.3.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
	3.9.4	Meningkatkan Kualitas Kecamatan Banjit	Indeks Desa Membangun Kecamatan Banjit	Poin	0,6202	0,6584





			3.9.4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
			3.9.4.2	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65
			3.9.4.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
			3.9.4.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
			3.9.4.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
		3.9.5	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Baradatu		Indeks Desa Membangun Kecamatan Baradatu	Poin	0,6738	0,7153
			3.9.5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
			3.9.5.2	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65





		3.9.5.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
		3.9.5.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
		3.9.5.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
	3.9.6	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Kasui		Indeks Desa Membangun Kecamatan Kasui	Poin	0,6494	0,6893
		3.9.6.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
		3.9.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65
		3.9.6.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
		3.9.6.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65





		3.9.6.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
	3.9.7	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Pakuan Ratu		Indeks Desa Membangun Kecamatan Pakuan Ratu	Poin	0,6397	0,6791
		3.9.7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
		3.9.7.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65
		3.9.7.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
		3.9.7.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
		3.9.7.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
	3.9.8	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Bahuga		Indeks Desa Membangun Kecamatan Bahuga	Poin	0,6414	0,6809





		3.9.8.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
		3.9.8.2	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65
		3.9.8.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	%	60	65
		3.9.8.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
		3.9.8.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
	3.9.9	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Way Tuba		Indeks Desa Membangun Kecamatan Way Tuba	Poin	0,6531	0,6933
		3.9.9.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
		3.9.9.2	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65





			3.9.9.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
			3.9.9.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
			3.9.9.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
			3.9.10	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Negeri Agung	Indeks Desa Membangun Kecamatan Negeri Agung	Poin	0,6276	0,6662
			3.9.10.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
			3.9.10.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65
			3.9.10.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
			3.9.10.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65





		3.9.10.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
	3.9.11	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Gunung Labuhan		Indeks Desa Membangun Kecamatan Gn. Labuhan	Poin	0,6510	0,6910
		3.9.11.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
		3.9.11.2	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65
		3.9.11.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
		3.9.11.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
		3.9.11.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
	3.9.12	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Rebang Tangkas		Indeks Desa Membangun Kecamatan Rb. Tangkas	Poin	0,6830	0,7250





		3.9.12.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
		3.9.12.2	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65
		3.9.12.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
		3.9.12.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
		3.9.12.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
	3.9.13	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Negara Batin		Indeks Desa Membangun Kecamatan Negara Batin	Poin	0,6621	0,7028
		3.9.13.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
		3.9.13.2	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65



			3.9.13.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
			3.9.13.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
			3.9.13.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
		3.9.14	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Negeri Besar		Indeks Desa Membangun Kecamatan Negeri Besar	Poin	0,6480	0,6879
		3.9.14.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65	
		3.9.14.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65	
		3.9.14.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65	
		3.9.14.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65	





		3.9.14.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
	3.9.15	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Buay Bahuga		Indeks Desa Membangun Kecamatan Buay Bahuga	Poin	0,6414	0,6809
		3.9.15.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
		3.9.15.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65
		3.9.15.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
		3.9.15.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
		3.9.15.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
	3.9.16	Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Bumi Agung		Indeks Desa Membangun Kecamatan Bumi Agung	Poin	0,6647	0,7056





		3.9.16.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
		3.9.16.2	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65
		3.9.16.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
		3.9.16.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
		3.9.16.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
	3.9.17		Meningkatkan Kualitas Kampung Di Kecamatan Umpu Semenguk	Indeks Desa Membangun Kecamatan Umpu Semenguk	Poin	0,6529	0,6931
		3.9.17.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	60	65
		3.9.17.2	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kampung dan Kelurahan Yang Diberdayakan	%	60	65



		3.9.17.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	%	60	65
		3.9.17.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	60	65
		3.9.17.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	%	60	65
3.10	Meningkatnya Pembangunan Gender			Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,19	88,54
	3.10.1	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	65,3	69,32
		3.10.1.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang telah menerapkan ARG	%	15	45,00
	3.10.2	Mengurangi Kejadian Kekerasan Terhadap Perempuan		Angka Kekerasan Perempuan	Kasus	28	0
		3.10.1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus Kekerasan pada Perempuan	%	100	100
3.11	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemuda			Cakupan Pembinaan Pemuda	%	n/a	0,09
	3.11.1	Meningkatkan Pembinaan Wirausaha Muda		Persentase Wirausaha Muda	%	n/a	26,43





	3.11.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula	%	n/a	17.62
	3.11.2	Meningkatkan Pembinaan Pemuda Pelopor	Persentase Pemuda Pelopor	%	n/a	52,86
	3.11.2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor	%	n/a	13.22
	3.11.3	Meningkatkan Pembinaan Pemuda Kader	Persentase Pemuda Kader	%	n/a	29,41
	3.11.2.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor	%	n/a	100
	3.11.4	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	70.58 %	100
	3.11.2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina	%		5.88
	3.11.5	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kepramukaan	Persentase Gugus depan yang ter akreditasi	%	80	63,33
	3.11.2.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Gugus depan	%	80	4.13
3.12		Meningkatnya Kualitas Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	29,17	56,67
	3.12.1	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Prestasi	Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi	%	29.17	62.50
	3.12.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi	%		16.67





	3.12.2	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Pendidikan		Persentase Pembinaan Olahraga Pendidikan	%	n/a	62.50	
		3.12.2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan	%	n/a	12.50	
	3.12.3	Meningkatkan Pembinaan Olahraga Rekreasi		Persentase Pembinaan Olahraga Rekreasi	%	n/a	100	
		3.12.3.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	%	n/a	33.33	
	3.13	Meningkatnya Pembinaan Budaya Daerah			Cakupan Pembinaan Kebudayaan	%	n/a	80
		3.13.1	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Daerah		Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	%	n/a	80
			3.13.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	%	n/a	80
		3.13.1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA & SASTRA	Cakupan Pembinaan Bahasa dan Sastra Yang Penuturannya di Way Kanan	%	n/a	60	
		3.13.1	Meningkatkan Pembinaan Lembaga Adat		Cakupan Pembinaan Lembaga Adat	%	100	100
			3.13.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Lembaga Adat	%	100	100



	3.13.2	Melestarikan Kesenian Tradisional		Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	%	n/a	80	
		3.13.2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	%	n/a	80
	3.13.3	Pembinaan Sejarah Lokal		Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	%	n/a	75	
		3.13.2.1	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal	%	n/a	75
	3.13.4	Melestarikan Dan Mengelola Cagar Budaya		Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	n/a	88,10	
		3.13.2.1	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	n/a	88,10
	3.14	Mengurangi Dampak Bencana			Indeks Resiko Bencana	Poin	131,19	131,19
		3.14.1	Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana	%	n/a	100
			3.14.1.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana	%	n/a
		3.14.2	Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana		Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani	%	n/a	100
			3.14.1.2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani	%	n/a
		3.14.3	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	n/a	100
3.14.1.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	n/a	100		



		3.14.4	Meningkatkan Penanganan Bencana	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Bencana Sosial	%	61.44	67.44
		3.14.4.1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Bencana Sosial	%	61.44	67.44
				Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	%	2	8
		3.14.5	Pengurangan Wilayah Rawan Bencana	Persentase Penurunan Wilayah Dampak Bencana Banjir	%	0	5
				3.14.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengurangan Wilayah Banjir	%
		3.14.6	Membangun/Merehabilitasi Rumah Korban Bencana	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	%	0	5
				3.14.6.1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	%
		3.14.7	Meningkatkan Penanganan Jalan Pada Saat Tanggap Darurat Bencana	Cakupan Jalan Yang Ditangani Pada Saat Tanggap Darurat	%	n/a	5



		3.14.7.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan Jalan Yang Ditangani Pada Saat Tanggap Darurat	%	n/a	5
	3.14.8	Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Menit	30	30
		3.14.8.1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN & PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Menit	30	30
3.15	Meningkatnya Ketertiban Daerah			Cakupan Ketertiban	Poin	n/a	60
	3.15.1	Meningkatkan Penegakan Perda		Persentase Penegakan PERDA	%	2,5	100
		3.15.1.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	%	2,5	100
	3.15.2	Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Keindahan		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan)	%	100	100
		3.15.2.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan)	%	100	100
	3.15.3	Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten		Cakupan Peningkatan Kapasitas PPNS Kab.	%	100	100





		3.15.3.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Peningkatan Kapasitas PPNS Kab.	%	100	100
3.16	Menurunnya Konflik Sosial			Angka Konflik Sosial	Kasus	0	0
	3.16.1	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	20	100
	3.16.1.1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan Kecamatan Yang Menerima Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara	Kecamatan	15	15
	3.16.2	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Cakupan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100
	3.16.1.1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama	Kecamatan	15	15
	3.16.3	Pemberdayaan & Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Cakupan Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	16,67	100





	3.16.3.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tersedianya data organisasi kmasyarakatatan	Orkemas	10	60
	3.16.4	Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Peningkatan Demokrasi	Cakupan Pemanfaatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	%	100	100
	3.16.4.1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kecamatan yang menerima pembinaan pendidikan Politik	%	100	100
	3.16.5	Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial	%	20	100
	3.16.5.1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	dokumen	12	60
	3.16.6	Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	0	100
	3.16.6.1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%		100
	3.16.6.2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah	%		4





		3.16.6.3	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	%		4
		3.16.6.4	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%		8
		3.16.6.5	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penerbitan Izin membuka tanah	%		100
		3.16.6.6	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam suatu daerah kabupaten	%		8
3.17	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah			Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,55	74,15
	3.17.1	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	%	20,59	35,29
		3.17.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	%	20,59	35,29
	3.17.2	Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	87,4	86,6
		3.17.2.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	87,4	89,7





	3.17.3	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten	%	59,367	59,378
	3.17.3.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/ Kota (CBPK)	%	59,365	59,378
	3.17.4	Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	18,94	5,29
	3.17.4.1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	18,94	3,52
	3.17.5	Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	%	72,2	87,8
	3.17.5.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	%	72,2	87,8
MISI-4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur						
4	Meningkatkan Perekonomian Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,16	4,03
	4.1	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,74	3,92
	4.1.1	Meningkatkan Produksi Padi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi	%		1,46
	4.1.1.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	171.840	188.690





		4.1.1.2	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	171.840	188.690	
		4.1.1.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Padi	Ton	171.840	188.690	
		4.1.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Indeks Pertanaman Padi	Kali Tahun	2,01	2,071	
		4.1.1.5	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	%		100	
		4.1.2	Meningkatkan Produksi Padi Gogo		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi Gogo	%	2	6,66
		4.1.2.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Padi Gogo	Ton	101.920	153.172	
		4.1.2.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Padi Gogo	Ton	101.920	153.172	
		4.1.2.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Padi Gogo	Ton	101.920	153.172	
		4.1.3	Meningkatkan Produksi Padi Organik		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi Organik	%	30	30
		4.1.3.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Padi Organik	Ton	65	185	





	4.1.3.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Padi Organik	Ton	65	185
	4.1.3.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Padi Organik	Ton	65	185
	4.1.4	Meningkatkan Produksi Jagung	Produksi Jagung	Ton	114.675	253.875
	4.1.4.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Jagung	Ton	114.675	253.875
	4.1.4.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Jagung	Ton	114.675	253.875
	4.1.4.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Jagung	Ton	114.675	253.875
	4.1.5	Meningkatkan Produksi Ubi Kayu	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Ubi Kayu	%		7,20
	4.1.5.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Ubi Kayu	Ton	386.683	646.042
	4.1.5.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Ubi Kayu	Ton	386.683	646.042
	4.1.5.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Ubi Kayu	Ton	386.683	646.042
	4.1.6	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lainnya	%		4,88





		4.1.6.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Pangan Lainnya	Ton	717	1024,2474
		4.1.6.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Pangan Lainnya	Ton	717	1024,2474
		4.1.6.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Pangan Lainnya	Ton	717	1024,2474
	4.1.7	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Semusim	%		0,74
		4.1.7.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Semusim	Ton	5058,45	5286,45
		4.1.7.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Semusim	Ton	5058,45	5286,45
		4.1.7.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Semusim	Ton	5058,45	5286,45
	4.1.8	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Organik Semusim	%		20
		4.1.8.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Organik Semusim	Ton	n/a	30
		4.1.8.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Organik Semusim	Ton	n/a	30
		4.1.8.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Organik Semusim	Ton	n/a	30





	4.1.9	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Semusim		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Buah-Buahan Semusim	%		0,72
		4.1.9.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Buah Semusim	Ton	1.472	1.542
		4.1.9.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Buah Semusim	Ton	1.472	1.542
		4.1.9.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Buah Semusim	Ton	1.472	1.542
	4.1.10	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Buah-Buahan Organik Semusim	%		2,16
		4.1.10.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Buah Organik Semusim	Ton	200	189.754
		4.1.10.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Buah Organik Semusim	Ton	200	189.754
		4.1.10.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Buah Organik Semusim	Ton	200	189.754
	4.1.11	Meningkatkan Produksi Tanaman Obat-Obatan (Biofarmaka) Semusim		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim	%		0,47
		4.1.11.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim	Ton	100.277	102.732
		4.1.11.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim	Ton	100.277	102.732





	4.1.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Biofarmaka Semusim	Ton	100.277	102.732
4.1.12	Meningkatkan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	%		0,48
	4.1.12.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Tahunan	Ton	184.252	188833
	4.1.12.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Tahunan	Ton	184.252	188833
	4.1.12.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Sayuran Tahunan	Ton	184.252	188833
4.1.13	Meningkatkan Produksi Tanaman Buah-Buahan (Fruitikultura) Tahunan		Persentase Peningkatan Produksi Buah-Buahan Tahunan	%		10
	4.1.13.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Buah Tahunan	Ton	0	10
	4.1.13.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Buah Tahunan	Ton	0	10
	4.1.13.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Buah Tahunan	Ton	0	10
4.1.14	Meningkatkan Produksi Tanaman Kopi		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kopi	%	4	3,80
	4.1.14.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Kopi	Ton	8705	10567,00



		4.1.14.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Kopi	Ton	8705	10567,00
		4.1.14.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Kopi	Ton	8705	10567,00
		4.1.15	Meningkatkan Produksi Tanaman Lada	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Lada	%	4	3,90
		4.1.15.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Lada	Ton	1625	1981
		4.1.15.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Lada	Ton	1625	1981
		4.1.15.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Lada	Ton	1625	1981
		4.1.16	Meningkatkan Produksi Tanaman Kakao	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao	%	4	3,8
		4.1.16.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Kakao	Ton	548	690
		4.1.16.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Kakao	Ton	548	690
		4.1.16.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Kakao	Ton	548	690
		4.1.17	Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit	%	4	4
		4.1.17.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Kelapa Sawit	Ton	27665	34967





		4.1.17.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Kelapa Sawit	Ton	27665	34967
		4.1.17.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Kelapa Sawit	Ton	27665	34967
		4.1.18	Meningkatkan Produksi Tanaman Karet	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet	%	4	3,9
		4.1.18.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Karet	Ton	52605	66385
		4.1.18.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Karet	Ton	52605	66385
		4.1.18.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Karet	Ton	52605	66385
		4.1.19	Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa	%	4	4
		4.1.19.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Kelapa	Ton	3.027	3822
		4.1.19.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Kelapa	Ton	3.027	3822
		4.1.19.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Kelapa	Ton	3.027	3822
		4.1.20	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	%	4	3,6





		4.1.20.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	90	114	
		4.1.20.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	90	114	
		4.1.20.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya	Ton	90	114	
	4.1.21	Meningkatkan Produksi Tanaman Tebu			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tebu	%	4	4
		4.1.21.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tebu	Ton	97850	123778	
		4.1.21.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Tebu	Ton	97850	123778	
	4.1.22	4.1.21.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Tebu	Ton	97850	123778	
		Meningkatkan Produksi Tanaman Tembakau			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tembakau	%	4	3,6
		4.1.22.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Tembakau	Ton	23	29	
		4.1.22.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Tembakau	Ton	23	29	



		4.1.22.3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Tembakau	Ton	23	29
	4.1.23	Meningkatkan Produksi Ternak Sapi		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	%		0,98
		4.1.23.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi Ternak Sapi	Ekor	40.112	42.174
		4.1.23.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Populasi Ternak Sapi	Ekor	40.112	42.174
		4.1.23.3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Ternak Sapi	Ekor	40.112	42.174
	4.1.24	Meningkatkan Produksi Ternak Kerbau		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kerbau	%		0,48
		4.1.24.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi Ternak Kerbau	Ekor	3.038	3.118
		4.1.24.2	PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Populasi Ternak Kerbau	Ekor	3.038	3.118
		4.1.24.3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Ternak Kerbau	Ekor	3.038	3.118
	4.1.25	Meningkatkan Produksi Ternak Kambing		Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kambing	%		0,20
		4.1.25.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi Ternak Kambing	Ekor	52.325	52.855
		4.1.25.2	PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Populasi Ternak Kambing	Ekor	52.325	52.855





	4.1.25.3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Ternak Kambing	Ekor	52.325	52.855
	4.1.26	Meningkatkan Produksi Ternak Ruminansia Lainnya	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Lainnya	%		1,15
	4.1.26.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi Ternak Rumansia Lainnya	Ekor	9.226	9.770
	4.1.26.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Populasi Ternak Rumansia Lainnya	Ekor	9.226	9.770
	4.1.26.3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Ternak Rumansia Lainnya	Ekor	9.226	9.770
	4.1.27	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Petelur	Persentase Peningkatan Populasi Ayam Petelur	%		6,00
	4.1.27.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	186.494	266.509
	4.1.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	186.494	266.509
	4.1.27.3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pupulasi Ayam Petelur	Ekor	186.494	266.509
	4.1.28	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Pedaging	Persentase Peningkatan Populasi Ayam Pedaging	%		2,50
	4.1.28.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi Ayam Pedaging	Ekor	612.061	692.491
	4.1.28.2	PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Populasi Ayam Pedaging	Ekor	612.061	692.491





	4.1.28.3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Ayam Pedaging	Ekor	612.061	692.491
	4.1.29	Meningkatkan Produksi Ternak Ayam Bukan Ras	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Bukan Ras	%		2,15
	4.1.29.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.220.295	2.487.795
	4.1.29.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.220.295	2.487.795
	4.1.29.3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Ayam Bukan Ras	Ekor	2.220.295	2.487.795
	4.1.30	Meningkatkan Produksi Ternak Itik	Persentase Peningkatan populasi Ternak Itik	%		1,32
	4.1.30.1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Populasi Itik	Ekor	31.161	33.273
	4.1.30.2	PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Populasi Itik	Ekor	31.161	33.273
	4.1.30.3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi Itik	Ekor	31.161	33.273
	4.1.31	Meningkatkan Produksi Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lele	%	4,25	
	4.1.31.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Ikan Lele	Ton	641,48	816,59
	4.1.31.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Lele	Ton	641,48	816,59





		4.1.32	Meningkatkan Produksi Ikan Nila		Persentase Peningkatan Produksi Ikan Nila	%	4,1	5,00
			4.1.32.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Ikan Nila	Ton	297,71	374,56
			4.1.32.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Nila	Ton	297,71	374,56
		4.1.33	Meningkatkan Produksi Ikan Gurame		Persentase Peningkatan Produksi Ikan Gurame	%	1,5	5,56
			4.1.33.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Ikan Gurame	Ton	22,13	27,93
			4.1.33.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Gurame	Ton	22,13	27,93
		4.1.34	Meningkatkan Produksi Ikan Emas		Persentase Peningkatan Produksi Ikan Emas	%	0,72	1,01
			4.1.34.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Ikan Emas	Ton	95,73	100,42
			4.1.34.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Emas	Ton	95,73	100,42
		4.1.35	Meningkatkan Produksi Ikan Patin		Persentase Peningkatan Produksi Ikan Patin	%	3,5	3,94
			4.1.35.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Ikan Patin	Ton	626,57	757,39
			4.1.35.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Patin	Ton	626,57	757,39
		4.1.36	Meningkatkan Produksi Ikan Baung		Persentase Peningkatan Produksi Ikan Baung	%	0,24	2,48





		4.1.36.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Ikan Baung	Ton	15,35	16,97
		4.1.36.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Baung	Ton	15,35	16,97
	4.1.37	Meningkatkan Produksi Ikan Budidaya Lainnya		Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya Lainnya	%	0,12	0,17
		4.1.37.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ton	11,98	12,08
		4.1.37.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ton	11,98	12,08
	4.1.38	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele		Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lele	%	4,43	10,00
		4.1.38.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Benih Ikan Lele	Ekor	23.182.000	33.399.397
		4.1.38.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Benih Ikan Lele	Ekor	23.182.000	33.399.397
	4.1.39	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila		Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Nila	%	2,41	10,00
		4.1.39.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Benih Ikan Nila	Ekor	802.958	1.033.091
		4.1.39.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Benih Ikan Nila	Ekor	802.958	1.033.091
	4.1.40	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame		Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Gurame	%	0,92	1,50





		4.1.40.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Benih Ikan Gurame	Ekor	271.423	289.526	
		4.1.40.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Benih Ikan Gurame	Ekor	271.423	289.526	
		4.1.41	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Emas		Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Emas	%	1,9	5,00
		4.1.41.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Benih Ikan Emas	Ekor	268.661	320.492	
		4.1.41.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Benih Ikan Emas	Ekor	268.661	320.492	
		4.1.42	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya		Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Lainnya	%	0,99	1,00
		4.1.42.1	PROG. PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ekor	50.000	52.551	
		4.1.42.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Budidaya Lainnya	Ekor	50.000	52.551	
		4.1.43	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap		Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,42	0,52
		4.1.43.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Ikan Tangkap	Ton	198,71	203,75	
		4.1.43.2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Ikan Tangkap	Ton	198,71	203,75	





	4.1.44	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan		Persentase Peningkatan Produksi Olahan Ikan	%	4,5	5,17	
		4.1.44.1	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi Olahan Ikan	Ton	12,42	15,88
	4.1.45	Meningkatkan Pemasaran Produksi Ikan		Persentase Peningkatan Produksi Ikan Yang Dipasarkan	%	4,17	5,00	
		4.1.45.1	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi Ikan Yang Dipasarkan	Ton	13550,54	17294,3
	4.1.46	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani		Indeks Kelembagaan Petani	Poin	1,34	1,44	
		4.1.46.1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Cakupan Kelompok Tani Pemula Yang Dibina	%	67,05	59,92
					Cakupan Kelompok Tani Lanjut Yang Dibina	%	32,22	35,84
					Cakupan Kelompok Tani Madya Yang Dibina	%	0,73	4,08
					Cakupan Kelompok Tani Utama Yang Dibina	%		0,15
					Cakupan Kelompok Tani Perkebunan Yang Dibina	%	10	10
	4.1.47	Meningkatnya Pemantauan Kebijakan Pertanian Dan Perikanan		Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutana dan Perikanan	%	59	65	





		4.1.47.1	PROGRAM PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutana dan Perikanan	%	59	65
4.2	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan			Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	-8,37	3,83
	4.2.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Industri		Persentase Pembangunan Kawasan Industri	%	0	36
		4.2.1.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pembangunan Kawasan Industri	%	0	36
	4.2.2	Meningkatkan Produksi Industri Pangan		Persentase Peningkatan Produksi Industri Pangan	%		13,70
		4.2.2.1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produksi Industri Pangan	Ton	176,2	361,00
	4.2.3	Meningkatkan Produksi Industri Karet,Barang dari karet dan Plastik		Persentase Peningkatan Produksi Industri Karet, Bahan dari Karet dan Plastik	%		22,73
		4.2.3.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Produksi Industri Karet, Bahan dari Karet dan Plastik	Ton	48,00	135
	4.2.4	Meningkatkan Produksi Industri Furniture Kayu/Barang dari kayu		Persentase Peningkatan Produksi Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	%		39,72





		4.2.4.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Produksi Industri Furnitur Kayu/Barang dari Kayu	Ton	150	985
	4.2.5	Meningkatkan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam		Persentase Peningkatan Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam	%		52,78
		4.2.5.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Produksi Industri Bahan Galian Bukan Logam	Buah	10.306.000	110.000.000
	4.2.6	Meningkatkan Produksi Industri Textile/Pakaian Jadi		Persentase Peningkatan Produksi Industri Textil/Pakaian Jadi	%		19,67
		4.2.6.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Produksi Industri Textil/Pakaian Jadi	Pcs	300	730
	4.2.7	Inisiasi Pengembangan Kawasan Pertumbuhan RAJAWALI TANGGUH		Cakupan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah	%		80
		4.2.7.1	PROGRAM PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah	%		80
	4.2.8	Meningkatkan Pengendalian Izin Usaha Industri		Persentase peningkatan Usaha Industri yang memiliki izin berusaha	%		20
		4.2.8.1	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	%		100
		4.2.8.2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional	%		50





4.3	Meningkatnya Usaha Konstruksi		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	%	-2,40	6		
	4.3.1	Pengembangan Jasa Konstruksi		Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	%	n/a	10	
		4.3.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi	%	n/a	10
	4.4	Meningkatnya Usaha Perdagangan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-0,89	6	
		4.4.1	Meningkatnya Promosi Produk Ekspor		Persentase Peningkatan produk ekspor	%		100
			4.4.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Promosi Produk Ekspor	%	
		4.4.2	Meningkatnya Promosi Produk Dalam Negeri		Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	%		100
			4.4.2.1	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	%	





	4.4.3	Meningkatnya Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi Perdagangan	%		15,5
		4.4.3.1	PROGRAM ENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi Perdagangan	%		15,5
	4.4.4	Meningkatnya Pembinaan Metereologi Legal, Tera, dan Tera Ulang		Persentase Peningkatan Pengawasan Tera dan Tera Ulang	%		39,3
		4.4.4.1	PROGRAM STANDARDISASI & PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Pengawasan Tera dan Tera Ulang	%		39,3
	4.4.5	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%		100
		4.4.5.1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%		100
	4.5	Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	%	-4,41	6
		4.5.1	Meningkatkan Jaringan Trayek Yang Terlayani Angkutan	Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan umum	%	30	60





		4.5.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan	%	30	60
		4.5.2	Tersedianya Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Indeks Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Poin		100
		4.5.2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Poin		100
		4.5.3	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya	Persentase Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Terpasang	%	26	35
		4.5.3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang	%	26	35
				Proporsi Angkutan Jalan yang memenuhi Standar Keselamatan	%	47,72	60
		4.6	Meningkatnya Usaha Pariwisata	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	-3,98	5,50
4.6.1	Meningkatkan Kunjungan Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	n/a	100		
		4.6.1.1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi yang ditetapkan	%	n/a	28.57





		4.6.1.2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	%	n/a	20
		4.6.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	%	n/a	20
4.7	Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian			Persentase Koperasi Sehat	%	n/a	78,43
	4.7.1	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi		Persentase Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	%	n/a	30
		4.7.1.1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Tertib Administrasi dan Perizinan Usaha	%	n/a	40
	4.7.2	Meningkatnya Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	%	n/a	100
		4.7.2.1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	%	n/a	10
	4.7.3	Meningkatkan Penilaian Derajat Kesehatan Koperasi, KSP dan USP		Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian	%	n/a	35
		4.7.3.1	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian	%	n/a	35
	4.7.4	Meningkatnya Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	%	n/a	60





		4.7.4.1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	%	n/a	60
	4.7.5	Meningkatnya Produktivitas, Modal, dan Hasil Penjualan Hasil Produk Koperasi		Persentase Koperasi yang diberdayakan	%	n/a	25
		4.7.5.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN & PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Produktivitas Hasil Produk Koperasi	%	n/a	18
				Persentase peningkatan Modal dan Pembiayaan Koperasi	%	n/a	18
				Persentase peningkatan Hasil Penjualan Koperasi	%	n/a	18
4.8	Meningkatnya Usaha Mikro			Persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk	%	7,19	7,50
	4.8.1	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro		Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	%	0,7	2,90
		4.8.1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas	%	0,7	2,90
	4.8.2	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	%	n/a	100
		4.8.2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Usaha Kecil	%	n/a	100





	4.8.3	Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	%	100	100
	4.8.3.1	PROGRAM PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	Persentase Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	%	100	100
4.9		Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Poin	-28,09	6,71
	4.9.1	Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	-3,00	4,00
	4.9.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%		25
	4.9.1.2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%		25
	4.9.1.3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%		1
	4.9.1.4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%		1
	4.9.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pemberian Izin Lokasi	%	n/a	100
4.10		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,22	74,80





	4.10.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Ketenagakerjaan		Cakupan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro	%		100
		4.10.1.1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	%		100
	4.10.2	Meningkatkan Kesempatan Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	%	96.44	96.5
		4.10.2.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA & PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	%		3,50
	4.10.3	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,56	3,50
		4.10.3.1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	%	n/a	35,00
	4.10.4	Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial		Persentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%	96.44	100
		4.10.4.1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	%	96.44	100
	4.11	Berkembangnya Ekonomi Kreatif		Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	n/a	4,41
		4.11.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual		Persentase Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif	%	



		4.11.1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	%	n/a	100
	4.11.2	Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	%	n/a	13,33
		4.11.2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumberdaya Kreatif	%		100
4.12	Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan			Persentase Jalan Mantap	%	52,73	63,4
	4.12.1	Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan		Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Dibangun	%	n/a	
		4.12.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dibangun	%	n/a	5
				Proporsi Jembatan Yang Dibangun	%	n/a	5
	4.12.2	Meningkatkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Proporsi Jalan dan Jembatan Yang Dipelihara	%	n/a	20
		4.12.2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Jalan Yang Dipelihara	%	n/a	20
				Proporsi Jembatan Yang Dipelihara	%	n/a	20





	4.12.3	Meningkatkan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Proporsi Jalan dan Jembatan Yg Direhabilitasi	%	n/a	10	
		4.12.3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Proporsi Jln Yg Direhabilitasi	%	n/a	10
	Proporsi Jembatan Yang Direhabilitasi				%	n/a	10	
	4.12.4	Meningkatkan saluran drainase jalan kabupaten		Prosentase jalan yang memiliki saluran drainase	%	19,46	236,49	
		4.12.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase saluran drainase dlm kondisi baik	%	19,46	23,58
	4.13	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang			Ketaatan Terhadap RTRW	%	n/a	100
		4.13.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang		Cakupan Dok Penataan Ruang	%	50	100
			4.13.1.1	PROG. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Cakupan Dok Penataan Ruang	%	50
		4.13.2	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang		Cakupan Pemanfaatan Ruang	%	n/a	100
			4.13.2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Cakupan Kesesuaian Ijin oleh TKPRD Way Kanan	%	n/a
4.13.3		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Ruang		Cakupan Pengendalian Ruang	%	n/a	100	
		4.13.3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Tindak lanjut pelanggaran tata ruang	%	n/a	100
4.13.4	Meningkatnya Kualitas Penataan Gedung & Lingkungannya		Cakupan Penataan Gedung dan Lingkungannya	%		130		



		4.13.4.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Proporsi Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik	%	n/a	65
		4.13.4.2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Proporsi Bangunan & Lingkungan Dalam Kondisi Baik	%	n/a	65
4.14	Terkendalnya Inflasi			Laju Inflasi	%	3-5	3-5
	4.14.1	Terkendalnya Harga Barang Kebutuhan Pokok		Cakupan Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	%	33,33	66,67
		4.14.1.1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali	%	33,33	66,67
	4.14.2	Terkendalnya Harga Pangan Pokok		Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	n/a	CV<10%
		4.14.2.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	n/a	CV<10%
	4.14.3	Terlaksananya Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Cakupan Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	%	100	100
		4.14.3.1	PROGRAM PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	%	100	100

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, Hal. 512 – 562



4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Dengan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, serta mengacu pada Rancangan RKP Tahun 2023, dan program strategis nasional, maka RKPD Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 mengambil tema **“Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia, Pemulihan Ekonomi, Reformasi Birokrasi, dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung Ketersediaan Infrastruktur”** yang secara umum diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan dan peningkatan peran koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, revitalisasi pertanian secara menyeluruh, pengembangan potensi peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, pertambangan dan energi yang di topang dengan pembangunan Infrastruktur dan pelayanan dasar terutama pelayanan dan akses kesehatan, pendidikan, kependudukan dan perizinan serta pembangunan sumber daya manusia dan melibatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kesemuanya itu bermuara pada peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat Kabupaten Way Kanan.

Dalam hal pemerintahan, arah kebijakan dititik beratkan pada penciptaan tata pemerintahan yang transparan, aspiratif, partisipatif, akuntabel, adil, demokratis (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh aparatur daerah yang profesional dan bebas KKN, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal. Selanjutnya, dalam rangka mendukung good governance, juga diperlukan

peningkatan kualitas masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial serta kehidupan beragama. Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas pemuda sebagai penerus pembangunan. Seiring dengan kebutuhan pembangunan diatas, kebijakan dalam peningkatan kapasitas sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat perhatian. Kebijakan pengembangan infrastruktur ini akan dapat memberikan manfaat ganda terhadap peningkatan investasi, penciptaan kegiatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam kaitan sinkronisasi prioritas pembangunan sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2019-2024 dalam upaya melaksanakan Arah Presiden Republik Indonesia terkait 5 (lima) Fokus Kerja Presiden Tahun 2019-2024 yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari sembilan bagian utama yakni :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pusat dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara umum, pelaksanaan Perioritas Pembangunan dan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 difokuskan pada bidang/sektor-sektor sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM yang Berkualitas;
2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah diatas, Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan

perkonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dan Nasional, maka sasaran makro Kabupaten Way Kanan yang ingin dicapai pada tahun 2023 yaitu :

Tabel I.17
Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Sasaran Makro	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3 – 4
2	Inflasi (%)	3,0 – 4,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50
4	Jumlah Pengangguran (orang)	9.477
5	Tingkat Kemiskinan (%)	11,90
6	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	57.846
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar (poin)	68,39
8	PDRB ADHB (Juta Rp)	15.218.522,50
9	PDRB per Kapita ADHB (Rp)	31.613.933,11
10	PDRB ADHK (Juta Rp)	10.329.452,85
11	PDRB per Kapita ADHK (Rp)	22.948.780,90
12	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribuan Rp)	9.477
13	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	7,79
14	Angka Harapan Hidup (tahun)	70
15	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42
16	Presentase Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar (%)	58,51

Adapun Rencana kerja berupa program, kegiatan dan indikator pembangunan seluruh perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023 yang tertuang dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Tabel I.18 berikut :



Tabel I.18
Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Pembangunan Dalam RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
1.01	Pendidikan	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Akreditasi Sekolah Dasar
2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat
2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian





2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Akreditasi SMP
2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat
2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat





2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia
2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian
2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Akreditasi PAUD
2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun
2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun
2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat





2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia
2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia
2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi
2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD
2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PKBM Terkreditasi
2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia
2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi
2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi





2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan Dasar
3.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
3.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	
01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
06.2.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun



2.22	Kebudayaan	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional
02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Adat
02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina
02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)
03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya



2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sejarah dan Tradisi
04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Cagar Budaya yang Dilestarikan
05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan
05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi



2. Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	
2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit
2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas
2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center



2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan
2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yg Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar





2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dgn Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar
2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan



2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah
2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit
2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)





1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi
2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan





1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan



1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan
04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)





3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Infrastruktur pengendali Banjir- Kelompok P3A yang dilakukan pembinaan pengelolaan jaringan irigasi- Kubikasi cadangan air baku
03.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun
03.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun
03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Jaringan irigasi dalam kondisi baik- Layanan jaringan irigasi tersier
03.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun
03.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan
03.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi
03.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara
03.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi





1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya penduduk yang mendapat akses air minum
03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun
03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM
03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat
03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan terbangun yang ditingkatkan
03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan
03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya penduduk yang mendapat akses sanitasi
05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman





1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	
03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none">- Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan bangunan Pendidikan- Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Gedung kantor dan atau rumah dinas- Peningkatan rasio kepatuhan IMB
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	
03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Cakupan penanganan bencana/tanggap darurat- Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik- Operasional rutin pemeliharaan jalan dan jembatan
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun
10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun





10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi
10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan jasa konstruksi
11.2.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan
11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan
03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Update data dan informasi pada SIPJAKI
11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
11.2.02.10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah badan usaha dan atau perorangan jasa konstruksi yang memiliki ijin usaha jasa konstruksi
11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi





03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tindakan yang diberikan terhadap ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan atau kualifikasi badan usaha dan atau perorangan
11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rencana tata ruang yang ditetapkan
12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabubapten/Kota	Pengajuan ijin lokasi yang mendapat rekomendasi teknis
12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang
03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditindaklanjuti
12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang



4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	
04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tersedianya dokumen retribusi pemakaian kekayaan daerah
02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terfasilitasinya BSPS
02.2.06.02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	



04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none">- Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan perkim dan perkim kumuh- Tercapainya penataan dan peningkatan kualitas kawasan perkim kumuh dengan luas dibawah 10 Ha
03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tercapainya penataan dan peningkatan kualitas kawasan perkim kumuh
03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
03.2.02.09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan





2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab./Kota	
04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santuna Tanah Untuk Pembangunan	
10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemda Kab./Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemda Kab./Kota
2.10.06	Program Redistribusi Tanah nan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	
10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya





5. Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha



02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab./Kota	
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
04.2.01.01	Pencegahan Kebakarandalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait





6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	
05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana
03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Yang Terlaksana
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas
03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya
05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Yang Terlaksana



03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)



7. Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin sumbangan
06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS mendapatkan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota



1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	
06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS (Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/ tertangani
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah PMKS selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial- Jumlah PMKS selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial
04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar Yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya
05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota
05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota



06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Validasi Data Fakir Miskin 227 Kampung, 15 Kecamatan
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.06	Program Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none">- Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten- Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial
06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat masa tanggap darurat maupun paska bencana
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
06.2.01.03	Penyediaan TempatPenampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota



06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota
06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Anggota Tagana yang Tangguh dan Terlatih
06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya
06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola
07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota



8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan
07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan RTK SKPD
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Melalui Pelatihan Kerja - Persentase Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Peningkatan Kualitas pencari kerja
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan Pencari Kerja Yang Ditempatkan Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Nakertrans
07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	- Kualitas Informasi Ketenagakerjaan - Kualitas Pelayanan Disnakertrans
04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Angka Perselisihan Yang Terfasilitasi Dan terselesaikan



07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan Hukum dan pemenuhan hak pekerja
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota	Fasilitasi Perselisihan Tingkat Tripartit
05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah
05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan
3	Urusan Pilihan	
3.32	Transmigrasi	
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none">- Cakupan Masyarakat Miskin Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi- Cakupan Masyarakat Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi
32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kawasan Transmigrasi





03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Masyarakat Yang Dibina Di Daerah Transmigrasi
32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kualitas SDM dan perekonomian Masyarakat Transmigrasi
04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina
04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan



9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan abupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan
02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi- Persentase jumlah masyarakat miskin yang di berdayakan
02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Penanganan kasus Kekerasan Pada perempuan
08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak- Persentasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan ewenangan Kabupaten/Kota





2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak
08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang telah mewujudkan kesetaraan gender
04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Penyedia Layanan Bagi KG
04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	
05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia





2.08.06	Rogram Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	
08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab./Kota	
07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasdan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yg Memerlukan Perlindungan Khusus Tk. Daerah Kab./Kota	Persentasi Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota





2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Presentase laju pertumbuhan Penduduk
14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pengendalian Penduduk
02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan
02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya
02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk & KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal- Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra



03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Dokumen Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan media lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK- Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK



14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLK)	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Dokumen Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)- Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB





03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang diberdayaakan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB- Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan
03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB
2.14.04	Rogram Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Pembinaan BKB
14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk





04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk- Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja





10. Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan
09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Kemandirian Pangan yang tersedia
02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia
02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Koefisien Variasi Harga Pangan pokok (beras) di tingkat konsumen- Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok (Beras) ditingkat Konsumen
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia



03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan
09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab./Kota	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK)
03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan
09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan
04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan



09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Masyarakat
04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah
09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Uji Pengawasan Keamanan Pangan
05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota



11. inas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan
11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	



03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
04.2.01.02	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut- Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut- Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	



10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab./Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	
11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	
11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan
11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir





12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap pembuatan KK, KTP, KIA
12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk
02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan
12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas Arsip Pencatatan Sipil
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksanakannya Pelayanan Keliling Kampung



03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
03.2.02.01	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan
12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggarakannya Pengelolaan Administrasi Kependudukan
04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun





04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa
04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
05.2.01.01	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga





14. Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	
15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Terpasang Dalam Kondisi Baik
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Yang Tersusun- Jumlah Terminal Tipe C yang di kelola
02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun
15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah PAD Retribusi Tempat Khusus Parkit
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Rekomendasi Numpang Uji Berkala Kendaraan Bermotor
02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota- Jumlah laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota
02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota





15. Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Pelayanan Informasi Publik yang dikelola
16.02.2.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Publik yang dikelola
02.2.02.06	Pelayanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik- Jumlah Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi
02.2.02.07	Layanan Hubungan Media	<ul style="list-style-type: none">- Adanya Kerjasama Media dengan Pemerintah Daerah (Online, Harian, Mingguan, TV dan Streaming)- Jumlah Layanan Hubungan Media
02.2.02.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	<ul style="list-style-type: none">- Adanya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas- Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none">- Indeks Domain Kebijakan Internal- Indeks Domain Layanan SPBE- Indeks Domain Manajemen SPBE- Indeks Domain Tata Kelola SPBE
16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Internet dan Intranet Pemerintah Kab. Way Kanan
16.03.2.02	Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan EGovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Retribusi Menara Telekomunikasi
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah - Jumlah Sarana dan Pengelolaan Video Conference dan Jumlah Updating Sistem Informasi Web Pemerintah Daerah (www.waykanankab.go.id)
2.20	Statistik	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan
20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab./Kota	Persentase Data sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor
2.21	Persandian	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Utk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi
21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi
02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dlm Jaring Komunikasi Sandi - Operasional Jaringan Komunikasi Sandi dan Pelaporan Palsan Jammer - Terlaksanan Pola Hubungan & operasional JKS Pem. Kab. Way Kanan





16. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian
17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan
04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan- Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Modern (ERP) Perusahaan untuk Koperasi Selama 24 JP





05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	<ul style="list-style-type: none">- Persentase peningkatan Hasil Penjualan Koperasi- Persentase peningkatan Modal dan Pembiayaan Koperasi- Persentase peningkatan Produktivitas Hasil Produk Koperasi
17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Temu Usaha Koperasi dengan Perusahaan BUMN/ Swasta dan Terlaksananya Pengusulan Bantuan Pemerithan Bagi Koperasi
06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.07	Rogram Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Masyarakat Miskin Yang Diberdayakan Dalam Usaha Mikro- Persentase Usaha Mikro Yang Berkualitas
17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatkannya Kapabilitas Pelaku UKM Dan memicu tumbuhnya wirausaha baru
07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro- Jumlah Dokumen Data Usaha Mikro
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Menjadi Usaha Kecil
17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi





17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.18.02	Rogram Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah
18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	
18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota



03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Izin Terbit Sesuai SOP
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizina	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal





05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Data Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi secara Elektronik
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan



18. Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Pembinaan Pemuda Kader- Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina- Persentase Peningkatan Pembinaan Gugus Depan- Persentase Peningkatan Pemuda Pelopor Persentase Peningkatan Wira Usaha Pemula
19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Jumlah Pelatihan Pemuda Pelopor Jumlah Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkata Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan
19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Pembina Pramuka Jumlah Pembinaan Organisasi Pemuda
02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan



2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan- Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi- Persentase Peningkatan Pembinaan Olahraga Rekreasi
19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pembinaan Olahraga
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan
19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab./Kota	Jumlah Event yang dilaksanakan ditingkat kabupaten
03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan
19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah induk Organisasi Olahraga yang di bina
03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan
19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan Olahraga Rekreasi
03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat
3.26	Pariwisata	
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi yang ditetapkan
26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan





02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Monitoring Destinasi Pariwisata
02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata
26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Pemasaran Pariwisata
03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pelaku ekonomi kreatif yang dibina Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif
05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif



19. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
2.23	Perpustakaan	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none">- Cakupan Pemerataan Layanan Perpustakaan- Perentase Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Persentase pengelolaan & pengembangan bahan pustaka perpustakaan- Persentase pengelolaan & pengembangan bahan pustaka perpustakaan
02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)
02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kab./Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya
02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kab./Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan
23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah/kota pada layanan- Persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kab./kota pada anggota perpustakaan- Persentase pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka perpustakaan
02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan



02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota
02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
2.24	Kearsipan	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pencipta Arsip Daerah Yg Mengelola Arsip Dinamis Scr Baku
24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan
24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan dan penciptaan kemampuan serta tata kelola pada akuisisi pengolahan, preservasi dan akses arsip
02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan
24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab./Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase jumlah arsip yang melalui penilaian, penetapan dan pemusnahan Arsip
03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun



20. Dinas Perikanan

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap
25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan nelayan tentang alat tangkap ramah lingkungan dan asuransi nelayan
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none">- Persentase petani miskin yang diberdayakan dalam budidaya ikan- Produksi Benih Ikan Gurame- Produksi Benih Ikan Lainnya- Produksi Benih Ikan Lele- Produksi Benih Ikan Mas- Produksi Benih Ikan Nila- Produksi Ikan Baung- Produksi Ikan Gurame- Produksi Ikan Lainnya- Produksi Ikan Lele- Produksi Ikan Mas- Produksi Ikan Nila- Produksi Ikan Patin
25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terwujudnya teknologi budidaya ikan kecil
04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan



25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terwujudnya operasional UPT BBI Terwujudnya pembinaan UPR Terwujudnya sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan
04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap
25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha bidang perikanan yang sadar akan pengawasan terhadap perairan umum
05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pemasaran ikan - Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pengolahan ikan Produksi, Ikan Olahan Produksi, ikan yang dipasarkan
25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Pencatatan Usaha pengolahan dan pemasar hasil perikanan skala mikro dan kecil yang diterbitkan





06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko
25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang dibina
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko
25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai tingkat konsumsi ikan Kabupaten Way Kanan
06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi



21. Dinas Perkebunan

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Cakupan Petani Miskin Yang Dibina Budidaya Perkebunan- Produksi Kakao- Produksi Karet- Produksi Kelapa- Produksi Kelapa Sawit- Produksi Kelapa Sawit- Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya- Produksi Tebu- Produksi Tembakau
27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme
02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian
02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman



02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Produksi Kakao- Produksi Karet- Produksi Kelapa- Produksi Kelapa Sawit- Produksi Tanaman- Perkebunan Tahunan Lainnya- Produksi Tebu- Produksi Tembakau
27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya Pengembangan Prasaranan Pertanian/Perkebunan- Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian
03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola
03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Produksi Kakao- Produksi Karet- Produksi Kelapa- Produksi Kelapa Sawit- Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Lainnya- Produksi Tebu- Produksi Tembakau





27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian/ Perkebunan
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Kelompok Tani Perkebunan Yang Dibina
27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi



22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Cakupan kecamatan yang mengikuti pendampingan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian- Cakupan kecamatan yang mengikuti pendampingan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian- Jumlah Keluarga Miskin Tanaman Hortikultura yang dibina- Jumlah Keluarga Miskin Tanaman Pangan yang dibina- Jumlah Kecamatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian (peternakan)- Jumlah kecamatan yang diawasi penggunaan sarana pertanian dalam rangka pengembangan tanaman pangan lainnya- Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendampingan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian- Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian- Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan penggunaan sarana pertanian- Jumlah Kecamatan yang Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian- Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pertanian (peternakan)- Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian



27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Kecamatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan jagung- Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota- Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota- Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota- Jumlah pengelolaan SDG dalam rangka pengembangan padi sehat- Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota- Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota- Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian
02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	





27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola
03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola
03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Cakupan kecamatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota- Jumlah kecamatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota- Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota- Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota- Jumlah kecamatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota





04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	



27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kecamatan yang dilakuakn Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian- Jumlah Kecamatan yang dilakukam Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian- Jumlah kecamatan yang dilakukam Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota- Jumlah Kecamatan yang dilakukan penanggulangan bencana pertanian dalam rangka pengembangan tanaman Ubi Kayu- Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengendalian bencana pertanian dalam rangka pengembangan padi sehat- Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana peranian- Jumlah kecamatan yang dilakukan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dalam rangka pengembangan jagung- Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota- Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan
05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	
27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Pelaksanaan
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kec. dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kec dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian





23. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
3.30	Perdagangan	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi Perdagangan
30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Yang Terkendali
30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengawasan pupuk dan peptisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota



04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	
30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang
05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal
3.1	Perindustrian	
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat





24. Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	
01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah- Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah- Persentase Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah- Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan- Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan



01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan
01.01.2.13	Penataan Organisasi	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Dokumen SAKIP Setda yang tersusun sesuai ketentuan- Persentase IKU Bupati Yang dievaluasi- Persentase OPD yang difasilitasi Dokumen LKJnya- Persentase OPD yang difasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi- Persentase penyusunan Proses Bisnis yang difasilitasi- Persentase penyusunan SOP yang difasilitasi Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab dan ABK
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Kegiatan Pimpinan yang di Dokumentasikan- Persentase Kegiatan Pimpinan yang di Fasilitasi- Persentase Kegiatan Pimpinan yang di publikasikan
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
01.2.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan





01.2.13.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">- Persentase OPD yang difasilitasi Dokumen LPPD nya- Terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang berkualitas
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Kebijakan terkait Bina Mental Spiritual yang difasilitasi- Persentase Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang difasilitasi- Persentase Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas





01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Persentase penanganan kasus yang diselesaikan- Persentase produk hukum daerah yang tidak tumpang tidih- Persentase Produk Hukum dalam JDIH- Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Di dokumentasi
01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Capaian Kerjasama dengan CSR- Persentase Capaian Kerjasama Pendidikan Tinggi/Vokasi- Persentase Fasilitasi Perjanjian Kerjasama
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	
01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Kebijakan bidang Perekonomian- Persentase Kontribusi BUMD terhadap PAD- Persentase laporan TPID yang disampaikan tepat waktu
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD





03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan- Persentase Pelaksanaan Pembangunan- Persentase Program Pembangunan yang di monitor
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa- Persentase penyelesaian Pengadaan Secara Elektronik- Persentase penyelesaian proses Pengadaan Barang/Jasa
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Kebijakan Energi dan Air- Persentase Pemantauan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan





25. Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	
02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terselesaikan tepat waktu
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan
02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terlaksana tepat waktu
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Cakupan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tepat Waktu
02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase dokumen peraturan daerah yang terselesaikan tepat waktu
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan



02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi
02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang terselenggara
02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS
02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD
02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan
02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terselenggara
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah





02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang terselenggara
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pembahasan kerja sama daerah yg terselesaikan tepat waktu
02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD





26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)
01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)



02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan





03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA





03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan



5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan



27. Badan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	
02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Jumlah Potensi Objek Retribusi Daerah
01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah
01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah
01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase Peningkatan Pajak Daerah - Persentase Peningkatan Retribusi Daerah
02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah



04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah



28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Cakupan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja APBD- Persentase Kesesuaian Program Perencanaan dan Penganggaran
02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Skor Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dan- Skor Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi
02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi
02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD & Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Skor Kondisi Keuangan Daerah dan Skor Penyerapan Anggaran



02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (point)
02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran





02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga, Hibah dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa
02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup keuangan Daerah





02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah
02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah dan Terlaksananya Proses Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota





29. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	
03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN
02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	
02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina





03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah, Menyampaikan Laporan Kinerja, Mendapatkan Penghargaan dan Mendapatkan Hukuman Disiplin
02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	
02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan



30. Inspektorat Kabupaten Way Kanan (Itkab)

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu
02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu



6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan- Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan- Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan
03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas





31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah





02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran OrmasPemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah





8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah



32. Unsur Kewilayahan (15 Kecamatan)

Kode	Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
02.2.01.02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah & Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4.1.45.12	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sumber : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonomi pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti Negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan Pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya. Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh Pemerintah melalui Pemerintahan di Daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang di orientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warganya sebagaimana dimatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, komitmen ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan

kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju good

governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah, karena :

- ❖ Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat;
- ❖ Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur, SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas urusan :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021, dengan visi **“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”** menjadikan penerapan SPM termasuk dalam isu strategis pembangunan Kabupaten Way Kanan yang harus diselesaikan, namun isu strategis tersebut kemudian menjadi arah kebijakan yang lebih kuat untuk mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal yang berkaitan dengan pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan. Berbagai isu strategis tersebut diantaranya seperti :

1. Pendidikan

- a. Kurang memadainya kualitas, kuantitas dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Kurangnya mutu pendidikan termasuk tenaga kependidikan (kualitas guru);
- c. Masih adanya kondisi bangunan sekolah yang kurang baik (rendahnya sarana fisik);
- d. Kurang terpadu dan efisiennya manajemen pendidikan (rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan); dan
- e. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah.

2. Kesehatan
 - a. Masih tingginya Angka Kematian Bayi;
 - b. Masih rendahnya Angka Harapan Hidup;
 - c. Masih Tingginya Angka Penyakit Degeneratif;
 - d. Masih adanya penderita gizi buruk; dan
 - e. Kurang optimalnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Kurangnya cakupan infrastruktur yang memadai dan berkualitas terutama pada daerah-daerah yang terpencil;
 - b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang terutama penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten;
 - c. Masih adanya kondisi jalan kabupaten yang rusak berat;
 - d. Belum optimalnya ketersediaan pengairan;
 - e. Masih adanya kekurangan air di sebagian besar wilayah terutama di musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan dan gagal panen pada beberapa komoditas pertanian;
 - f. Masih banyak saluran irigasi yang mengalami rusak berat; dan
 - g. Masih rendahnya penduduk yang mendapatkan akses air minum.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - a. Rendahnya ketersediaan rumah layak huni;
 - b. Rendahnya kualitas perumahan dari aspek sanitasi;
 - c. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya penegakan perda;
 - b. Masih tingginya angka kriminalitas; dan
 - c. Belum optimalnya penanganan bencana dan kebakaran.
6. Sosial
 - a. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) namun belum optimal didukung program bantuan sosial dan pemberdayaan sosial yang memadai; dan
 - b. Masih kurangnya dukungan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Rencana Kerja dan Pendanaan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan urusan pemerintahan, adapun yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan, diarahkan untuk :

- a. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan;
- e. Peningkatan pendidikan non formal;
- f. Meningkatkan Kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi.

2. Kesehatan, diarahkan untuk :

- a. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- b. Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi;

- c. Pencegahan penyakit Tidak Menular;
- d. Perbaikan Gizi Masyarakat;
- e. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan;
- f. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
- g. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
- h. Pengembangan Lingkungan Sehat;
- i. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
- j. Upaya Kesehatan Masyarakat;
- k. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- l. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
- m. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- n. Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- o. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- p. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- q. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- r. Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
- s. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- t. Peningkatan pelayanan rumah sakit;
- u. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- v. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diarahkan untuk :

- a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- b. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;

- c. Penyediaan dan pengolahan air baku;
- d. Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- e. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong;
- f. Pembangunan turap/talud/brojong;
- g. rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
- i. inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan;
- j. Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
- k. peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- l. Perencanaan Tata Ruang;
- m. Pemanfaatan Ruang;
- n. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- o. Penataan Wajah Kabupaten.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diarahkan untuk :

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Pengelolaan areal pemakaman;
- c. Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
- d. Lingkungan Sehat Perumahan;
- e. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan arah kebijakan :

- a. Pengembangan wawasan kebangsaan;
- b. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- c. Pendidikan politik masyarakat;
- d. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

- e. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- f. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- g. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
- h. Penegakan Peraturan Daerah;
- i. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
- j. Koordinasi tangap darurat dan logistik bencana;
- k. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

6. Sosial, diarahkan untuk :

- a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT, dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya;
- b. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
- c. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- d. Pembinaan Anak Terlantar;
- e. Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma;
- f. Pembinaan panti asuhan / panti jompo;
- g. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya).

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan

Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 (enam) bidang pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.18

**Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal
Di Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No.	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Bidang Pendidikan : <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan Anak Usia Dini2. Pendidikan Dasar3. Pendidikan Kesetaraan
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Bidang Kesehatan : <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan kesehatan ibu hamil2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir4. Pelayanan kesehatan balita5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Bidang Pekerjaan Umum : <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

		<p>Bidang Perumahan Rakyat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Way Kanan	<p>Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan	<p>Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan informasi rawan bencana2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
6.	Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	<p>Bidang Sosial :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

BAB II**CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****A. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan. Adapun capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Capaian Kinerja Makro
Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 – 2023

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
		2022	2023	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,92	70,51	0,84
2.	Angka Kemiskinan	11,76	11,02	-6,29
3.	Angka Pengangguran	3,28	3,07	-6,40
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,41	4,63	4,99
5.	Pendapatan Per Kapita	33.315.086	35.579.572	6,80
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,283	0,281	-0,7

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Sebagaimana terlihat dari tabel diatas, **IPM** (Indeks Pembangunan Manusia) yang pada **tahun 2022 sebesar 69,92** meningkat menjadi **70,51 pada tahun 2023**. Peningkatan IPM Kabupaten Way Kanan ini didukung oleh semua komponen dimensi penyusunnya, terutama pada standar hidup layak. Indikator ini mengalami percepatan pertumbuhan cukup tinggi dibandingkan indikator lainnya, yaitu dilihat dari peningkatan pengeluaran riil perkapita sebesar 4,62% dibandingkan tahun sebelumnya 3,02%. demikian juga rata-rata lama sekolah pertumbuhannya juga meningkat dari 0,13% menjadi 0,26%.

Pada **pertumbuhan ekonomi** Kabupaten Way Kanan, dimana pada tahun 2022 tumbuh sebesar **4,41%** dan ditahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **4,63%**. Selain itu juga PDRB Perkapita Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 sebesar Rp. **33.315.086** mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. **35.579.572** di tahun 2023.

Dalam aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Way Kanan bila dilihat dari angka kemiskinan pada tahun 2023 mencapai **51,26** ribu orang. Dibandingkan tahun 2022, jumlah penduduk miskin menurun **3,02** ribu orang. Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 tercatat sebesar **11,02** persen, turun menjadi 0,74 persen di tahun 2022. Pada tingkat **pengangguran** terbuka dimana pada tahun 2022 berkisar pada angka **3,28%** turun menjadi **3,07%** ditahun 2023. Untuk indikator ratio gini atau ketimpangan pendapatan di tahun 2022 sebesar **0,283** kemudian ditahun 2023 sebesar **0,281**. Dari berbagai indikator makro tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan meyakini bahwa pembangunan daerah kedepannya akan berlangsung cukup dinamis, dengan berbagai pertumbuhan dan target-target yang telah dicapai.

B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2023 di Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada indikator kinerja kunci outcome dan output sebagaimana pada tabel berikut :



1. Indikator Kinerja kunci Outcome dan Output Urusan Pendidikan

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian	
1.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Anak Usia 5 - 6 Tahun sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	14.118	81,39%	1.	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	236	
		Jumlah Anak Usia 5 - 6 Tahun	17.347		2.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.987	
						3.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12.974
						4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1.533
						5.	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.507





		6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	712
		7.	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	249





2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar	52.824	97,08%	1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	361
		Jumlah Anak Usia 7-12 tahun $\times 100\%$	54.412		2.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.145
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama $\times 100\%$	23.803	88,29%	3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	640
		Jumlah anak usia 13 - 15 tahun	26.959		4.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	47.946



			5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	18.748
			6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.118
			7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	517
			8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.726
			9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.579
			10.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	942





			11.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	349
			12.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	688
			13.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	327
			14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.901
			15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.579



			16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	580
			17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	151
			18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	232
			19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	188





4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	415	92,84%	1.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	11
		Jumlah anak usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	447		2.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	740
					3.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	794
					4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	179
					5.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	71





			6.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang atau sarjana (S1) memiliki ijazah diploma empat (D-IV)	47
			7.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	9
			8.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	9



2. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Kesehatan

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}} \times 100\%$	207	0,04%	1.	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi Sarana, Prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2
			489.773				
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten}} \times 100\%$	2	100%	1.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2
			2				
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan}}{\text{Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten}} \times 100\%$	8.010	92,65%	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.219.915
			8.645		2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.118



4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	7.556	91,57%	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	25.992
		Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten	8.252			2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	7.414	94,34%	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	33.704
		Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten	7.859			2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita yang mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	33.118	87,01%	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	563.008
		Jumlah balita di Kabupaten	38.061			2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar





7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	45.102	97,20%	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8.080
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten	46.400		2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.543
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Orang Usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	245.038	79,77%	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	895.994
		Jumlah Orang Usia 15 - 59 tahun di Kabupaten	307.188		2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.323
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standa	Jumlah Warga Negara Usia 60 tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	47.294	91,50 %	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	28.578
		Jumlah Orang Warga Negara Usia 60 tahun di Kabupaten	51.687		2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.323



10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	103.080	83,08 %	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.488.900
		— X 100%	124.070				2.
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	5.780	100 %	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3.963.032
		— X 100%	5.780				2.
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Penderita ODGJ yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	649	81,94 %	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	60
		— X 100%	792				2.





13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah Penderita TBC yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	6.623	100 %	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	15.620
		Jumlah Penderita TBC di Kabupaten	6.623		2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	530
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	7.717	89,27 %	1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	29.588
		Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV di Kabupaten	8.645		2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.238



3. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Pekerjaan Umum

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) X 100%	-	0,00%	1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-
		Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	-				
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) X 100%	-		2.	Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-
		Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	-				





			3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan	-
			4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	-
			5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten	-
			6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten	-
			7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten	-



3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas Irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh Jaringan Irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)	-	0,00 %	1.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	8,58 %
					2.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)	70,24 %
		Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	3.080		3.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)	55,34 %
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah Kumulatif Masyarakat Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten	87.124	55,32 %	1.	Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten	ada
					2.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	-
					3.	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 UPTD
		Jumlah Total Proyeksi Rumah Tangga di seluruh Kabupaten tersebut	150.384		4.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1



					5.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	1
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rumah yang memiliki Akses Pengolahan berupa cubluk + Jumlah Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	84.484	53,83 %	1.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	-
			Jumlah rumah di Kabupaten		156.942	2.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
					3.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	84.484





			4.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-
			5.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	-
			6.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	84.484
			7.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	-
			8.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	-
			9.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	-
			10.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	-
			11.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	-





					12.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	-	
					13.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	7,46	
					14.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	-	
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	105	100 %	1.	Rasio bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	-	
		Jumlah IMB yang berlaku	105					
						2.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	105
						3.	Penetapan Peraturan Daerah Bangunan/Gedung	Ada
						4.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada



			5.	Jumlah bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-
			6.	Jumlah bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	-
			7.	Jumlah bangunan Gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	348
			8.	Jumlah bangunan Gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	348



7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	39.677	3,76 %	1.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.055.898
		Panjang jalan keseluruhan di wilayah kab/kota X 100%	1.055.898				
					2.	Panjang jalan yang dibangun	5.284
					3.	Panjang jembatan yang dibangun	17,6
					4.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	28.699
					5.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-
					6.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	3.900
					7.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	6
					8.	Panjang jalan yang dipelihara	-





					9.	Panjang jembatan yang dipelihara	-
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis /analisis	60	75,00 %	1.	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	-
			Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten		80	2.	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota
		$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis /analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$		3.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	-	
				4.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	2	
				5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yg bersumber dari APBD Kabupaten	-	





			6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-
			7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-
			8.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-
			9.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1





			10.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	1
			11.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	1





			12.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kab/kota	1
			13.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-
			14.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-
			15.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dgn keg. usaha jasa konstruksi yg menjadi kewenangan pengawasannya	-





			16.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-
			17.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-
			18.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-
			19.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-





			20.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-
			21.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-
			22.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-
			23.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-





					24.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-
					25.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	-				
		X 100%	-				
		Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-				





4. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Perumahan Rakyat

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n	412	100 %	1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	1.501
		Jumlah Total Rencana Unit Rumah Korban Bencana Yang akan ditangani pada Tahun n	412		2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	412
					3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	412
					4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	412
					5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-



			6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-
			7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	-
			8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	412
			9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-





2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	-	-	1.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	
		Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	-		2.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	
					3.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	



					4.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	
					5.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	56
					6.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	-	0,00 %	1.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	8,781 Ha
		Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha	8.781		2.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1988
					3.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	-





4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	7.402	4,71 %	1.	Jumlah rumah di kab/kota	156.942	
		Jumlah Total Unit Rumah Kabupaten X 100%	156.942		2.	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	1988	
						3.	Jumlah rumah tidak layak huni	7402
						4.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	-
						5.	Rasio rumah dan KK	97,55 %
						6.	Jumlah rumah pembangunan baru	-
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Unit Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	201	53,74 %	1.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	201	
		Jumlah Unit Rumah Kabupaten/Kota X 100%	374		2.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	-	
						3.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-



			4.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	-
			5.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	-
			6.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	-
			7.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	-
			8.	Jumlah pengembang yang teregistrasi	-
			9.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-





5. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Trantibumlinmas

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian	
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Pengaduan yang ditangani	11	100 %	1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	11	
		Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang Masuk	11		2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2.341	
						3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7
						4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1
						5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	30 SOP
						6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	307





2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	7	100 %			
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi X 100%	7				
3.	warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	5.936	5.936 orang	1.	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	90 %
					2.	Persentase jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	2 %
4.	warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	851	851 orang	1.	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal	-
					2.	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontijensi sampai dinyatakan sah/legal	-





					3.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0,31 %
					4.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,26 %
					5.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0,97 %
					6.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,01 %
5.	warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.890	2.890	1.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	-
					2.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %



					3.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 %
					4.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah	31	100 %	1.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	31
					2.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dikantor kecamatan	2
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	31		3.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	60





			4.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	-
			5.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	86 jenis
			6.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	61 orang
			7.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	411





					8.	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	1 kali
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	30 menit				





6. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Sosial

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian	
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	849	2,35 %	1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	129	
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	X 100%		36.051	2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	15
						3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0
						4.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	104
						5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3



			6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	239
			7.	Jumlah rumah singgah/shelter /tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	-
			8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	101
			9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	33
			10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	-
			11.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	-



			12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	75
			13.	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-
			14.	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan /atau relawan sosial yang disediakan	291
			15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	130
			16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	4



			17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	10
			18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	8
			19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	6
			20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	4
			21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	6





2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	100	3,46 %	1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	60
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	2.890		2.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	60
					3.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	5
					4.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	30
					5.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	-
					6.	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	39





7. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Tenaga Kerja

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	-	0 %	1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	-
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	-		2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	-
					3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	-
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	318	2,67 %	1.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	-
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan	11.893		2.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	58,11 %
					3.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	5,93 %
					4.	Persentase LPK yg terakreditasi	81,82 %



					5.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100 %
					6.	Jumlah penganggur yang dilatih	57 orang
					7.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100 %
					8.	Persentase penyerapan lulusan	- %
					9.	Lulusan bersertifikat kompetensi	350
					10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	501
					11.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	501
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	10.635,97	89,43 %	1.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	-
		Jumlah tenaga kerja	11.893		2.	Data tingkat produktivitas total	-



4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	25	23,80 %	1.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	22 %
	Jumlah perusahaan	105		2.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	70 %
				3.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB diperusahaan	7 Perusahaan
				4.	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	14,29
				5.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	20 %
				6.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,95 %
				7.	Jumlah mogok kerja	-





			8.	Jumlah penutupan perusahaan	-
			9.	Jumlah perselisihan kepentingan	-
			10.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	-
			11.	Jumlah perselisihan PHK	1
			12.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	-
			13.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	-
			14.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten yang diberdayakan	-
			15.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100 %



5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	-	%	1.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten	-
				2.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten	859
	Jumlah pencaker yang terdaftar	859	3.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten	2	
			4.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kabupaten	2	
			5.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2	
			6.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten	-	
			7.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten	501	
			8.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	501	





			9.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	501
			10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	501
			11.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	-
			12.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	501
			13.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	-
			14.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-



8. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG (anggaran responsif gender) pada belanja langsung APBD = 5.381.345.646 X 100%		0,40 %	1.	Jumlah Lembaga Pemerintah tingkat daerah Kabupaten yang telah dilatih PUG	32
		Jumlah seluruh belanja langsung APBD = 1.339.265.076.571				2.	Jumlah program/kegiatan PUG pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi X 100%	38	0,02 %	1.	Jumlah media massa (cetak/elektronik) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Dinas P3AP2KB) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1 (RRI)
		Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18)	149.788				





					2.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1
					3.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %
					4.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	7
					5.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten)	1
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	5	2,09 %	1.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten yang mendapatkan pelatihan	4
		_____ X 100%	239.125		2.	Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten yang sudah dilatih	19
		Jumlah penduduk perempuan					



	Keputusan Bupati Way Kanan No. B.86/IV.II-WK/HK/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Way Kanan	3.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	-
		4.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten	6
		5.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi	1
		6.	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	1
		7.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %





9. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Pangan

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	91,623	174,92 %	1.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada 1
		Jumlah target cadangan pangan	52,38		2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada 15
				3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak	
				4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada 17	



			5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada 1
			6.	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada 6
			7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada
			8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada 3



10. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Pertanahan

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) X 100%	664.180,4	100 %	1.	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	19
		seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	664.180,4		2.	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	-
					3.	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	-
					4.	Dokumen Izin membuka tanah	-
					5.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten /Kota	-



2.	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	-	- %
		$\frac{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	-	
3.	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas KKPR	664.180,4	100 %
		$\frac{\text{Luas tanah di atas KKPR yang diterbitkan}}{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas KKPR}} \times 100\%$	664.180,4	
4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek land reform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	-	-
		$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek land reform}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek land reform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha}} \times 100\%$	-	



5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah _____ X 100%			
		Luas izin membuka tanah yang diterbitkan			
6.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani _____ X 100%	1	100 %	
		Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	1		



11. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Lingkungan Hidup

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	$(0,376 \cdot IKA) + (0,405 \cdot IKU) + (0,219 \cdot IKL)$	67,20	67,20 %	1.	Hasil perhitungan terhadap :	
						- Indeks Kualitas Air (IKA)	63,33
						- Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,94
						- Indeks Tutupan Hutan (ITH)	28,1
2.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kabupaten}} \times 100\%$	858.414	12,25 %	1.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota :	
			7.008.613			- Terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	Ada
						- Terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	Ada





					- Terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	Ada	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	-	0%	1.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	100%
		Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	20			Jumlah Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19 / 19 x 100%
						Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	
					2.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten	5,26 %
						Jumlah PPLHD yang ada	
						Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	





			3.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten	-
				Jumlah MHA (Masyarakat Hukum Adat) yang diakui	
				Jumlah usulan MHA	
			4.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan Keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	-
				Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	
				Jumlah MHA yang ada	
			5.	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana	
				Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	



			6.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	100 %
				Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	
				Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi	





12. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian		
1.	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yg memiliki KTP	345.297	99,44 %	1.	Penerbitan akta perkawinan	100 %		
		Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	347.246			Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	145 / 145 x 100%		
						2.	Penerbitan akta perceraian	100 %	
							Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	17 / 17 x 100%	
							Peristiwa perceraian yang dilaporkan		
						3.	Penerbitan akta kematian	100 %	
				Jumlah akta kematian yang diterbitkan	1.321/1.321 x 100%				
				Peristiwa kematian yang dilaporkan					



					4.	Penyajian data kependudukan	100 %
						Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	2 / 2
						2 tahun	x 100%
2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA	126.916	90,46 %			
		X 100%					
		Jumlah anak usia 0 - 17 tahun	140.295				
3.	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0- 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	149.220	99,62 %			
		X 100%					
		Jumlah anak usia 0 - 18 tahun	149.788				
4.	OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	13	28,26 %			
		X 100%					
		Jumlah OPD	46				





13. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	-	- %	1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	13
		Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) X 100%	-		2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	5
					3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	99
					4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-





2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	98	100 %	1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	13
					2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	5
		Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)	98		3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	99
					4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-





14. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{f} \times K$	2,53	2,53%	1.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada 1
					2.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	50,06
					3.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	23,2 %
					4.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	69,55 %
						$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}}$	





					5.	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	5	
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	54.190	71,97 %	1.	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100 %	
		Jumlah pasangan usia subur	75.293					
		_____ X 100%					Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	23 / 23
							Jumlah faskes	x 100%
					2.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	71,97 %	
						Jumlah Peserta KB aktif (PA) MKJP		
						Jumlah PUS		





					3.	Jumlah kelompok kerja KKBPk yang efektif	1 kelompok
					4.	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	55,47 %
						$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}}$	
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	8.396	11,15 %	1.	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dengan kesertaan rendah	0,079 %
		Jumlah Pasangan Usia Subur	75.293		2.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	6,83 %
						$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada Keluarga penerima PBI}}{\text{Jumlah keluarga PBI}}$	





15. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Perhubungan

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian	
1.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,72	0,72 %	1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	0,00 %	
		(IK1 x 100) + (IK2 x 0) = (0,72 x 100) + 0 = 72					Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia	0 / 0 x 100%
							Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	
					2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	60,84 %	
					Jumlah kendaraan yang di uji per tahun			
					Jumlah kendaraan wajib uji			





					3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kab., serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	-
						Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	
						Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten	
					4.	Persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalulintas	39,95 %
						Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab.	
						Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten	
2.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,101	0,101	1.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan	39,95 %
						Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab.	
						Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten	





16. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Kominfo

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	14	30,43 %	1.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	30,43 %
		Jumlah OPD	46				
		$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$					
					2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	30,43 %





					<p>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</p> <hr/> <p>Jumlah Perangkat Daerah</p>		
					3.	<p>Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah</p>	Ada 1
2.	<p>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p>	<p>Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <hr/> <p>Jumlah Layanan Publik</p> <p>X 100%</p>	8	100%	1.	<p>Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015</p>	-
			8				





				Jumlah kegiatan (event) Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5 tahun 2015	
				Jumlah kegiatan (event) Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemda	
			2.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100 %
				Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	
				Jumlah Perangkat Daerah	





			3.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundangundangan	100 %
				Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
				Jumlah Perangkat Daerah	
			4.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	12,05 %



				Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah di implementasikan secara elektronik <hr/> Jumlah layanan	
			5.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik <hr/> Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik <hr/> Jumlah layanan	100 %
			6.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %





				$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}}$	
			7.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%
				$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}}$	
			8.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100 %





			$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$	
			9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100 %
			$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$	
			10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100 %
			$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$	



			11.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%
				$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah}}$	
			12.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	-
				$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$	
			13.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	-



						<p>Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo</p> <hr/> <p>Jumlah ASN Pengelola TIK</p>	<p>0 / 4 x 100%</p>
					14.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada
3.	<p>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	<p>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten</p> <hr/> <p>X 100%</p>	489.773	100 %	1.	<p>Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten</p>	-
		<p>Jumlah Penduduk</p>	489.773			<p>Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah</p> <hr/> <p>Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	





			2.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab. sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	-
				Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kab. sesuai dengan STARKOM	
				Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah dan Pem. Kab.	
			3.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STARKOM & SOP yg ditetapkan	-
				Jumlah Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan starategi komunikasi (STARKOM) dan SOP	
				Jumlah Disemniasi dan layanan Informasi Publik	



17. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Koperasi dan UKM

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset	26	21,85 %	1.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-
		Jumlah seluruh Koperasi Aktif	119			Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi pada tahun yang dilaporkan	
						Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang belum mempunyai Izin Usaha Simpan Pinjam	
					2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-





				<p>Jumlah penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam pada tahun yang dilaporkan</p> <hr/> <p>Jumlah permohonan izinPembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam pada tahun yang dilaporkan</p>	
			3.	<p>Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p>	5,12 %
				<p>Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi</p> <hr/> <p>Jumlah Koperasi yang ada</p>	





			4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100 %
				Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	
				Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang ada	
			5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,27 %
				Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
				Jumlah Koperasi yang ada	



			6.	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,027 %
				$\frac{\text{Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian}}{\text{Jumlah Anggota Koperasi yang ada}}$	
			7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-
				$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}}$	



			8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-
			9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,52 %
				$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}}$	
			10.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-
				$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}}$	





			11.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-
				$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}}$	
			12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-
				$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}}$	



					13.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-
						$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}}$	
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Mikro keseluruhan}} \times 100\%$	11	0,04 %	1.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	-
			30.725			$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah Wirausaha yang ada}}$	
					2.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	2,77 %





				$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang di input ke dalam Sistem Data Online (ODS)}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang ada}}$	
			3.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,02 %
				$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang ada}}$	
			4.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,66 %
				$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}}$	





			5.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,15 %
				$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang blm mdptkn dukungan pemasaran}}$	
			6.	Rasio usaha mikro diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,66 %
				$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yg diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang ada}}$	
			7.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	1,65 %
				$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang ada}}$	



18. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Penanaman Modal

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun n} - \text{Jumlah investasi tahun n-1}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1}} \times 100\%$		57,28 %	1.	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	-
			Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten			2.	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal
		Tahun 2022 = 334.741.802.504 Tahun 2023 = 526.496.695.902 $526.496.695.902 - 334.741.802.504 = \mathbf{191.754.893.398}$ $\mathbf{191.754.893.398} / \mathbf{334.741.802.504} * \mathbf{100\%} = \mathbf{57,28\%}$			3.	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	17
					4.	Jumlah Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	3
					5.	Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal	1





			6.	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	5
			7.	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	865
			8.	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	10.285
			9.	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau ditingkat Kabupaten	489.094
			10.	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	4
			11.	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	151
			12.	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	10.285





19. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten	10.221	9,06 %	1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	25 orang
		Jumlah Pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten	112.697		2.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	10 orang
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten	11.023	9,78 %	1.	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	3 orang
		Jumlah Pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten	112.697		2.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	25 orang





3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	23 medali	23	1.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	8
					2.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1



20. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Statistik

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	46	100%	1.	Tersedianya buku profil daerah	Ada 1
		Jumlah OPD	46		2.	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	46
					3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	18
					4.	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	46
					5.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	18
					6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistic sektoral	100 %
						Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	
				Jumlah kegiatan statistik sektoral			





					7.	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100%
						$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}}$	
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	46	100%			
		Jumlah OPD X 100%	46				





21. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Persandian

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	7	4,02 %	1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100 %
		Jumlah area penilaian	174				
						$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan}}$	
					2.	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian disbanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah	-



				$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang menerapkan SMKI dan di amankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah sistem elektronik yang ada}}$	
			3.	Persentase sistem elektronik/ aset informasi yg telah diaudit dgn resiko kategori rendah	-
				$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik atau aset informasi yg telah di audit dgn resiko kategori rendah}}{\text{Jmlh sistem elektronik yg ada}}$	
			4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	-
				$\frac{\text{Jumlah titik yang diamankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}}$	





22. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Kebudayaan

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian	
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	15	26,78 %	1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	102	
		Jumlah Cagar Budaya yang terdata	56					
						2.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	2 Objek
						3.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2 Objek





-			4.	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	56
			5.	Jumlah Cagar Budaya ditetapkan – Jumlah Cagar Budaya dihapuskan (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	-
			6.	Jumlah Cagar Budaya (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)	-
			7.	Jumlah Cagar Budaya diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	-





			8.	Jumlah Cagar Budaya (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	-
			9.	Jumlah Cagar Budaya dimanfaatkan (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)	-
			10.	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	-
			11.	Jumlah pengunjung museum	-
				Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	-
			12.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak perlu diisi





			13.	Jumlah tim pendaftaran Cagar Budaya yang dibentuk	Ada 7
			14.	Jumlah pembentukan tim ahli Cagar Budaya	-
			15.	Jumlah ahli Cagar Budaya yang disertifikasi	-
			16.	Jumlah SDM Cagar Budaya + Jumlah SDM Museum	-
			17.	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (Cagar Budaya + Museum)	-
			18.	Jumlah sarana dan prasarana (Cagar Budaya + Museum)	-
			19.	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	-



23. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Perpustakaan

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	167.649	167.649	1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	5,59 %
						Koleksi Perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) Jumlah penduduk (dalam jiwa)	
					2.	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	12,05 %
					Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite Jumlah penduduk (dalam jiwa)		
					3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,12 %



						Jumlah ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya <hr/> Jumlah penduduk (dalam jiwa)	
					4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional <hr/> Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan <hr/> Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis di wilayahnya	6,48 %
					5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	23
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	54,87	54,87	1.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar	6
					2.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	5
					3.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar (item)	3





24. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Kearsipan

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai tingkat ketersediaan arsip $T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	a=100% + i=100% + s=100% + j=0,00% = 300%/4	75,00 %	1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip <hr/> Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip <hr/> Jumlah seluruh arsip aktif	100 %
					2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip <hr/> Jumlah arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip <hr/> Jumlah seluruh arsip inaktif	100 %
					3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik <hr/> Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik <hr/> Jumlah seluruh arsip statis	100 %
		$T = 68,00\%$ $(a = 100\%) + (i = 100\%) + (s = 100\%) + (j = 0,00\%) = 100\%$ $300\% / 4 = 75,00\%$					





					4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-
						Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	
						$\frac{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis Pemerintah Kabupaten}}{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}$	
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai tingkat keberadaan dan keutuhan arsip $T = (m + b + g + a + c + i)/6$	-	-	1.	Jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	-
					2.	Jumlah perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-
					3.	Jumlah penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten	-





			4.	Jumlah Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	-
			5.	Jumlah pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan	-
			6.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	-





25. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Perikanan

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data : one data KKP)		100 %	1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	3.351
		Total Produksi Perikanan = 2.138,41 Ton			2.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	-
		Target Produksi Perikanan = 2.135,12 Ton				$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten}}$	
					3.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	-



			4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	29
			5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	29.246





26. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Pariwisata

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{Jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	2	100 %	1.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	17
		Jumlah wisatawan tahun n-1	2		2.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	34
		Wisman 2022 = 2			3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	781
		Wisman 2023 = 4			4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	4
					5.	Jumlah promosi event daerah yg terlaksana di dalam negeri	2
					6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten	-
					7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	-



			8.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	-
				$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}}$	
			9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100 %
				$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}}$	
			10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	-



2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan (nusantara) tahun n - Jumlah wisatawan (nusantara) tahun n-1	11.439	20,31 %	Wisatawan Nusantara 2022 = 56.310 Wisatawan Nusantara 2023 = 67.749
		Jumlah wisatawan (nusantara) tahun n-1	56.310		
3.	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	6.787	9,78 %	
		Jumlah kamar yang tersedia	69.350		
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,91 %	0,91 %	
5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,003 %	0,003 %	



27. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Pertanian

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	669,34	1,21 %	1.	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	50
		Luas Panen	55.496		2.	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	45
					3.	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	15
					4.	Persentase prasarana yang digunakan	100 %
						$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}}$	



					5.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	100%
						$\frac{\text{Jumlah usulan izin usaha pertanian yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan izin usaha pertanian}}$	
2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) - Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	1	100 %	1.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 %
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	1			$\frac{\text{Jumlah area bencana yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}}$	





28. Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Kehutanan

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.					1.	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	-
					2.	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	13
					3.	Luas areal tahura yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	-
					4.	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	-



29. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	-		1.	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	-



30. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Perdagangan

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian	
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	836	31,09 %	1.	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	a. b.	
		Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten	2.689		a.	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	 / x 100%
					b.	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	 / x 100%
						Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		
						Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		





			2.	Persentase penerbitan TDG	-
				$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}}$	
			3.	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	
				$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kabupaten}} \times 100\%$ / x 100%
			4.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	
				a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	a.
				b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	b.
				c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	c.



			a.	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap/benar <hr/> Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri / x 100%
			b.	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar <hr/> Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri / x 100%
			c.	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar / x 100%



				Jumlah permohonan STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri	
			5.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	
				Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten /
				Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	x 100%
			6.	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	





			<p>Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam)</p> <hr/> <p>Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar</p>	<p>..... / x 100%</p>
			<p>7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> <p>Rumus : $K = (a + b) \times 100\%$</p> <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> <p>a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</p> <p>b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>	





					8.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	9,16
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk (ton)	26.529.800	90,70 %	1.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan Rumus : $\chi = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan A = Jumlah pupuk yang disalurkan B = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) C = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan kelompok)	26.529.800
		RDKK (ton) X 100%	29.221.000				





3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	513	36,64 %	1.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	36,64 %	
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten	1.400		Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan			
						2.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100 %
						Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku		
				Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan				





31. Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output Urusan Perindustrian

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n} - \text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n-1}}{\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n-1}} \times 100\%$	519	13,25 %	1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-
Tahun 2023 = 4.435 Tahun 2022 = 3.916						Jumlah realisasi izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin usaha perluasan kawasan industri (IPKI) yang diterbitkan <hr/> Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	-



2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$	100		1.	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100 %
		Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$			Tahapan :		
		Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut			a.	Tersusunnya naskah akademik (30%)	Ada
					b.	Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)	Ada
					c.	Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)	Ada
					d.	Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)	Ada
					e.	Penetapan Perda RPIK (10%)	Ada





3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dipantau dan di analisis dlm laporan hasil pemantauan	36	100%	1.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industry (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100 %
		Jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	36			Jumlah realisasi izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dipantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan	-		1.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-
		Jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	-			Jumlah realisasi izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan menengah yang diterbitkan	
						Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	



5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dipantau dan di analisis dalam laporan hasil pemantauan	-	-			
		Jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan X 100%	-				
6.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 	50 %	60 %	1.	Persentase data perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	-





		<p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>	10 %			<p>Jumlah data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab di SIINas</p> <hr/> <p>Total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten</p>	
--	--	---	------	--	--	--	--





32. Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Transmigrasi

No.	IKK Outcome	Rumus	Data 2023	Capaian	No.	IKK Output	Capaian
					1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	1 Kampung
					2.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 Kampung Kp. Way Tuba
					3.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	3 Kampung



33. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi Fenunjang	No.	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Data 2023	Capaian
PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	428.707.583.054	30,72 %
				1.395.535.691.960	
	2.	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$	81.405.102.578,47	5,98%
				1.361.130.364.439,5	
	3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3
	4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3



	5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures (realisasi)	934.313.667.542	66,95 %
			_____ X 100%	1.395.535.691.960	
			Jumlah belanja APBD (realisasi)		
	6.	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	WTP	WTP
PENGADAAN	1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	0	0,00%
			_____ X 100%	7.062 kontrak	
			Jumlah kontrak keseluruhan thn n		
	2.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	177	2,50 %
_____ X 100%			7.062		
			Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		



	3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang dilakukan melalui pengadaan _____ X 100%	455.145.459.275,7	97,48 %
			Total belanja Langsung	466.898.175.814	
KEPEGAWAIAN	1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas _____ X 100%	1.256	80,31 %
			Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	1.564	
	2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) _____ X 100%	331	21,16 %
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.564	





	3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan) X 100%	55	3,51 %
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.564	
MANAJEMEN KEUANGAN	1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja	1.347.022.390.434,8	3,47 %
			Total belanja APBD X 100%	1.395.535.691.960	
	2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi	79.400.411.051,75	99,90
			Total PAD dalam APBD X 100%	81.405.102.102.579	
	3.	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap?	1. Ya	4
			2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	2. Ya	
3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?			3. Ya		
4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?			4. Ya		





	4.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SILPA Total belanja anggaran tahun sebelumnya X 100%	21.602.874.967,49 1.298.465.949.488,1	1,66 %
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda X 100%	667.173.530.189	98,80 %
			Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	689.228.723.435	
	2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda X 100%	8	100 %
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	8	

C. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan. Sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, hal ini akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana

yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, bahwa perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia. Semua

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan Sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini memuat Sasaran Strategis, indikator Kinerja Utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2023, IKU dan APBD. Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan PK Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan Kualitas Briokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	57,50
	➤ Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	62,01
	➤ Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	79,01
	➤ Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,6841
	➤ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik	Poin	9,24
	➤ Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Nilai Komponen Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Poin	9,44
	➤ Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	Poin	5,55
	➤ Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	58,01
	➤ Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik	Poin	83
	➤ Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE	Poin	2,75

2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,43
	➤ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,43
3	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,39
	➤ Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,00
	➤ Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42
	➤ Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,79
	➤ Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	9,40
	➤ Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Cakupan PMKS yang tertangani	%	8,72
	➤ Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,90
	➤ Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya
	➤ Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,90
	➤ Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6608
	➤ Meningkatnya Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,32
	➤ Mengurangi Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	131,19
	➤ Menurunnya Konflik Sosial	Angka Konflik Sosial	Kasus	0
	➤ Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,85
4	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4
	➤ Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	4
	➤ Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	3,5
	➤ Meningkatnya Usaha Konstruksi	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	%	5

➤ Meningkatnya Usaha Perdagangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5
➤ Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	%	5
➤ Meningkatnya Usaha Pariwisata	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	6
➤ Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian	Persentase Peningkatan omset Koperasi	%	6,38
➤ Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk	%	7,35
➤ Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Poin	6,71
➤ Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75
➤ Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	Indeks Penataan Ruang	%	50
➤ Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	%	3-5

2. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel II.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

3. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

IKU Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis telah dilakukan perubahan dimana sebelumnya terdapat 59 Indikator Kinerja, maka setelah perubahan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 memiliki 4 Tujuan, 35 Sasaran Strategis dengan masing-masing sasaran strategis terdapat 1 Indikator Kinerja Utama. Sehingga keseluruhan terdapat 35 indikator kinerja Utama (outcomes).

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Adapun capaian Kinerja Utama Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel II.4
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dalam Rangka Pencapaian Misi

No	Misi / Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023				Kondisi Nasional
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
	Meningkatkan Kualitas Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	57,5	55,56	96,63	Sangat Tinggi	(rata-rata nasional)
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan							
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,43	67,2	98,20	Sangat Tinggi	72,54
3	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya							
	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,39	70,51	103,10	Sangat Tinggi	74,39
4	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur							
	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4	4,63	115,75	Sangat Tinggi	5,31



Pencapaian masing-masing Tujuan dan target kinerja tujuan yang terkait yang direncanakan dalam Tahun 2023, sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 tujuan dan indikator kinerja tujuan selama Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator tujuan capaian kinerjanya Sangat Tinggi dengan capaian kinerja di atas 100% dan capaian rata-ratanya adalah sebesar 103,42%.

Adapun capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel II.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Briokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	57,5	55,56	96,63
	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	62,01	60,52	97,60
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	79,01	77,5	98,09
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,6841	0,958	140,04
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik	Poin	9,24	3,41	36,90
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Nilai Komponen Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Poin	9,44	-	-
	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	Poin	5,55	-	-
	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	58,01	53,35	91,97





	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik	Poin	83	-	-
	Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE	Poin	2,75	3,08	112,00
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,43	67,20	98,20
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,43	67,20	98,20
3	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,39	70,51	103,10
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70	69,91	99,87
	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,43	100,08
	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,79	7,74	99,36
	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	9,4		0,00
	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Cakupan PMKS yang tertangani	%	8,72	8,72	100,00
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	11,9	11,02	107,39
	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	100,00



	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,9	1,22	64,44
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6608	0,7306	110,56
	Meningkatnya Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,32	88,5	100,20
	Mengurangi Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	131,19	120,97	92,21
	Menurunnya Konflik Sosial	Angka Konflik Sosial	Kasus	0	0	100,00
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,85	78,34	106,08
4	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4		0,00
	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	4	0,01	0,25
	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	3,5	2,11	60,29
	Meningkatnya Usaha Konstruksi	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	%	5	8,17	163,40



Meningkatnya Usaha Perdagangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5	13,44	268,80
Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	%	5	19,24	384,80
Meningkatnya Usaha Pariwisata	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	6	13,28	221,33
Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian	Persentase Peningkatan omset Koperasi	%	6,38	-	-
Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk	%	7,35	-	-
Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Poin	6,71	7,79	116,10
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75	73,32	97,76
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	Indeks Penataan Ruang	%	50	99,71	199,42
Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	%	3-5	4,55	100,00



4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

4.1 Pencapaian Misi ke-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika serta tuntutan masyarakat, kinerja pemerintah Kabupaten Way Kanan selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian Pemerintah Daerah untuk selalu memperbaiki derajat pelayanannya. Oleh karenanya segala program pembangunan Pemerintah Daerah selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Untuk mengukur derajat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, mulai periode awal RPJMD tahun 2021-2026 akan dilakukan perhitungan indeks tata kelola pemerintahan yang baik dalam wujud indeks reformasi birokrasi. Indikator ini dipandang relevan untuk menggambarkan kualitas tata kelola pemerintahan di instansi pemerintah dimana penilaian indeks reformasi birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi (RB) adalah kegiatan perubahan yang membawa perbaikan secara berkelanjutan pada birokrasi pemerintah, agar menjadi birokrasi baru yang lebih baik dan kuat sebagai elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pada tataran kebijakan, berbagai kebijakan sudah dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan RB ini, baik sebagai rujukan maupun kebijakan yang secara langsung

mengatur tentang pelaksanaan RB di Indonesia. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perbaikan dan perubahan pada birokrasi ke arah yang lebih baik. Indeks RB mencerminkan kualitas perbaikan birokrasi menuju birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam pembangunan nasional Indonesia, Reformasi birokrasi telah menjadi fokus utama. Maka dalam rangka mencapai visi "World Class Bureaucracy," pemerintah telah menetapkan sejumlah agenda prioritas, di antaranya adalah reformasi birokrasi. Visi ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan memiliki manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mencapai visi tersebut menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menjadi pedoman dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sejalan dengan komitmennya mewujudkan Way Kanan Unggul dan Sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam visi pembangunan Kabupaten Way Kanan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibangun dengan mempedomani prinsip dasar Reformasi Birokrasi yaitu : dinamis, holistik, berorientasi hasil, kolaboratif, sinergis dan

kontinuitas. Selain itu aspek penting yang juga penting telah membantu dalam peningkatan capaian ini yaitu ketepatan dalam desain program kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi sehingga apa yang telah dirancang dengan tepat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta keberhasilan pencapaian sasaran dimana keharusan untuk mencermati sejauh mana sasaran-sasaran reformasi telah tercapai. Sehingga capaian Reformasi Birokrasi ini bukan hanya capaian dalam angka yang membanggakan namun yang terpenting adalah dampak atau manfaat bagi masyarakat dan pembangunan.

Prinsip pelaksanaan reformasi birokrasi tahun ini, bersifat dinamis, holistik, berorientasi pada hasil, kolaboratif dan sinergis. Pada penilaian RB tahun ini masih menggunakan lembar kinerja evaluasi (LKE) lama pada PermenPANRB No. 26 tahun 2020. Terdapat beberapa indikator urusan penunjang yang akan diturunkan dari RB, sebagaimana diketahui bahwa RB tahun ini terdapat dua jenis RB yaitu RB General dan RB Tematik. Berkaitan dengan RB General di perangkat daerah memiliki tiga capaian indikator, seperti capaian sasaran strategis, capaian pelaksanaan kebijakan RB dan capaian strategis pelaksanaan kebijakan RB. Untuk RB Tematik sendiri, berfokus pada isu tematik pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan investasi, pengendalian laju inflasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN), dan kinerja core bisnis perangkat daerah. Adapun capaian dari

RB tematik tersebut yaitu realisasi belanja PDN dalam belanja daerah, digitalisasi administrasi pemerintahan dan capaian kinerja publik.

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan melalui penerapan Reformasi General dan Tematik dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan. Saat ini road map RB pemerintah daerah tengah dilakukan penajaman sesuai dengan PermenPANRB Nomor 3 tahun 2023. Penajaman pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi ini lebih melihat hasil dan juga dampak dibandingkan dengan proses, menghilangkan kesan penilaian yang bersifat administratif, serta harmonisasi, integrasi dan sinergitas indikator penilaian reformasi birokrasi. Adapun tujuan dari pelaksanaan evaluasi yaitu memberikan saran perbaikan.

Berdasarkan Surat Kementerian PAN-RB Nomor B/381/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 perihal Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah 55,56 dengan kategori "CC".

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023 sebesar 55,56, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 55,49, sehingga capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,07 poin. Hasil akhir seluruh aspek reformasi birokrasi, ukurannya bagaimana

kualitas pelayanan kepada instansi pemerintah dan masyarakat. Ujungnya ada di pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Way Kanan.

Capaian Reformasi birokrasi melalui penerapan Reformasi General Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Capaian Reformasi General Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	0,88	0,88
2	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	0	0
3	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0,8
5	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,019	2,42
6	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5	0,5
7	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	60,52	2,42
8	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5		
9	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	7,71	0,19
10	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5		
11	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	0	0
12	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2,5	55,54	1,39

13	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	1,33	0,67
14	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	59,04	1,48
15	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	209	2,04
16	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1,5	3,41	1,02
17	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	80,13	1,2
18	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3,08	5,54
19	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2
20	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	45,95	2,22
21	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5
22	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	75,9	3,04
23	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	4	62,7	2,51
24	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	70,49	7,05
25	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	90,45	7,24
26	Koefisien	Koefisien	10	-	-

Sumber : Surat Kementerian PAN-RB Nomor B/381/RB.06/2024

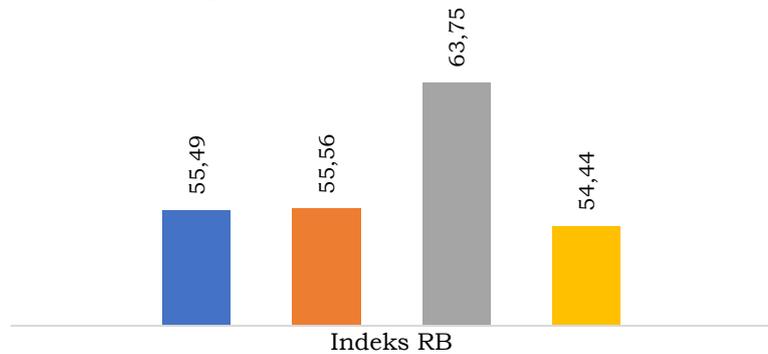
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi perlu langsung menasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata. Pada tahun 2023, RB tematik ada 4 fokus tema utama yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting dan prioritas Presiden yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan

produk dalam negeri. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada rencana aksi reformasi birokrasi tematik hanya fokus pada tema penanggulangan kemiskinan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Sehingga nilai Reformasi Birokrasi tematik Kabupaten Way Kanan hanya mencapai nilai 3,95 poin dengan rincian nilai RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan memperoleh nilai 1,16 poin dan Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri mendapat nilai 2,21 poin.

Perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya, target akhir periode dan capaian tingkat nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi

■ Tahun 2022 ■ Tahun 2023 ■ Target Akhir Periode ■ Capaian Nasional 2023



Tahun 2022	55,49
Tahun 2023	55,56
Target Akhir Periode	63,75
Capaian Nasional 2023	54,44

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan

efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dalam mewujudkan Misi Ke-1, terdapat 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang mendukung Tujuan Meningkatnya Kualitas Birokrasi, yaitu :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 2) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- 6) Meningkatnya Kinerja Organisasi;
- 7) Meningkatnya Inovasi Daerah;
- 8) Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
- 9) Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Analisis Capaian Sasaran 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten”. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pelaksanaan SAKIP merupakan

bagian pelaksanaan tata kelola pemerintahan, yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kinerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran, serta pelaporan kinerja. Capaian Nilai Sakip tahun 2023 diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Way kanan Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB. Nilai SAKIP merupakan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tingkat akuntabilitas atas penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Pengukuran ini dilaksanakan melalui pengukuran komponen-komponen tata kelola SAKIP. Dengan nilai yang diperoleh, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang mengandung kelemahan untuk dilakukan perbaikan.

Berdasarkan Surat Kementerian PAN-RB Nomor : B/265/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memperoleh nilai 60,52 atau dengan predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.

Tabel II.7
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah

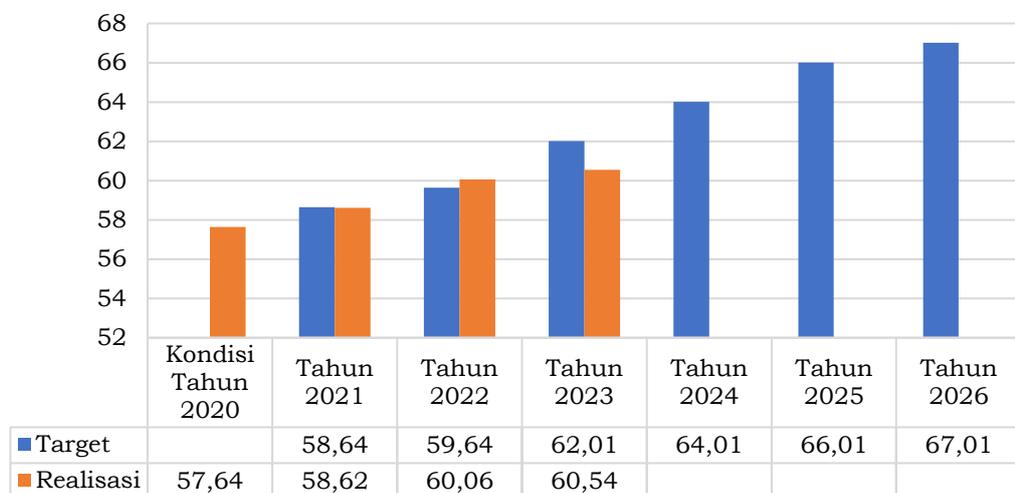
Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	62,01	62,01	60,52	97,60

Sumber : KemenpanRB, Hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Realisasi Nilai Sakip Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah sebesar 60,06 dengan capaian kinerja 100,70% dari yang ditargetkan yakni sebesar 59,64. Realisasi “Nilai SAKIP” Tahun 2023 meningkat sebesar 01,44 poin atau 2,45% dari tahun sebelumnya. Capaian ini merupakan hasil evaluasi atas kinerja tahun 2021 dengan meningkatkan implementasi SAKIP pada Tahun 2023 dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi atas hasil evaluasi Tahun 2021.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Nilai SAKIP” tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut :

Target Dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Nilai SAKIP” Tahun 2021-2026



Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- a. Agar Pimpinan OPD lebih memberikan perhatian khusus pada penerapan SAKIP;

- b. Penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu;
- c. Penyelesaian target kinerja tingkat Pemerintah Daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau *crosscutting* program;
- d. Monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong pencapaian kinerja.

Beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Mengawal optimisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi e-SAKIP Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Way Kanan meskipun saat ini sedang dalam tahap pengembangan aplikasi. Nantinya aplikasi digunakan sebagai tool dalam mengelola data kinerja sehingga memudahkan dalam mengawal kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- b. Menyusun pedoman pengukuran, pemantauan dan pelaporan kinerja dengan menerbitkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Per 31 Desember 2023, draft pedoman tersebut dalam proses pembahasan akhir sebelum ditandatangani oleh Bupati Way Kanan.
- c. Mengupayakan pelaksanaan *Self-Assessment* SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan berkoordinasi dengan Inspektorat sebagai pereviu untuk memperoleh gambaran kualitas SAKIP

di lingkungan unit kerja masing-masing. Diharapkan seluruh Perangkat Daerah telah selesai melaksanakan SAKIP dan mengupayakan perbaikan SAKIP di lingkungan kerja masing-masing.

d. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Kementerian PAN-RB Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Melakukan Perbaikan IKU dan Cascading Kinerja Pemerintah Kabupaten dan OPD bekerjasama dengan Tenaga Ahli dari UGM Yogyakarta serta meriviu kembali IKU dan Cascading hasil perbaikan antara OPD dengan Tenaga Ahli untuk memastikan kualitas penjenjangan kinerja berorientasi hasil dengan memperhatikan Logical Framework dan CSF;
- 2) Menyusun Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pedoman SAKIP dan Pedoman Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja;
- 3) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap tingkat organisasi guna:
 - memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented);
 - memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) terutama pada kriteria spesifik, relevan, dan terukur;

- 4) Meriviu kembali dokumen perencanaan setiap tingkat organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja;
- 5) Menggunakan Hasil Analisa atas pencapaian target sebagai bahan penyusunan rencana kinerja dan target tahun berikutnya sebagai langkah perbaikan dalam perencanaan kinerja;
- 6) Mengembangkan e-SAKIP yang terintegrasi dan dimanfaatkan dalam proses pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala;
- 7) Menyusun pedoman pemberian *reward and punishment* atas penilaian / evaluasi kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- 8) Menyusun Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pedoman SAKIP yang mengatur pelaksanaan pelaporan kinerja secara berkala;
- 9) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala (setiap triwulan) yang berfokus pada pencapaian kerjanya selain realisasi anggaran;
- 10) Menyusun Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pedoman SAKIP yang mengatur pengumpulan data kinerja secara berkala dan melaporkan hasil data kinerja tersebut sebagai reviu atas pencapaian kinerja;
- 11) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengumpulan data kinerja secara berkala dan melaporkan hasil data kinerja;
- 12) Menyusun Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pedoman SAKIP sebagai pedoman dalam penyusunan laporan kinerja;

- 13) Meningkatkan kualitas dalam analisis pencapaian kinerja untuk dapat memberikan informasi yang mendalam atas capaian kinerja sehingga dapat digunakan dalam perencanaan kinerja selanjutnya;
- 14) Menyusun Peraturan Bupati Way Kanan tentang Pedoman SAKIP dan Pedoman Evaluasi internal sesuai dgn Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 15) Seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi internal yang telah dilakukan oleh inspektorat melalui penyusunan rencana tindak lanjut sebagai media dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- 16) Memantau tindak lanjut evaluasi internal dalam penyusunan rencana tindak lanjut sebagai media dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Analisis Capaian Sasaran 2 :

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.

Ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur yaitu (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD; (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah; (4) Penyerapan anggaran; (5) Kondisi keuangan daerah; dan (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengelompokan hasil IPKD dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah.

Salah satu tolok ukur Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan adalah Opini atas laporan keuangan berdasarkan audit BPK. BPK melaksanakan audit berdasarkan standar audit keuangan negara yang mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan yang diaudit bebas dari kesalahan penyajian material. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan akan diberikan opini dan rekomendasi sebagai bentuk apresiasi

dari BPK. Selain itu, pemberian opini audit ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan Keuangan pemerintah atas informasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan pemerintah diwujudkan dalam bentuk opini audit yang terdiri dari empat jenis opini, yaitu :

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- 3) Tidak Memberikan Pendapat (TMP); dan
- 4) Tidak Wajar (TW).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, BPK RI memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023. Dengan perolehan Opini WTP Tahun 2023 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut. Hal-hal yang telah dilakukan dalam mempertahankan opini WTP antara lain :

- 1) Melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan seluruh Satuan Kerja di Lingkungan BPKP sebelum penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023;
- 2) Menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku;
- 3) Menyampaikan Laporan Keuangan sebelum batas akhir yang ditentukan;
- 4) Menindaklanjuti temuan Laporan Keuangan sesuai dengan rekomendasi yg telah diberikan oleh BPK RI.

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah cermin bagi kita untuk harus melakukan perbaikan dan perubahan terus menerus mewujudkan peningkatan

kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah. IPKD diharapkan dapat memacu dan memotivasi daerah untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemendagri telah mengembangkan aplikasi untuk pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten. OPD terkait agar melakukan input di aplikasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemendagri akan memberikan reward dan punishmen atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hasil penilaian dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu :

- 1) Kategori A : Baik;
- 2) Kategori B : Perlu Perbaikan;
- 3) Kategori C : Sangat perlu Perbaikan.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu kunci penting dan urat nadi penyelenggaraan pemerintah daerah. Selama ini, sejumlah permasalahan di Indonesia terkait tata kelola keuangan daerah ditengarai masih kerap terjadi untuk itu perlu dilakukan langkah percepatan perbaikan dan pedoman dari sisi regulasi.

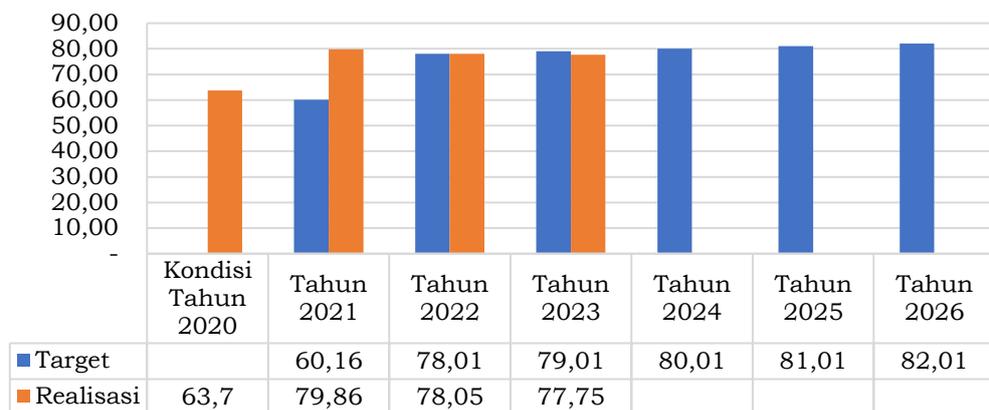
Tabel II.8
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	79,86	79,01	77,5	98,09

Sumber : Hasil Evaluasi IPKD Kemendagri

Dari hasil Pengukuran IPKD Tahun 2023, diperoleh Nilai IPKD Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar 78,05. Hal ini menunjukkan bahwa capaian IPKD Tahun 2023 adalah 129,48% dibandingkan dengan target tahun 2023, yaitu sebesar 60,28. Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)” tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik dibawah :

**Target dan Realisasi Kinerja Indikator
Sasaran Strategis “IPKD”
Tahun 2021-2026**



Realisasi Indikator Kinerja “IPKD” Tahun 2023 tersebut turun sebesar dari tahun sebelumnya. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa Target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 masih dibawah capaian IPKD Kabupaten Way Kanan. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dalam penetapan target sehingga terjadi undervalued dalam penetapan target kinerja. Perlu direviu Kembali target IPKD tahun-tahun selanjutnya. Target yang ditetapkan harus Achievable dan menantang agar seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat bekerja keras dalam melaksanakan target

yang ditetapkan. Selain itu diperlukan kerjasama dan kerja keras seluruh perangkat daerah dan seluruh jajaran ASN di Kabupaten Way Kanan serta meningkatkan motivasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Analisis Capaian Sasaran 3 :

Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah adalah Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Indeks kapasitas fiskal dibagi menjadi empat golongan yaitu (1) kapasitas fiskal sangat tinggi, (2) kapasitas fiskal tinggi, (3) kapasitas fiskal sedang dan (4) kapasitas fiskal rendah. Kapasitas fiskal daerah merupakan kebijakan yang sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan pada pemerintah pusat maupun perumusan kebijakan pada pemerintah daerah.

Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2020. Kapasitas fiskal daerah sebagai unsur dalam penyusunan peta kapasitas fiskal daerah.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 PMK 120/2020 peta kapasitas fiskal daerah yaitu gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Dalam menyusun peta kapasitas fiskal daerah, dari daerah provinsi atau kabupaten/kota, pelaksanaannya lewat 2 tahap. Di antaranya, menghitung kapasitas fiskal daerah provinsi/kabupaten/kota, lalu menghitung indeks kapasitas fiskal daerah provinsi/kabupaten/kota. Dihitungnya kapasitas fiskal daerah melalui formula pendapatan dikurangi atas pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu. Pendapatannya yaitu pada daerah provinsi mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan, pada pendapatan yang pemakaiannya telah ditentukan pada daerah provinsi mencakup pajak rokok, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam, dana reboisasi, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik dan dana otonomi khusus.

Tabel II.9
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

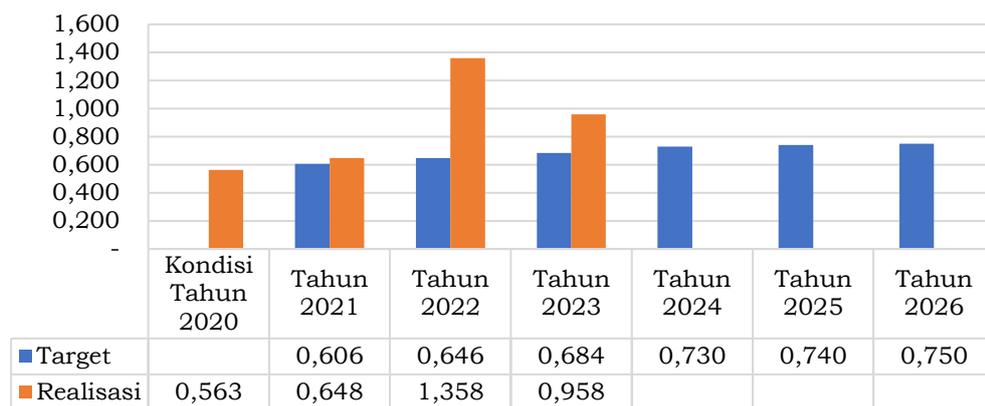
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,648	0,6841	0,958	140,04

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, telah ditetapkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 sebesar 0,958 atau pada Kategori Kapasitas Fiskal Rendah.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Indeks Kapasitas Fiskal Daerah” tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik dibawah :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Indeks Kapasitas Fiskal Daerah” Tahun 2021-2026



Analisis Capaian Sasaran 4 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara

dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan egovernment sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Dalam hal pemberian pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk memenuhi standar pelayanan Publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menekankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Publik baik dalam bidang perizinan maupun non perizinan lainnya agar melakukan upaya selalu memenuhi standar pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga di nilai oleh Ombudsman RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ombudsman RI menilai Kepatuhan terhadap Standar pelayanan publik dengan hasil zona kepatuhan terhadap standar pelayanan publik

berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 sementara KemenPANRB menilai kualitas pelayanan dengan hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah penilaian untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dengan hasil akhirnya berupa Opini Pengawasan Pelayanan Publik.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah dinilai oleh Ombudsman dari Tahun 2018. Pada awal penilaian, Pemerintah Kabupaten Way Kanan berada pada Zona Merah dengan nilai 42,29. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dengan cara memenuhi standar pelayanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hasilnya pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendapat Nilai 97,12 atau pada Zona Hijau kategori kepatuhan tinggi. Dengan nilai tersebut Kabupaten Way Kanan menempati peringkat 4 (empat) nasional dan peringkat pertama untuk wilayah Sumatera. Pada Tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, Penilaian kepatuhan tidak dilaksanakan dan dilaksanakan Kembali pada Tahun 2021 dimana Pemerintah Kabupaten Way

Kanan masih berada pada Zona Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau dengan nilai 88,61.

Selanjutnya Ombudsman dalam melakukan penilaian tahun 2023 melakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan. Ada 4 (empat) dimensi yang dinilai, yaitu kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, pemenuhan standar pelayanan publik, serta pengelola pengaduan. Kategori penilaian tahun ini menggunakan kategori sebagai berikut :

Interval Nilai Kategori Opini Zonasi

- 88.00-100, Kategori A, Kualitas Tertinggi, Zona Hijau
- 78.00-87.99, Kategori B, Kualitas Tinggi, Zona Hijau
- 54.00-77.99, Kategori C, Kualitas Sedang, Zona Kuning
- 32.00-53.99, Kategori D, Kualitas Sedang, Zona Merah
- 0-31.99, Kategori E, Kualitas Rendah, Zona Merah

Pada penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI, pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendapatkan nilai 80,13 / Opini Kualitas Tinggi. Nilai ini menempatkan Kabupaten Way Kanan pada posisi kedua kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang mendapatkan nilai tertinggi setelah Kota Metro.

Selain penilaian oleh ombudsman, Kementerian PANRB juga melaksanakan evaluasi pelayanan publik. Pada Penilaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dilaksanakan pada 3 (tiga) unit pelayanan yaitu Dinas Sosial, Kecamatan Blambangan Umpu dan RSUD Z.A

Pagar Alam Kabupaten Way Kanan. Hasilnya pada Tahun 2023 Kabupaten memperoleh Nilai Rata-rata IPP sebesar 3,41 kategori B-, dimana Dinas Sosial mendapatkan nilai 3,79 atau kategori B, Kecamatan Blambangan Umpu mendapatkan Nilai 2,83 atau Kategori C dan RSUD ZAPA mendapatkan nilai 3,41 atau kategori B.

Dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, Indikator yang digunakan untuk mengukur Kualitas Pelayanan Publik adalah Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun, Tahun 2023 terdapat perubahan penilaian pada pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kemen PANRB, sehingga tidak terdapat nilai komponen Kualitas Pelayanan Publik pada Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin baik. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Way Kanan, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas sarana prasana;
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan;
- 4) Meningkatkan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- 5) Mengembangkan pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik.

Analisis Capaian Sasaran 7 :

Meningkatnya Inovasi Daerah

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Persoalan penting pembangunan di Kabupaten Way Kanan yang perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi prioritas pembangunanaerah tahun 2021, meliputi : (1) Penanggulangan kemiskinan; (2) Penguatan daya saing ekonomi daerah; (3) Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka mendukung bonus demografi; (4) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana; (5) Perwujudan ketahanan pangan dan energi; (6) Pengurangan kesenjangan wilayah; dan (7) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah. Berbagai persoalan pembangunan tersebut perlu menjadi arena kolaborasi dan koordinasi berbagai pihak secara inovatif.

Guna mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera, maka perlu menata aktivitas kelitbangan yang

mengarah pada upaya penataan kerangka kelembagaan inovasi pembangunan, penataan kerangka jejaring inovasi pembangunan, dan penataan kesumberdayaan inovasi pembangunan daerah. Kebijakan penataan unsur SIDA Kabupaten Way Kanan berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang kondusif, khususnya bagi aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan dan dunia usaha.

Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi dan internalisasi budaya inovasi. Tujuan utamanya ialah menciptakan interaksi produktif multipihak yg saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik inovasi terbaik dan hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Tabel II.10
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Inovasi Daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Inovasi Daerah	Poin	52,05	58,01	53,35	91,97

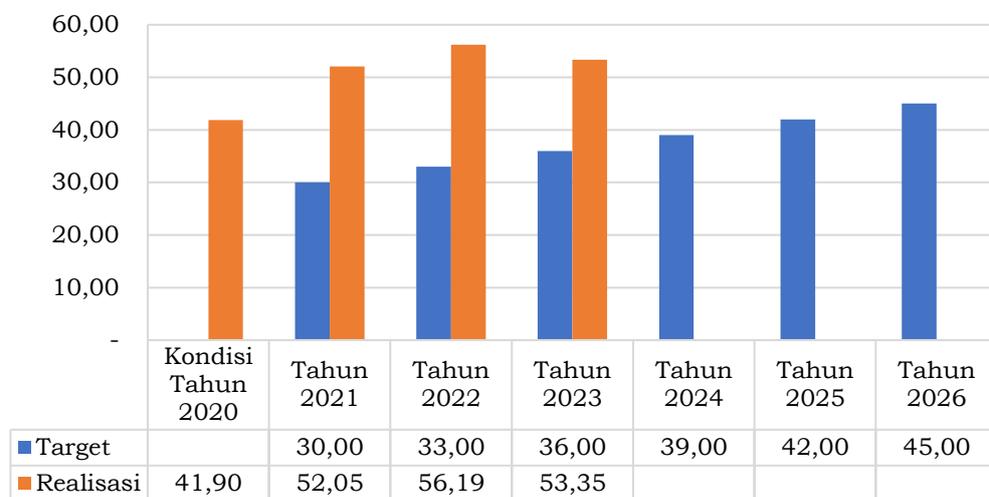
Sumber : Kemendagri

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur Inovasi Daerah dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah Indeks Inovasi Daerah yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. B. Pada Tahun

2023 Kabupaten Way Kanan memperoleh nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 53,35 atau kategori Inovatif.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “IID” tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “IID” Tahun 2021-2026



Pemerintah Kabupaten Way Kanan berupaya meningkatkan skor agar dapat meningkatkan indeks inovasi daerah, namun sampai saat ini masih menemui beberapa kendala diantaranya tidak semua OPD mengirimkan data inovasi. Data yang dikirim oleh OPD banyak yang tidak lengkap, sehingga kedepan harapannya data inovasi dari OPD telah disesuaikan dengan parameter yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Untuk itu diperlukan kerjasama dan kerja keras seluruh perangkat daerah dan seluruh jajaran ASN di Kabupaten Way Kanan serta meningkatkan motivasi untuk meningkatkan inovasi.

Analisis Capaian Sasaran 8 :

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mengetahui ketaatan dan kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, mengetahui kendala-kendala Badan Publik dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan mendapatkan gambaran kinerja PPID sebagai bahan perbaikan standar layanan informasi Publik. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat juga dapat memberikan input, saran, dan masukan kepada pemerintah. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance). Gambaran umum pelayanan informasi publik di Kabupaten Way Kanan telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini gambaran umum pelaksanaan informasi publik, sebagai berikut :

1) Sarana dan Prasarana :

Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Way Kanan terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media :

- a) Website: <https://ppid.waykanankab.go.id/>;
- b) Ruang Layanan PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan;
- c) Telepon layanan informasi Telp. (0723) 4761735;
- d) Email : diskominfo@waykanankab.go.id.

2) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

Tabel II.11
Susunan Organisasi PPID Kabupaten Way Kanan

No	Kedudukan Dalam PPID	Jabatan
1.	Pembina	Bupati Way Kanan
2.	Penasehat	Wakil Bupati Way Kanan
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah
4.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5.	Ketua PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan
6.	Bidang-Bidang :	
	1. Bidang Pelayanan Informasi Publik	Kepala Bagian Prokopim Setdakab Way Kanan
	2. Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Way Kanan
	3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
4. Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Kepala Bagian Hukum Setdakab Way Kanan	
7.	Pejabat PPID Pembantu	Kepala Organisasi Perangkat Daerah
	<u>Bidang – Bidang :</u>	
	1. Bidang Pelayanan Informasi Publik	Sekretaris Badan/Dinas/Kepala Bagian se-Kabupaten Way Kanan
	2. Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Kepala Bidang/Kepala Bagian se-Kabupaten Way Kanan
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kasubbag Tata Usaha se-Kabupaten Way Kanan	

- 3) Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada website PPID pada laman <https://ppid.waykanankab.go.id/>

Sasaran Strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik di ukur melalui indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan

implementasi pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui berbagai kanal yang ada. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kab. Way Kanan Tahun 2020 sebesar 94,96 poin dan menjadi nilai tertinggi se-Provinsi Lampung. Selanjutnya dikarenakan Pandemi Covid-19, maka Komisi Infomasi Provinsi Lampung tidak mengadakan penilaian lagi.

Kendala yang ada dalam pengelolaan PPID antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia yang khusus menangani Pelayanan PPID, Belum tersedianya Ruang khusus Pelayanan PPID dan Ruang Penyimpanan Dokumen Publik serta masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan PPID untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu maka langkah pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a) Mengupayakan penyempurnaan layanan melalui website dengan melengkapi menu layanan informasi yang belum tersedia saat ini;
- b) Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran;
- c) Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi;
- d) Peningkatan implementasi SOP
- e) Penyediaan Ruang khusus Pelayanan PPID;
- f) Penambahan Petugas Pelayanan PPID;

Analisis Capaian Sasaran 9 :

Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi

beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian PANRB ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

- 1) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- 2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- 3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang

menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 ini akan menjadi baseline kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Indikator Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE dijadikan Indikator Kinerja Utama dalam mengukur Sasaran strategis Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan. Indikator ini menggambarkan maturitas Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dilatarbelakangi oleh akselerasi pembangunan yang dilakukan melalui program reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025 dalam rangka mencapai birokrasi yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat dan terjangkau yang menjadikan Indeks Maturitas SPBE menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

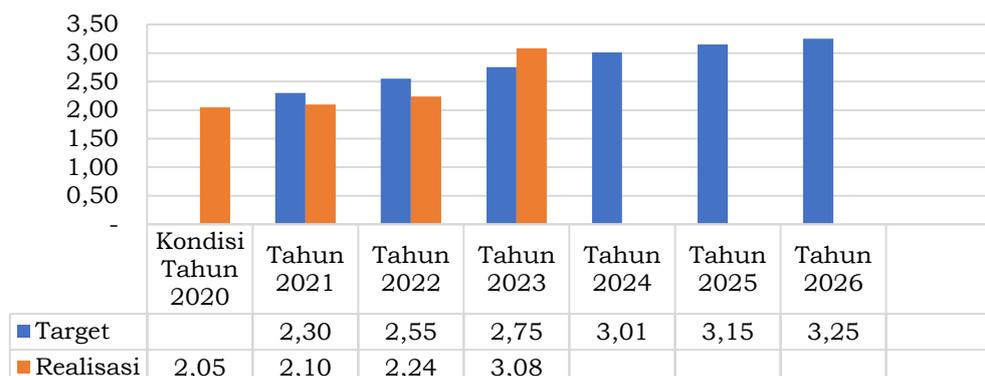
Tabel II.12
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kematangan Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE	Poin	2,10	2,75	3,08	112,00

Sumber : KemenPANRB

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE” tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE” Tahun 2021-2026



Untuk mencapai tingkat kematangan Baik pada Akhir Periode Tahun 2026 tersebut atau Nilai Indeks Pelaksanaan SPBE 3,25 pada setiap indikator/aspek/domain yang menjadi penilaian maturitas SPBE memang tidak dapat dilakukan secara serta merta dalam jangka waktu yang relatif cepat. Selain kebijakan dan tata kelola yang telah terintegrasi antar proses tata kelola dan mekanisme kinerja yang terukur, juga diperlukan kebijakan yang telah mengatur mekanisme evaluasi dan manajemen perubahan serta proses tata kelola yang dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Demikian juga dengan kapabilitas yang diberikan harus terintegrasi atau kolaborasi dengan layanan SPBE lain serta dilakukan dan peningkatan kualitas yang menyesuaikan perubahan di lingkungan internal dan eksternal. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan tingkat maturitas SPBE. Dalam hal ini, setidaknya setiap tahun target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Guna memperbaiki hasil indeks maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Way Kanan, diantaranya :

- 1) Melakukan penilaian tingkat maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada seluruh Perangkat Daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga didapatkan data keseluruhan tentang penerapan SPBE pada Pemerintah

Kabupaten Way Kanan sebagai bahan evaluasi bagi seluruh Perangkat Daerah;

- 2) Kebijakan internal terkait tata kelola ditetapkan dan dilengkapi dengan memuat proses tata kelola, serta dievaluasi secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal. Demikian juga dengan kebijakan internal layanan seyogianya ditetapkan dan dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan SPBE pada semua unit kerja, bahkan dengan layanan SPBE antar instansi; dan
- 3) Melakukan monitoring pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berkala untuk meningkatkan layanan SPBE yang optimal dan tepat sasaran, sehingga layanan yang masih bersifat interaksi dapat ditingkatkan menjadi layanan bersifat transaksi serta layanan yang sudah bersifat transaksi meningkat menjadi layanan yang bersifat kolaborasi dengan layanan SPBE yang lain.

4.2 Pencapaian Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan

Untuk mengetahui Kualitas Lingkungan Hidup digunakan Indeks Kualitas Lingkungan hidup yang merupakan suatu indeks dapat merangkum banyak variabel menjadi satu variabel yang dapat dijadikan salah satu pendekatan yang baik dalam menghitung dampak dengan banyak paparan sekaligus. Oleh karena itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas lingkungan suatu kawasan dan membandingkan

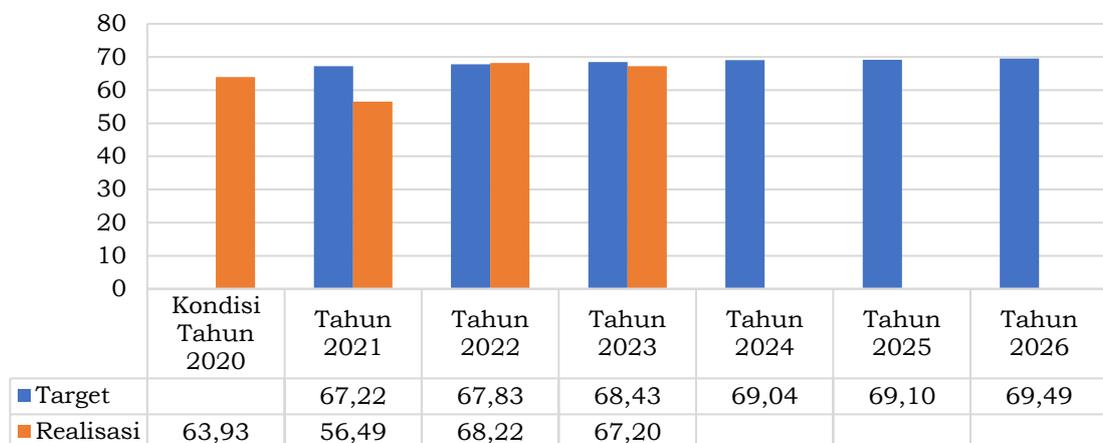
kawasan-kawasan dengan tingkat kualitas lingkungan yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. $90 \leq \text{IKLH} \leq 100$, Kategori Sangat Baik
- b. $70 \leq \text{IKLH} < 90$, Kategori Baik
- c. $50 \leq \text{IKLH} < 70$, Kategori Sedang
- d. $25 \leq \text{IKLH} < 50$, Kategori Kurang
- e. $0 \leq \text{IKLH} < 25$, Sangat Kurang

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu barometer kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup Untuk mencapai target IKLH tersebut perlu sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, salah satunya melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup baik kualitas udara, kualitas air sungai, kualitas air laut dan kualitas lahan. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kajian Evaluasi IKLH Kabupaten Way Kanan adalah untuk mengetahui gambaran kondisi kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Way Kanan dan mengevaluasi dinamika kualitas lingkungan hidup dengan menilai kondisi aktual lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Way Kanan serta tersedianya Dokumen Kajian Evaluasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Way Kanan.

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 yaitu 68,22 dan tahun 2023 yaitu 67,20 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pencapaian tersebut masih dalam kategori “SANGAT BAIK” jika dibandingkan dengan target tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Way Kanan akan menghadapi tantangan terhadap pengelolaan lingkungan hidup baik itu kualitas udara, kualitas air, kualitas lahan maupun kualitas air, dan ini merupakan tanggung jawab bersama, dan perlunya peran para pihak serta masyarakat untuk mendukung upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam menjaga kualitas lingkungan melalui rencana aksi daerah untuk mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Nilai Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut :

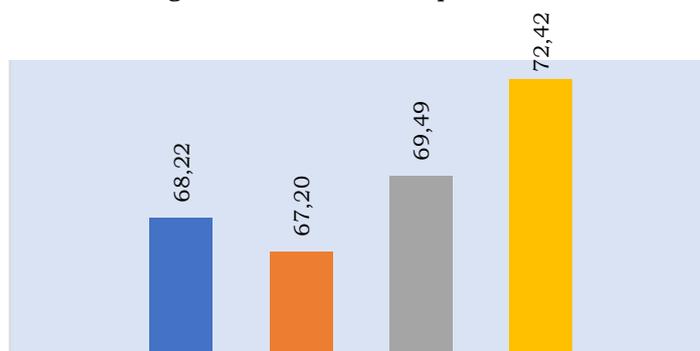
Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Nilai Kualitas Lingkungan Hidup” Tahun 2021-2026



Perbandingan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya, target akhir periode dan capaian tingkat nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

PERBANDINGAN IKLH

■ Tahun 2022 ■ Tahun 2023 ■ Target Akhir Periode ■ Capaian Nasional 2023



	IKLH
Tahun 2022	68,22
Tahun 2023	67,20
Target Akhir Periode	69,49
Capaian Nasional 2023	72,42

4.3 Pencapaian Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Dalam rangka mewujudkan Misi Ke-3 RPJMD yakni “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah”, telah ditetapkan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia” dengan Indikator kinerja Tujuannya adalah “Indeks Pembangunan Manusia”. Indikator tersebut dipilih karena Keberhasilan dalam pembangunan sumberdaya manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diawali oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi umur panjang dan hidup sehat. Pilar ini diwakili oleh indikator usia harapan hidup pada waktu lahir. Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh

seseorang sejak lahir. Angka ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Dimensi pengetahuan. Pilar ini diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini dihitung pada usia tujuh tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. Sedangkan dimensi standard hidup layak yang diwakili oleh pendapatan nasional bruto (PNB). Pada level provinsi dan kabupaten, PNB di proporsi dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan daya belinya melalui konsep “purchasing power parity”. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

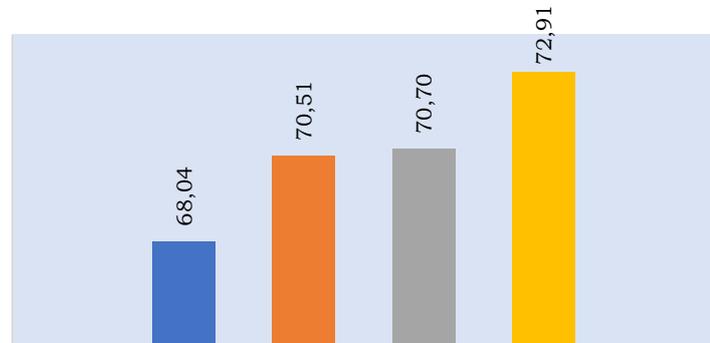
Namun Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM di suatu wilayah, akan tetapi juga melihat kecepatan

dalam peningkatan angka IPM. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu digunakan ukuran reduksi short-fall pertahun. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal, karena reduksi shortfall merupakan gambaran laju pergerakan IPM untuk mencapai nilai idealnya yaitu 100. Dengan kata lain, reduksi shortfall menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus di tempuh untuk mencapai titik IPM ideal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan tahun 2023 mencapai 70,51 Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,59 poin atau tumbuh 0,84 persen. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran perkapita yang disesuaikan. IPM Kabupaten Way Kanan masih berada di bawah level Provinsi Lampung yang besarnya 72,48. IPM Kabupaten Way Kanan menduduki peringkat ke-11 dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Pada tahun 2023, untuk pertama kalinya IPM Kabupaten Way Kanan meningkat menjadi level “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya, target akhir periode dan capaian tingkat nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

PERBANDINGAN IPM

■ Tahun 2022 ■ Tahun 2023 ■ Target Akhir Periode ■ Capaian Nasional 2023



	IPM
Tahun 2022	68,04
Tahun 2023	70,51
Target Akhir Periode	70,70
Capaian Nasional 2023	72,91

Dalam mewujudkan Misi Ke-3, terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang mendukung Tujuan Meningkatnya Kualitas Birokrasi, yaitu :

- a. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- b. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah
- c. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah
- d. Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- e. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
- f. Meningkatnya Kualitas Hidup Anak
- g. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
- h. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung
- i. Meningkatnya Pembangunan Gender
- j. Mengurangi Dampak Bencana
- k. Menurunnya Konflik Sosial
- l. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis dalam mewujudkan Misi Ke-3, yakni Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia tersebut, adalah sebagai berikut :

Analisis Capaian Sasaran 11 :

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dapat melakukan aktivitas secara produktif dalam proses pembangunan. Salah satu indikator pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka ini diharapkan mampu mencerminkan “lama hidup” dan “hidup sehat”. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Artinya jika angka harapan hidup meningkat, maka derajat kesehatan penduduk juga meningkat serta memperpanjang usia harapan hidupnya. Angka harapan hidup (AHH) ditentukan oleh besarnya angka kematian bayi (AKB), sehingga jika kasus kematian bayi tinggi maka AHH akan rendah.

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at

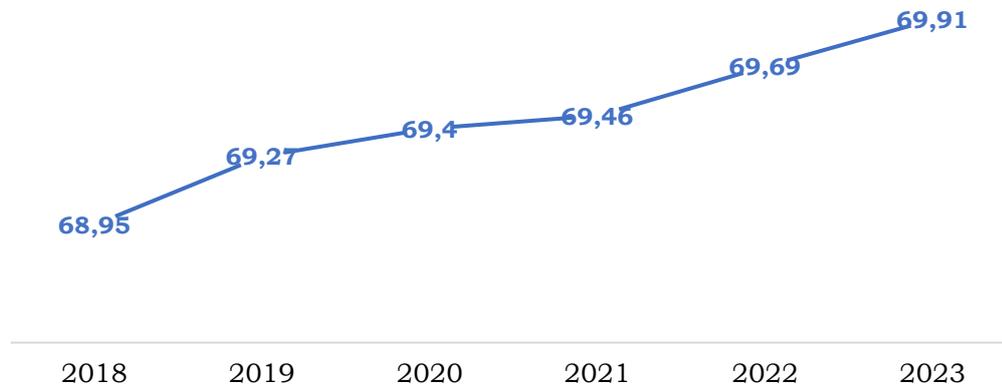
birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program. Cara untuk menentukan usia harapan hidup ialah dengan menunjukkan dan meratakan semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu.

Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Way Kanan mengalami tren peningkatan. Tercatat, selama lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup meningkat 0,74 poin, dari 68,95 pada 2018 menjadi 69,69 tahun pada 2023.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2023



Tabel II.13
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,46	70	69,91	99,87

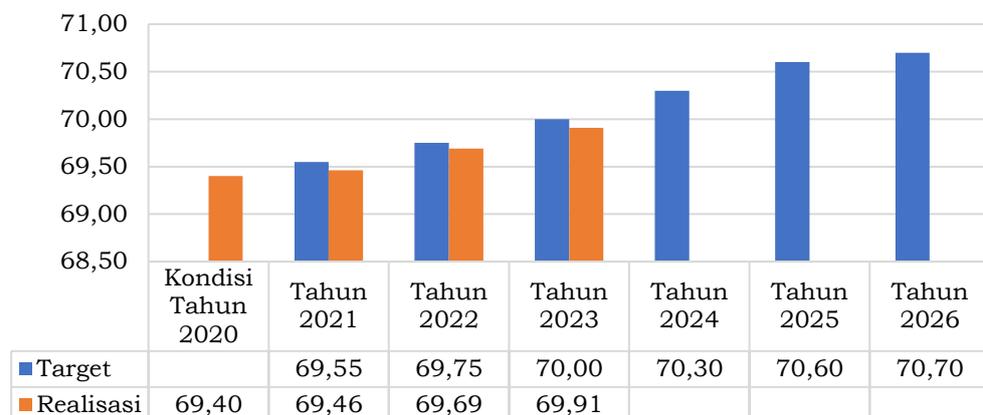
Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

Tahun 2023 Angka Harapan Hidup Kabupaten Way Kanan sebesar 69,91 Tahun, yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Way Kanan akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 69,91 tahun. Sementara itu, tren AHH yang terus meningkat menunjukkan peluang bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat disebabkan beberapa hal. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat, diduga turut memiliki andil dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat tersebut.

Selain itu, faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Angka Harapan Hidup” tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Angka Harapan Hidup” Tahun 2021-2026



Untuk itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus berupaya untuk menaikkan Angka Harapan Hidup dengan cara sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan (Ponek, AMP, Perbaikan Gizi, Rujukan, Jampersal, Pemberian Mikro nutrient, pemberian Vitamin bagi remaja putri, dll);

- 2) Meningkatkan upaya pencegahan kematian Bayi dan Balita dengan Imunisasi, Pencegahan Stunting/Wasting, Pencegahan penyakit menular;
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan
- 4) Memperbaiki status gizi keluarga;
- 5) Survey Indek Keluarga Sehat;
- 6) Perbaiki kesehatan lingkungan.

Analisis Capaian Sasaran 12 :

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.

Sasaran meningkatnya harapan lama sekolah dengan indikator angka harapan lama sekolah adalah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan indek

pembangunan manusia. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pembangunan pendidikan di Kabupaten Way Kanan, karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia a pada tahun t .

Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Way Kanan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Bupati terpilih yakni terwujudnya masyarakat Way Kanan yang sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam wadah NKRI.

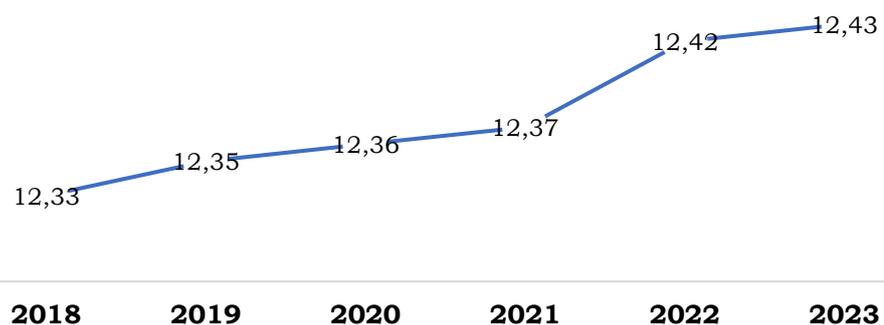
Sasaran Strategis Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di ukur melalui indikator sasaran Angka Harapan Lama Sekolah. Harapan lama sekolah (HLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang. Indikator Angka Harapan Lama Sekolah, Sasaran meningkatnya harapan lama sekolah dengan indikator angka harapan lama sekolah

adalah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan indek pembangunan manusia.

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pembangunan pendidikan di Kabupaten Way Kanan, karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia 7 tahun.

Indikator Angka Harapan Lama Sekolah, Sasaran meningkatnya harapan lama sekolah dengan indikator angka harapan lama sekolah adalah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan indek pembangunan manusia. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pembangunan pendidikan di Kabupaten Way Kanan, karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia 7 tahun.

**Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2022**



Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Way Kanan mengalami tren peningkatan. Tercatat, selama lima tahun terakhir harapan lama sekolah meningkat 0,09 tahun, dari 12,33 pada 2018 menjadi 12,42 tahun pada 2023.

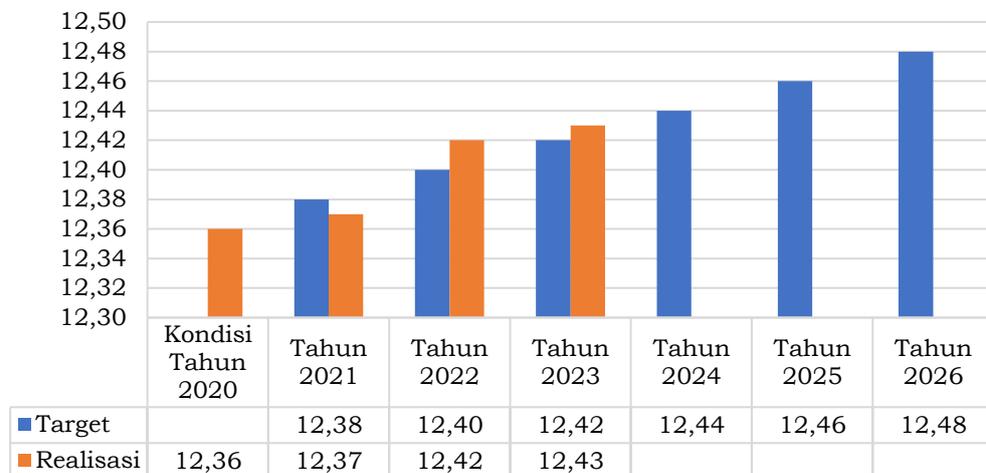
Tabel II.14
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,37	12,42	12,43	100,08

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Harapan Lama Sekolah” tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator
Sasaran Strategis “Harapan Lama Sekolah”
Tahun 2021-2026



Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Kabupaten Way Kanan menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang sekolah. Berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Analisis Capaian Sasaran 13 :

Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Sementara Harapan lama sekolah (HLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, sedangkan HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu, dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Rata-rata lama sekolah dihitung dari penduduk usia 15 tahun keatas. Untuk mereka yg tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Angka rata-rata lama sekolah menjadi salah satu penentu skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di satu wilayah. Disamping berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan

Manusia, rata-rata lama sekolah juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Ada 3 faktor terbesar penyebab Kemiskinan, yaitu rendahnya pendidikan dan tingginya pengangguran; inflasi, dan terbatasnya sumberdaya alam dan belum dikedepankannya daya saing. Secara parsial rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan secara simultan rata-rata lama sekolah dengan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap jumlah Penduduk Miskin. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran yang lebih tinggi.

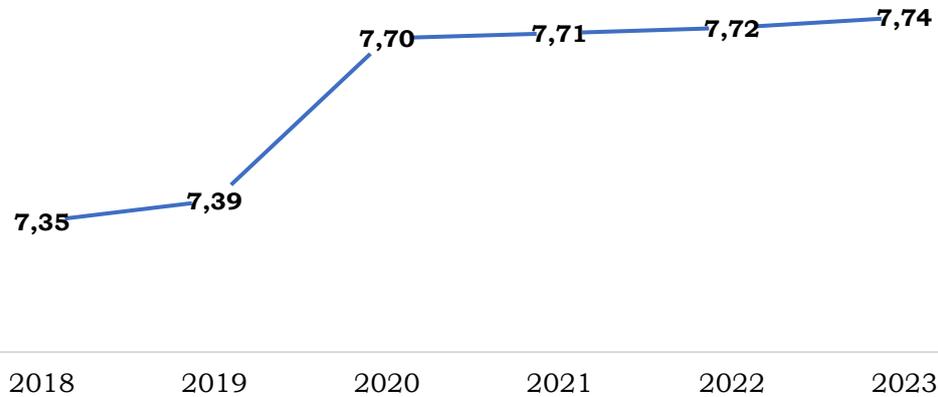
Tabel II.15
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,71	7,79	7,74	99,36

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

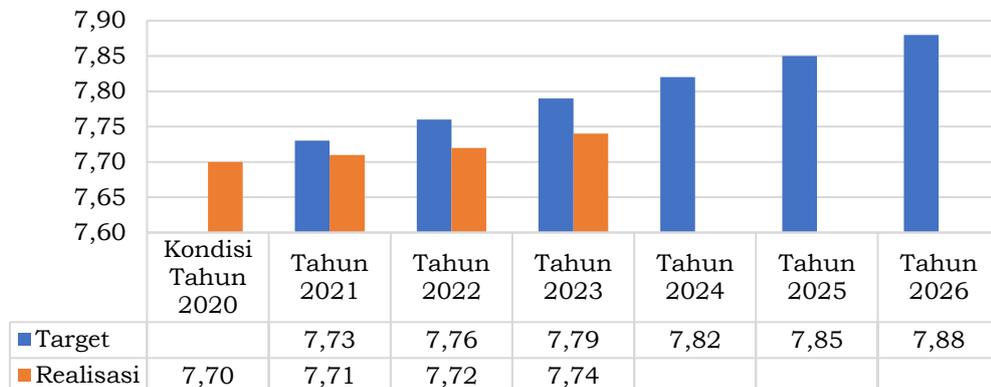
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Way Kanan mengalami tren peningkatan. Tercatat, selama lima tahun terakhir Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,37 tahun, dari 7,35 Tahun pada 2018 menjadi 7,74 tahun pada 2023.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 - 2023



Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Rata-rata Lama Sekolah” tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Harapan Lama Sekolah” Tahun 2021-2026



Permasalahan rendahnya angka rata-rata lama sekolah disebabkan banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar bahkan ada yang belum pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Perlu diketahui dalam menghitung angka rata-rata lama sekolah tersebut menggunakan

variabel penduduk dengan usia atau umur 25 tahun ke atas, dengan usia penduduk tersebut sudah berkeluarga dan bekerja sehingga motivasi dan keinginan untuk kembali melanjutkan pendidikan sangat rendah.

Perlu upaya dan kerja keras dalam rangka meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui kebijakan dan strategi (solusi) antara lain :

- 1) Memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan melalui perluasan dan peningkatan akses pendidikan, misal dengan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan (BOP Kesetaraan), Penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS maupun BOSDA), Program Beasiswa serta Program Indonesia Pintar;
- 2) Penyelenggaraan pendidikan non formal dengan akses yang terjangkau melalui program kesetaraan (Paket A, B dan C) dengan mengoptimalkan lembaga PKBM ataupun Pokjar;
- 3) Perlu adanya koordinasi dan sinergitas dengan OPD lain (PMK) dan perangkat kampung dalam pelaksanaan dan penganggaran (ADD / ADK) terhadap warga belajarnya pada program Kesetaraan (Paket A, B dan C) di PKBM;
- 4) Melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Capaian Sasaran 15 :

Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan & perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian sebagai berikut :

- 1) Anak Balita Telantar
- 2) Anak Telantar
- 3) Keluarga bermasalah sosial psikologis
- 4) Penyandang Disabilitas
- 5) Tuna Susila
- 6) Gelandangan
- 7) Pengemis
- 8) Pemulung
- 9) Kelompok Minoritas
- 10) Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)
- 11) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- 12) Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 13) Korban Trafficking
- 14) Korban Tindak Kekerasan
- 15) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
- 16) Korban Bencana Alam

- 17) Korban Bencana Sosial
- 18) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- 19) Fakir Miskin
- 20) Keluarga bermasalah sosial psikologis
- 21) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
- 22) Anak berhadapan dengan hukum
- 23) Anak Jalanan
- 24) Lanjut Usia Telantar
- 25) Penyandang Disabilitas Orang dengan HIV/AIDS
- 26) Komunitas Adat Terpencil.

Tabel II.16
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Cakupan PMKS yang tertangani	%	6,72	8,72	8,72	100,00

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

Berikut perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Cakupan PMKS yang tertangani” tahun 2021-2026 :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Cakupan PMKS Yang Ditangani” Tahun 2021-2026



Dari Grafik di atas jelas terlihat, bahwa Cakupan PMKS yang tertangani di Kabupaten Way Kanan melebihi Target, bahkan jauh di atas target jangka menengah Kabupaten Way Kanan Tahun 2026. Perlu dilakukan reviu Kembali penetapan indikator dan target kinerja dalam rangka penanganan PMKS.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus menggalang kekuatan untuk menangani PMKS. Sasaran atau objek dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini yakni perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dalam penanganan Penyadang masalah kesejahteraan social, kemiskinan, perlindungan anak dan pemberdayaan untuk menuju kesejahteraan sosial, terdapat beberapa permasalahan antar lain :

- 1) Pendataan yang saat ini telah memulai untuk terintegrasi secara internal, belum dapat dioptimalkan;
- 2) Integrasi sasaran berbasis data kemiskinan dan PMKS belum digunakan oleh stakeholder dalam pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar;
- 3) Belum maksimal pemberdayaan organisasi masyarakat dan Lembaga untuk penanganan PMKS dan kemiskinan;

- 4) Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan penanganan terhadap PMKS serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program maupun kegiatan tersebut berkaitan dengan upaya penanganan isu-isu strategis yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang cacat, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial, penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan. Program dan kegiatan itu akan menjawab terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Way Kanan terhadap program-program unggulan nasional sebagaimana dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial maupun pencapaian dalam penanggulangan kemiskinan.

Kondisi PMKS di Kabupaten Way Kanan cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya masalah sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi Sosial serta memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah PMKS.

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, maupun pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan, untuk penanganan kepada eks para korban diberikan advokasi, bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki. Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum dapat tertangani di seluruh wilayah kecamatan dan kampung hal ini diakibatkan karena minimnya anggaran. Namun demikian semua bentuk permasalahan social tersebut telah diupayakan penanganannya secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan dengan OPD/ Lembaga terkait. Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial antara lain :

- 1) Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya;
- 2) Penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan lain lain) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitasnya sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya;
- 3) Rentannya wilayah Way Kanan terhadap Bencana Alam dan bahkan setiap tahun sering terjadi di

beberapa wilayah kecamatan, hal ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan masalah sosial akibat bencana dimaksud;

- 4) Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung para tuna sosial (WTS, Gepeng, orang terlantar luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan).

Analisis Capaian Sasaran 16 :

Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta merta akibat dari malas bekerja, terdapat faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi situasi ini. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Salah satu definisi kemiskinan difokuskan pada ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan komoditi makanan dan kebutuhan dasar lainnya (UNSD, 2005). Meskipun dianggap menyempitkan makna kemiskinan itu sendiri, namun hal itu masih banyak digunakan karena dari sisi kepraktisannya. Selain itu, beberapa konsep kemiskinan lainnya sukar untuk diukur pada dasarnya masih sangat terkait dengan kemampuan keuangan dari seseorang.

Kemiskinan juga merupakan masalah global. Kemiskinan adalah hambatan sosial yang lebih luas. Ketika kemiskinan mulai meningkat, kemiskinan menjadi

masalah sosial karena kemiskinan akan mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Kemiskinan juga menjadi masalah sosial ketika stratifikasi sosial menciptakan tingkatan dan batasan dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi penyimpangan dan batasan dalam interaksi dan komunikasi antara orang-orang di tingkat atas dan bawah.

Kemiskinan tidak hanya disebabkan satu hal saja. Kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Faktor penyebab kemiskinan antara lain :

- 1) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
- 2) Motivasi yang rendah;
- 3) Pandangan dalam hubungan kekeluargaan;
- 4) Terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai;
- 5) Tidak kreatif.

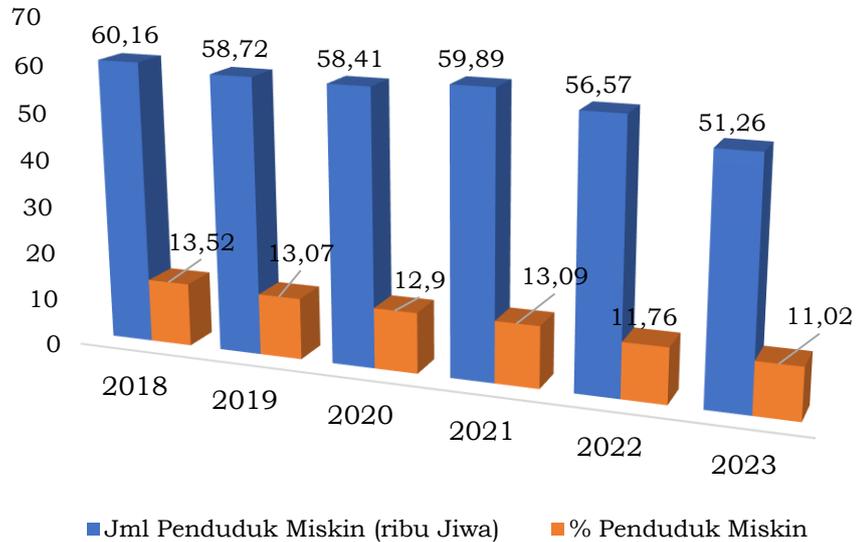
Tabel II.17
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Angka Kemiskinan	%	13,09	11,9	11,02	107,39

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

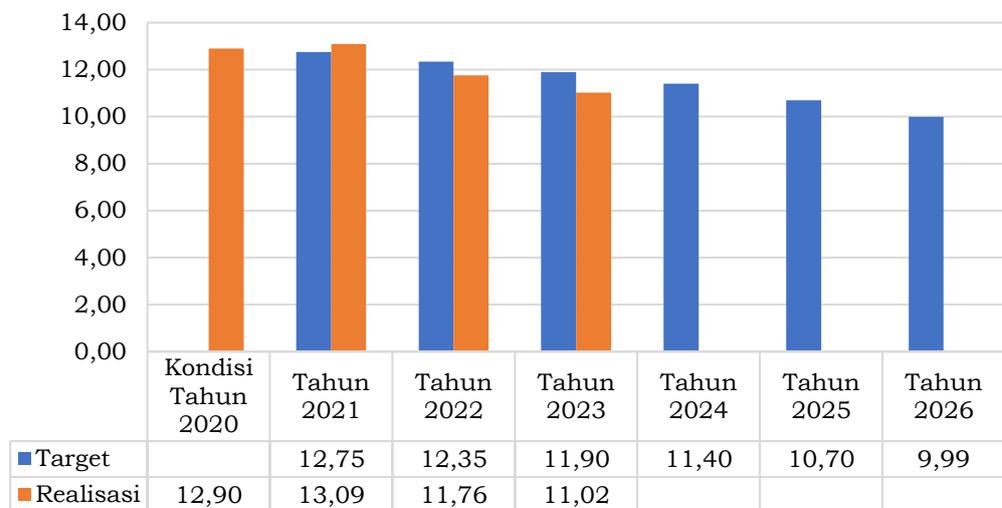
Angka Kemiskinan di Kabupaten Way Kanan mengalami tren penurunan. Tercatat, selama lima tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami peningkatan di Tahun 2021, Angka Kemiskinan Kabupaten Way Kanan menurun 1,76% dari 13,52% pada Tahun 2018 menjadi 11,76 tahun pada September 2023.

Angka Kemiskinan Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 - 2022



Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Angka Kemiskinan” tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Angka Kemiskinan” Tahun 2021-2026



Analisis Capaian Sasaran 17 :

Meningkatnya Kualitas Hidup Anak

Kualitas hidup anak merupakan cerminan secara menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan anak, terutama pada anak yang menderita penyakit kronis. Tetapi adapula faktor lain yang berperan dalam pencapaian kualitas hidup pada anak, yaitu pola asuh dalam keluarga. Pola asuh merupakan hal penting dalam kelangsungan hidup anak karena terkait dengan faktor keluarga, lingkungan, dan lingkungan asuhan anak. Kualitas hidup merupakan suatu persepsi subjektif dari kepuasan atau kebahagiaan terhadap kehidupan di domain yang penting bagi individu.

Tiga domain utama yang dinilai pada kualitas hidup yaitu domain fisis, psikis, dan sosial. Kualitas hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kondisi kesehatan termasuk terapinya, status sosioekonomi, pola asuh dan lingkungan tempat dibesarkannya seorang anak. Kondisi kesehatan merupakan aspek yang cukup penting berkontribusi terhadap kualitas hidup seorang anak, sehingga lahirlah definisi lain yaitu kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan yang disebut *health related quality of life (HRQoL)*. Dalam konteks anak, HRQoL dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti kemampuan untuk berpartisipasi dalam kelompok sebaya dan kemampuan untuk bersaing sesuai tingkatan perkembangan seorang anak. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas Hidup Anak adalah Kabupaten Layak Anak. Kabupaten/ kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan

sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah “Sistem pembangunankabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak”. Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun cara memenuhi hak dan melindungi anak-anak di daerah masing-masing adalah dengan jalan mewujudkan upaya daerah melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan suatu kebijakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara Layak Anak. Kebijakan ini merupakan upaya pencapaian dari pelaksanaan perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan merujuk pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia kedalam sistem hukumnya, dan juga sebagai bentuk komitmen Negara Indonesia turut serta dalam mewujudkan Dunia Layak Anak. Wujud dari pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dimulai pada tahun 2011 ini adalah sebuah keunggulan/prestasi yang harus dicapai oleh setiap Kabupaten/Kota di Indonesia yang nantinya akan dianugerahi predikat sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Agar dapat memperoleh predikat sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak, pemerintah daerah harus melaksanakan pengembangan KLA.

Untuk itu menjadi penting mewujudkan KLA menjadi tanggung jawab dan kewajiban daerah karena :

- 1) Jumlah anak yang rata-rata sepertiga dari total jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan, sehingga keberadaan anak dengan jumlah sebesar itu tidak dapat diabaikan begitu saja;
- 2) Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia potensial bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Pengabaian dan peminggiran anak dari upaya-upaya pembangunan daerah akan berakibat kepada menurunnya kualitas anak dan sumberdaya manusia masa depan yang pada gilirannya justru akan menjadi beban pembangunan.

Tabel II.18
Kategori Penghargaan Kota Layak Anak berdasarkan Skor

No	Skor	Kategori
1	901-1000	Kabupaten Layak Anak
2	801-900	Utama
3	701-800	Nindya
4	601-700	Madya
5	501-600	Pratama

Melalui pemberian penghargaan, setiap kabupaten/kota berupaya untuk meningkatkan status capaian kategorinya. Kategori Pratama (501-600), Madya (601-700), Nindya (701-800), Utama (801-900), dan Kota Layak Anak (901-1000). Tercapainya kinerja capaian Kota Layak Anak dengan skor 870,3 dari target yang ditetapkan direntang nilai 501-600, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mampu menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak.

Tabel II.19
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Hidup Anak**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Nindya	Nindya	100,00

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh Kementerian PPPA, Kabupaten Way Kanan mendapatkan skor 688,0. Penghargaan KLA diberikan kepada Daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung

pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh Tim dari Kementerian PPPA Republik Indonesia, Tim dari Kementerian/Lembaga dan Tim Independen. Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 Indikator yang telah ditetapkan. Penghargaan KLA terdiri dari 5 Peringkat, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.

Analisis Capaian Sasaran 18 : **Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk**

Penduduk merupakan sumber daya yang paling penting dan berharga bagi setiap bangsa dan negara, karena dengan kemampuannya, penduduk dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya secara berkelanjutan, di samping pengaturan hubungan sosial di antara mereka sehingga mampu berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dari segi kuantitas, jumlah penduduk merupakan potensi tenaga kerja yang bermanfaat dalam rangka menghasilkan barang-barang produksi, tetapi di lain pihak penduduk juga memerlukan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar, dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, serta persebaran penduduk yang tidak seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Bentuk hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi adalah positif di negara maju, tetapi di negara yang sedang berkembang hubungan tersebut masih negatif seperti di

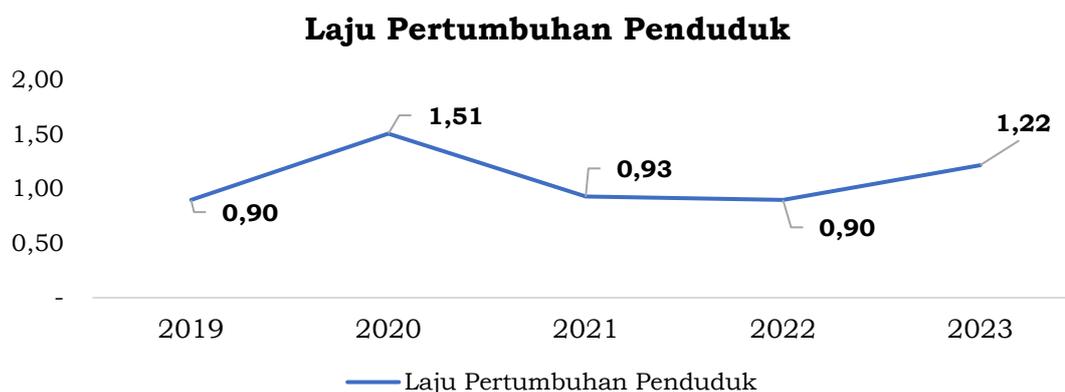
Indonesia. Sebagai contoh dalam upaya menanggulangi kelaparan, kemiskinan dan peningkatan pendidikan, akan sangat diuntungkan jika angka pertumbuhan penduduk dapat diturunkan, karena jika tidak diturunkan, maka kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan, seiring dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk suatu wilayah bisa saja bertambah atau berkurang. Perubahan jumlah penduduk ini berkaitan erat dengan angka pertumbuhan penduduk yang bisa saja positif atau negatif. Angka pertumbuhan penduduk positif sifatnya menambah jumlah penduduk. Pertambahan ini disebabkan oleh faktor kelahiran, peningkatan kualitas hidup atau perbaikan gizi penduduk, dan imigrasi yakni perpindahan penduduk dari luar ke dalam suatu wilayah. Sementara angka pertumbuhan negatif bersifat artinya mengurangi jumlah penduduk. Pengurangan ini dipengaruhi oleh faktor kematian, peperangan, wabah penyakit, dan emigrasi yaitu perpindahan penduduk dari dalam ke luar suatu wilayah.

Angka pertumbuhan penduduk mencerminkan laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah setiap tahunnya. Semakin tinggi angka pertumbuhan penduduk mengindikasikan semakin cepat laju pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, apabila angka pertumbuhan penduduk yang rendah menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang lambat. Berkenaan dengan angka pertumbuhan penduduk, kriteria laju pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

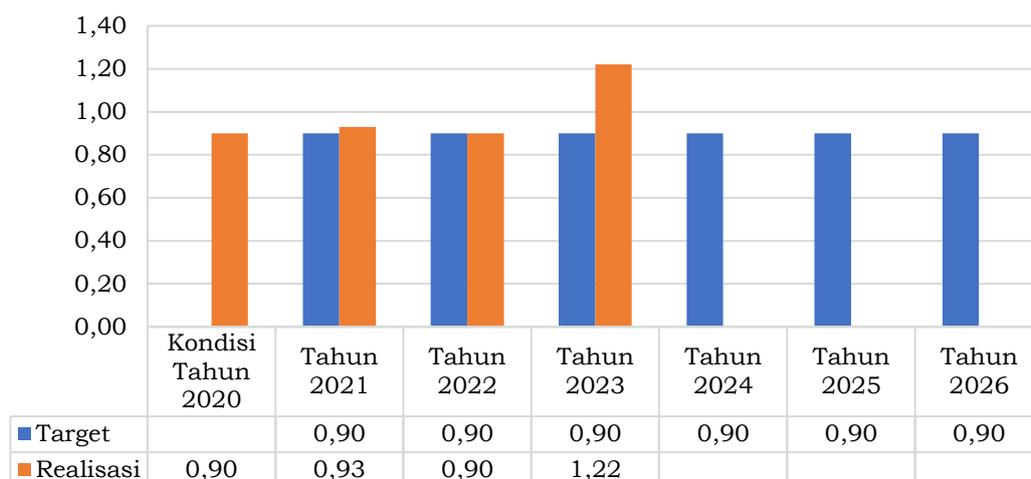
- 1) Laju pertumbuhan cepat, apabila angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2% setiap tahunnya;
- 2) Laju pertumbuhan sedang, apabila angka pertumbuhan penduduk berkisar antara 1% – 2% setiap tahunnya;
- 3) Laju pertumbuhan lambat, apabila angka pertumbuhan penduduk kurang dari 1% setiap tahunnya.

Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah semakin banyak. Sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk yang lambat menunjukkan jumlah populasi suatu wilayah sedikit. Sasaran Strategis Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk di ukur melalui indikator sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk. Pemerintah Kabupaten Way Kanan berusaha untuk menyeimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk untuk menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Way Kanan mengalami tren penurunan. Tercatat, selama empat tahun terakhir meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2023, berikut :



Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Penduduk” Tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik Berikut Ini :

Target dan realisasi kinerja indikator sasaran strategis “laju pertumbuhan penduduk” Tahun 2021-2026



Analisis Capaian Sasaran 19 : **Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung**

Indikator yang dipergunakan dalam mengukur keberdayaan masyarakat kampung adalah Indeks Desa Membangun yang dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal.

Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

- 1) Indeks Ketahanan Sosial

- Pendidikan
 - Kesehatan
 - Modal Sosial
 - Permukiman
- 2) Indeks Ketahanan Ekonomi
- Keragaman Produksi Masyarakat
 - Akses Pusat Perdagangan dan Pasar
 - Akses Logistik
 - Akses Perbankan dan Kredit
 - Keterbukaan Wilayah
- 3) Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan
- Kualitas Lingkungan
 - Bencana Alam
 - Tanggap Bencana

Tabel II.20
Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM

No	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2	Tertinggal	$> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3	Berkembang	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4	Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5	Mandiri	$> 0,815$

Indeks Desa Membangun di rilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menetapkan menetapkan status setiap Desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh

menjadi pembatas status setiap Desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi status Desa yaitu :

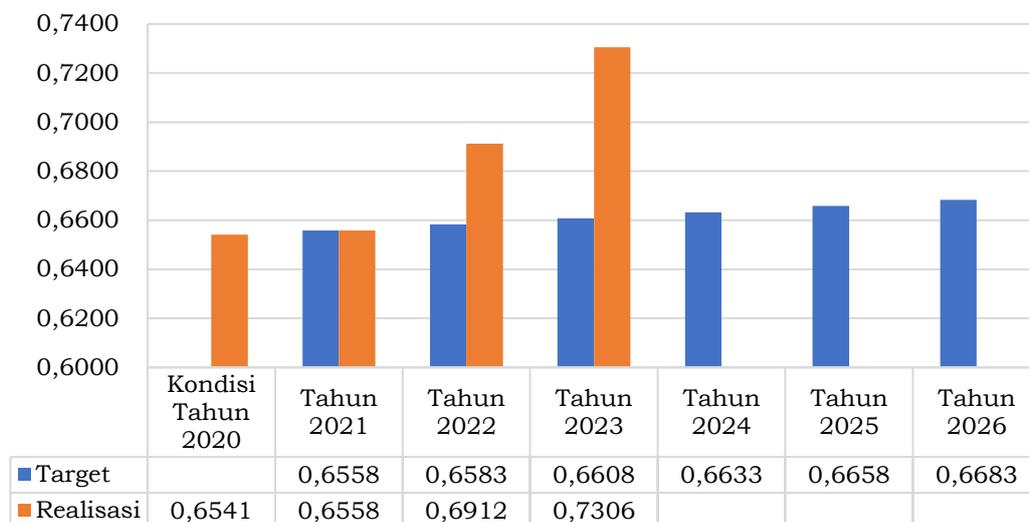
Tabel II.21
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Desa Membangun	Poin	0,6558	0,6608	0,7306	110,56

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

Dari data tersebut jumlah seluruh kampung sangat tertinggal /tertinggal dari tahun ke tahun semakin berkurang, sementara jumlah kampung berkembang, maju, dan mandiri dari tahun ke tahun semakin bertambah/meningkat jumlahnya. Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “IDM” Tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “IDM” Tahun 2021-2026



Analisis Capaian Sasaran 20 : **Meningkatnya Pembangunan Gender**

Kesetaraan gender merujuk pada suatu kondisi dimana laki-laki dan perempuan bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, kondisi ini masih jauh panggang dari api. Kasus diskriminasi berdasarkan gender masih marak terjadi di seluruh aspek kehidupan. Bisa dilihat di sekeliling kita masih banyak perempuan yang mengalami beban ganda. Perempuan yang bekerja di sektor publik juga harus mengerjakan urusan domestik, seperti menjaga kebersihan rumah, memasak, dan mengurus anak. Kondisi ideal dalam pembangunan manusia adalah tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pembangunan, serta merasakan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara. Sebaliknya, diskriminasi gender dalam pembangunan dapat menimbulkan perbedaan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender pada suatu negara akan turut memperkuat kemampuan untuk berkembang, keluar dari kemiskinan dan menjalankan pemerintahan dengan efektif. Artinya, mengupayakan kesetaraan gender merupakan strategi penting dalam pembangunan untuk memberdayakan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi

dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Dalam penghitungan IDG, tidak bisa langsung diambil dari masing-masing indeks yang merupakan data dasar yaitu 1) Persentase keterwakilan perempuan di parlemen, 2) Persentase tenaga profesional perempuan, dan 3) Persentase sumbangan pendapatan perempuan.

Data dasar tersebut memiliki satuan yang berbeda. Untuk itu terlebih dahulu dihitung nilai standarisasi agar mendapatkan agregasi guna mempermudah menghitung rata-rata. Untuk perhitungan masing-masing komponen perlu dihitung indeksnya terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan IDG. Adapun komponen perhitungan adalah:

- 1) Proporsi keterwakilan perempuan di parlemen;
- 2) Proporsi profesional perempuan;
- 3) Proporsi sumbangan pendapatan perempuan;
- 4) Proporsi sumbangan pendapatan laki-laki;
- 5) Proporsi penduduk perempuan;
- 6) Proporsi pengeluaran perkapita pertahun;
- 7) Proporsi penduduk laki-laki;
- 8) Proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen;
- 9) Proporsi tenaga profesional laki-laki.

Hasil perhitungan komponen tersebut diatas menghasilkan tiga indeks sebagai berikut :

- 1) Indeks keterwakilann di parlemen;
- 2) Indeks pengambil keputusan;
- 3) Indeks distribusi pendapatan.

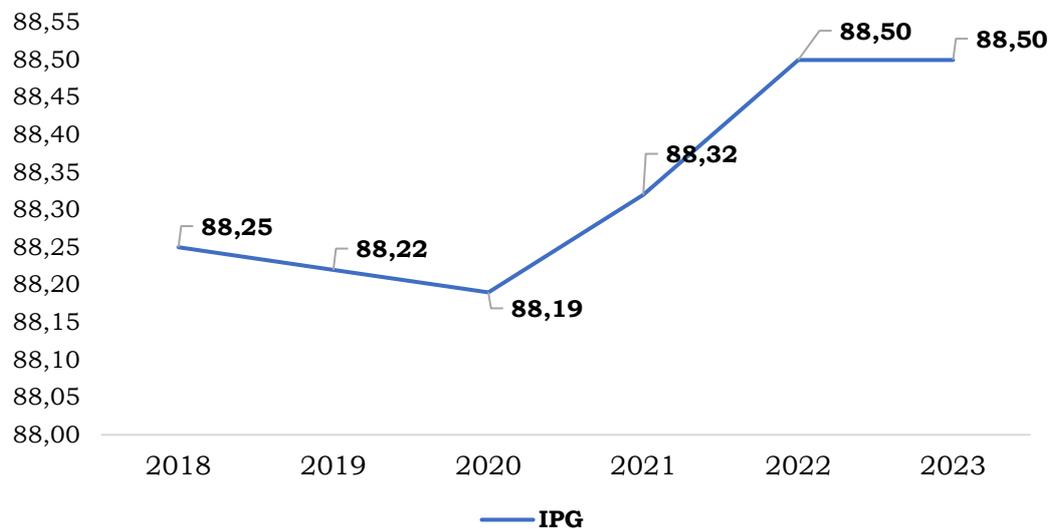
Tabel II.22
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Pembangunan Gender

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,32	88,32	88,50	100,20

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

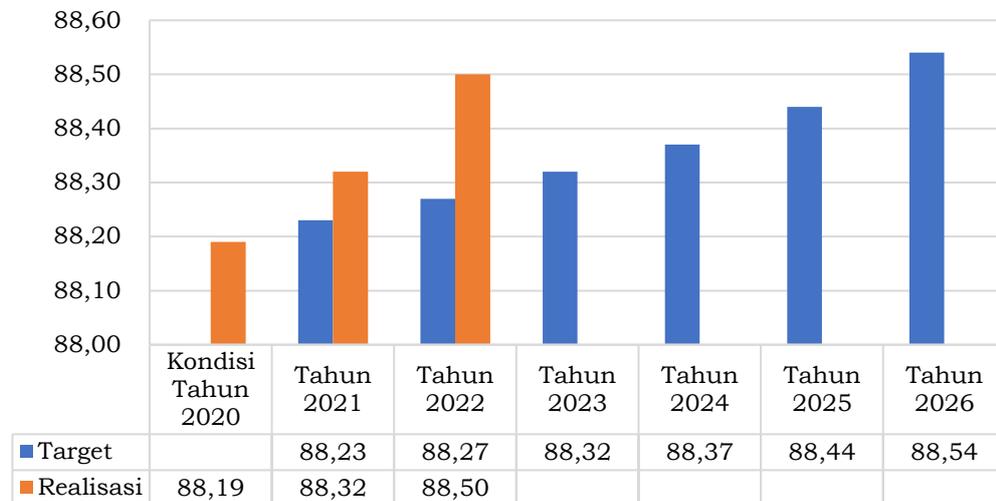
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 sebesar 88,50, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,26% dari Target Tahun 2023 sebesar 88,27. Meskipun sempat mengalami penurunan di Tahun 2019 dan 2020, IPG Kabupaten Way Kanan tercatat, mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir.

IPG KABUPATEN WAY KANAN



Adapun perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “IPG” Tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis "IPG" Tahun 2021-2026



Upaya yang dapat meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Way Kanan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan dan melakukan pembinaan PKK Kabupaten Way Kanan
PKK bisa menjadi pihak di garda depan dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya, menggerakkan ibu-ibu, bagaimana caranya menekan angka kematian ibu hamil. Atau berkontribusi mengatasi masalah gizi anak, kesehatan anak dan stunting.
- 2) Melatih Kewirausahaan Perempuan Kabupaten Way Kanan
Dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan usaha ekonomi diri. Muara dari hal tersebut adalah mereka dapat bekerja dan menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan ekonomi serta meningkatkan derajat sosial ekonomi diri.
- 3) Capacity Building PKK dan Organisasi Wanita Kabupaten Way Kanan

Meningkatkan kemampuan individu khususnya perempuan sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi essensial, memecahkan masalah, menetapkan tujuan, serta mengelola keadaan secara kolektif. Pemberdayaan tidak akan tercapai bila kapasitas individu perempuan tidak meningkat.

Analisis Capaian Sasaran 21 : **Mengurangi Dampak Bencana**

Penentuan tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak periode awal berdiri, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko).

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas

adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

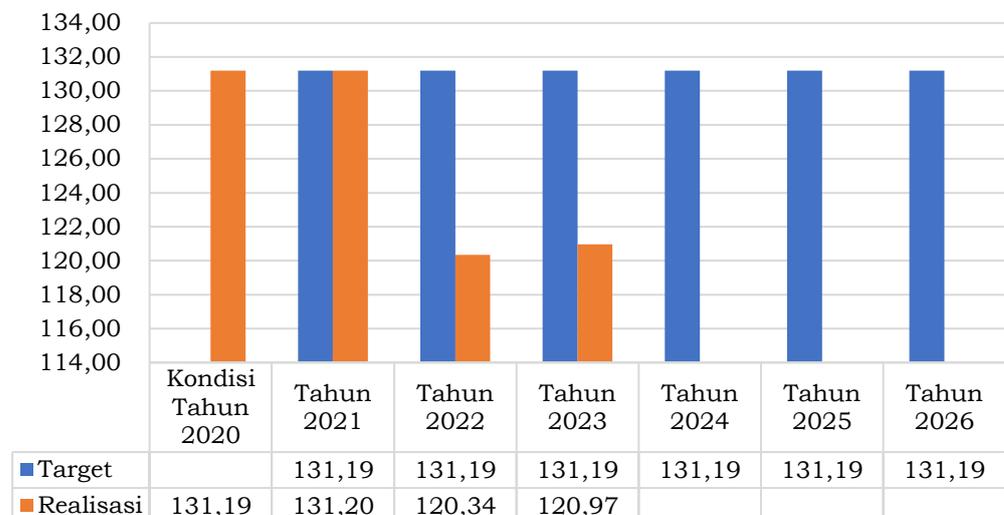
Tabel II.23
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Mengurangi Dampak Bencana

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Resiko Bencana	Poin	131,2	131,19	120,97	92,21

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

Berikut ini perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Indeks Risiko Bencana” Tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator
Sasaran Strategis “Indeks Risiko Bencana”
Tahun 2021-2026



Analisis Capaian Sasaran 21 : **Menurunnya Konflik Sosial**

Konflik sosial adalah ketegangan, ketidaksepakatan, dan pertentangan antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau nilai yang berbeda. Konflik sosial bisa terjadi dalam berbagai skala, mulai dari konflik antara individu di dalam keluarga hingga konflik antara kelompok etnis atau antar negara. Tolok ukur capaian sasaran Menurunnya Konflik Sosial adalah Angka Konflik Sosial. Adanya Potensi konflik berlatarbelakang isu SARA, ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat juga menjadi tantangan, dimana masyarakat Kabupaten Way Kanan terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama serta latar belakang budaya yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadi gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Pada Tahun 2023, tidak ada konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, sehingga kondisi stabilitas daerah masih dapat terjaga. Dengan tidak adanya konflik social, maka target indikator kinerja angka konflik sosial dapat tercapai 100%.

Tabel II.24
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Menurunnya Konflik Sosial

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Angka Konflik Sosial	Kasus	0	0	0	100,00

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

Pada RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ditargetkan tidak ada konflik sosial atau targetnya 0 konflik sosial setiap tahunnya. Sehingga diharapkan kondisi di Kabupaten Way Kanan senantiasa kondusif. Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki potensi penghalang terjadinya konflik sosial yaitu dengan adanya ormas atau lembaga masyarakat yang terdata dan bisa menjadi mitra untuk mengendalikan konflik. Dengan demikian potensi konflik sosial yang mungkin terjadi dapat ditekan. Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program pemerintah daerah sebagai pendukung sasaran.

Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya Indikator Sasaran ini diantaranya :

- 1) Dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Way Kanan.
- 2) Sinergisitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Way Kanan.
- 3) Dukungan masyarakat secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Way Kanan.

Potensi-Potensi konflik sepanjang tahun 2023 yang telah dihimpun oleh Badan Kesbangpol sebanyak sebanyak 4 (empat) potensi konflik. Dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, telah ditindaklanjuti dengan melibatkan stakeholder terkait. Namun terdapat beberapa permasalahan atau Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target diantaranya :

- 1) Heterogenya masyarakat Kabupaten Way Kanan, sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat, baik yang disebabkan SARA maupun persoalan sosial lainnya.
- 2) Permasalahan masih adanya peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Way Kanan yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini.

Rencana tindak lanjut dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut dengan :

- 1) Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi.
- 2) Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode.
- 3) Menginisiasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Way Kanan.
- 4) Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa.

Analisis Capaian Sasaran 21 :

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU

tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi

mempengaruhi sistem pangan dan ketahanan pangan nasional. Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi

ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

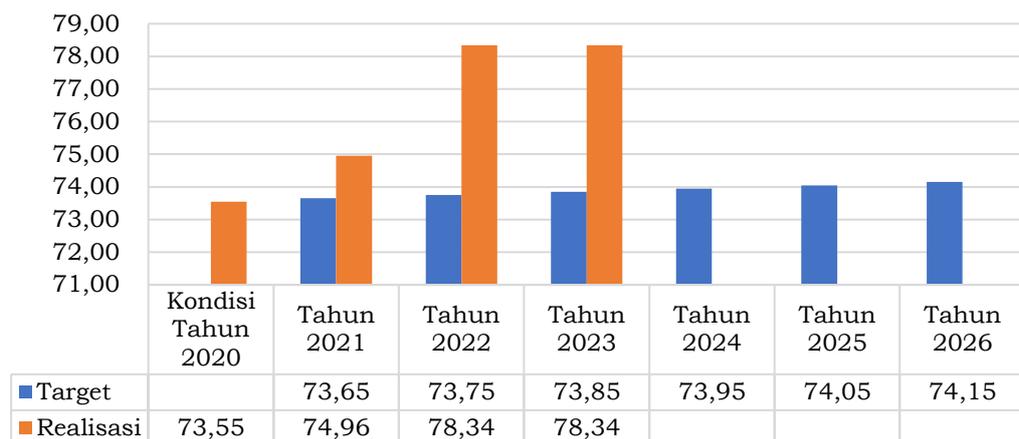
Tabel II.25
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	74,96	73,85	78,34	106,08

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 sebagaimana hasil perhitungan dari Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan sebesar 78,34 poin dengan capaian kinerja 106,22 persen dibandingkan target Tahun 2023 sebesar 73,75 persen. Berikut ini perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Indeks Risiko Bencana” Tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Indeks Ketahanan Pangan” Tahun 2021-2026



4.4 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Misi ke-4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur

Perekonomian merupakan sistem yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Dalam tata kelola pembangunan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi berkualitas menjadi target yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Penerapan *good governance* akan mendukung pemerataan

dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi dapat terwujud. Hal ini kelak akan turut menimbulkan kestabilan dalam upaya membangun atau menumbuhkan kesejahteraan.

Untuk mengukur maju atau tidaknya suatu perekonomian daerah sebagai hasil dari program pembangunan daerah tersebut diperlukan alat pengukur yang tepat, salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk menyusun PDRB dapat menggunakan dua pendekatan, yakni produksi dan penggunaan. Kedua pendekatan tersebut menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB maupun agregat turunannya terbagi dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” serta atas dasar “harga konstan”.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan penjelasan

tersebut, bisa dikatakan PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

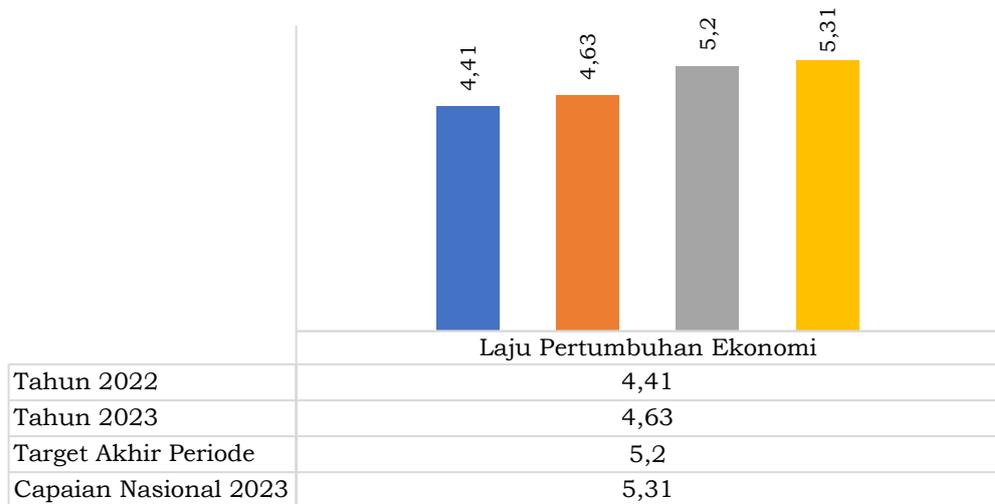
Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menggambarkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah.

PDRB Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 sebesar 17.473,41 Miliar Rupiah dan 10.635,97 Miliar Rupiah menurut harga konstan. Dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, PDRB tahun 2023 pertumbuhan sebesar 4,63 persen. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan sebesar 15,72 persen. Sektor Pertanian masih mendominasi distribusi persebaran PDRB menurut lapangan usaha. Sektor ini memiliki distribusi persentase PDRB sebesar 34,64 persen.

Perbandingan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan capaian tahun sebelumnya, target akhir periode dan capaian tingkat nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi

■ Tahun 2022 ■ Tahun 2023 ■ Target Akhir Periode ■ Capaian Nasional 2023



Selengkapnya Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Bupati Way Kanan Tahun 2023 dalam rangka pencapaian Misi ke-4, berikut ini :

Analisis Capaian Sasaran 22 :

Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kabupaten Way Kanan memiliki kekayaan atas sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya hutan, maupun keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya dan tersebar secara luas pada 15 Kecamatan di Kabupaten Way Kanan. Kekayaan alam yang dimiliki tersebut dapat menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi bagi Kabupaten Way Kanan.

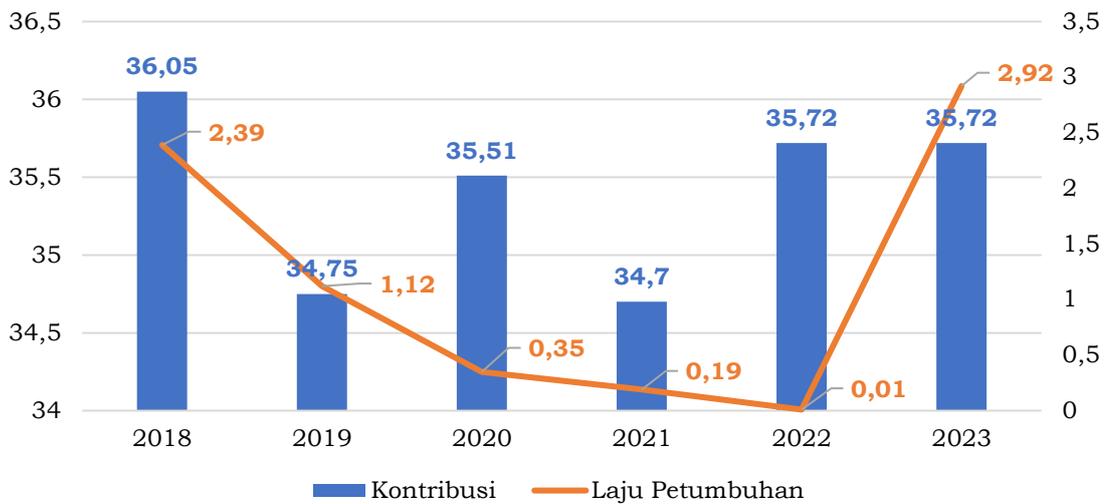
Sektor pertanian masih menjadi andalan penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini menjadikan peluang sektor pertanian dalam pengaruhnya terhadap perekonomian di Kabupaten Way Kanan. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Ditinjau menurut kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Way Kanan, perekonomian Kabupaten Way Kanan masih sangat bergantung pada sektor primer. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan lebih dari sepertiga penciptaan nilai tambah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun lapangan Usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Way Kanan, namun kontribusinya semakin menurun.

Tercatat kontribusi lapangan usaha ini mengalami fluktuatif pada periode 2018-2023. Pada Tahun 2018 kontribusi lapangan Usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 36,05%, turun menjadi 3,4% pada Tahun 2019, kemudian naik Kembali pada Tahun 2020 menjadi 35,51% dan turun lagi pada Tahun 2021 menjadi 34,7%. Pada Tahun 2023 kontribusi lapangan Usaha pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 35,72%.

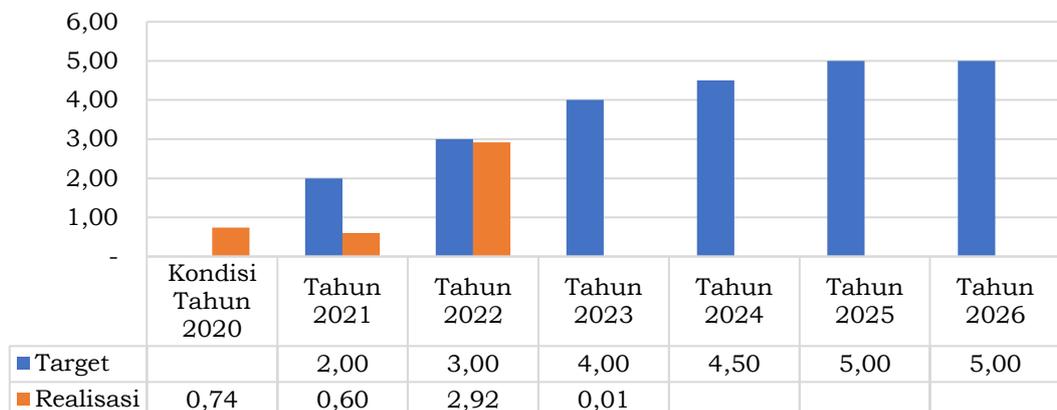
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 - 2022



Adapun perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran ini pada Tahun 2021-2026 disajikan pada grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Lapangan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan” Tahun 2021-2026



Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan di Kabupaten, antara lain :

1) Bidang Pertanian

Permasalahan pokok terkait pertanian di Kabupaten Way Kanan, yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Selama periode 2018-2023 pertumbuhan yang dicapai kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami trend yang berfluktuatif namun cenderung turun. Secara umum, akar permasalahan di bidang pertanian, yaitu

- a. Rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian, peternakan dan perkebunan;
- b. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura);
- c. Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
- d. Masih rendahnya kapasitas produksi pertanian dan tingginya Alih fungsi lahan pertanian;
- e. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
- f. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
- g. Kurang efektif dan efisien penanganan paska panen;
- h. Masalah anomaly cuaca;
- i. Rendahnya akses permodalan.

2) Bidang Perikanan

Permasalahan di bidang perikanan secara umum dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Rendahnya nilai tambah produksi hasil perikanan;
- b. Pemasaran hasil Perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir;
- c. Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh Petani.

Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan melaksanakan program-program pembangunan di sektor Pertanian dan Perikanan.

Dari upaya yang telah dilakukan di Tahun 2023, bahwa tercapainya persentase peningkatan produksi tanaman pangan, dan persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura. Komoditas utama tanaman pangan yang menjadi sasaran prioritas adalah padi, jagung dan ubi kayu. Target produksi tanaman pangan pada tahun 2023 adalah peningkatan sebesar 0,5% dari ketiga komoditas unggulan tersebut. Realisasi yang tercapai pada tahun 2023 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,34% untuk tanaman pangan.

Hal ini disebabkan tidak tercapainya target produksi untuk tanaman padi dan ubi kayu karena pengaruh dari kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi yang menyebabkan

lahan sawah yang teraliri dan selama ini tanam padi 2 kali dalam setahun, menjadi 1 kali tanam padi dan beralih ke tanam jagung sehingga berpengaruh terhadap luas panen dan produksi padi. Faktor lain adalah berkurangnya luas tanam ubi kayu berpengaruh ke luas panen dan penurunan produksi, serta penurunan produksi jagung akibat pengurangan pemakaian pupuk karena tidak adanya lagi bantuan pupuk bersubsidi untuk komoditas ubi kayu.

Pencapaian kinerja bidang tanaman hortikultura dilihat dari persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura tahunan (mangga, kelengkeng, durian, alpukat, dll), dan persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura musiman (sayur-sayuran). Target Produksi tanaman hortikultura tahun 2023 adalah peningkatan sebesar 1,75%, dan telah terrealisasi sebesar 3,49%.

Peningkatan produksi tanaman hortikultura yang cukup tinggi ini pada tanaman hortikultura tahunan dan musiman. Hal ini disebabkan pada tanaman hortikultura tahunan telah produktif berbuah, dan ada peningkatan produksi di beberapa komoditas seperti kelengkeng, jeruk dan alpukat. Sedangkan untuk produksi tanaman hortikultura musiman mengalami peningkatan yang disebabkan terdapat penambahan luas tanam untuk tanaman sayur-sayuran melalui peningkatan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, dan pembukaan lahan baru untuk kebun kolektif Kelompok Wanita Tani.

Di sektor perikanan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, antara lain :

- Upaya penggunaan pakan alternatif berbahan baku lokal, Penguatan kelembagaan kelompok usaha dalam memajemen kelompok usaha perikanan sehingga dapat mempermudah pelaku-pelaku usaha perikanan akses pakan dan pemasar perikanan.
- Usaha pembenihan dimasyarakat dalam pendampingan, pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana usaha pendukung pembenihan di masyarakat seperti penyediaan induk ikan, teknologi budidaya.
- Penguatan pendampingan pelaku usaha perikanan dalam akses permodalan ke perbankan.
- Melaksanakan pembinaan terhadap nelayan dan Pokmaswas mengenai alat tangkap ramah lingkungan dan bahaya illegal fishing.
- Memberian Restocking Ikan (pengkayaan) Ikan di perairan umum.

Analisis Capaian Sasaran 23 :

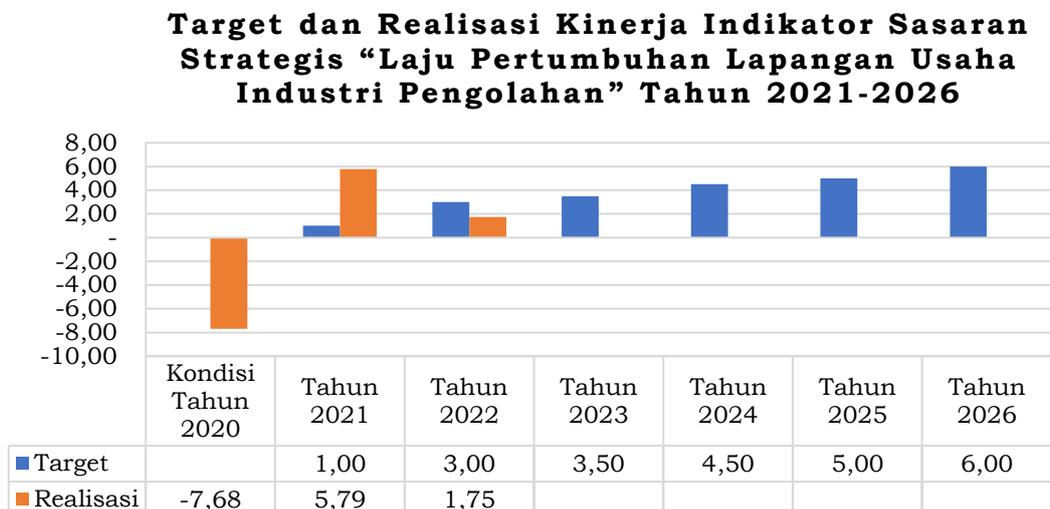
Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan

Sasaran Strategis Meningkatkan Usaha Industri Pengolahan di ukur melalui indikator sasaran Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Sektor industri merupakan penggerak perekonomian suatu

negara karena dapat memberikan kesempatan kerja yang luas dan nilai tambah yang besar sehingga mampu menyelesaikan suatu masalah yaitu mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan lapangan usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan” Tahun 2021-2026 disajikan pada grafik berikut ini :



Analisis Capaian Sasaran 24 :

Meningkatnya Usaha Konstruksi

Sasaran Strategis Meningkatkan Usaha Konstruksi diukur melalui indikator sasaran Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi. Sektor konstruksi dan bangunan merupakan suatu sektor dengan kegiatan membangun sarana maupun prasarana pada sebuah area atau beberapa area. Berlakunya MEA saat ini dan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia adalah kunci meningkatnya sektor konstruksi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha. Beberapa permasalahan sektor jasa konstruksi nasional sendiri diantaranya seperti, tenaga kerja konstruksi yang belum memiliki kompetensi proporsional sesuai dengan kenaikan anggaran, kompetensi dan kualitas badan usaha sebagai penyedia jasa di Indonesia, serta kebijakan dan pengaturan untuk mendukung berbagai upaya percepatan pembangunan.

Tercatat kontribusi lapangan usaha Konstruksi mengalami fluktuatif pada periode 2018-2023. Pada Tahun 2018 kontribusi lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,36%, naik menjadi 8,39% pada Tahun 2019,

kemudian turun pada Tahun 2020 menjadi 8,17% dan naik lagi pada Tahun 2021 menjadi 8,57%. Pada Tahun 2023 kontribusi lapangan Usaha Konstruksi adalah sebesar 8,11% yang berarti capaian kinerja Indikator Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi hanya sebesar 40,33% dari target Tahun 2023 yang sebesar 3%. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Kontribusi dan Laju Pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi di Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 - 2022



BPS mencatat PDRB ADHK sektor konstruksi Tahun 2023 sebesar Rp. 898,85 Milyar. Nilainya tumbuh 1,21% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) sebesar Rp. 888,11 milyar. Sektor konstruksi sempat mengalami kontraksi sejak Tahun 2019. Hal itu merupakan imbas dari pandemi Covid-19 yang membatasi berbagai aktivitas. Kinerja sektor konstruksi mulai pulih pada Tahun 2021 dengan kenaikan hingga 7,55%. Namun Sektor tersebut pun kembali tumbuh negatif pada Tahun 2023.

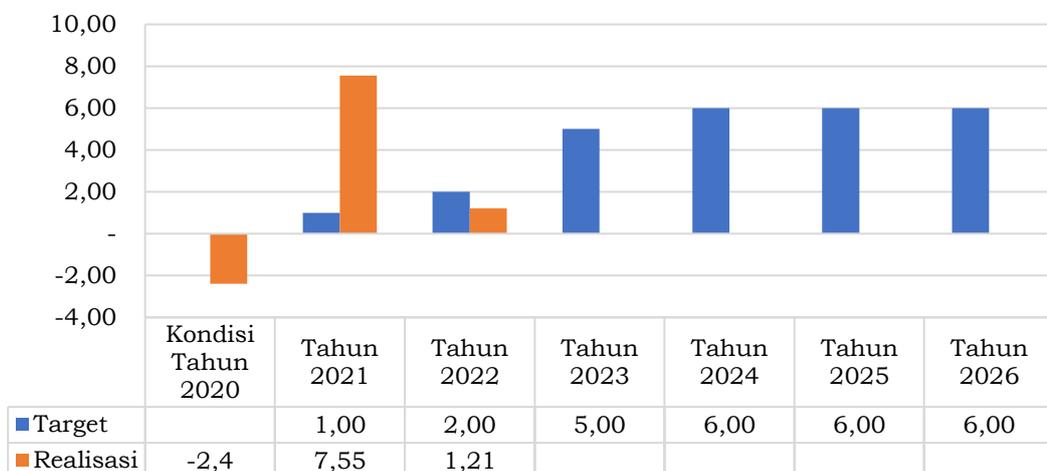
Tabel II.26
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Usaha Konstruksi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	%	7,55	3	1,21	40,33

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

Pada Tahun 2023, Laju Pertumbuhan lapangan Usaha Konstruksi turun menjadi 1,21%. Capaian Kinerja Indikator tersebut adalah sebesar 40,33% dari target Tahun 2023 sebesar 3%. Dengan demikian maka, capaian kinerja indikator kinerja laju pertumbuhan lapangan Usaha Konstruksi pada kriteria Sangat Rendah. Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi” Tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi” Tahun 2021-2026



Tahun 2021 lapangan usaha konstruksi menyumbang 8,95 persen terhadap PDRB Way Kanan atau setara Rp62,23 triliun. Lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang Rp41,41 triliun atau 5,96 persen terhadap PDRB Way Kanan.

Sumbangan lapangan usaha konstruksi tahun 2021 sebesar 8,95 persen, sebenarnya menurun dibandingkan tahun 2020 yakni 9,54 persen. Begitu pula dengan lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, tahun 2020 menyumbang 6,46 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Way Kanan dalam Laporan PDRB Way Kanan Periode 2017-2021 yang diluncurkan Bulan April 2023, pada tahun 2017 sumbangan sektor usaha konstruksi terhadap PDRB Way Kanan sebesar 7,92 persen, sedangkan tahun 2021 mencapai 8,95 persen atau setara Rp62,23 triliun.

Peningkatan peran konstruksi dalam ekonomi Way Kanan didorong adanya proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, kilang minyak dan bangunan lainnya, Pertumbuhan lapangan usaha konstruksi fluktuatif dalam lima tahun terakhir, bahkan sempat tumbuh 8,15 persen. Pada tahun 2020 sempat berkontraksi sebesar 1,46 persen. Namun pada tahun 2021 sudah tumbuh positif 4,41 persen.

Analisis Capaian Sasaran 25 : **Meningkatnya Usaha Perdagangan**

Pertumbuhan ekonomi sektor perekonomian di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dari berapa besar kontribusinya terhadap PDRB-nya. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan.

Sasaran Strategis Meningkatkan Usaha Perdagangan diukur melalui indikator sasaran Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/ lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

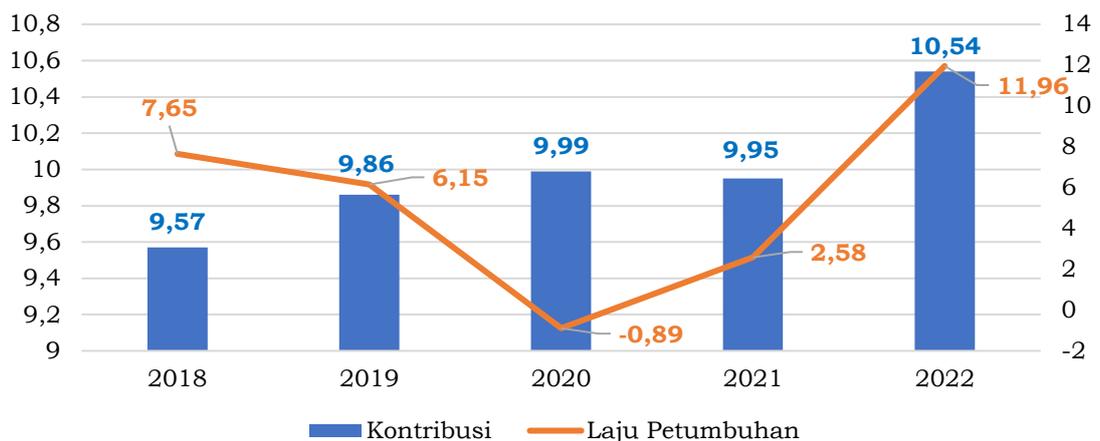
Tabel II.27
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Usaha Perdagangan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	2,58	3	11,96	398,67

Sumber : BPS Way Kanan, Data diolah

Tahun 2023 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang 11,96% terhadap PDRB atau setara Rp.1,15 triliun. Sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2023 tersebut, meningkat dibandingkan tahun 2021 yakni 9,95%. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2018 - 2022

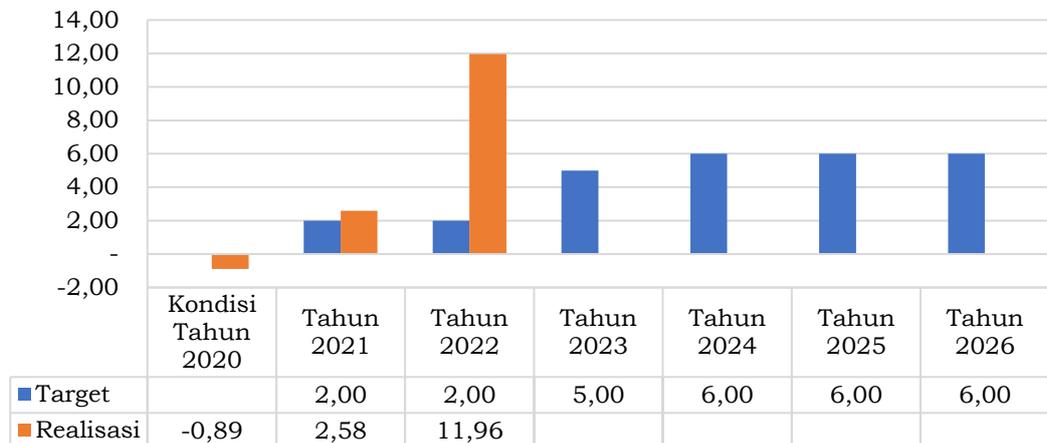


Laju Pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor fluktuatif dalam lima tahun terakhir, sempat berkontraksi sebesar minus 0,89%. Namun pada tahun 2021 kembali tumbuh positif 9,95%. Pada Tahun 2023 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 10,54%, yang artinya capaian kinerjanya sangat tinggi, mencapai 398,67% dari target Tahun 2023 yang sebesar

3%. Capaian Kinerja masuk dalam kategori Capaian Kinerja Sangat Tinggi.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi” Tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor” Tahun 2021-2026



Analisis Capaian Sasaran 25 :

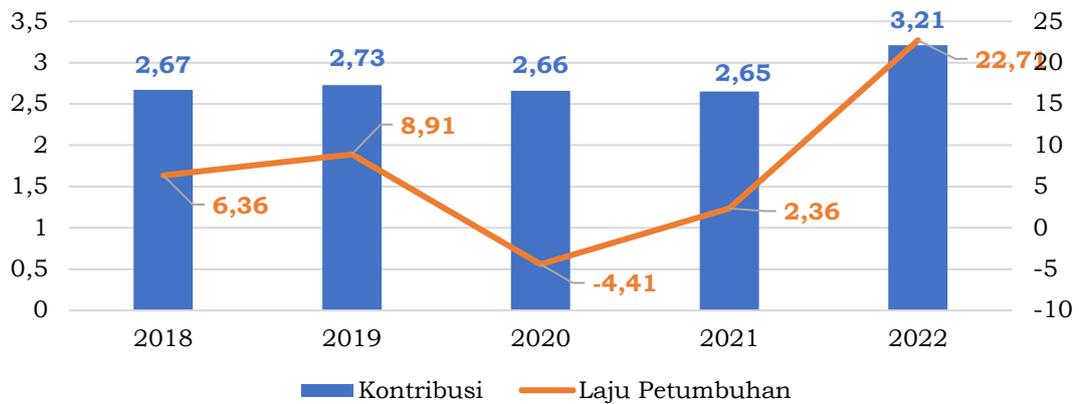
Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan

Transportasi dan pergudangan merupakan suatu fungsi dari proses untuk menawarkan kesempatan yang baik dan mengurangi pemborosan secara keseluruhan sistem logistik. Transportasi bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB dikarenakan setiap daerah tentu nya memiliki transportasi. Sudah cukup banyak ditemukan perusahaan-perusahaan transportasi yang berdiri beroperasi di berbagai daerah atau lazim melihat transportasi banyak dipakai oleh masyarakat,

baik itu transportasi umum maupun pribadi. Hal ini dapat mempengaruhi dan bahkan mungkin bisa membantu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut. Selain transportasi, pergudangan juga merupakan salah satu faktor sektor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Pergudangan merupakan suatu tempat yang bisa digunakan untuk menyimpan keperluan. Pergudangan semakin banyak ditemukan di beberapa daerah karena semakin banyak perusahaan yang membutuhkan suatu tempat untuk menyimpan barang-barangnya secara baik dan aman tanpa mengganggu kegiatan perusahaan. Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha Transportasi dan Pergudangan di ukur melalui indikator sasaran Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan.

Laju Pertumbuhan lapangan usaha Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan fluktuatif dalam lima tahun terakhir, sempat berkontraksi pada Tahun 2020 sebesar minus 4,41%. Namun pada tahun 2021 kembali tumbuh positif 2,36%. Pada Tahun 2023 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh cepat sebesar 22,71%, yang artinya capaian kinerjanya sangat tinggi, mencapai 757% dari target Tahun 2023 yang sebesar 3%. Capaian Kinerja masuk dalam kategori Capaian Kinerja Sangat Tinggi Kontribusi dan Laju Pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan Tahun 2018-2022



Meningkatnya sektor transportasi dan pergudangan di Kabupaten Way Kanan tentu nya memiliki beberapa alasan. Meningkatnya sektor transportasi dapat disebabkan karena jumlah kendaraan yang juga semakin meningkat untuk dijadikan sebagai sarana pengangkutan. Untuk transportasi darat, Kendaraan pribadi bertambah terutama pada kendaraan roda dua dan roda empat merefleksikan jika terjadi peningkatan.

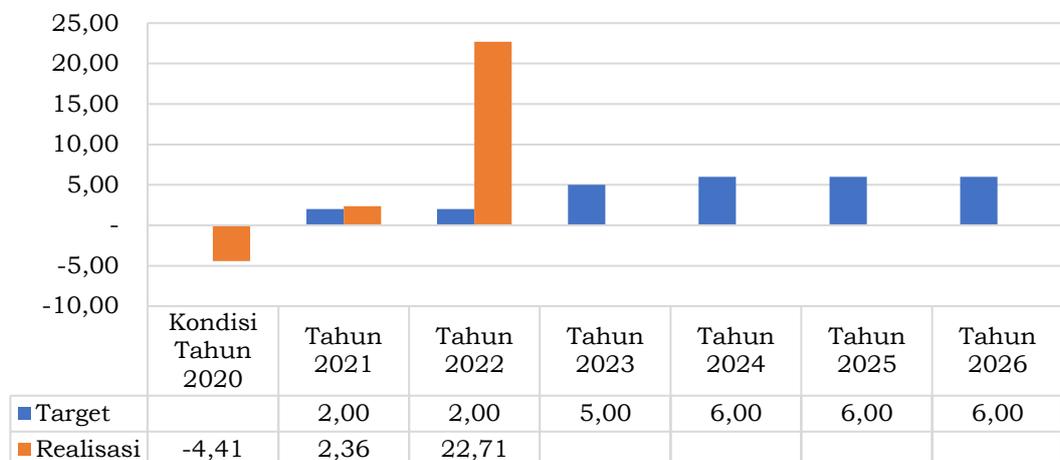
Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada di sektor transportasi, seperti keterbatasan fiskal APBD, meningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur transportasi, belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kurangnya tingkat kesadaran akan keselamatan transportasi, hingga pengembangan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan guna menghadapi isu pemanasan global dan perubahan iklim. Sejumlah strategi yang akan dilakukan yaitu: mengoptimalkan penerapan pendanaan kreatif non APBD melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur

transportasi, mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong keterlibatan peran swasta dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan melakukan transformasi struktural dan digitalisasi dalam upaya meningkatkan layanan transportasi.

Upaya tersebut tentu tidak bisa dilakukan tanpa kerja sama yang baik. Antara pemerintah pusat dengan daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha swasta, media, dan masyarakat. Kolaborasi pentahelix ini harus dilaksanakan dengan baik.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan” Tahun 2021-2026 disajikan pada grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan” Tahun 2021-2026



Analisis Capaian Sasaran 25 : **Meningkatnya Usaha Pariwisata**

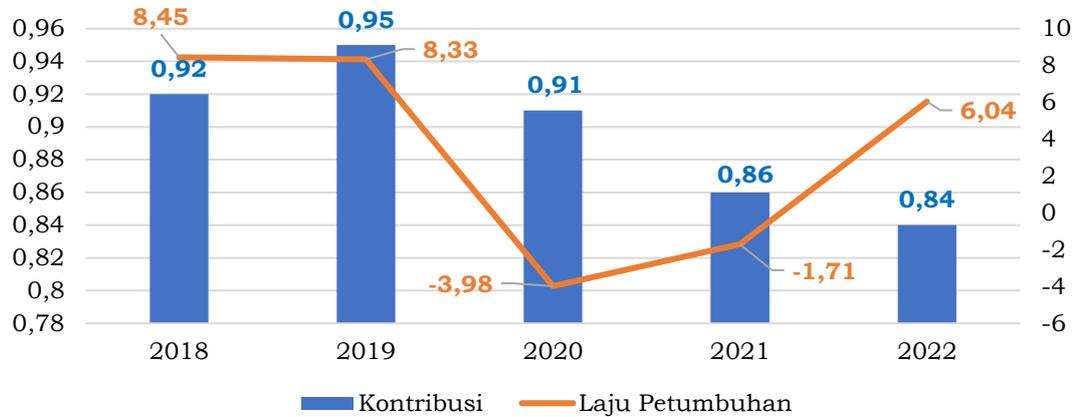
Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan disebutkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Sedangkan Sihite (2000:49) pengertian wisatawan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1) Wisatawan nusantara adalah wisatawan dalam negeri atau wisatawan domestik, dan 2) Wisatawan mancanegara adalah warga negara suatu negara yang mengadakan perjalanan wisata keluar lingkungan dari negaranya (memasuki negara lain). Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha Pariwisata di ukur melalui indikator sasaran Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tahun 2023 Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum menyumbang 3,21% terhadap PDRB atau setara Rp. 328,08 Milyar. Sumbangan lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2023 tersebut, meningkat dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar Rp. 267,36 milyar.

Laju Pertumbuhan lapangan usaha Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum fluktuatif dalam lima tahun terakhir, sempat berkontraksi pada Tahun 2020 sebesar minus 3,98% dan minus 1,71 pada Tahun 2021. Namun pada tahun 2023 kembali tumbuh positif 6,04%.

Kontribusi dan Laju Pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Kontribusi dan Laju Pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2018-2022



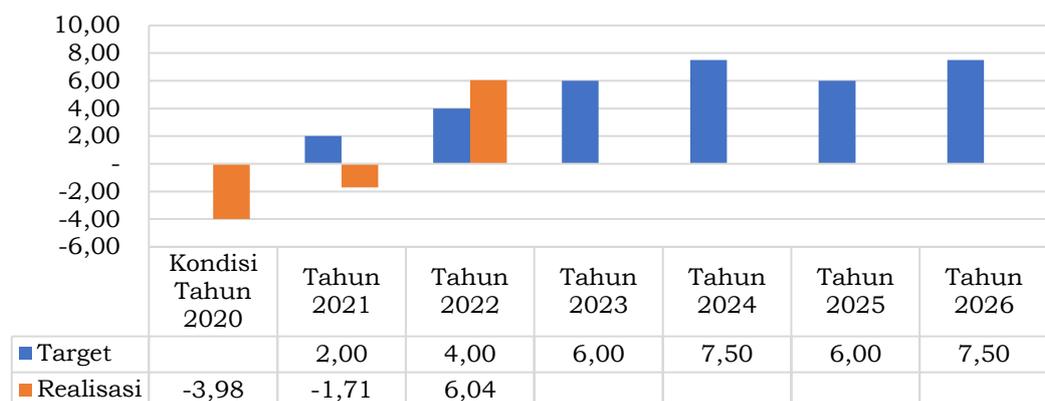
Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak pandemic Covid-19 yang melanda dunia semenjak awal Tahun 2019. Pandemi COVID-19 membawa perubahan dalam gaya hidup masyarakat secara menyeluruh. Sebelum pandemi masyarakat belum terbiasa untuk menyelesaikan segala urusannya secara daring. Namun adanya pandemi segala bentuk pertemuan fisik sebisa mungkin diminimalisir dan dialihkan ke mode daring.

Peluang dan tantangan sektor usaha hotel dan restoran pasca covid-19, bahwa sektor pariwisata dari wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mengalami penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan dari pandemi covid-19. Dampak pandemi di setiap daerah ada 3 yaitu adanya penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran di setiap kabupaten/kota, menurunnya permintaan pada sektor usaha menengah kecil (UMK), dan penurunan occupancy hotel dan konsumen di restoran.

Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tersebut mendakan bahwa berbagai upaya Pemerintah yang didukung oleh masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional telah mulai menunjukkan hasil yang membaik. Sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga mendapat dukungan dari Pemerintah untuk bisa pulih.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum” Tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum” Tahun 2021-2026



Pada Tahun 2023 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh cepat sebesar 6,04%, yang artinya capaian kinerjanya sangat tinggi, mencapai 151% dari target Tahun 2023 yang

sebesar 4%. Capaian Kinerja masuk dalam kategori Capaian Kinerja Sangat Tinggi.

Seiring dengan berkembangnya pariwisata dan adanya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan, telah membawa konsekuensi tersendiri khususnya pada daerah tujuan wisata dan masyarakat lokal. Kehadiran pariwisata pada dasarnya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, meningkatkan standar hidup, serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Tumbuhnya peluang usaha dan kerja akibat pariwisata menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja meningkat. Makin banyak wisatawan yang berkunjung maka makin banyak pula jenis usaha yang tumbuh di daerah wisata sehingga makin luas lapangan kerja yang tercipta.

Lapangan kerja yang tercipta tidak hanya yang langsung berhubungan dengan pariwisata, tetapi juga di bidang yang tidak langsung berhubungan dengan pariwisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa pariwisata mempunyai potensi yang besar dalam menyediakan lapangan kerja bagi para tenaga kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru.

Analisis Capaian Sasaran 26 : **Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian**

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan Hukum koperasi, yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai

usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Usaha koperasi di Indonesia berlandaskan pada Undang Undang No. 25 Tahun 1992. Berdasarkan undang-undang tersebut gerak langkah koperasi menjadi lebih leluasa karena perkumpulan koperasi dianggap sama dengan bentuk badan usaha lain. Koperasi di Indonesia berperan strategis dalam menggerakkan denyut nadi perekonomian masyarakat serta pembangunan nasional.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Perkoperasian di ukur melalui indikator sasaran persentase Koperasi Sehat. Status Koperasi dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa pertimbangan dibawah ini: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. Nah, salah satu hal terpenting dapat kita telisik melalui Laporan keuangan koperasi. Bagaimana cara menilai kesehatan koperasi. Aspek-aspek yang akan dinilai untuk menilai kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jatidiri koperasi.

Transformasi Koperasi perlu didukung dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain melalui kebijakan vokasi. Hal ini penting agar koperasi bisa kreatif dan inovatif dalam menjalankan strategi bisnis di era industri 4.0 dan ekonomi digital. Salah satu sasaran dari arah pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah peningkatan jumlah koperasi aktif. Untuk mendorong keberhasilan dari pengembangan koperasi tersebut, ada beberapa upaya

yang perlu dilakukan. Pertama, dengan meningkatkan pelatihan perkoperasian secara masif.

Kedua, sertifikasi kompetensi untuk pengelola koperasi. Ketiga, bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan strategi bisnis hingga pemasaran. Keempat, pengenalan koperasi mulai dari pendidikan dasar. Kelima, mendorong digital literacy, kreativitas, dan inovasi. Data dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Way Kanan mencatat, jumlah koperasi aktif sejumlah 122 koperasi.

Analisis Capaian Sasaran 27 : **Meningkatnya Usaha Mikro**

UMKM memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) memberikan pengertian tentang UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana. Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Selaras dengan upaya Pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga berkomitmen dalam pengembangan UMKM di daerah. Untuk itu maka

salah satu Sasaran Strategi Pembangunan Daerah adalah Pengembangan UMKM. Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha Mikro di ukur melalui indikator sasaran persentase Usaha Mikro Per Jumlah Penduduk.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Way Kanan, terdapat 809 UMKM yang ada di Kabupaten Way Kanan. Jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada saat ini semakin bertambah banyak, namun jumlah UMKM ini ternyata tidak sebanding dengan tingkat daya saing UMKM tersebut, baik secara lokal maupun nasional. Kebanyakan UKM di Kabupaten Way Kanan hanya melakukan proses produksi, berdagang, dan berekonomi, sehingga membuat daya saing UKM di Indonesia tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan, ternyata banyak UMKM yang memulai usaha karena adanya desakan ekonomi bukan karena mereka memiliki produk yang unik atau keterampilan pada bidang tertentu. Tentu saja kondisi ini akhirnya membuat sebagian besar dari UMKM di Kabupaten Way Kanan tidak memiliki daya saing. Bahwa untuk tetap bertahan dan berkembang di dalam dunia bisnis yang semakin ketat harus dimiliki keterampilan, profesional, dan mampu menciptakan inovasi-inovasi pada usaha UMKM itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Koperasi UKM melakukan upaya untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam meningkatkan UMKM, antara lain :

- 1) Melatih Pelaku UKM memiliki Jiwa Kepemimpinan. Walaupun baru memulai UKM dan belum memiliki seorang karyawan harus tetap ditanamkan jiwa kepemimpinan dalam diri pelaku UMKM, Kemampuan dalam memimpin, merencanakan, mengatur, dan menjalankan sebuah usaha tentunya akan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan UMKM itu sendiri.
- 2) Memberikan pelajaran manajemen kepada Pelaku UMKM. Pengetahuan tentang Manajemen adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pelaku UMKM. Dengan modal knowledge manajemen, pelaku UMKM akan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam bisnis Anda, dan dapat mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi.
- 3) Memberikan pengetahuan tentang Marketing dan Branding. Salah satu penyebab kegagalan sebuah UMKM adalah tidak melakukan marketing dan branding secara maksimal. Dua faktor ini adalah sangat penting dalam tumbuh kembangnya sebuah usaha baik skala besar ataupun skala kecil. Contohnya dalam membuat sebuah logo dan juga nama perusahaan yang mudah diingat oleh orang lain, dan juga melakukan promosi agar UMKM semakin dikenal oleh masyarakat luas. Sebagus apapun produk yang dijual UMKM, apabila tidak didukung oleh kegiatan promosi yang baik, orang tidak akan mengenalnya.
- 4) Mendampingi Pelaku UMKM agar dapat Beradaptasi. Pasar yang semakin luas dan pertumbuhan UMKM yang semakin banyak tentunya akan menciptakan

banyak tantangan. Kemampuan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan dapat memenuhi permintaan konsumen yang semakin beragam akan membuat UMKM dapat bertahan dan dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

- 5) Mendorong Pelaku UMKM untuk terus Berinovasi. Inovasi Dalam Bisnis Adalah sesuatu yang sangat penting. Pelaku UMKM harus bisa berinovasi dalam menawarkan produknya ke pasar.

Analisis Capaian Sasaran 27 :

Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah (BPS Way Kanan).

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan suatu besaran tanpa satuan hitung yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Nilai ICOR didapat dengan membandingkan nilai investasi yang ditanamkan terhadap tambahan output

yang terjadi sepanjang periode investasi. Besaran ICOR adalah proxy efisiensi sebuah perekonomian dimana semakin rendah nilai ICOR berarti menunjukkan efisiensi relatif suatu perekonomian. Atau dengan kata lain nilai ICOR yang rendah mengindikasikan tingginya produktifitas kapital yang tinggi.

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “ICOR” Tahun 2021-2026



Sementara itu target akhir periode RPJMD pada Tahun 2026 ICOR Kabupaten Way Kanan sebesar 6,70%. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus berupaya dalam mendorong investasi yang merupakan salah satu pemantik pertumbuhan ekonomi dan terbukannya lapangan kerja, termasuk pula investasi di daerah.

Berbagai instrument dan daya dukung disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan, termasuk menyiapkan help desk personil yang siap siaga melayani permohonan dan kendala yang ditemukan pemohon yang biasanya mengurus perzinan secara mandiri. Dalam kegiatan

penanaman modal pemerintah memberikan kemudahan dan fasilitas kepada investor yang akan menanamkan modal. Adapun fasilitas penanaman modal menurut Peraturan BKPM No: 4 Tahun 2021 didefinisikan sebagai bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pemberian fasilitas penanaman modal oleh pemerintah ditujukan untuk mendorong investasi, meningkatkan daya saing, membantu persiapan produksi komersial, melindungi usaha nasional, dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

Pemberian fasilitas penanaman modal diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dapat berupa fasilitas fiskal maupun non fiskal dan kemudahan lainnya di bidang penanaman modal. Berdasarkan peraturan BKPM terakhir yang mengatur tata cara perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal, fasilitas penanaman modal dikategorikan menjadi dua, yaitu segala bentuk insentif di bidang fiskal dan non fiskal dan kemudahan di bidang penanaman modal.

Di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, fasilitas penanaman modal fasilitas fiskal diberikan kepada penanaman modal baru maupun dalam rangka perluasan usaha, yang memenuhi minimal salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- 1) menyerap banyak tenaga kerja;
- 2) termasuk skala prioritas tinggi;
- 3) termasuk pembangunan infrastruktur;

- 4) melakukan alih teknologi;
- 5) melakukan industri pionir;
- 6) berada di daerah terpoencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah yang dianggap perlu;
- 7) menjaga kelangsungan lingkungan hidup;
- 8) melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 9) bermitra dengan UMKM atau koperasi;
- 10) industri yang menggunakan barang modal/mesin/peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Adapun tujuan dari pemberian fasilitas penanaman modal antara lain :

- 1) Mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi serta peningkatan daya saing dan kualitas penanaman modal;
- 2) Membantu perusahaan penanaman modal terutama industri pada saat persiapan melaksanakan produksi komersial dalam hal persiapan peralatan produksi;
- 3) Melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam negeri dari masuknya barang sejenis yang dimpor dengan mempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar;
- 4) Memberi kemudahan bagi investor khususnya dalam proses impor barang modal berupa mesin, barang dan bahan;
- 5) Mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing dengan menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis;
- 6) Mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan serta percepatan pembangunan dalam bidang-bidang usaha tertentu dan/atau jasa daerah-daerah tertentu.

Analisis Capaian Sasaran 28 :

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Faktor-faktor tersebut antara lain : (1) Umur; (2) Status perkawinan; (3) Tingkat pendidikan; (4) Daerah tempat tinggal; (5) Pendapatan; (6) Agama. Pengaruh dari masing-masing faktor tersebut terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja berbeda antara penduduk satu dengan penduduk yang lain.

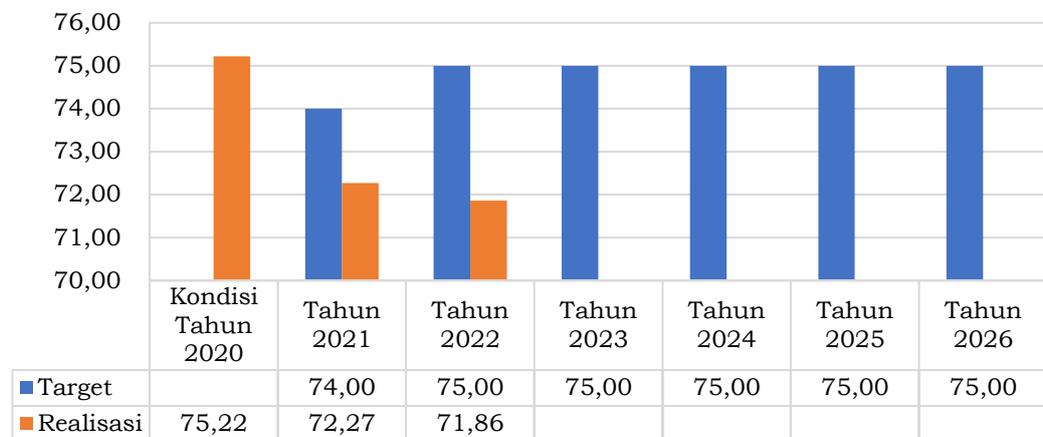
Manfaat data tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebagai berikut : Mengukur komposisi pasokan tenaga kerja di dalam perekonomian. Membuat proyeksi pasokan tenaga kerja dimasa depan. TPAK berguna untuk mengetahui seberapa banyak angkatan kerja yang ikut andil dalam perekonomian, karena dengan melihat TPAK kita dapat mengetahui sejauh mana para angkatan kerja yang aktif dalam pasar kerja. Dengan menggunakan tiga variabel bebas yakni; upah minimum, penduduk usia prima, dan penduduk usia tua. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Angka TPAK yang tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, begitu pula sebaliknya.

Seiring dengan turunnya TPAK maka jumlah pengangguran di Kabupaten Way Kanan juga mengalami Peningkatan. BPS mencatat jumlah pengangguran di Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023 mencapai 8.167

jiwa, atau 3,28% dari total angkatan kerja yang berjumlah 248.708 jiwa.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)” Tahun 2021-2026 disajikan pada grafik berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “TPAK” tahun 2021-2026



Sementara itu target akhir periode RPJMD pada Tahun 2026 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Way Kanan sebesar 675%.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran, antara lain :

- Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Kegiatan ini dilakukan dengan menentukan jenis pemagangan/pelatihan yang akan dilakukan serta lokasi dan peserta yang akan di beri pelatihan yang

melibatkan LPK/BLK yang ada di Kabupaten Way Kanan.

- Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dilakukan dengan memasukan (entry) data pencari kerja terdaftar yang melakukan proses pembuatan AK 1 (Kartu Pencari Kerja) dan Rekom ID TK.

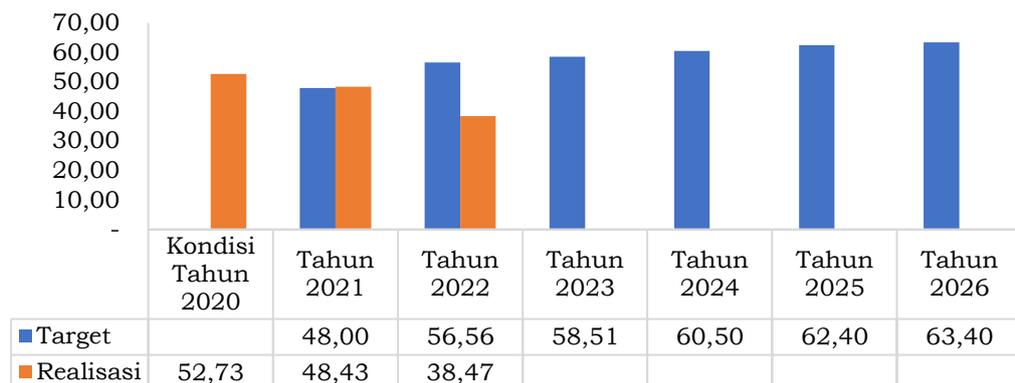
Analisis Capaian Sasaran 29 : **Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan**

Pembangunan jalan pada dasarnya ditujukan sebagai suatu prasarana untuk masyarakat agar memudahkan mobilitas dan aksesibilitas dalam melakukan aktivitas baik sehari-hari maupun untuk mendukung aktivitas ekonomi. Keberadaan jalan ini merupakan hal penting sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan berbagai sektor lain. Pemeliharaan atau perbaikan jalan memang perlu terus dilakukan mengingat prasarana ini tentu akan terbebani dengan volume lalu lintas yang tinggi dan berulang, terutama di ruas jalan antar provinsi. Sebab mobilitas tinggi dapat berpotensi menurunkan kualitas kondisi jalan baik secara struktural maupun fungsional. Mengacu pada Misi Ke-4 Bupati Way Kanan yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan terus melakukan peningkatan agar presentase kondisi jalan baik memenuhi target tahunan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kondisi Jalan diukur melalui indikator sasaran Persentase Jalan Mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Persentase Jalan Mantap” Tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Persentase Jalan Mantap” Tahun 2021-2026



Peningkatan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas PUPR dengan ditargetkannya pembangunan jalan untuk meningkatkan presentase jalan dengan kondisi mantap dan fokus terhadap jalan rusak berat dan wilayah perbatasan kabupaten. Target presentase kondisi jalan baik pun terus ditingkatkan setiap tahunnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dimana untuk target akhir periode RPJMD pada Tahun 2026 Persentase Jalan Mantap Kabupaten Way Kanan sebesar 63,40%.

Sementara itu, pada infrastruktur jembatan, dari data diketahui bahwa Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik mencapai realisasi sebesar 89.08%. Pada tahun 2023 terdapat 457 unit jembatan dengan kondisi baik dari jumlah total jembatan di Kabupaten Way Kanan 513 Unit. Pada tahun 2021 terdapat 357 unit jembatan dengan kondisi baik. Sehingga perbandingan dari tahun sebelumnya meningkat sebanyak 19.49.

Analisis Capaian Sasaran 29 :

Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Pada hakikatnya penataan ruang terdiri dari tiga aspek, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga aspek tersebut saling bersinergi dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang dicita-citakan.

Penataan kota dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sudah merupakan kebutuhan yang penting. Perencanaan tata ruang kota merupakan wahana untuk mewujudkan suatu kota yang nyaman, asri, dan sehat. Salah satu tolok ukur penataan ruang kota adalah yang mampu memberikan kenyamanan, keasrian, dan kesehatan bagi penghuni kota adalah pengelolaan lingkungan dan kegiatan pelayanan publik yang harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan program ADIPURA

meliputi aspek; (a) pengelolaan sampah, (b) pengendalian pencemaran air, dan (c) pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang, setidaknya harus memperhatikan empat hal yaitu : (1) penduduk dan sosial; (2) ekonomi; (3) lingkungan dan (4) teknologi. Untuk mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut: Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk penataan ruang. Penguatan kerja sama pemerintah daerah. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Pengawasan dan penegakan hukum dengan tegas.

Pada Tahun 2023 Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Way Kanan sebesar 88,00%. Capaian kinerjanya sebesar 88,00% dari target Tahun 2023 yang sebesar 100,00%. Namun Laju Inflasi tersebut menurun Jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, dimana pada Tahun 2021 Ketaatan Terhadap RTRW sebesar 100%.

Meskipun demikian Hal ini mengindikasikan bahwa indikator ketaatan RTRW pada umumnya tidak mengalami kendala yang signifikan. Hal ini dilihat dari data penyelesaian izin lokasi dan peruntukan lahan yang ada telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten yang telah ditetapkan.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Ketaatan Terhadap RTRW” Tahun 2021-2026 disajikan pada Grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Ketaatan Terhadap RTRW” Tahun 2021-2026



Analisis Capaian Sasaran 30 : **Terkendalinya Inflasi**

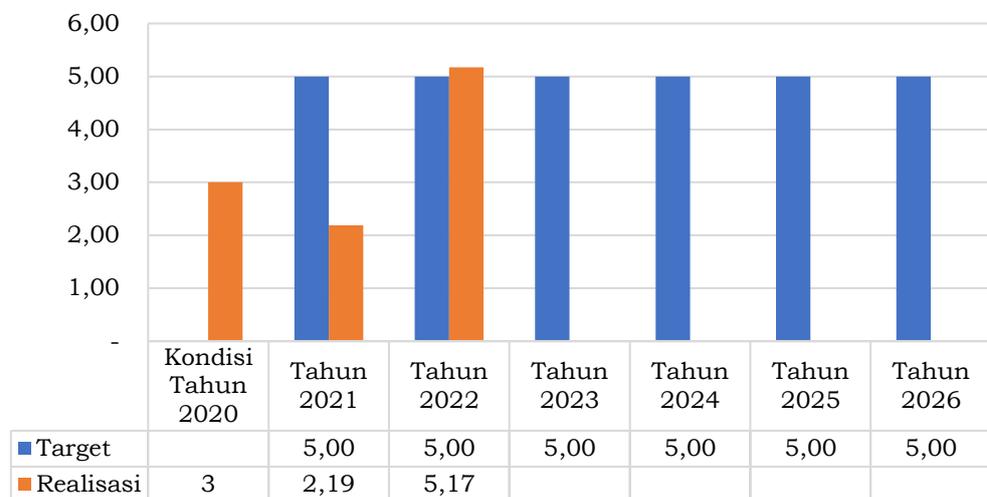
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Melainkan, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Sasaran Strategis Terkendalnya Inflasi di ukur melalui indikator sasaran Laju Inflasi.

Perkembangan target dan realisasi kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Inflasi” Tahun 2021-2026 disajikan pada grafik berikut ini :

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Strategis “Laju Inflasi” Tahun 2021-2026



Sementara itu target akhir periode RPJMD pada Tahun 2026 Laju Inflasi Kabupaten Way Kanan sebesar 3-5%. Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Way Kanan terus mengambil langkah-langkah antisipatif pengendalian inflasi di Kabupaten Way Kanan. Terbukti telah menunjukkan hasil nyata dengan terkendalnya inflasi di Kabupaten Way Kanan yang stabil. Inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil diharapkan akan menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian.

Iklim kondusif bagi perekonomian yakni berupa kepastian usaha dan terjaganya biaya produksi yang akan mendorong peningkatan investasi dan produksi. Terjaganya kestabilan inflasi tersebut, turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk juga mendorong pembangunan perekonomian di Kabupaten Way Kanan.

Bagi masyarakat sebagai konsumen, dengan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah mendorong daya beli masyarakat baik untuk masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah maupun tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan. Sementara dari sisi produsen baik untuk petani maupun pelaku usaha, pergerakan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil dibutuhkan sebagai insentif untuk melakukan produksi. Meski demikian, sejumlah risiko masih dihadapi di antaranya masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan setempat.

Pencapaian inflasi Di Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi IHK pada Desember 2023 tercatat menjadi 0,66% (mtm) sehingga inflasi IHK Tahun 2023 menjadi 5,51% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87% (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0+1%, terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar.

Begitu juga jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Lampung mencatat pada Desember 2023, terjadi inflasi years on years (yoy) untuk gabungan dua kota di Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dan Metro sebesar 5,51%.

Sebagai langkah menanggulangi dampak inflasi dan tetap menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah mendorong upaya pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan-kebijakan berikut :

1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Daerah diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi.

2) Dukungan Pemerintah Daerah sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil)

Untuk mengantisipasi dampak inflasi setelah dilakukan penyesuaian harga BBM, pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

3) Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID)

Selain itu sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah yang berhasil menekan/mengendalikan inflasi.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah melalui Kementerian maupun dari Pemerintah Provinsi Lampung yang langsung ditujukan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan LNRI Nomor 4816);

B. Gambaran Umum Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - Kementerian Pertanian RI;
 - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
2. Instansi Penerima Tugas Pembantuan
 - Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan;
 - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan

C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian RI dan Pemerintah Provinsi Lampung

1. Target Kinerja
 - a. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Peternakan**
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
Tugas Pembantuan dari Kementan RI :
 - Kegiatan Program Bantuan Traktor Roda 4 (1 Unit); Traktor Roda 2 (10 unit); Hand Sprayer (24 Unit); Unit Pengelohan Pupuk Organik (UPPO) (4 Unit); Irigasi Air Tanah Dangkal (Sumur Bor) (1 Unit); Pupuk Organik Cair (POC) (12.929 Ha).

- Kegiatan Bimtek, dan Evaluasi Alat dan Mesin Pertanian; Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan e-RDKK; Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi; Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP); Dukungan Manajemen Operasional Dinas (1 Paket).

Tugas Pembantuan dari Provinsi Lampung :

- Kegiatan Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi (2.382,20 Ha); Asuransi Petani Lansia (379 Petani); Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO) (1 Unit); Perangkat Uji Pupuk (PUP) (1 Unit).

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Provinsi Lampung : Kegiatan Bantuan Chopper (1 Unit), Rabakong (1 Unit), Kandang Kambing (1 Unit), Ternak Sapi (20 Ekor), Ternak Kambing (80 ekor), Ternak Ayam Program Stunting (100 Ekor), Ternak Itik (100 Ekor);
- Kementan RI : Kegiatan Bantuan Ternak Kambing (50 Ekor), Ternak Sapi (80 Ekor).

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tugas Pembantuan Kementan RI :

- Kegiatan Bantuan Padi Ramah Lingkungan (250 Ha), Corn Sheller Mobile (2 Unit), Combine Harvester Besar (4 Unit), Optimalisasi Padi (4.237 Ha), Optimalisasi Jagung (4.450 Ha);
- Kegiatan Pengembangan Cabai (20 Ha), Hidroponik (2 Kelompok), Pekarangan Pangan Lestari (10 Kelompok), Sarana Pasar Tani (1 Kelompok);

Tugas Pembantuan Provinsi Lampung :

- Kegiatan Bantuan Padi Inbrida Tahap I dan Tahap II (5.856 Ha); Jagung (500 Ha); UPH Jagung (1 Kelompok); Kedelai Tahap 1 dan Tahap 2 (658 Ha);

Padi Kaya Gizi Tahap 1 dan Tahap 2 (343 Ha); Corn Sheller (2 Unit).

- Kegiatan Bantuan Bibit Buah Bibit Alpukat (2.400 Batang) dan Bibit Durian (1.500 Batang).

b. Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- Program Registrasi Keamanan Pangan Segar dengan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Pelaku Usha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Uji untuk 11 produk PSAT (beras dalam kemasan) berupa logam Cadmium (Cd) dan Timbal (Pb) dan uji mutu beras.
- Program Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar dengan kegiatan Uji laboratorium logam beras (cadmium dan arsen) untuk pangan segar beras 20 sampel dan Uji rapid testkit untuk produk pangan segar sebanyak 29 sampel.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- Kegiatan Penyusunan FSVA Kab. Way Kanan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- Penguatan Cadangan Pangan Nasional di Kabupaten Way Kanan;
- Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kabupaten Way Kanan.

2. Realisasi

Adapun target dan capaian kinerja dari tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel matriks capaian sebagaimana berikut :



Tabel III.1

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

NO	Bidang	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Anggaran	Realisasi Kegiatan	Capaian
1.	Tanaman Pangan dan Holtikultura	APBN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian melalui Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	Program Bantuan : - Padi Inbrida Tahap 1 dan Tahap 2 (5.856 Ha) - Jagung (500 Ha) - UPH Jagung (1 Kelompok) - Kedelai Tahap 1 dan 2 (658 Ha) - Padi Kaya Gizi Tahap 1 dan 2 (343 Ha) - Corn Sheller (2 Unit)		- 12 Kecamatan - 3 kecamatan - 1 Kecamatan - 1 Kecamatan - 3 Kecamatan - 2 Kecamatan		- 12 Kecamatan (5.856 Ha) - 3 kecamatan (500 Ha) - 1 Kecamatan (1 Kelompok) - 1 Kecamatan (658 Ha) - 3 Kecamatan (343 Ha) - 2 Kecamatan (2 Unit)	100% 100% 100% 100% 100% 100%





	APBN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian	Program Bantuan : - Padi Ramah Lingkungan (250 Ha) - Corn Sheller Mobil (2 Unit) - Combine Harvester Besar (4 Unit) - Optimalisasi Padi (4.237 Ha) - Optimalisasi Jagung (4.450)	- 3 Kecamatan - 2 Kecamatan - 3 Kecamatan - 6 Kecamatan - 9 Kecamatan		- 3 Kecamatan (250 Ha) - 2 kecamatan (2 Unit) - 3 Kecamatan (4 Unit) - 6 Kecamatan (4.237 Ha) - 9 Kecamatan (4.450)	100% 100% 100% 100% 100%
	APBN Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian	Program Bantuan : - Pengembangan Cabai (20 Ha) - Hidroponik (2 Kelompok) - Pekarangan Pangan Lestari (10 Kelompok) - Sarana Pasar Tani (1 Kelompok)	- 3 Kecamatan - 1 Kecamatan - 2 Kecamatan - 1 Kecamatan		- 3 Kecamatan (20 Ha) - 1 Kecamatan Hidroponik (2 Kelompok) - 2 Kecamatan (10 Kelompok) - 1 Kecamatan (1 Kelompok)	100% 100% 100% 100%



		APBD Provinsi Lampung Bidang Holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Bantuan : - Bibit Buah Alpukat (2.400 Batang) - Bibit Durian (1.500 Batang)		- 5 Kecamatan - 4 Kecamatan		- 5 Kecamatan (2.400 Batang) - 4 Kecamatan (1.500 Batang)	100% 100%
2.	Prasarana dan Sarana Pertanian	APBN Direktorat Jenderal Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian RI	Program Bantuan : - Traktor Roda 4 (1 Unit) - Traktor Roda 2 (10 Unit) - Hand Sprayer (24 Unit) - Unit Pengolah Pupuk Organik (4 Unit) - Irigasi Air Tanah Dangkal (1 Unit) - Pupuk Organik Cair (12.929)		- 1 Kecamatan - 4 Kecamatan - 1 Kecamatan - 4 Kecamatan - 1 Kecamatan - 15 Kecamatan	- 357.148.000 - 296.969.400 - 28.080.000 - 800.000.000 - 100.000.000	- 1 Kecamatan (1 Unit) - 4 Kecamatan (10 Unit) - 1 Kecamatan (24 Unit) - 4 Kecamatan (4 Unit) - 1 Kecamatan (1 Unit) - 15 Kecamatan (12.929)	100% 100% 100% 100% 100% 100%
		SP DIPA Nomor : 018.08.4.12.9119/2022 tentang Tugas Pembantuan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Program : - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Alat dan Mesin Pertanian		- 15 Kecamatan		- 15 Kecamatan	100%





			<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan e-RDCK - Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi - Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) - Dukungan Manajemen Operasional Dinas 		<ul style="list-style-type: none"> - 15 Kecamatan - 15 Kecamatan - 15 Kecamatan Dinas TPHP Kab. Way Kanan 		<ul style="list-style-type: none"> - 15 Kecamatan - 15 Kecamatan - 15 Kecamatan Dinas TPHP Way Kanan (1 Paket) 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100%
	APBD Provinsi Lampung Bidang Prasarana dan Sarana, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	Program Bantuan :	<ul style="list-style-type: none"> - Asuransi Usaha Tani Padi (2.382,20 Ha) - Asuransi Petani Lansia (379 Petani) - Perangkat Uji Pupuk Organik (1 Unit) - Perangkat Uji Pupuk (1 Unit) 		<ul style="list-style-type: none"> - 4 Kecamatan - 15 Kecamatan - Dinas TPHP Kab. Way Kanan - Dinas TPHP Kab. Way Kaan 		<ul style="list-style-type: none"> - 4 Kecamatan (2.382,20 Ha) - 15 Kecamatan (379 Petani) - Dinas (1 Unit) - Dinas (1 Uni) 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100%





3.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	APBD Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Bantuan : - Chopper (1 Unit) - Rabakong (1 Unit) - Kandang Kambing (1 Unit) - Ternak Sapi (20 Ekor) - Ternak Kambing (20 Ekor) - Ternak Ayam Program Stunting (100 Ekor) - Ternak Itik (100 Ekor)	- 1 Kecamatan - 1 Kecamatan - 1 Kecamatan - 2 Kecamatan - 4 Kecamatan - 1 Kecamatan - 1 Kecamatan	- 1 Kecamatan (1 Unit) - 1 Kecamatan (1 Unit) - 1 Kecamatan (1 Unit) - 2 Kecamatan (20 Ekor) - 4 Kecamatan (20 Ekor) - 1 Kecamatan (100 Ekor) - 1 Kecamatan (100 Ekor)	100% 100% 100% 100% 100% 100%
		APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian	Program Bantuan : Ternak Kambing (50 Ekor) Ternak Sapi (80 Ekor)	- 2 Kecamatan - 2 Kecamatan	- 2 Kecamatan (50 Ekor) - 2 Kecamatan (80 Ekor)	100% 100%

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan, 2024





Tabel III.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

NO	Bidang	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Kosumsi dan Keamanan Pangan	- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang BAPANAS	- Registrasi Keamanan Pangan Segar	- Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Pelaku Usha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	- Dinas Ketahanan Pangan Kab. Way Kanan	32.327.000	32.276.991	99,84%
		- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	- Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	- Uji untuk 11 produk PSAT (beras dalam kemasan) berupa logam Cadmium (Cd) dan Timbal (Pb) dan uji mutu beras	- PT. Saraswanti Indogenetech Bogor (SIG)	16.742.000	16.251.000	97,1%
		- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar		- Uji laboratorium logam beras (cadmium dan arsen) untuk pangan segar beras 20 sampel	- PT. Saraswanti Indogenetech Bogor (SIG)			
		- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia						





		No. 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu & Label Beras - Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan - Pedoman pelaksanaan kegiatan keamanan		- Uji rapid testkit untuk produk pangan segar sebanyak 29 sampel	- Pasar Km.2, Pasar Blambangan Umpu, Pasar Baradatu, Pasar Karya Tiga Kecamatan Pakuan Ratu			
2.	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ttg Pangan - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan FSVA Kabupaten Way Kanan	1 Paket	Kab. Way Kanan	23.500.000	23.500.000	100%





		- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						
3.	Distribusi dan Cadangan Pangan	- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ttg Pangan - PP No. 17 Thn 2015 ttg Ketahanan Pangan dan Gizi - Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional - Perpres No 15 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah - Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Thn 2022 tentang	- Penguatan Cadangan Pangan Nasional di Kabupaten Way Kanan - Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kabupaten Way Kanan	1 Paket 1 Paket	Kab. Way Kanan Kab. Way Kanan	4.140.000 48.125.000	4.140.000 48.075.000	100% 99,90%





		Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah - Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah - Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah - Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan kedelai Pemerintah						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan, 2024



D. Permasalahan dan Kendala

1. Kurang personal PMHP selaku petugas PPC, Inspektur dan Auditor keamanan pangan;
2. Kurangnya SDM di Dinas Ketahanan Pangan;
3. Kurangnya kemampuan Tim Kabupaten secara teknis dan pendampingan yang tidak maksimal dikarenakan terkendala anggaran.

E. Saran dan Tindak Lanjut

1. Perlu penambahan tenaga Fungsional PMHP untuk menjalankan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
2. Perlu sarana dan prasarana Laboratorium Rapid Tes Kit dan sarana mobilitas darat yang memadai;
3. Perlu penambahan tenaga Fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam penyusunan Peta FSVA;
4. Perlu penambahan tenaga Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan staf untuk mendukung kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang banyak memerlukan personil di lapangan.
5. Perlunya CPCL langsung kepada kelompok calon penerima manfaat agar tepat guna dan tepat sasaran.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 (enam) bidang pelayanan dasar. Pelaksanaan SPM oleh 6 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1**Jenis Pelayanan Dasar dan Perangkat Daerah Pelaksana SPM
Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023**

No.	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Bidang Pendidikan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Bidang Kesehatan : 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Bidang Pekerjaan Umum : 1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Bidang Perumahan Rakyat : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Way Kanan	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
7. Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

Pelaporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dari masing-masing kementerian, sebagaimana dapat dilihat pada penjabaran masing-masing bidang urusan berikut ini :

A. URUSAN PENDIDIKAN

SPM Bidang Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Penerapan dan pencapaian SPM menjadi sangat *urgen* dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka pelaksanaan pembangunan pendidikan serta perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat dapat terwujud.

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar, meliputi :
 - Sekolah Dasar; dan
 - Sekolah Menengah Pertama.
- c. Pendidikan Kesetaraan.

2. TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Way Kanan pada tahun anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel IV.2
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Harus Dilayani	Terlayani	Capaian
1.	Pendidikan Dasar (SD)	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	81.463	76.460	93,86%	1. Angka partisipasi kasar	100	101.54	100%
						2. Angka partisipasi sekolah	100	99.73	99,73%
						3. Angka partisipasi murni	100	93.52	93,52%
						4. Kemampuan literasi	50	51.43	100%
						5. Kemampuan numerasi	35	34.59	98,83%
						6. Perbedaan Skor Literasi	5	4.24	84,80%
						7. Perbedaan Skor numerasi	5	2.18	43,60%



						8. Indeks iklim keamanan	69.12	65.58	94,88%
						9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	62.98	54.09	85,88%
						10. Kecukupan formasi guru ASN	60	34.5	57,50%
						11. Indeks distribusi guru	20	0.39	1,95%
						12. Proporsi PTK bersertifikat	100	63.75	63,75%
						13. Proporsi PTK penggerak	100	0.98	0,98%
						14. Pengalaman pelatihan guru	100	93.75	93,75%
	Pendidikan Dasar (SMP)					1. Angka partisipasi kasar	100	101.32	-1.32%
						2. Angka partisipasi sekolah	100	95.42	95.42%
						3. Angka partisipasi murni	100	75.27	75.27%



					4. Kemampuan literasi	61.94	58.99	95.24%
					5. Kemampuan numerasi	54	51.44	95.26%
					6. Perbedaan Skor Literasi	100	5.68	5.68%
					7. Perbedaan Skor numerasi	100	1.26	1.26%
					8. Indeks iklim keamanan	100	65.71	65.71%
					9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	67.51	54.22	80.31%
					10. Kecukupan formasi guru ASN	60	41	68.33%
					11. Indeks distribusi guru	20	0.33	1.65%
					12. Proporsi PTK bersertifikat	100	84.85	84.85%
					13. Proporsi PTK penggerak	100	2.46	2.46%
					14. Pengalaman pelatihan guru	100	86.65	86.65%



2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.670	2.176	81,50%	1. Angka partisipasi kasar	100	4.89	4.89%
						2. Angka partisipasi sekolah	100	4.89	4.89%
						3. Angka partisipasi murni	-	-	0.00%
						4. Kemampuan literasi	100	18.15	18.15%
						5. Kemampuan numerasi	100	18.26	18.26%
						6. Perbedaan Skor Literasi	100	17.93	17.93%
						7. Perbedaan Skor numerasi	100	11.25	11.25%
						8. Indeks iklim keamanan	100	61.64	61.64%
						9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	61.80	61.80%
						10. Kecukupan formasi guru ASN	35	14	40.00%





						11. Indeks distribusi guru	80	40	50%
						12. Proporsi PTK bersertifikat	-	-	0.00%
						13. Proporsi PTK penggerak	-	-	0.00%
						14. Pengalaman pelatihan guru	100	69	69%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	17.247	13.625	79%	1. Angka partisipasi sekolah	100	78.06	78.06%
						2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	42.5	43.07	100%
						3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	56.95	55.67	97.75%



					4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	344	308	89.53%
					5. Kecukupan formasi guru ASN	44	26	59.09%
					6. Indeks distribusi guru	20	0.27	1.35%
					7. Proporsi PTK bersertifikat	100	16.8	16.80%
					8. Proporsi PTK penggerak	100	0.7	0.70%
					9. Pengalaman pelatihan guru	50	0.6	1.20%

3. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber Dana Lain yang Sah. Alokasi anggaran Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Pagu Anggaran Terkait SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Pagu Anggaran
Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan yang dilaksanakan :		
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 474.903.187
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 143.429.000
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 648.798.000
4.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp. 151.250.000
Jumlah		Rp. 1.418.380187

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, 2024

Adapun sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 171.801.550.016,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel II.4
Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis DAK	Pagu Anggaran
1.	DAK FISIK	
	a. Pendidikan SD	Rp. 31.128.481.000
	b. Pendidikan SMP	Rp. 6.946.058.000
	c. Pendidikan PAUD	Rp. 1.472.830.000
Jumlah DAK Fisik		Rp. 28.920.234.000
2.	DAK NON FISIK	
	a. Bantuan Operasional Sekolah / Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 45.192.035.690
	b. Bantuan Operasional Sekolah / Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 20.594.889.590
	c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD / Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 6.738.713.000
	d. BOP Kesetaraan / Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 937.500.000
	e. Tunjangan Profesi Guru	Rp. 86.251.456.728
	f. Tambahan Penghasilan Guru	Rp. 2.402.250.000
	g. Tunjangan Khusus Guru	Rp. 2.632.355.200
Jumlah DAK Non Fisik		Rp. 164.749.200.208
Total Keseluruhan		Rp. 204.296.569.208

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, 2024

Tabel II.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian		Jumlah
	PNS	PTHLS	
1	31	14	45

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan, 2024

Tabel II.6
Banyaknya Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No.	Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1.	IV	5	Strata II	7
2.	III	26	Strata I	23
3.	II	-	Diploma III	-
			SLTA	1
			SLTP	-
Jumlah		31	Jumlah	31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, 2024

Tabel II.7
Banyaknya Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Struktural	Jumlah	Fungsional	Jumlah
1.	Eselon II	1	Guru PAUD Formal (TK)	1.587
2.	Eselon III	5	Gurus SD	3.726
3.	Eselon IV	9	Guru SMP	1.337
4.	Fungsional Dinas	6	Pengawas	30
Jumlah		21	Jumlah	6.680

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, 2024

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan tahun 2023, sebagai berikut :

a. Permasalahan

- 1) Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.

- 2) Masih terbatasnya alokasi atau anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan pencapaian SPM Pendidikan sesuai dengan amanah peraturan.
 - 3) Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.
 - 4) Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM (Anak Tidak Sekolah – ATS dan Peserta Didik Miskin – PDM).
- b. Solusi
- 1) Perlunya dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan di tingkat Perangkat Daerah maupun di Satuan Tingkat Pendidikan dan membentuk Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan (Kelompok Kerja) sesuai dengan tugasnya mulai dari tahap pengumpulan data, tahap penghitungan kebutuhan, tahap penyusunan rencana pemenuhan serta tahap pelaksanaan pemenuhan.
 - 2) Lebih memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan sesuai target indikator pencapaian.
 - 3) Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor (dengan pihak-pihak terkait) dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.
 - 4) Melaksanakan verifikasi dan validasi data hasil pemadanan data Dapodik dan Emis (Kemenag) serta Database Kependudukan (Kemendagri).

B. URUSAN KESEHATAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk :

- Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya;
- Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara

dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan. Kondisi kemampuan sumber daya Pemerintahan Daerah di Indonesia tidaklah sama dalam melaksanakan urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan bagi seluruh warga negara. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga pada penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di kabupaten/kota ada kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN. Untuk hal tersebut, pada penerapannya tidak perlu mengalokasikan anggaran pada pelayanan-pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yang dibiayai oleh JKN.

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang SPM, Jenis pelayanan dasar bidang kesehatan pada daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu Bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut



- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus
- j. Pelayanan kesehatan orang dgn gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga TBC
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

2. TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Way Kanan pada tahun anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel IV.8
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Harus Dilayani	Yang Terlayani	Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	8.645	8.010	92,65%	1. Vaksin Tetanus Difteri (TD)	866	866	100%
						2. Tablet Tambah Darah	1.169.640	1.169.640	100%
						3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	8.664	8.664	100%
						4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	8.645	8.008	92,63%
						5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	8.645	8.008	100%
						6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	4.400	4.400	100%
						7. Kartu ibu/rekam medis ibu	8.664	8.664	100%





						8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8.664	8.664	100%
						9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	3	3	100%
						10. Tenaga kesehatan : Bidan	718	718	100%
						11. Tenaga kesehatan : Perawat	397	397	100%
						12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	3.401	3.401	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	8.252	7.556	91,57%	1. Formulir Partograf	8.664	8.664	100%
						2. Kartu ibu (rekam medis)	8.664	8.664	100%
						3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8.664	8.664	100%



						4. Tenaga Kesehatan Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	3	3	100%
						5. Tenaga Kesehatan Bidan	718	718	100%
						6. Tenaga Kesehatan Perawat	397	397	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7859	7414	94,34%	1. Vaksin Hepatitis BO	8.664	8.664	100%
						2. Vitamin K1 Injeksi	4.720	4.720	100%
						3. Salep/Tetes Mata Antibiotik	3.780	3.780	100%
						4. Formulir Bayi Baru Lahir	7.876	7.876	100%
						5. Formulir MTBM	8.664	8.664	100%
						6. Buku KIA	8.664	8.664	100%
						7. Dokter/dokter spesialis Anak	2	2	100%
						8. Bidan	718	718	100%
						9. Perawat	397	397	100%



4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	38.061	33.118	87,01%	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) / Instrumen Standart lain yang berlaku	32.248	32.248	100%
						2. Formulir DDTK	38.052	38.052	100%
						3. Buku KIA	32.248	32.248	100%
						4. Vitamin A Biru	12.442	12.442	100%
						5. Vitamin A Merah	105.550	105.550	100%
						6. Vaksin Imunisasi Dasar : HBO	38.052	38.052	100%
						7. Vaksin Imunisasi Dasar : BCG	38.052	38.052	100%
						8. Vaksin Imunisasi Dasar : Polio	38.052	38.052	100%
						9. Vaksin Imunisasi Dasar : IPV	38.052	38.052	100%
						10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	38052	38052	100%





					11. Vaksin imunisasi dasar : Campak	38.052	38.052	100%
					12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	38.052	38.052	100%
					13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	38052	38.052	100%
					14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	38.052	38.052	100%
					15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	38.052	38.052	100%
					16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	38.052	38.052	100%
					17. Peralatan Anafilaktik	38.052	38.052	100%
					18. Tenaga Kesehatan : Dokter	81	81	100%
					19. Tenaga Kesehatan : Bidan	718	718	100%
					20. Tenaga Kesehatan : Perawat	397	397	100%



						21. Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	41	41	100%
						22. Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	20	20	100%
						23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	315	315	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	46.400	45.102	97,20%	1. Buku Raport Kesehatanku	8.000	8.000	100%
						2. Buku Pemantauan Kesehatan	20	20	100%
						3. Kuesioner Skrining Kesehatan	20	20	100%
						4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	20	20	100%
						5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	20	20	100%



						6. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	6	6	100%
						7. Tenaga kesehatan : Bidan	718	718	100%
						8. Tenaga kesehatan : Perawat	397	397	100%
						9. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	41	44	100%
						10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	66	66	100%
						11. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	315	315	100%
						12. Tenaga Non kesehatan : Guru	2.0	2.0	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	298.233	245.038	82,16%	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	247	247	100%
						2. Alat ukur berat badan	247	247	100%
						3. Alat ukur tinggi badan	247	247	100%





					4. Alat ukur lingkaran perut	247	247	100%
					5. Alat : Tensimeter	247	247	100%
					6. Alat : Glukometer	247	247	100%
					7. Alat : Tes strip gula darah	298.233	298.233	100%
					8. Alat : Lancet	298.233	298.233	100%
					9. Alat : Kapas alkohol	298.233	298.233	100%
					10. Alat : KIT IVA Tes	20	20	100%
					11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi SIPTM	20	20	100%
					12. Tenaga kesehatan : Dokter	81	81	100%
					13. Tenaga kesehatan : Bidan	718	718	100%
					14. Tenaga kesehatan : Perawat	397	397	100%



						15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	41	41	100%
						16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	66	66	100%
						17. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	20	20	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	51.261	47.294	92,26%	1. Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	20	20	100%
						2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	20	20	100%
						3. Buku Kesehatan Lansia	28.535	28.535	100%



						4. Tenaga kesehatan : Dokter	81	81	100%
						5. Tenaga kesehatan : Bidan	718	718	100%
						6. Tenaga kesehatan : Perawat	397	397	100%
						7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	41	41	100%
						8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	66	66	100%
						9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	20	20	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	124.070	103.080	83,08%	1. Pedoman Pengendalian Hipertensi &Media KIE	20	20	100%
						2. Tensimeter	20	20	100%
						3. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi SIPTM	20	20	100%



						4. Tenaga kesehatan : Dokter	81	81	100%
						5. Tenaga kesehatan : Bidan	718	718	100%
						6. Tenaga kesehatan : Perawat	397	397	100%
						7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	20	100%
						8. Obat Hipertensi	1.488.840	1.488.840	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5.242	5.780	100%	1. Alat : Glukometer	20	20	100%
						2. Alat : Strip Tes Gula Darah	62.904	62.904	100%
						3. Alat : Kapas Alkohol	62.904	62.904	100%
						4. Alat : Lancet	62.904	62.904	100%
						5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	20	20	100%



						6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	20	20	100%
						7. Tenaga kesehatan : Dokter	81	81	100%
						8. Tenaga kesehatan : Bidan	718	718	100%
						9. Tenaga kesehatan : Perawat	397	397	100%
						10. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	41	41	100%
						11. Tenaga Kesehatan Masyarakat	6	6	100%
						12. Obat Diabetes Melitus	3.774.240	3.774.240	100%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	792	649	81,94%	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	20	20	100%



						2. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	20	20	100%
						3. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	20	20	100%
						4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	20	20	100%
						5. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	20	20	100%
						6. Tenaga kesehatan : Dokter	81	81	100%
						7. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	20	20	100%
						8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	20	20	100%



11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5.814	6.623	100%	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2.000	2.000	100%
						2. Reagen Zn TB	400	400	100%
						3. Masker Jenis Rumah Tangga & Masker N95	2.000	2.000	100%
						4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	10.000	10.000	100%
						5. Catridge Tes Cepat Molekuler	1.200	1.200	100%
						6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan	10	10	100%
						7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur	10	10	100%
						8. Dokter / dokter spesialis penyakit dalam / dokter spesialis paru	1	1	100%



						9. Tenaga kesehatan : Perawat	397	397	100%
						10. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik	35	35	100%
						11. Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	11	11	100%
						12. Tenaga kesehatan masyarakat	66	66	100%
						13. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	20	20	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	8.645	7.717	89,27%	1. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	2.000	2.000	100%
						2. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	9.196	9.196	100%
						3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai	9.196	9.196	100%



					4. Alat tulis, Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	9.196	9.196	100%
					5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2	2	100%
					6. Tenaga kesehatan : Perawat	397	397	100%
					7. Tenaga kesehatan : Bidan	718	718	100%
					8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	35	35	100%
					9. Tenaga kesehatan masyarakat	66	66	100%
					10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	20	20	100%

3. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan tahun 2023, bersumber dari :

- 1) APBD Murni Kabupaten Way Kanan Sebesar Rp. 3.431.590.150,-
- 2) Bantuan Operasional Kegiatan/BOK (DAK non fisik) Sebesar Rp. 755.166.400,-

Tabel II.9
Sub Kegiatan dan Realisasi Anggaran Terkait Pelayanan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No.	Uraian	Realisasi Anggaran (APBD dan DAK)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :		
1.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Rp. 633.867.300
2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 456.159.993
3.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 466.158.000
4.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Rp. 438.910.000
5.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 430.000.000
6.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 91.508.400
7.	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 290.850.000
8.	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Rp. 165.250.000
9.	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Rp. 174.900.000
10.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp. 283.989.650
11.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 304.220.050
12.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 193.525.300
Jumlah		Rp. 3.929.338.693

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, 2024

4. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan Personil untuk melaksanakan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan belum optimal dimana secara rasio 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas belum sesuai yang diharapkan, khususnya untuk keberadaan tenaga diluar dokter umum, perawat dan bidan (Tenaga kefarmasian, dokter gigi, sanitarian, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan ahli laboratorium medic kesehatan yang sangat sedikit di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama/FKTP puskesmas), dukungan sarana dan Prasarana di 20 Puskesmas belum sesuai standar (Permenkes 75 tahun 2014) dan dukungan terkait anggaran dalam penyediaan BMHP sebagai pemenuhan standar kualitas dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2019.

Tabel II.10
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian		Jumlah
	PNS	PTHLS	
1	761	30	791

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, 2024

Tabel II.11
Jumlah Pegawai pada UPT Gudang Farmasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No.	Kelompok Dan Jenis SDM	PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI			PENGELOLA KEFARMASIAN		
		Jumlah SDM Saat Ini (ASN)	Jumlah SDM Seharusnya	Keadaan	Jumlah SDM Saat Ini (ASN)	Jumlah SDM Seharusnya	Keadaan
		(A)	(B)	K / S / L	(A)	(B)	K / S / L
1	Instalasi Pelayanan Farmasi	-	2	K	-	2	K

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, 2024



Tabel IV.12
Banyaknya Pegawai Puskesmas Berdasarkan Jenis SDM Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Jenis SDM	PUSKESMAS															
		Banjit				Baradatu				Gunung Labuhan				Blambangan Umpu			
		PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah
1.	Dokter Umum	1	-	4	5	7	-	-	7	2	-	2	1	1	-	2	3
2.	Dokter Gigi	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
3.	Perawat	10	-	14	24	24	-	11	35	12	-	6	1	18	-	4	22
4.	Terapis Gigi dan Mulut	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	18	2	-	-	2
5.	Bidan	39	-	28	67	39	-	25	64	28	-	11	2	12	-	21	33
6.	Sanitarian	1	-	2	3	1	-	-	1	3	-	-	39	1	-	1	2
7.	Apoteker	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	1	1
8.	Asisten Apoteker	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1
9.	Ahli Teknologi Lab. Medik	-	-	1	1	1	-	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-
10.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	2
11.	Nutrisisionis	2	-	1	3	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	1	1
12.	Perekam Medis Dan Infokes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Way Kanan		57	-	42	109	76	-	40	116	49	-	24	73	34	-	33	67





No	Jenis SDM	PUSKESMAS															
		Way Tuba				Kasui				Rebang Tangkas				Bumi Baru			
		PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah
1.	Dokter Umum	2	-	-	2	3	-	3	3	3	-	-	3	2	-	-	2
2.	Dokter Gigi	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Perawat	13	-	6	19	6	-	6	12	9	-	9	18	2	-	2	4
4.	Terapis Gigi dan Mulut	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	1	2	-	-	2
5.	Bidan	19	-	22	41	24	-	15	39	14	-	16	30	9	-	7	16
6.	Sanitarian	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1
7.	Apoteker	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1
8.	Asisten Apoteker	3	-	-	3	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-
9.	Ahli Teknologi Lab. Medik	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
10.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	-	1	1	-	1	2
11.	Nutrisionis	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1
12.	Perekam Medis Dan Infokes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Way Kanan		42	-	29	71	36	-	29	60	33	-	27	60	17	-	13	30





No	Jenis SDM	PUSKESMAS															
		Way Tuba				Kasui				Rebang Tangkas				Bumi Baru			
		PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah
1.	Dokter Umum	2	-	-	2	3	-	3	3	3	-	-	3	2	-	-	2
2.	Dokter Gigi	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Perawat	13	-	6	19	6	-	6	12	9	-	9	18	2	-	2	4
4.	Terapis Gigi dan Mulut	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	1	2	-	-	2
5.	Bidan	19	-	22	41	24	-	15	39	14	-	16	30	9	-	7	16
6.	Sanitarian	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1
7.	Apoteker	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1
8.	Asisten Apoteker	3	-	-	3	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-
9.	Ahli Teknologi Lab. Medik	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
10.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	-	1	1	-	1	2
11.	Nutrisionis	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1
12.	Perekam Medis Dan Infokes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Way Kanan		42	-	29	71	36	-	29	60	33	-	27	60	17	-	13	30





No	Jenis SDM	PUSKESMAS															
		Mesir Ilir				Suka Bumi				Negeri Baru				Negeri Agung			
		PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah
1.	Dokter Umum	1	-	1	2	2	-	-	2	2	-	1	3	1	-	1	2
2.	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Perawat	8	-	5	13	6	-	9	15	10	-	6	16	7	-	5	12
4.	Terapis Gigi dan Mulut	2	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	1	-	-	1
5.	Bidan	14	-	10	24	19	-	7	16	23	-	22	45	17	-	10	27
6.	Sanitarian	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
7.	Apoteker	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
8.	Asisten Apoteker	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
9.	Ahli Teknologi Lab. Medik	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
10.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	-	-	2	1	-	1	2	1	-	2	3	1	-	-	1
11.	Nutrisionis	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	1
12.	Perekam Medis Dan Infokes	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Way Kanan		29	-	18	47	34	-	18	52	42	-	34	76	29	-	16	45





No	Jenis SDM	PUSKESMAS															
		Bumi Agung				Srupa Indah				Negeri Besar				Pisang Baru			
		PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah
1.	Dokter Umum	1	-	1	2	2	-	-	2	2	-	1	3	3	-	-	3
2.	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3.	Perawat	4	-	4	8	3	-	4	7	4	-	13	17	7	-	14	21
4.	Terapis Gigi dan Mulut	1	-	-	1	2	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-
5.	Bidan	7	-	17	34	19	-	14	33	16	-	8	24	14	-	13	27
6.	Sanitarian	1	-	1	2	2	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	2
7.	Apoteker	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
8.	Asisten Apoteker	1	-	2	3	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	1	1
9.	Ahli Teknologi Lab. Medik	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2
11.	Nutrisionis	1	-	2	3	1	-	1	2	-	-	1	1	1	-	2	3
12.	Perekam Medis Dan Infokes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Way Kanan		17	-	29	46	31	-	21	52	26	-	25	51	28	-	32	60





No	Jenis SDM	PUSKESMAS															
		Pakuan Ratu				Purwo Agung				Gisting Jaya				Tanjung Rejo			
		PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah	PNS	PTT	lainnya	Jumlah
1.	Dokter Umum	2	-	-	2	1	-	1	2	2	-	2	4	2	-	-	2
2.	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
3.	Perawat	2	-	1	3	3	-	6	9	3	-	9	12	7	-	7	14
4.	Terapis Gigi dan Mulut	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	1	2	2	-	-	2
5.	Bidan	9	-	15	24	12	-	15	27	10	-	9	19	4	-	12	16
6.	Sanitarian	2	-	-	2	1	-	1	2	1	-	1	2	1	-	-	1
7.	Apoteker	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	1
8.	Asisten Apoteker	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
9.	Ahli Teknologi Lab. Medik	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-
10.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	1	-	-	1	1	-	1	2	1	-	1	2	1	-	-	1
11.	Nutrisionis	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	2	2	1	-	-	1
12.	Perekam Medis Dan Infokes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Way Kanan		20	-	16	36	24	-	25	49	19	-	29	48	20	-	19	39

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, 2024



4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Way Kanan untuk 12 indikator belum dapat mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam pengumpulan data terkendala saat akan dikompilasi dari beberapa bidang terkait kelengkapan data.
- 2) Pelayanan kesehatan balita terkait kebutuhan peralatan anafilatik belum ditentukan kebutuhannya dikarenakan definisi operasional belum sesuai pemahamannya.
- 3) Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan SPM BK yang belum maksimal untuk SPM BK khususnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (Puskesmas & Klinik swasta). Pelaporan SPM BK yang belum optimal mulai dari klinik swasta ke puskesmas, puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi.
- 4) Masih adanya warga yang kurang paham tentang pentingnya persalinan di fasyankes dan melakukan persalinan di dukun dan tidak melaporkan, kurang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya monitoring terhadap penyakit tidak menular seperti Hipertensi, DM hingga ODGJ. Serta masih adanya masyarakat yang tidak bersedia mengakui bahwa adanya gejala penyakit TBC dan HIV sehingga sulit dilakukan pemeriksaan dan Pelayanan Rujukan.

b. Solusi

Solusi yang akan dilaksanakan untuk dapat melaksanakan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan adalah :

- 1) Melakukan Upaya pemetaan sarana dan prasarana untuk pelayanan SPM BK (promotif, preventif kuratif : penegakan diagnosis dan pengobatan);
- 2) Melakukan pemetaan SDMK khususnya yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP dan mengadvokasi BKD untuk dapat menyiapkan SDMK di FKTP sesuai jenis dan jumlah yang standar (Permenkes nomor 75 tahun 2014);
- 3) Melakukan pemetaan dan menyusun Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk dapat memenuhi kebutuhan obat dan BMHP untuk layanan SPM BK serta advokasi pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan RI untuk dapat memenuhi kebutuhan obat program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- 4) Melakukaan Rapat Koordinasi dengan Seluruh Puskesmas untuk menyamakan persepsi dalam pemahaman SPM BK tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Melakukan Konsultasi dan Bimbingan teknis (Bimtek) :
 - a. Melakukan Bimbingan/ konsultasi Ke Dinas Kesehatan provinsi untuk perhitungan (*costing*) kebutuhan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten dan untuk pelaporan SPM Bidang Kesehatan dengan

- menggunakan aplikasi pelaporan SPM Bidang Kesehatan;
- b. Melakukan bimbingan teknis pada 20 Puskesmas untuk pencatatan dan pelaporan terkait pencapaian target dan realisasi SPM Bidang Kesehatan.
- 6) Optimalisasi pencatatan dan pelaporan.

c. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta petunjuk teknis pelaksanaan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis pelayanan dasar pada daerah Kabupaten/Kota meliputi :

- 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

2. TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM

Adapun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel IV.13
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Harus Dilayani	Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Harus Dilayani	Yang Terlayani	Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	476.871	348.495	73,08%	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	476.871	65.450	13,07%
						2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)			



						3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	476.871	282.925	59,33%
						4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	476.871	282.925	59,33%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	476.871	337.936	70,87%	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	476.871	337.936	70,87%



						2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	476.871	0	0,00%
						3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	476.871	337.936	70,87%

3. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan tahun 2023, bersumber dari dana APBD Murni Kabupaten Way Kanan Sebesar Rp. 4.402.782.796,-

Tabel II.14
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Terkait Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
I	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
	➤ Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Rp. 797.928.673
	➤ Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rp. 102.500.000
	➤ Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Rp. 197.500.000
	➤ Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rp. 2.704.854.123
II	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	➤ Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp. 600.000.000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, 2024

4. DUKUNGAN PERSONEL

Jumlah aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan dalam mendukung pelaksanaan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dengan komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.15
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan

No	Golongan	Pendidikan		
		S2	S1	≤D3
1	IV	1	-	-
4	III	1	3	-
5	II	-	1	2

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, 2024

Tabel II.16
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Pejabat Struktural	Jumlah	Pejabat Fungsional	Jumlah
1	Eselon II. b	1	Ahli Muda Teknik Tata Bangunan	2
2	Eselon III. a	1		
3	Eselon III. b			
4	Eselon IV. a			
5	Eselon IV. b			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, 2024

5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum di Kabupaten Way Kanan masih belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan berbagai persoalan, baik itu terkait penyediaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam pelayanan SPM maupun masih kurangnya SDM secara teknis dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum mengingat banyaknya jumlah kegiatan yang spesifik membutuhkan keahlian pada bidang tertentu. Solusi yang bisa mengatasi persolan klasik tersebut adalah tentu saja harus ada

upaya sungguh-sungguh untuk menambah SDM teknis di Dinas Pekerjaan Umum dengan kualifikasi rekrutmen yang ketat dan transparan, hal ini tentunya akan menghasilkan kualitas SDM yang tangguh, juga disertai dukungan kegiatan dan anggaran untuk mewujudkan pelayanan SPM bidang pekerjaan umum.

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, adapun jenis pelayanan dasar pada daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten;
- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM

Adapun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2023 dapat dilihat sebagaimana berikut :



Tabel IV.17
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Harus Dilayani	Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Harus Dilayani	Yang Terlayani	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	412	412	100%	1. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	-	-	-
						2. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	412	412	100%
						3. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	-	-	-
						4. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	-	-	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	-	-	-
						2. Subsidi Uang Sewa	-	-	-
						3. Penyediaan Rumah Layak Huni	-	-	-

3. ALOKASI ANGGARAN

Adapun alokasi anggaran terkait penerapan SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Way Kanan tahun 2023 adalah sebagaimana berikut :

Tabel IV.18
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Terkait Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Perumahan			
1	Pendataan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	➤ Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah	Rp. 900.000.000	Rp. 787.140.688
	➤ Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp. 400.000.000	Rp. 395.963.085

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan, 2024

4. DUKUNGAN PERSONEL

Jumlah SDM dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.19
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat, Golongan dan Pendidikan

No	Pangkat	Golongan	Pendidikan		
			S2	S1	≤D3
1	Pembina TK. I	IV. b	1	-	-
2	Pembina	IV. a	1	-	-
3	Penata TK. I	III. d	3	-	-
5	Penata	III. c	-	-	-
6	Penata Muda TK. I	III. b	-	-	-
7	Penata Muda	III. a	-	1	-
9	Pengatur	II. c	-	-	1

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan, 2024

Tabel IV.20
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Pejabat Struktural	Jumlah	Pejabat Fungsional	Jumlah
1	Eselon II. b	1	-	-
2	Eselon III. a	1	-	-
3	Eselon III. b	2	-	-
4	Eselon IV. a	2	-	-
5	Eselon IV. b	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan, 2024

5. PERMASALAHAN

❖ Pengumpulan Data

Belum terakomodirnya data spesifik terkait rumah korban bencana dan pasca bencana dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sehingga pada tahun 2023 pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dilaksanakan dengan 2 Sub Kegiatan saja.

❖ Penghitungan Kebutuhan

Penghitungan kebutuhan Anggaran terkait SPM bidang Perumahan Rakyat belum maksimal dikarenakan keterbatasan data yang ada serta setelah cek dan verifikasi lapangan kepada korban bencana telah ditanggulangi secara swadaya oleh masyarakat.

❖ Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan

- 1) Pekerjaan penyusunan dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah dan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat

- Bencana merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga untuk pelaporan realisasi capaian SPM di Triwulan 1 dan Triwulan 2 belum dapat di laksanakan karena belum selesainya pendataan dokumen tersebut;
- 2) Menurut Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari 2 indikator yang harus dipenuhi yaitu Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum memiliki program Pemerintah yang mengakibatkan relokasi Masyarakat, sehingga mengakibatkan capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tidak maksimal.

❖ **Lain - Lain**

Jumlah rumah yang terdampak bencana berdasarkan hasil Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani tahun 2023 se-Kabupaten Way Kanan terdapat 412 rumah masyarakat dalam kondisi rusak ringan akibat puting beliung dan banjir pada saat diadakan survey di lokasi bencana 412 unit rumah tersebut telah diperbaiki secara swadaya yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak bencana.

E. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban umum cenderung meningkat dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan. Dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan tersebut Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan pada bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di Pemerintahan Daerah ialah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota serta kebakaran.

Kemudian dalam Undang-undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. "Pernyataan ini merupakan komitmen negara untuk melindungi warganya untuk hidup sejahtera dan tangguh dalam mengelola risiko bencana. Letak Geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan (archipelagic state) dan berada pada pertemuan lempeng tektonik dunia yang bergerak aktif setiap tahunnya serta sabuk vulkanik yang membentang di Kepulauan Indonesia dikenal dengan istilah "Ring of Fire", selanjutnya istilah tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang rawan terhadap bencana alam. Pada tataran internasional, salah satu langkah strategis dalam rangka membangun ketangguhan bangsa melalui upaya pengurangan risiko bencana. Yaitu melalui

implementasi komitmen dunia dalam pencapaian target global yang tertuang dalam kerangka kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030).

Dalam hal implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut :

- a. Aspek pembagian urusan pemerintahan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki makna bahwa penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar harus memiliki kriteria, sebagai berikut :
 - Bersifat layanan dasar yg disediakan pemerintah kepada masyarakat;
 - Pelaksanaannya berpedoman pada SPM;
 - Merupakan prioritas urusan yang harus dilaksanakan di daerah;
 - Memerlukan kelembagaan perangkat daerah yang kuat (struktur, personel, peralatan dan anggaran);
 - Pengarusutamaan PRB dalam perencanaan dan penganggaran secara integratif.

- b. Selain itu dari aspek perencanaan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 18, sebagaimana berikut :

- ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yg berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dgn pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Aspek penganggaran terkait kebencanaan diatur dalam pasal 298 ayat (1) menyatakan bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Pelayanan Dasar Pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Way Kanan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan indikator kinerjanya masing-masing. Berikut penjelasan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasarnya meliputi :

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator capaian dalam SPM adalah Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan akibat dari

Penegakkan Hukum PERDA dan PERKADA. Petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- b. Pelayanan informasi rawan bencana
yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) & kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga

negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan indikator capaian dalam SPM adalah Jumlah Penduduk yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Petunjuk Teknis Pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

2. TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan pada tahun anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel IV.21

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang TRANTIBUMLINMAS Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Harus Dilayani	Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Harus Dilayani	Yang Terlayani	Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	2.901	2.901	100%	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	307	307	100%
						2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakkan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	30	30	100%





						3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	2.558	2.558	100%
						4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	2	-	0,00%
						5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	2	-	0,00%



						6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	2	-	0,00%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	5.936	5.936	100%	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dok. yang sah/legal)	125	125	100%
						2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	297.185	297.185	100%





						3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	3.294	3.294	100%
						4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	1	1	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	851	851	100%	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi dll)	6	6	100%
						2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	311	311	100%



4.	Pelayanan dan evakuasi penyelamatan korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.890	2.890	100%	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	2	2	100%
						2. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	2.890	2.890	100%
						3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	2	100%
						4. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2.890	2.890	100%



5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	222	220	99,10%	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran)	45	31	68,89%
						2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	40	29	72,50%



						3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	100	27	27,00%
						4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	62	62	100%





						5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	35	20	57,14%
						6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	35	10	28,57%



Berdasarkan capaian kinerja jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 diatas dapat di jelaskan berikut ini :

a. Jenis Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten dari total yang harus dilayani sebanyak 2.901 terlayani 100%

b. Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Berdasarkan peta daerah rawan bencana di Kabupaten Way Kanan yang disusun sebagai acuan dalam mengurangi resiko bencana daerah bertujuan untuk mengetahui kawasan yang rentan terhadap potensi bencana khususnya yang berkaitan dengan bencana banjir, longsor, kebakaran, kekeringan dan bencana alam lainnya, juga untuk menganalisa resiko bahaya. Adapun jumlah penduduk perkampung berdasarkan peta daerah rawan bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.22
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Kampung
Berdasarkan Peta Rawan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan

NO	KECAMATAN/KAMPUNG	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I	Kecamatan Negara Batin	18.586	17.616	36.202
	1 Kampung Negara Mulya	250	262	512
	2 Kampung Kerta Jaya	499	516	1.015
	3 Kampung Sri Menanti	320	317	637
	4 Kampung Negara Batin	1.362	1.390	2.752

II	Kecamatan Negeri Besar	11.976	11.468	23.444
	1 Kampung Negeri Besar	1.106	1.113	2.219
	2 Kampung Tiuh Baru	589	589	1.178
	3 Kampung Kali Awi	430	461	891
	4 Kampung Kiling-kiling	802	830	1.632
	5 Kampung Tanjung Mas	421	401	822
III	Kecamatan Pakuan Ratu	22.988	21.708	44.696
	1 Kampung Pakuan Ratu	1.032	972	2.004
	2 Kampung Gunung Waras	748	734	1.482
	3 Kampung Tanjung Ratu	681	651	1.332
	4 Kampung Gunung Cahya	345	344	689
	5 Kampung Rumbih	750	689	1.439
	6 Kampung Negara Ratu	537	516	1.053
	7 Kampung Negara Sakti	985	920	1.905
IV	Kecamatan Bahuga	5.709	5.371	11.080
	1 Kampung Dewa Agung	239	242	481
	2 Kampung Bumi Agung	249	220	469
	3 Kampung Tulang Bawanng	439	398	837
	4 Kampung Mesir Ilir	523	520	1.043
	5 Kampung Mesir Udik	39	43	82
V	Kecamatan Bumi Agung	14.320	13.531	38.062
	1 Kampung Karang	998	979	1.977
	2 Kampung Tanjung Dalam	1.012	995	2.007
VI	Kecamatan Negeri Agung	19.566	18.496	38.062
	1 Kampung Negeri Agung	639	594	1.233
	2 Kampung Pulau Batu	608	577	1.185
	3 Kampung Penengahan	432	384	816
	4 Kampung Sunsang	912	889	1.801
	5 Kampung Kotabaru	764	744	1.508
	6 Kampung Kotabumi Way Kanan	910	863	1.773
	7 Kampung Gedung Meneng	572	566	1.138
Jumlah		147.570	140.595	289.980

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, 2024

Jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana Kabupaten Way Kanan berjumlah **289.980** jiwa, dengan 147.570 jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan 140.595 jiwa berjenis kelamin perempuan yang tersebar di 15 Kecamatan dan 125 Kampung. Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi rawan bencana melalui sosialisasi maupun himbuan serta edukasi berjumlah **5.936** orang penduduk, sehingga capaian SPM pada tahun 2023 sebesar **100%**.

c. Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pendidikan dan pelatihan satuan tugas penanggulangan bencana guna membentuk anggota Satgas Penanggulangan Bencana (SATGAS-PB) yang terampil dan handal dalam penanganan dan penanggulangan bencana pada pra dan pasca bencana yang dilaksanakan di 15 Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan dan sampai dengan tahun 2023 baru 13 (tiga Belas) Kecamatan yang terbentuk. Capaian SPM tahun 2023 pada indikator Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mencapai **100%** dengan rincian warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana sebanyak **851** orang.

Tabel IV.23
Jumlah Satgas Penanggulangan Bencana, Aparatur dan Warga
Negara di Kawasan Rawan Bencana Dalam Pelatihan Mitigasi
Bencana Tahun 2023

No	Kecamatan	Satgas PB	Aparatur	Warga di KRB
1	Pakuan Ratu	30	127	20.216
2	Buay Bahuga	20	74	17.139
3	Bumi Agung	20	96	25.541
4	Kasui	20	97	21.141
5	Rebang Tangkas	20	91	17.612
6	Negara Batin	25	109	22.357
7	Negeri Besar	25	88	12.993
8	Blambangan Umpu	20	230	25.518
9	Negeri Agung	20	103	19.869
10	Baradatu	20	117	27.257
11	Gunung Labuhan	20	133	18.513
12	Bahuga	20	57	5.296
13	Way Tuba	20	94	16.140
14	Banjit		122	27.179
15	Umpu Semenguk		97	18.779
Total		280	1.635	295.550

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Way Kanan, 2024

d. Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Berdasarkan laporan kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Way Kanan selama tahun 2023 terdapat 62 kejadian bencana dengan korban terdampak bencana sebanyak 2.890 jiwa. Dari data laporan korban tersebut Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 2.890 korban. Dengan demikian untuk indikator SPM Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana mencapai **100%**. Adapun jumlah kejadian bencana dan bencana alam dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel IV.24
Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Tanggal	Jenis Bencana	Jumlah Korban	Lokasi Kejadian	Kerusakan
1	02 Januari 2023	Bencana Banjir		Kampung Karang Agung Kecamatan Pakuan Ratu	Sawah/Perladangan ± 3 Ha Terendam Banjir Jalan Penghubung Kampung Terendam Selama ± 3 Jam
2	02 Februari 2023	Bencana Angin Puting Beliung	3	Kampung Bumi Jaya Kecamatan Negara Batin	Rumah Rusak Berat (Tertimpa Pohon Besar, Hancur Rata Dengan Tanah, Kerugian Diperkirakan Rp. 15.000.000)
3	03 Februari 2023	Bencana Angin Puting Beliung	8	Kampung Penengahan Kecamatan Negeri Agung	Rumah Rusak Ringan (Asbes Berhamburan, Kerugian Diperkirakan Rp. 5.000.000)
4	21 Februari 2023	Bencana Angin Puting Beliung	4	Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu	Rumah Rusak Ringan (Genteng Berhamburan, Alat Masak Rusak, Kerugian Diperkirakan Rp. 3.000.000)
5	28 Februari 2023	Bencana Angin Puting Beliung	4	Kampung Tiuh Balak I Kecamatan Baradatu	Rumah Rusak Berat (Bagian Atap/Genteng Hancur Tertimpa Kayu Roboh, Kerugian Diperkirakan Rp. 5.000.000)
6	09 Maret 2023	Bencana Banjir	105	Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung	Rumah Terendam Air Setinggi 50-150 Cm
			137	Kampung Sungsang Kecamatan Negeri Agung	Rumah Terendam Air Setinggi 50-150 Cm
			34	Kampung Gedung Menong Kecamatan Negeri Agung	Rumah Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.





			20	Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung	Rumah Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.
			45	Kampung Kotabumi Kecamatan Negeri Agung	Rumah Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.
			480	Kampung Sri Menanti Kecamatan Negara Batin	Rumah Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.
			570	Kampung Karta Jaya Kecamatan Negara Batin	Rumah Dan Tanaman Padi Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.
			40	Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui	Rumah Dan Tanaman Padi Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.
			171	Kampung Tulang Bawang Kecamatan Bahuga	Rumah Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.
			7	Kampung Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung	Rumah Terendam Air Setinggi 50-100 Cm.
			30	Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar	Rumah Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.
			110	Kampung Tiuh Baru Kecamatan Negeri Besar	Tanaman Padi Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.
			23	Kampung Karang Agung Kecamatan Pakuan Ratu	Rumah Dan Tanaman Padi Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.





			215	Kampung Negara Ratu Kecamatan Pakuan Ratu	Rumah Dan Tanaman Padi Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.
			160	Kampung Gunung Waras Kecamatan Pakuan Ratu	Rumah Terendam Air Setinggi 50-150 Cm.
			-	Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu	Putusnya Jembatan Ayun Penghubung Dusun Dan Kampung
7	10 Maret 2023	Bencana Tanah Longsor	5	Dusun Simpang Rejang Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit	Dua Korban Meninggal Dunia, Ditemukan Setelah 6 Hari Pencarian
			4	Dusun Cempedak Kampung Juku Batu Kec. Banjit	Satu Korban Meninggal Dunia, Ditemukan Setelah 7 Hari Pencarian
			3	Dusun Pati Kampung Sumber Sari Kec. Banjit	Korban Selamat
			3	Dusun Pati Kampung Sumber Sari Kec. Banjit	Korban Selamat
			4	Dusun Pati Kampung Sumber Sari Kec. Banjit	Korban Meninggal Dunia Ditemukan Pada Hari Pertama Pencarian
			4	Dusun Pati Kampung Sumber Sari Kec. Banjit	Korban Meninggal Dunia, Ditemukan Setelah 3 Hari Pencarian



8	29 Maret 2023	Bencana Angin Puting	32	Kampung Kota Dewa Kecamatan Bahuga	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Ada Korban Jiwa• 13 Unit Rumah Warga Rusak;• 2 Unit Tobong Bata Rusak Berat;• Sawah Rusak;• Instalasi Listrik Rusak Total Kerugian Ditaksir Sekitar Rp. 100.000.000
9	29 Maret 2023	Bencana Angin Puting	-	Kampung Bonglai Kecamatan Banjit	Gedung Rusak Berat (Atap Dan Pelapon)
10	03 April 2023	Bencana Angin Puting	3	Kampung Cugah Kecamatan Baradatu	Rumah Rusak Sedang Karena Tertimpa Pohon Tumbang, Kerugian Ditaksir Sekitar Rp. 5.000.000
11	26 April 2023	Bencana Banjir	-	Kampung Negeri Bumi Putera Kecamatan Umpu Semenguk	Jalan Penghubung Kampung Terputus Aksesnya
12	01 Mei 2023	Bencana Banjir	15	Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung	Rumah Warga Terendam Banjir Setinggi 1 Meter
			5	Kampung Kotabumi Way Kanan Kec. Negeri Agung	Rumah Warga Terendam Banjir Setinggi 1 Meter
			5	Kampung Kotabaru Kecamatan Negeri Agung	Rumah Warga Terendam Banjir Setinggi 1 Meter
13	27 Agustus 2023	Kebakaran Lahan	-	Kampung Gunung Sangkalan Kecamatan Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Tanaman Hortikultura Seluas ± 3 Ha





14	05 Septmbr 2023	Kebakaran Lahan	5	Kampung Negeri Baru Kec. Umpu Semenguk	Lahan Perkebunan Sawit Terbakar Seluas ± 3 Ha
15	12 Septmbr 2023	Kebakaran Lahan	4	Kampung Negeri Baru Kec. Umpu Semenguk	Lahan Perkebunan Seluas ± 2 Ha
16	12 Septmbr 2023	Kebakaran Lahan	5	Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu	Lahan Perkebunan Tanaman Hortikultura Seluas ± 2 Ha
17	15 Septmbr 2023	Kebakaran Lahan	4	Kelurahan Bl. Umpu Kecamatan Bl. Umpu	Lahan Perkebunan Singkong Seluas ± 2 Ha
18	15 Septmbr 2023	Kebakaran Lahan	-	Kelurahan Bl. Umpu Kecamatan Bl. Umpu	Lahan Pekarangan Seluas ± 1 Ha
19	17 Septmbr 2023	Kebakaran Lahan	3	Kampung Umpu Bakti Kec. Blambangan Umpu	Lahan Kosong Terbakar Seluas ± 5 Ha
20	18 Septmbr 2023	Kebakaran Lahan	3	Kelurahan Bl. Umpu Kecamatan Bl. Umpu	Lahan Pekarangan Seluas ± 400 M2
21	22 Septmbr 2023	Angin Puting Beliung	-	Kampung Sidorajo Kec. Umpu Semenguk	Rusaknya Tribun Lapangan Kampung Sidoarjo Dan Menimpa Bangunan Laboratorium Biologi Sman 2 Blambangan Umpu
22	29 Septmbr 2023	Kebakaran Lahan	-	Kampung Negeri Baru Kec. Umpu Semenguk	Lahan Perkebunan Karet Terbakar Seluas ± 10 Ha
23	01 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	4	Kelurahan Bl. Umpu Kecamatan Bl. Umpu	Lahan Perkebunan Dan Lahan Kosong Terbakar Seluas ± 4 Ha



24	05 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	6	Km. 6 Kelurahan Bl. Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Karet Terbakar Seluas ± 3 Ha
25	06 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	6	Km. 6 Kelurahan Bl. Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Karet Terbakar Seluas ± 3Ha
26	08 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	5	Km. 3 Kelurahan Bl. Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Karet Terbakar Seluas ± 3Ha
27	11 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	4	Km. 1 Kelurahan Bl. Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Karet Terbakar Seluas ± 0,5 Ha
28	13 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	4	Km. 1 Kelurahan Bl. Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Kosong / Belukar Kecil Terbakar Seluas ± 0,5 Ha
29	13 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	5	Km. 1 Kelurahan Bl. Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Sengon Terbakar Seluas ± 0,5 Ha
30	14 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	4	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Karet Dan Sengon Terbakar Seluas ± 10 Ha
31	15 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	-	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Sengon Terbakar Seluas ± 10 Ha
32	16 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	-	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Karet Terbakar Seluas ± 10 Ha
33	17 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	-	Kelurahan Bl. Umpu Kecamatan Bl. Umpu	Lahan Kosong / Belukar Kecil Terbakar Seluas ± 1 Ha



34	17 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	5	Kampung Umpu Bakti Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Lahan Karet Terbakar Seluas ± 1 Ha
35	18 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	-	Km. 3 Kelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Karet Terbakar Seluas ± 10 Ha
36	20 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	3	Km. 8 Kelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Karet Terbakar Seluas ± 2 Ha
37	21 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	4	Km. 2 Kelurahan Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Sengon Terbakar Seluas ± 1 Ha
38	21 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	6	Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Karet Terbakar Seluas ± 5 Ha
39	22 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	5	Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Karet Dan Sawit Terbakar Seluas ± 10 Ha
40	28 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	-	Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung	Lahan Perkebunan Sengon Terbakar Seluas ± 1,5 Ha
41	28 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	5	Kampung Negeri Baru Kec Umpu Semenguk	Lahan Perkebunan Sawit Terbakar Seluas ± 10 Ha



42	29 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	6	Kampung Negeri Baru Kec. Umpu Semenguk	Lahan Perkebunan Karet Dan Sawit Terbakar Seluas ± 5 Ha
43	29 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	9	Kampung Karta Jaya Kecamatan Negara Batin	Lahan Terbakar, Korban Meninggal Dunia
44	30 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	-	Kelurahan Bl. Umpu Kecamatan Bl. Umpu	Lahan Perkebunan Sengon Terbakar Seluas ± 2 Ha
45	30 Oktober 2023	Kebakaran Lahan	-	Kampung Umpu Bakti Kec. Blambangan Umpu	Lahan Perkebunan Karet Terbakar Seluas ± 1,5 Ha
46	31 Oktober 2023	Angin Kencang	-	Kelurahan Bl. Umpu Kecamatan Bl. Umpu	Pohon Besar Tumbang
47	02 Nopember 2023	Kebakaran Lahan	-	Kelurahan Bl. Umpu Kecamatan Bl. Umpu	Lahan Pertanian/ Kebun Singkong Terbakar Seluas ± 0,5 Ha
48	03 Nopember 2023	Angin Kencang	-	Kelurahan Bl. Umpu Kecamatan Bl. Umpu	Pagar Tembok Roboh Sekitar 50 Meter
49	05 Nopember 2023	Angin Puting Beliung	4	Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga	Rumah Rusak Ringan, Genteng Berhamburan, Ditaksir Kerugian Rp. 2.000.000
50	14 Nopember 2023	Angin Puting Beliung	104	Kampung Bengkulu Jaya Kec. Gunung Labuhan	6 Rumah Rusak Berat, 20 Rumah Rusak Ringan, Total Kerugian Ditaksir Rp. 58.700.000
51	15 Nopember 2023	Angin Kencang	-	Kelurahan Bl. Umpu Kec. Blambangan Umpu	Kayu Besar Roboh, Menghalangi Pengguna Jalan Dan Menimpa Kabel Listrik dan Telkom, Mengakibatkan Listrik Padam



52	17 Nopember 2023	Angin Kencang	-	Kelurahan Bl. Umpu Kec. Blambangan Umpu	Kayu Besar Roboh, Menghalangi Pengguna Jalan
53	17 Nopember 2023	Angin Kencang	-	Kampung Umpu Bakti Kec. Blambangan Umpu	Kayu Besar Roboh, Menghalangi Pengguna Jalan
54	17 Nopember 2023	Angin Kencang/ Puting Beliung	3	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Rumah Rusak Berat, Atap Berhamburan.
			4	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Rumah Rusak Berat, Atap Berhamburan.
			4	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Rumah Rusak Berat, Atap Berhamburan.
			5	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Rumah Rusak Berat, Atap Berhamburan.
			3	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Rumah Rusak Berat, Atap Berhamburan.
			2	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Rumah Rusak Berat, Atap Berhamburan.
			5	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Rumah Rusak Berat, Atap Berhamburan.
			4	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Rumah Rusak Berat, Atap Berhamburan.
			3	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Rumah Rusak Berat, Atap Berhamburan.
			5	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Rumah Rusak Berat, Tertimpa Pohon Tumbang, Atap Berhamburan.





			6	Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	Rumah Rusak Berat, Atap Berhamburan.
55	18 Nopember 2023	Angin Kencang	-	Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu	Kayu Besar Roboh, Menghalangi Pengguna Jalan Dan Menimpa Kabel Listrik Dan Telkom, Mengakibatkan Listrik Padam
56	18 Nopember 2023	Hujan Deras Dan Angin Kencang	-	Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu	Kayu Besar Roboh, Menghalangi Pengguna Jalan Dan Menimpa Kabel Listrik Dan Telkom, Mengakibatkan Listrik Padam
57	18 Nopember 2023	Hujan Deras Dan Angin Kencang	4	Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk	Rumah Rusak Ringan Tertimpa Pohon Tumbang Kerugian Ditaksir Rp. 3.000.000 Tiang Gardu Trafo Jaringan Tegangan Menengah (Jtm) Serta Pohon Roboh Menghalangi Jalan Lintas Serta Menimpa Kabel Listrik Mengakibatkan Listrik Warga Rusak Dan Listrik Padam
58	05 Desember 2023	Hujan Deras Dan Angin Kencang	-	Kelurahan Blambangan Umpu Kec. Bl. Umpu	Kayu Besar Roboh, Menghalangi Pengguna Jalan
59	11 Desember 2023	Banjir	-	Kampung Karta Jaya Kecamatan Negara Batin	Terjadi Erosi Dan Amblas Tanah Bahu dan Badan Jalan Kurang Sepanjang 98 Meter, Kedalaman 8 Meter Lebar 3 m
60	16 Desember 2023	Angin Kencang	-	Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu	Pohon Tumbang Mengakibatkan Terganggu Nya Lalu Lintas Di Jalan Lintas Sumatera
61	18 Desember 2023	Angin Kencang	-	Kampung Bumi Ratu Kec. Umpu Semenguk	Pohon Tumbang Mengakibatkan Terganggu Nya Lalu Lintas Di Jalan Lintas Sumatera



62	24 Desember 2023	Angin Kencang	4	Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung	Rusak Parah, Bagian Dapur Hancur Dan Perabotan Rumah Tangga Rusak
			4	Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung	Rusak Parah, Bagian Dapur Hancur Dan Perabotan Rumah Tangga Rusak
			4	Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung	Rusak Parah Tertimpa Pohon
			4	Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung	Rusak Berat Bagian Atap
			4	Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung	Rusak Parah Ketimpa Pohon
			200	Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung	Rusak Ringan, Genteng Berhamburan 50 - 100 Buah
			3	Kampung Sumber Rezeki Kecamatan Negeri Agung	Rusak Ringan, Genteng Berhamburan 50 - 100 Buah
			2	Kampung Sumber Rezeki Kecamatan Negeri Agung	Rusak Ringan, Genteng Berhamburan 50 - 100 Buah
			4	Kampung Sumber Rezeki Kecamatan Negeri Agung	Rusak Ringan, Genteng Berhamburan 50 - 100 Buah
Total Korban Bencana			2.890		

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, 2024



e. Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Capaian utama dalam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah persentase kejadian kebakaran yang ditangani. Dari upaya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai 99,10%, dimana dalam tahun 2023 jumlah yang harus dilayani sebanyak 222 orang dan yang tertangani sebanyak 220 orang.

3. ALOKASI ANGGARAN

Adapun alokasi anggaran terkait penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.25
Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi
I	Proram Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Rp. 4.582.822.900	Rp. 4.545.821.750
2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Rp. 46.000.000	Rp. 46.000.000
3	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman & ketertiban umum	Rp. 46.000.000	Rp. 46.000.000

4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 58.000.000	Rp. 56.499.750
5	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 294.870.800	Rp. 293.937.650
II	Program Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 67.136.050	Rp. 67.135.650
2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 79.244.600	Rp. 79.081.090
3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 151.600.000	Rp. 51.598.450
III	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Rp. 12.455.100	Rp. 12.454.850
IV	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)		
1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Rp. 85.900.100	Rp. 82.394.600
2	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 40.600.000	Rp. 40.600.000

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan, 2024

Tabel IV.26
Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Penanggulangan Bencana			
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 453.698.600	Rp. 451.828.940

II Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1.	Pelatihan Pencegahan & Mitigasi Bencana	Rp. 591.012.000	Rp. 589.424.220
2.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp. 20.000.000	Rp. 18.624.000
3.	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Rp. 465.000.000	Rp. 465.000.000
III Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 220.000.000	Rp. 219.999.000
2.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Rp. 57.690.000	Rp. 57.690.000
IV Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	Penanganan pasca bencana Kabupaten	Rp. 32.000.000	Rp. 31.720.200

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, 2024

4. DUKUNGAN PERSONEL

Dukungan personil dalam penyelenggaraan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan tahun 2023 sebagai berikut :

a. Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian		
	PNS	TKS/T. Kontrak	Jumlah
1	29	275	304

b. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Ket.
1	IV	5 Orang	
2	III	22 Orang	
3	II	2 Orang	
4	TKS/ T. KONTRAK	275 Orang	8 Orang TKS 203 Anggota Pol PP 64 Anggota Damkar
Total		304 Orang	

Tabel IV.27
Data Penugasan Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Tahun 2023

Kepala Satuan	: 1 Orang
Sekretaris	: 1 Orang
Kabid	: 3 Orang
Kepala Subbag	: 2 Orang
Kepala Seksi	: 6 Orang
Staf Kantor/Administrasi	: 50 Orang
Kantor Kecamatan/Kelurahan	: 52 Orang
Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Ajudan	: 27 Orang
Anggota Piket di Rumah Bupati dan Wakil	: 90 Orang
Anggota Piket di Rumah Ketua DPRD	: 8 Orang
Jumlah Keseluruhan	: 240 Orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan, 2024

Sedangkan dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana Daerah pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 dengan komposisi jumlah sumberdaya aparatur sebagaimana tergambar dari tabel berikut :

a. Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Kepegawaian		Jumlah
	PNS	PTHLS	
1	17	7	24

b. Berdasarkan Golongan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	4	
2	Golongan III	11	
3	Golongan II	2	
4	Golongan I	-	
Jumlah		17	

c. Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon

No	Eselonering	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	4	
3	Eselon IV	9	
4	Fungsional	-	
5	Pelaksana	3	
Jumlah		17	

d. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana

Satuan tugas atau yang disebut Satgas-PNB mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas

operasional Badan Penanggulangan Bencana yang ada di kecamatan. Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, mengadakan pendidikan dan pelatihan diklat satgas penanggulangan bencana guna membentuk anggota satgas-PB yang terampil dan handal dalam penanganan dan penanggulangan pada pra dan pasca bencana yang terjadi di 15 kecamatan dan sampai tahun 2023 baru 13 kecamatan yang terbentuk.

Jumlah Personil Stagas-PB

No	Kecamatan	Jumlah	Tahun Terbentuk
1	Pakuan Ratu	30 Orang	2013
2	Buay Bahuga	20 Orang	2014
3	Bumi Agung	20 Orang	2014
4	Kasui	20 Orang	2015
5	Rebang Tangkas	20 Orang	2015
6	Negara Batin	25 Orang	2016
7	Negeri Besar	25 Orang	2016
8	Blambangan Umpu	20 Orang	2017
9	Negeri Agung	20 Orang	2017
10	Baradatu	20 Orang	2018
11	Gunung Labuhan	20 Orang	2018
12	Bahuga	20 Orang	2019
13	Way Tuba	20 Orang	2019
14	Banjit	-	-
15	Umpu Semenguk	-	-
Total		280 Orang	

Sumber : BPBD Kabupaten Way Kanan, 2024

e. Tim Reaksi Cepat

Tim Reaksi Cepat atau yang disebut TRC mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumberdaya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanggulangan bencana dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana. Sampai dengan tahun 2022 anggota Tim Reaksi Cepat Kabupaten Way Kanan berjumlah 31 orang personil.

5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM trantibum linmas diantaranya :

- Masih kurang/minimnya personil yg memiliki sertifikasi PPNS;
- Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana kebakaran;
- Masih kurangnya fungsi koordinasi terkait Perda atau Perkada yang memuat sanksi oleh dengan OPD;
- Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam memahami aturan dan mekanisme terhadap penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana;
- Pada Sub Urusan Bencana terdapat indikator yang dalam pengisian laporannya menggunakan data

berjalan yaitu memakai Laporan Kejadian bencana, sehingga dalam penginputan Pelaporan e-SPM sering terlambat;

- Belum adanya Kajian Resiko Bencana yang merupakan data Induk atau data Utama sebagai data referensi target penerima layanan dasar;
- Terdapat 12 Sub Kegiatan SPM Sub Urusan Bencana pada tahun 2022 baru terlaksana 5 Sub Kegiatan di karenakan keterbatasan anggaran, Sehingga pengisian pelaporan pada Aplikasi e-SPM masih ada indikator yang belum terisi;
- Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM.

Solusi

- Peningkatan SDM anggota Satpol PP melalui Kesamaptan dan diklat Satpol PP serta Diklat PPNS;
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana penyelamatan korban kebakaran;
- Membangun koordinasi dengan kerjasama yang baik dengan OPD penyedia Perda atau Perbup;
- Penyusunan Peraturan Daerah yang bisa memberikan payung hukum untuk pelaksanaan penindakan dan penertiban serta pengambilan sangsi berbagai persoalan yang memicu munculnya konflik di masyarakat;
- Perlunya dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana di tingkat Perangkat Daerah dan membentuk Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM (Kelompok Kerja)

sesuai dengan tugasnya mulai dari tahap pengumpulan data, tahap penghitungan kebutuhan, tahap penyusunan rencana pemenuhan serta tahap pelaksanaan pemenuhan;

- Lebih memaksimalkan alokasi anggaran penanganan bencana dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sesuai target indikator pencapaian;
- Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor (dengan pihak-pihak terkait) dalam rangka upaya percepatan penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana.

F. URUSAN SOSIAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Way Kanan tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis pelayanannya terdiri atas 5 (lima) layanan dasar yaitu :

- a. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
- b. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti/ LKSA



- c. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- d. Pelayanan rehabilitasi sosila dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
- e. Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota

2. TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM

Adapun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel IV.28
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang SOSIAL Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Harus Dilayani	Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Harus Dilayani	Yang Terlayani	Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	75	75	100%	1. Layanan data dan pengaduan	7	7	100%
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	2	100%
						3. Penyediaan permakanaan	13	13	100%
						4. Penyediaan sandang	5	5	100%
						5. Penyediaan alat bantu	30	30	100%
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	65	65	100%
						7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	24	24	100%



					8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	24	24	100%
					9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak /Bukti dokumen kependudukan	6	6	100%
					10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2	2	100%
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	100%
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100%
					13. Layanan rujukan	2	2	100%



2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	54	54	100%	1. Layanan Data dan Pengaduan	111	111	30,67%
						2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	3	3	100%
						3. Penyediaan permakanaan	11	11	100%
						4. Penyediaan sandang	4	4	100%
						5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	11	11	100%
						6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	5	100%
						7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	76	76	100%
						8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	2	100%



						9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	5	5	100%
						10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100%
						11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100%
						12. Layanan rujukan	1	1	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	180	145	80,56%	1. Layanan Data dan Pengaduan	2	2	100%
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	1	100%
						3. Penyediaan Permakanan	210	210	100%
						4. Penyediaan Sandang	90	90	100%
						5. Penyediaan Alat bantu	3	3	100%



					6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	3	3	100%
					7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	90	90	100%
					8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	5	5	100%
					9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	2	2	100%



						10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	2	2	100%
						11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100%
						12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100%
						13. Layanan Rujukan	2	2	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	10	10	100%	1. Layanan Data dan Pengaduan	9	9	100%
						2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	2	2	100%
						3. Penyediaan Permakanan	5	5	100%
						4. Penyediaan Sandang	2	2	100%



					5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	2	2	100%
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	5	100%
					7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	5	5	100%
					8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak /Bukti dokumen kependudukan	0	0	0%



						9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	100%
						10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	100%
						11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0%
						12. Layanan rujukan	1	1	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	125	100	80%	1. Penyediaan Permakanan	60	60	100%
						2. Penyediaan Sandang	60	60	100%
						3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2	0	0%
						4. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	60	30	50%
						5. Pelayanan Dukungan Psikososial	0	0	0%

3. ALOKASI ANGGARAN

Adapun alokasi anggaran terkait penerapan SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.20
Alokasi dan Realisasi Anggaran Terkait Penerapan SPM
Bidang Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
	1. Penyediaan permakanan	Rp. 65.200.000	Rp. 62.060.320
	2. Penyediaan alat bantu	Rp. 74.200.000	Rp. 73.986.860
	3. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Rp. 28.259.800	Rp. 28.259.800
II	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
	1. Penyediaan makanan	Rp. 45.000.000	Rp. 25.787.750
	2. Penyediaan sandang	Rp. 45.000.000	Rp. 19.547.500
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Rp. 25.000.000	Rp. -
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Rp. 41.100.000	Rp. 30.145.050
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Rp. 45.000.000	Rp. -

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 2023

4. DUKUNGAN PERSONEL

Adapun jumlah sumberdaya manusia dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

a. Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Kepegawaian		Jumlah
	PNS	PTHLS	
1	21	21	42

b. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata II	9	
2	Strata I	11	
3	Diploma III	-	
4	SLTA	1	
5	SLTP	-	
Jumlah		21	

c. Berdasarkan Golongan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	6	
2	Golongan III	15	
3	Golongan II	-	
4	Golongan I	-	
Jumlah		21	

d. Berdasarkan Jabatan Struktural/Eselon

No	Eselonering	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	5	
3	Eselon IV	12	
4	Fungsional	-	
5	Pelaksana	3	
Jumlah		21	

Tabel IV.30
Jumlah Personil Sumber Daya Manusia
Terkait Penerapan SPM Bidang Sosial

No	SDM Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial PNS	9 Orang
2	Pekerja Sosial Non PNS	- Orang
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	28 Lembaga
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	15 Orang
5	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	227 Orang
6	Anggota Tagana	39 Orang
7	PKH	94 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 2024

5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Way Kanan untuk 5 indikator belum mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Sosial, khususnya untuk melakukan pendataan sasaran SPM;
2. Ada beberapa Sub Kegiatan yang menunjang SPM sudah tertuang dalam Renstra akan tetapi belum tertuang di dalam Renja dikarenakan keterbatasan anggaran Tahun 2023;
3. Kurang atau minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan terutama kendaraan operasional;
4. Pemahaman SPM yang belum optimal ditingkat Kabupaten dan Fasilitas pelayanan Sosial tingkat pertama (perhitungan estimasi sasaran, Definisi

Operasional, indikator untuk mengukur capaian SPM Bidang Sosial;

5. Belum Optimalnya Peran PSKS dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan sosial;
6. Kurang kerja sama antara dinas sosia kabupaten Way Kanan dengan pihak luar seperti dinas terkait dan dunia usaha csr dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 antara lain :

1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia/ aparatur melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan teknis;
2. Adanya Kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Dinas Terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Pengelokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Koordinasi antar sektor perlu ditingkatkan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal;
5. Harus adanya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Way Kanan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial agar mencapai target 100%.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Pelaksanaan RKPD tahun 2023 sendiri mengambil tema “*Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia, Pemulihan Ekonomi, Reformasi Birokrasi, dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung Ketersediaan Infrastruktur*”. Secara umum, pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 difokuskan pada bidang/sektor-sektor sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM yang Berkualitas;
2. Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Pertanian Industri Kecil, Usaha Mikro dan Pariwisata;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung Ekonomi dan Pelayanan Publik.

Dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat disampaikan bahwa realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 1.335.027.727.618,44 (*satu trilyun tiga ratus tiga puluh lima milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas koma empat puluh empat rupiah*) (angka an-audit), hal ini mengalami kenaikan sebesar 1,45% bila dibandingkan tahun 2022 dimana pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp.

1.315.948.727.618,44 (*satu trilyun tiga ratus lima belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas koma empat puluh empat rupiah*).

Secara makro capaian pembangunan manusia di Kabupaten Way Kanan terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2023 status pembangunan manusia Kabupaten Way Kanan mencapai level ‘tinggi’ setelah 3 tahun sebelumnya berada pada level ‘sedang’. Selama tahun 2020 – 2023, IPM Kabupaten Way Kanan rata-rata meningkat sebesar 0,56 persen per tahun, dari 69,33 pada tahun 2020 menjadi 70,51 persen di tahun 2023. Peningkatan IPM Kabupaten Way Kanan ini didukung oleh semua komponen dimensi penyusunnya, terutama pada standar hidup layak. Indikator ini mengalami percepatan pertumbuhan cukup tinggi dibandingkan indikator lainnya, yaitu dilihat dari peningkatan pengeluaran riil perkapita sebesar 4,62% dibandingkan tahun sebelumnya 3,02%. demikian juga rata-rata lama sekolah pertumbuhannya juga meningkat dari 0,13% menjadi 0,26%.

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ketahun. Selama periode tahun 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,34 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,19% per tahun. Pada tahun 2020 UHH Kabupaten Way Kanan mencapai 73,68 dan pada tahun 2023 mencapai 74,11 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,18 tahun dengan persentase pertumbuhan sebesar 0,24% dibandingkan UHH tahun sebelumnya.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan penduduk usia 7 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun



2020 hingga tahun 2023, HLS Kabupaten Way Kanan telah meningkat 0,07 tahun sementara RLS meningkat 0,04 tahun.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Way Kanan sangat optimis bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akan berlangsung cukup dinamis, dengan berbagai pertumbuhan dan target-target yang telah dicapai.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun sebagai bahan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Way Kanan akan berupaya secara maksimal dan berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di masa-masa mendatang untuk terus mewujudkan Kabupaten Way Kanan yang Unggul dan Sejahtera.

